



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(R P J M D)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021-2026**





**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/ atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/ walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
20. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
21. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
22. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

23. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
24. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
25. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
28. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
29. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi dan misi Bupati, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah.
31. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
34. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
36. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
40. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
41. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
42. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
43. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
44. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
45. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
46. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
47. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
48. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
49. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
50. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
51. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

52. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
53. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
54. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
55. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
56. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrument arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
57. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
58. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program /sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
59. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
60. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
61. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
62. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
63. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
64. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
65. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
66. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
67. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

68. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
69. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
70. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (2) RPJMD sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang menggambarkan :
 - a. visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra-PD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dan RKPD.
 - b. Bahan penyusunan dan evaluasi Renstra PD dengan memperhatikan Tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.
 - c. Pedoman Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RKPD

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

BAB I.	PENDAHULUAN
BAB II.	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III.	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV.	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V.	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI.	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII.	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII.	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB IX.	PENUTUP
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD;
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kabupaten;
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan Jangka panjang daerah Kabupaten dan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional;
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 24 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

FAJURRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH 04, 44/2021

Salinan sesuai dengan aslinya :



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I-7
1.3.1 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-7
1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWN	I-9
1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	I-9
1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035.....	I-11
1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWK Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.....	I-11
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-11
1.4.1 Maksud.....	I-11
1.4.2 Tujuan	I-12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.2 Aspek Demografi	II-25
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-27
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi.....	II-27
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-38
2.2.3 Fokus Kebudayaan	II-46
2.2.4 Fokus Kepemudaan dan Olahraga	II-47
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM.....	II-48
2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-48
2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-75
2.3.3 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-82
2.3.4 Fokus Pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	II-86
2.3.5 Fokus Pelayanan Unsur Pemerintah Umum	II-86
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-87
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-87
2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-97
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 KINERJA KEUANGAN	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
3.1.2 Neraca Daerah.....	III-28
3.2 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN.....	III-35
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III-35
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-35
3.3 PROYEKSI KEUANGAN	III-36

3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-36
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	IV-1
4.1	PERMASALAHAN.....	IV-1
4.1.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-1
4.1.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV-4
4.1.3	Urusan Pilihan.....	IV-9
4.1.4	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	IV-10
4.2	ISU STRATEGIS.....	IV-11
4.2.1	Rencana Pembangunan	IV-12
4.2.2	Perbandingan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur(Perbandingan secara vertikal).....	IV-17
4.2.3	Perbandingan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang Berbatasan terhadap Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (Perbandingan secara Horizontal)	IV-22
4.2.4	Rencana Tata Ruang	IV-23
4.2.5	Perbandingan Isu Strategis Penataan Ruang Nasional terhadap Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-30
4.2.6	Perkembangan Penataan Ruang Lainnya	IV-33
4.2.7	Isu Pembangunan Dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	IV-33
4.2.8	Isu Pembangunan pada Wilayah yang Lebih Luas	IV-34
4.2.9	Isu Strategis dari Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan	IV-35
4.2.10	<i>Sustainable Development Goals / SDGs</i>	IV-37
4.2.11	Penentuan dan Prioritisasi Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur.....	IV-42
4.2.12	Aktualisasi Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-50
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1	VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.....	V-1
5.2	MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.....	V-4
5.3	TUJUAN DAN SASARAN.....	V-7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1	STRATEGI	VI-1
6.2	ARAH KEBIJAKAN.....	VI-2
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-3
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP.....	IX-1
9.1	KAIDAH TRANSISI.....	IX-1
9.2	KAIDAH PELAKSANAAN	IX-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Nasional.....	I-8
Tabel 1.2 Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Provinsi.....	I-10
Tabel 2.1 Data Administratif Kecamatan Serta Desa/Kelurahan	II-1
Tabel 2.2 Profil Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-8
Tabel 2.3 Jumlah IUP Ekplokasi dan Produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur	II-10
Tabel 2.4 Profil Sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-12
Tabel 2.5 Peramalan Air Pasang Tertinggi, Air Surut Terendah dan Tunggang Maksimum Pasang Surut di Perairan Pantai Kalimantan Tengah	II-13
Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur	II-22
Tabel 2.7 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hingga Tahun 2020.....	II-25
Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	II-25
Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	II-26
Tabel 2.10 Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-27
Tabel 2.11 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Atas Dasar Harga Berlaku, dan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020...	II-28
Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Riil PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (Persen), 2016- 2020.....	II-28
Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020	II-29
Tabel 2.14 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020	II-30
Tabel 2.15 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020	II-31
Tabel 2.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020.....	II-32
Tabel 2.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020	II-32
Tabel 2.18 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi, dan Inflasi Kota Sampit Tahun 2020...	II-35
Tabel 2.19 Laju Inflasi Kota Sampit menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020	II-35
Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten-Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	II-36
Tabel 2.21 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-37
Tabel 2.22 Status Kesejahteraan Keluarga Dan Individu	II-37
Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 -2020.....	II-38
Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2011-2020...	II-39
Tabel 2.25 Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2020.....	II-39
Tabel 2.26 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur	II-40
Tabel 2.27 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020	II-42
Tabel 2.28 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020	II-42
Tabel 2.29 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020.....	II-42
Tabel 2.30 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020	II-44
Tabel 2.31 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020.....	II-44
Tabel 2.32 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-45
Tabel 2.33 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-45
Tabel 2.34 Produktivitas Total Daerah Dan Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.35 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020.....	II-46

Tabel 2.36 Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	II-48
Tabel 2.37 Indikator Capaian Urusan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020.....	II-48
Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020..	II-50
Tabel 2.39 Jumlah Satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	II-51
Tabel 2.40 Jumlah Satuan SD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020.....	II-51
Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2.43 Jumlah Satuan SMP di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020	II-53
Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.45 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.46 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.47 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.48 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.49 Perkembangan Kondisi Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	II-55
Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Rasio Dokter Per satuan Penduduk di Kab. Kotawaringin Timur tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.51 Rasio Tenaga Keperawatan dan Kebidanan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-60
Tabel 2.52 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi Per 100.000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-61
Tabel 2.53 Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-62
Tabel 2.54 Capaian indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.55 Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2.56 CNR Seluruh Kasus TBC di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2020.....	II-65
Tabel 2.57 CNR Seluruh Kasus TBC di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-65
Tabel 2.58 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur	II-67
Tabel 2.59 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur	II-68
Tabel 2.60 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-68
Tabel 2.61 Indikator Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.62 Data Jaringan Jalan (Kilometer) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.....	II-70
Tabel 2.63 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-71
Tabel 2.64 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.65 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.66 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019..	II-73
Tabel 2.67 Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.68 Indikator Capaian Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Timur	

Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.69 Kinerja Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode Tahun 2016-2020	II-74
Tabel 2.70 Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-74
Tabel 2.71 Data PMKS Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-74
Tabel 2.72 Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-75
Tabel 2.73 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-75
Tabel 2.74 Kinerja Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-76
Tabel 2.75 Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-76
Tabel 2.76 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-76
Tabel 2.77 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-77
Tabel 2.78 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-77
Tabel 2.79 Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2018-2020	II-78
Tabel 2.80 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-79
Tabel 2.81 Indikator Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.82 Kinerja Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-80
Tabel 2.83 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-80
Tabel 2.84 Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-81
Tabel 2.85 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-81
Tabel 2.86 Kinerja Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-82
Tabel 2.87 Kinerja Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-82
Tabel 2.88 Kinerja Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-82
Tabel 2.89 Kinerja Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-83
Tabel 2.90 Kinerja Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-83
Tabel 2.91 Kinerja Pertanian Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-83
Tabel 2.92 Kinerja Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-84
Tabel 2.93 Kinerja Pertanian Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-84
Tabel 2.94 Kinerja Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-85
Tabel 2.95 Kinerja Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-85
Tabel 2.96 Kinerja ESDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-85
Tabel 2.97 Kinerja Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-86
Tabel 2.98 Kinerja Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	

Periode 2016-2020	II-86
Tabel 2.99 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020	II-87
Tabel 2.100 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah) Periode 2016-2020	II-89
Tabel 2.101 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Persentase) Periode 2016-2020.....	II-90
Tabel 2.102 PDRB Persentase laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Komponen Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020	II-90
Tabel 2.103 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2016-2020	II-90
Tabel 2.104 Perkembangan Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB).....	II-91
Tabel 2.105 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)	II-91
Tabel 2.106 Pertumbuhan dan Persentase Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.107 Pertumbuhan dan Persentase Perubahan Inventori Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.108 Pertumbuhan dan Persentase Net Ekspor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.109 Pertumbuhan dan Persentase ICOR Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.110 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2020	II-95
Tabel 2.111 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2020	II-97
Tabel 2.112 Waktu Proses Perijinan, di DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur	II-97
Tabel 2.113 Target Ketaatan terhadap RTRW 2021-2026.....	II-98
Tabel 2.114 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2020.....	II-99
Tabel 2.115 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016- 2020.....	II-101
Tabel 2.116 Analisis Pertumbuhan PAD 4 Tahun Sebelumnya.....	II-102
Tabel 2.117 Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan 4 Tahun Sebelumnya	II-102
Tabel 2.118 Analisis Pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 Tahun Sebelumnya	II-103
Tabel 2.119 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.120 Desa Unggulan dan Sektor/ Produk Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-116
Tabel 3.1 APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020.....	III-3
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-4
Tabel 3.3 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010- 2019.....	III-5
Tabel 3.4 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-6
Tabel 3.5 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah dan Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020	III-6
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-7
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-7
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-8

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-9
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-9
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-10
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-10
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-11
Tabel 3.14 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-12
Tabel 3.15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-12
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-13
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-13
Tabel 3.18 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-13
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-14
Tabel 3.20 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020	III-14
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-15
Tabel 3.22 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014–2019	III-15
Tabel 3.23 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020.....	III-17
Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-18
Tabel 3.25 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-19
Tabel 3.26 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-19
Tabel 3.27 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-20
Tabel 3.28 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-21
Tabel 3.29 Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010-2019	III-21
Tabel 3.30 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-21
Tabel 3.31 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-22
Tabel 3.32 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-22
Tabel 3.33 Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-23
Tabel 3.34 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-24
Tabel 3.35 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-24
Tabel 3.36 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran Tahun 2020.....	III-26
Tabel 3.37 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2020	III-27
Tabel 3.38 Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin Timur	

Tahun Anggaran 2010-2020	III-27
Tabel 3.39 Laporan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran Tahun 2020	III-28
Tabel 3.40 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020 (dalam Rupiah)..	III-30
Tabel 3.41 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020 (dalam Persen) ...	III-32
Tabel 3.42 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020	III-34
Tabel 3.43 Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Tahun 2010-2020	III-35
Tabel 3.44 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2020.....	III-35
Tabel 3.45 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026.....	III-40
Tabel 4.1 Isu-Isu Strategis Nasional terhadap kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-17
Tabel 4.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional terhadap kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-19
Tabel 4.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional terhadap kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-22
Tabel 4.4 Isu-Isu Strategis Penataan Ruang Nasional terhadap kondisi Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	IV-31
Tabel 4.5 Integrasi Isu Strategis KLHS dalam Isu Strategis RPJMD	IV-34
Tabel 4.6 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan	IV-35
Tabel 4.7 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan	IV-37
Tabel 4.8 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan	IV-38
Tabel 4.9 Capaian Penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah	IV-39
Tabel 4.10 Penjabaran seluruh alternatif isu strategis pembangunan yang terkait dengan Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-44
Tabel 4.11 Isu Strategis berdasarkan Urusan Pemerintahan dibandingkan Hasil Klasifikasi Isu Strategis	IV-45
Tabel 4.12 Alternatif, Kriteria serta Penilaian Kriteria	IV-47
Tabel 4.13 Penentuan Bobot Penilaian.....	IV-48
Tabel 4.14 Perhitungan dan Hasil Prioritisasi Isu-Isu Strategis Pembangunan	IV-49
Tabel 4.15 Prioritas Pembangunan dan Isu Strategis	IV-51
Tabel 5.1 Kesesuaian Misi dalam RPJMD Kab. Kotim Tahun 2016-2021 terhadap RPJMN 2020-2024	V-4
Tabel 5.2 Prioritas dan Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih.....	V-5
Tabel 5.3 Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	V-8
Tabel 6.1 Penjabaran Strategi.....	VI-2
Tabel 6.2 Strategi Dan Arah Kebijakan.....	VI-3
Tabel 6.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif.....	VI-4
Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.....	VII-2
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur	VIII-2
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur	I-4
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen.....	I-7
Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-2
Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-3
Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-5
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur	II-11
Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-14
Gambar 2.6 Peta Bathimetri Kabupaten Kotawaringin Timur	II-15
Gambar 2.7 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Kotawaringin Timur	II-18
Gambar 2.8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur	II-21
Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur.....	II-23
Gambar 2.10 Peta Mitigasi Identifikasi Wilayah Rawan Bencana.....	II-24
Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-27
Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020.....	II-29
Gambar 2.13 Distribusi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020	II-33
Gambar 2.14 Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita 2015-2020.....	II-34
Gambar 2.15 IHK, Laju Inflasi MoM dan Inflasi YoY tahun 2020	II-36
Gambar 2.16 Dinamika Melek Huruf Usia 15+ Kabupaten Kotawaringin Timur	II-40
Gambar 2.17 Dinamika Umur Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	II-41
Gambar 2.18 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013-2020.....	II-43
Gambar 2.19 Perkembangan Jumlah Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-56
Gambar 2.21 Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	II-57
Gambar 2.22 Perkembangan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-58
Gambar 2.23 Rasio Posyandu terhadap Balita di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019	II-58
Gambar 2.24 Perkembangan Persentase Jumlah Posbindu di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020	II-59
Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020	II-63
Gambar 2.26 Jumlah dan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (Dilaporkan) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020.....	II-63
Gambar 2.27 Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019	II-87
Gambar 2.28 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020	II-88
Gambar 2.29 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2019.....	II-88
Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020..	II-89
Gambar 2.31 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020	II-92
Gambar 2.32 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020	II-93
Gambar 2.33 Peta Kawasan Industri Kabupaten Kotawaringin Timur	II-96
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020	III-4

Gambar 3.2 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-5
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	III-8
Gambar 3.4 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-11
Gambar 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-18
Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-20
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019	III-23
Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.....	III-25
Gambar 4.1 Pusat-Pusat Kegiatan	IV-26
Gambar 4.2 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	IV-27
Gambar 4.3 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	IV-28
Gambar 4.4 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan	IV-28
Gambar 4.5 Pusat Perdagangan dan Jasa.....	IV-29
Gambar 4.6 Kawasan Industri dan Pergudangan.....	IV-29
Gambar 4.7 Bagan Alur Penentuan Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur	IV-43
Gambar 5.1 Perubahan Tingkatan Indikator Kinerja Atas PMDN Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020.....	V-13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Timur H.HALIKINNOR,S.H.,M.M dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur IRAWATI, S.Pd. Terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan mutlak tersedia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Sistem Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: RPJPD dengan jangka waktu 20 tahun, RPJMD dengan jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005- 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008. Salah satu substansi dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah, yaitu “Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional”. Visi ini kemudian djabarkan kedalam 12 Misi Pembangunan sebagai langkah untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari
2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Mengembangkan Industri Pengolahan
4. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman
6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial
7. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa
8. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi

9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman
10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana
11. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
12. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dengan dilantiknya Bupati Kotawaringin Timur dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur masa bakti 2021-2026, pada tanggal 26 Februari 2021 di Gedung paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, melekat kewajiban untuk menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kotawaringin Timur, merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

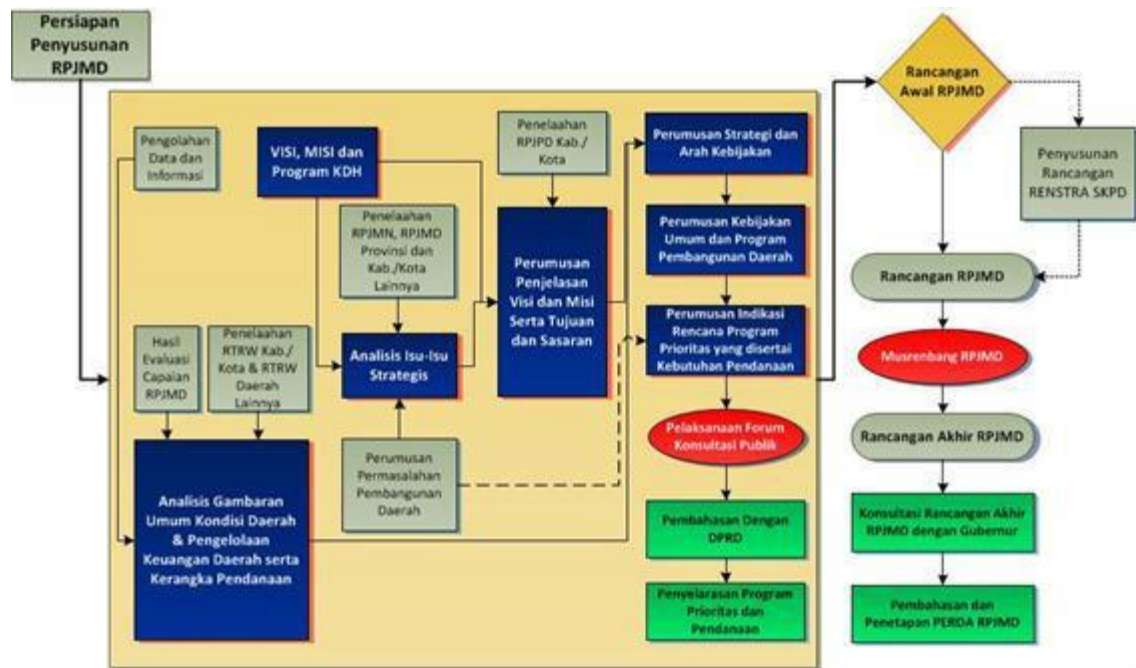
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2021-2026 merupakan pelaksanaan Tahap IV RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026 harus berpedoman kepada RPJMD dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. RPJMD ini bersifat indikatif dan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga mengintegrasikan rencana tata ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi

yang dimiliki, sesuai dinamika daerah dan nasional. serta disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322).
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178).
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663).
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664).
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816).
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 18. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 2);

Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda pembangunan nasional tersebut kemudian menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah yang dituangkan sesuai dengan kewenangannya yang akan dijabarkan pada Bab. V. Disamping itu, program- program pembangunan kementerian yang direncanakan di Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan didukung dan disinergikan dengan program- program yang ada di masing-masing Perangkat Daerah Terkait. Keterkaitan misi dan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur dengan misi dan isu strategis Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Nasional

		Misi dalam RPJMD Kabupaten				
		Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5
Misi Dalam RPJMN	1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia		√			
	2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing		√	√		
	3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	√				
	4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan					√
	5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa					√
	6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya				√	
	7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga					√
	8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya				√	
	9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan				√	

Sumber: RPJMN (diolah), 2021

Keterangan:

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)

Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa:

- Misi 1 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 3 pada RPJMN
- Misi 2 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1 dan 2 pada RPJMN
- Misi 3 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 2 pada RPJMN
- Misi 4 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 6, 8 dan 9 pada RPJMN
- Misi 5 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 4, 5 dan 7 pada RPJMN

1.3.2 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWN

Rencana tata ruang merupakan instrumen yang mengatur perwujudan struktur ruang, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang suatu wilayah agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Sampit sebagai ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam sistem perkotaan nasional, sehingga dukungan terhadap pembangunan Kota Sampit terutama terhadap sarana dan prasarana perkotaan akan secara otomatis dilakukan oleh pemerintah pusat. Demikian juga dengan penetapan kawasan andalan Sampit- Pangkalan Bun dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata. Hal ini tentu saja akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu dalam kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur juga akan memprioritaskan program-program yang terkait.

1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

Hingga disusunnya dokumen ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum menetapkan Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, berdasarkan misi pembangunan dan isu strategis sesuai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih periode 2021-2024 dapat disusun keterkaitan seperti yang terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Keterkaitan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Misi Provinsi

		Misi dalam RPJMD Kabupaten				
		Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5
Misi Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan	√	√	√		√
	Misi 2 : Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global		√			√
	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi				√	
	Misi 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing		√			
	Misi 5 : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender		√			√

Sumber: KPU Provinsi Kalteng (diolah), 2021

Keterangan:

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)

Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa:

- Misi 1 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1 pada RPJMD Provinsi
- Misi 2 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1, 2, 4 dan 5 pada RPJMD Provinsi
- Misi 3 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1 pada RPJMD Provinsi
- Misi 4 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 3 pada RPJMD Provinsi
- Misi 5 RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur terkait dengan misi ke 1, 2 dan 5 pada RPJMD Provinsi

1.3.4 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWP Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015, tentu saja mengakomodir Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu pengembangan wilayah di provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah yang strategis. Hal ini tergambar dari perencanaan penataan ruangnya maupun indikasi program prioritasnya dalam perwujudan Struktur Ruang, Pola Ruang, maupun Kawasan Strategisnya.

1.3.5 Hubungan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026 dengan RTRWK Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

Hubungan antara kedua dokumen ini sangat erat kaitannya terutama dalam indikasi program prioritas dalam perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Penetapan Sampit sebagai PKW dalam sistem perkotaan nasional, juga akan disambut dengan penetapan 3 (tiga) ibukota kecamatan (Parenggean, Samuda, dan Simpang Sebabi) yang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) untuk memperkuat keberadaan Kota Sampit, juga penetapan ibu kota kecamatan lainnya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), serta beberapa desa unggulan yang menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Tidak kalah penting dengan perencanaan jaringan transportasi baik darat, laut, maupun udara yang terus dikembangkan serta jaringan jalan, jaringan sumberdaya air pendukung lahan pertanian, pelayanan air minum, kelistrikan dan telekomunikasi. Dalam pola ruang pengembangan kawasan budidaya diharapkan akan sejalan dengan pelestarian kawasan lindung yang telah ditetapkan. Penetapan kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan strategis perkotaan (Kota Sampit), Kawasan Industri Bagendang, Kawasan Argopolitan di Kecamatan Teluk Sampit, dan Kawasan Strategis Pariwisata Ujung Pandaran. Tiga kawasan strategis ini dipandang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan visi, misi, dan program dari kepala daerah terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menggambarkan kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah
2. Menggambarkan pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menggambarkan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, serta prioritas pembangunan daerah.
4. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih Periode Tahun 2021-2026 ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.
5. Menetapkan indikator kinerja daerah sebagai acuan penyusunan RKPD dan Renstra PD serta evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun rencana.

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan

diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPD tahun berkenaan.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah.

BAB IX Penutup

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

1. Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan satu dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Posisi geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di antara 112° 4' 3"-113° 16' 11" Bujur Timur dan 1° 11' 35"-3° 18' 8" Lintang Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.679.600 Ha. Luas wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut adalah luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002. Sedangkan luas wilayah fungsi berdasarkan perencanaan pemanfaatan ruang seluas kurang lebih 1.554.584,6 Ha. Adapun batas-batas administrasi wilayahnya adalah sebagai berikut :

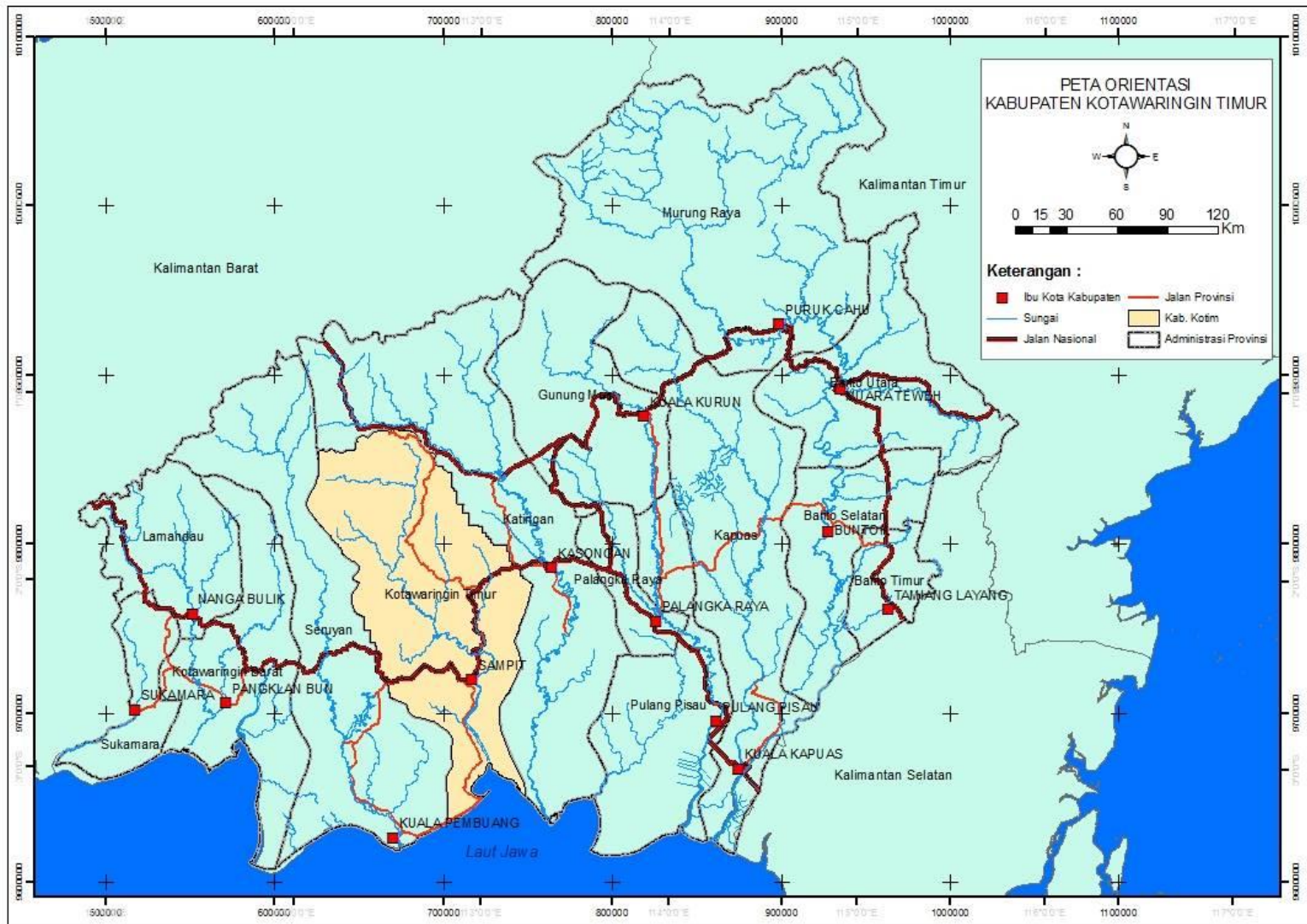
Sebelah Utara : Kabupaten Katingan;
 Sebelah Timur : Kabupaten Katingan;
 Sebelah Selatan : Laut Jawa;
 Sebelah Barat : Kabupaten Seruyan.

Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap kabupaten/kota disekitarnya dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1. Wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.2. Sejak tahun 2011 Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi atas 17 kecamatan. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

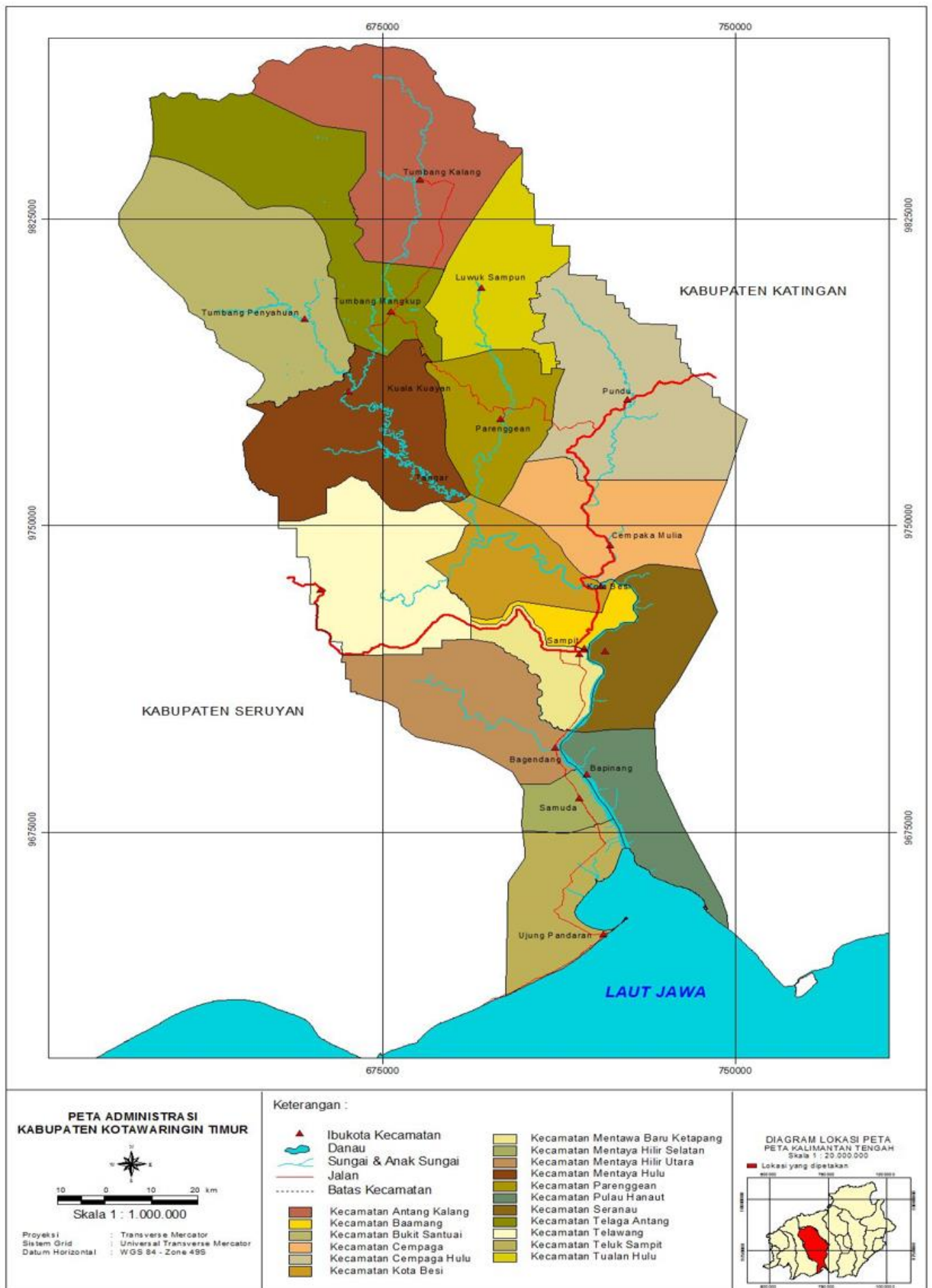
Tabel 2.1 Data Administratif Kecamatan Serta Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Area (Km ²)	Persentase terhadap Kab (%)	Luas berdasarkan Pemanfaatan Ruang (Ha)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kab (Km)
1	Mentaya Hilir Selatan	Samuda	318	1.89	21.058.1	10	48
2	Teluk Sampit	Ujung Pandaran	610	3.63	66.449.4	6	128
3	Pulau Hanaut	Bapinang	620	3.69	62.515.6	14	48
4	Mentawa Baru Ketapang	Sampit	726	4.32	34.900.3	11	1
5	Seranau	Mentaya Seberang	548	3.26	71.115.8	6	3
6	Mentaya Hilir Utara	Bagendang	725	4.32	96.443.7	7	28
7	Kota Besi	Kota Besi	1.889	11.25	63.581.2	11	18
8	Telawang	Sebabi	317	1.89	11.6412.3	6	93
9	Baamang	Baamang	639	3.80	20.640.7	6	3
10	Cempaga	Cempaka Mulia	1.253	7.46	88.297.1	8	48
11	Cempaga Hulu	Pundu	1.183	7.04	15.1045.9	11	124
12	Parenggean	Parenggean	493.15	2.94	71.147.1	15	105
13	Tualan Hulu	Luwuk Sampun	1.090.85	6.49	84.510.8	11	165
14	Mentaya Hulu	Kuala Kuayan	1.712.79	10.20	131.926.2	16	167
15	Bukit Santuai	Tumbang Penyahuan	1.636	9.74	168.005.1	14	207
16	Antang Kalang	Tumbang Kalang	1.579	9.40	160.402.4	15	183
17	Telaga Antang	Tumbang Mangkup	1.456.21	8.67	146.133.1	18	160
Kotawaringin Timur		Sampit	16.796	100%	1.554.584.6	185	1

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012



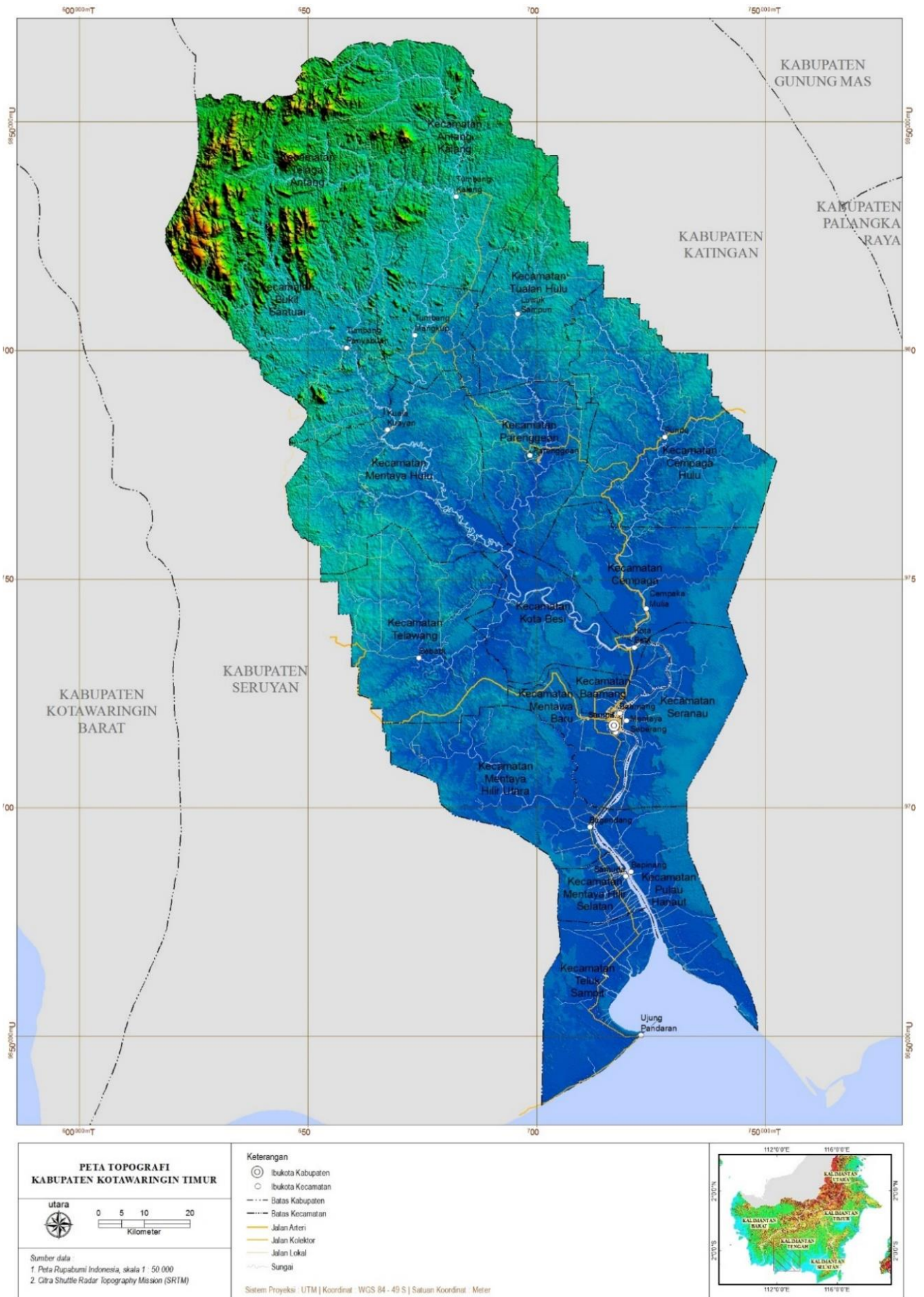
Gambar 2.2 Peta Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2035

2. Topografi

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, dapat dibagi dalam lima kelompok lereng yaitu 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, dan >40%. Wilayah Selatan didominasi oleh kemiringan lereng 0-2%, wilayah tengah didominasi kemiringan 2-5%, sedangkan wilayah Utara didominasi kemiringan lereng 5-15% dan 15-40%. Umumnya pembagian lini topografi di kelompokkan dalam dua zona, yaitu :

- a. Wilayah Selatan dan Tengah dengan ketinggian tempat 0-100 m-dpl.
- b. Wilayah Utara dengan ketinggian tempat bervariasi antara 0-1000 m-dpl, tempat tertinggi terdapat di Kecamatan Antang Kalang, Kecamatan Telaga Antang, dan Kecamatan Bukit Santuai.

Daerah ini merupakan wilayah berbukit hingga pegunungan yang terdiri dari batuan intrusi masam terdapat di Bagian Utara, sedangkan Bagian Tengah sampai Selatan didominasi oleh dataran rendah. Dataran Bagian Tengah terdiri dari dome gambut serta dataran rendah endapan sungai (fluvial) serta backswamp atau rawa belakang di sepanjang aliran sungai. Dibagian selatan, dataran rendah didominasi oleh dataran rendah endapan pantai (fluviomarine) dan pesisir pantai.



Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Bappelitbangda Kab. Kotim. 2021

3. Topografi

Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis yang terdiri atas::

a. Dataran rendah, endapan pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.

b. Dataran rendah, endapan sungai

Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (meander) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

c. Lahan Gambut

Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (levee), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton telah mencapai klomaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (dome).

d. Dataran rendah, batuan endapan pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

e. Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan (told) dan lipatan (fault), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam.

f. Delta/Pulau

Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

g. Lain-Lain

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam. Pada daerah ini belum sempat terbentuk gambut.

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/ perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam, sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki kondisi fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan backswamps di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan dome gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang- kadang tergenang dan banjir.

4. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Kotawaringin Timur termasuk beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan kelembaban nisbi berkisar antara 82%-89% dan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 27°C-36°C. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan curah hujan bervariasi. Pada daerah pedalaman kecenderungan curah hujannya tinggi sedang dikawasan pantai memiliki curah hujan sedang. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah kabupaten ini berkisar antara 1.934 mm/tahun. Profil klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Klimatologi Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Bulan	Suhu Maksimum (°C)	Rerata Kelembaban (%)	Rerata Penguapan (ml)	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Durasi Sinaran Matahari	Kecepatan Angin (Knot)	Arah Angin
1	Januari	35,60	88,20	3,3	305,50	23	45,83	5,66	Utara
2	Februari	34,30	88,68	3,4	403,60	22	49,91	6,69	Timur
3	Maret	35,10	88,47	3,8	202,90	24	56,03	5,66	Barat
4	April	35,00	87,85	4,1	407,00	24	69,50	6,69	Selatan
5	Mei	35,00	88,18	3,8	314,80	21	70,36	5,66	Tenggara
6	Juni	34,80	86,68	4,1	178,00	19	65,04	6,69	Tenggara
7	Juli	33,30	86,65	4,5	387,30	27	71,29	7,20	Tenggara
8	Agustus	34,10	84,47	4,5	185,60	17	77,46	7,20	Selatan
9	September	34,80	85,97	4,3	170,70	26	66,54	10,29	Selatan
10	Oktober	35,00	85,71	4,7	333,70	23	68,19	7,72	Selatan
11	November	35,00	87,12	4,6	378,30	23	68,96	7,72	Barat Laut
12	Desember	34,80	86,71	3,8	220,90	25	52,88	7,20	Barat Laut

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

5. Geologi

Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing-masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
- b. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
- c. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (cross bedding) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa-rawa.
- d. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir karbonan (carbonaceous sandstone), konglomerat (conglomerate), batu lanau (siltstone), batu lempung (claystone) dan gambut (peat).
- e. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (deltaic deposit) dan endapan klastika tak terpisahkan (undifferentiated clastic deposit). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (coarse to fine grained sands), lanau (silt) dan lumpur (mud). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (sand), lanau (silt), lempung (clay) dan gambut (peat). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur

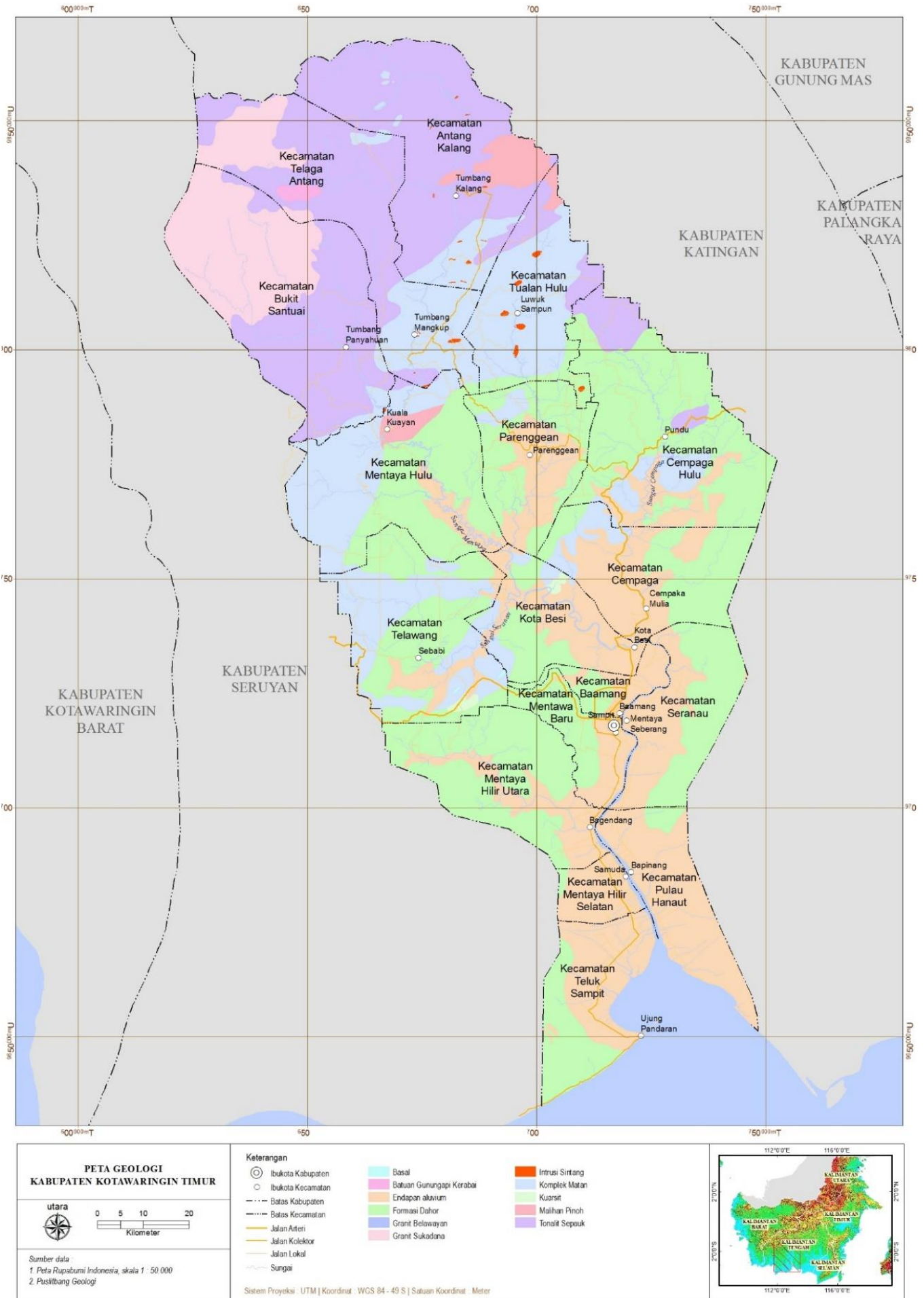
sesar/patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

Kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.4. Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A, B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, bijih besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit, dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir di seluruh wilayah. Data IUP eksplorasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Jumlah IUP Ekplorasi dan Produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jenis Bahan Tambang	Eksplorasi				Produksi			
		2017		2018		2017		2018	
		IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)	IUP	Luas (Ha)
1	Batubara	4	12730	4	12730	6	17936	5	15941
2	Zircon	3	9151	-	-	2	1074.58	-	-
3	Bijih Besi	2	10000	-	-	6	2432.68	4	2138.6
4	Emas	-	-	4	21268	-	-	-	-
5	Bauksit	1	250	1	250	9	11815.89	9	11815.8
6	Pasir	3	15000	-	-	-	-	-	-
7	Laterit	1	4.8	-	-	1	-	-	-
8	Mineral Logam	-	-	-	-	-	-	13	13954.4

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2019



Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Bappelitbangda Kab. Kotim. 2021

6. Hidrologi - Oceanografi

Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat sungai besar yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Beberapa sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Sungai besar tersebut antara lain yaitu : Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Tualan, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, Sungai Sampit, Sungai Lenggana, Sungai Mentobar, Sungai Seranau, dan Sungai Penyahuan (Tabel 2.4). Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air danau, rawa-rawa, dan air tanah untuk keperluan sehari-hari.

Tabel 2.4 Profil Sungai di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Panjang Anak Sungai (Km)	Jalur pelayaran (Km)	Rerata Kedalaman (m)	Rerata Lebar (m)
1	Mentaya	400	-	270	6	400
2	Cempaga	42	100 Km	38	6	250
3	Sampit	46	75 Km	40	6	200
4	Kuayan	48	100 Km	40	6	200
5	Kalang	18	65 Km	18	3	200
6	Seranau	21	75 Km	21	3	200

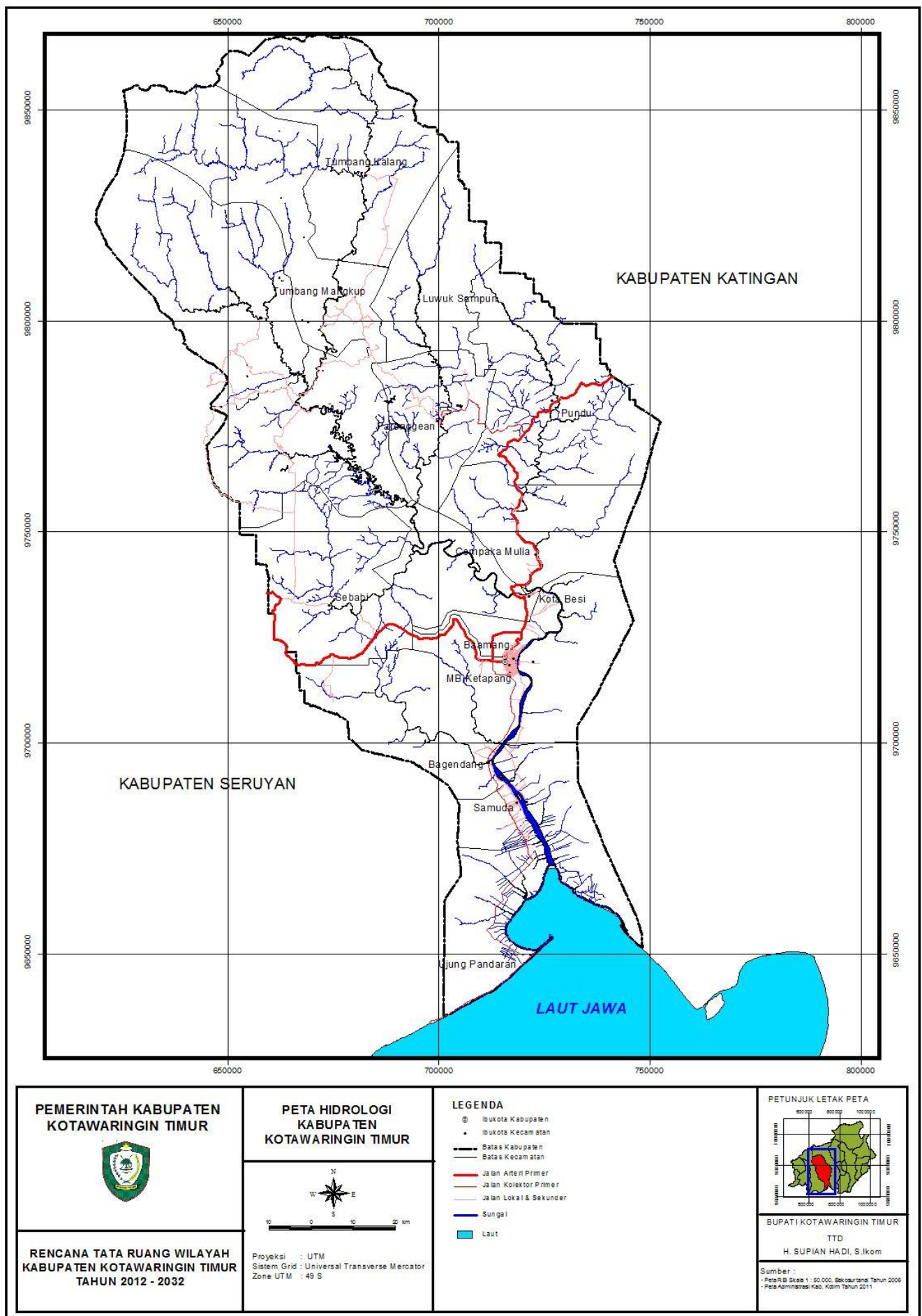
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Kondisi batimetri perairan laut di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, umumnya dangkal dan memiliki gradasi landai, dimana garis isobath (garis khayal yang menghubungkan kedalaman perairan yang sama) 10 meter ditemui sekitar 10 – 20 km dari pantai. Kedalaman perairan laut dangkal rerata pada kisaran 0,5 – 4 meter. Kondisi batimetri yang paling dalam hanya terdapat di sekitar 70 km ke arah luar muara sungai Mentaya dengan kedalaman sekitar 25 meter. Gradasi kedalaman pantai bagian Timur Tenggara – Selatan Relatif sangat landai dibanding bagian Utara – Barat, akibat pengaruh tingkat sedimentasi ambang Sungai Mentaya yang lebih besar. Pantai dengan gradasi relatif tajam terdapat di bagian Timur (dekat mulut muara), sebagai akibat pengaruh gelombang laut Jawa dan arus muara sungai yang menggeser sedimen transport ke arah lepas pantai. Berdasarkan hasil peramalan pasang surut terhadap beberapa stasiun lokasi di perairan pantai Kalimantan Tengah, dapat diinformasikan variasi tunggang pasut. Data menunjukkan tunggang pasut berkisar antara 47,35 cm di Tanjung Keluang (Tanjung Penghujan), hingga 321,54 cm di Teluk Sampit. Secara umum tunggang pasut terendah di perairan pantai bagian barat dan semakin tinggi ke arah timur (lihat Tabel 2.5). Kondisi Hidrologi dan Oceanografi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan Gambar 2.6.

Tabel 2.5 Peramalan Air Pasang Tertinggi, Air Surut Terendah dan Tunggang Maksimum Pasang Surut di Perairan Pantai Kalimantan Tengah

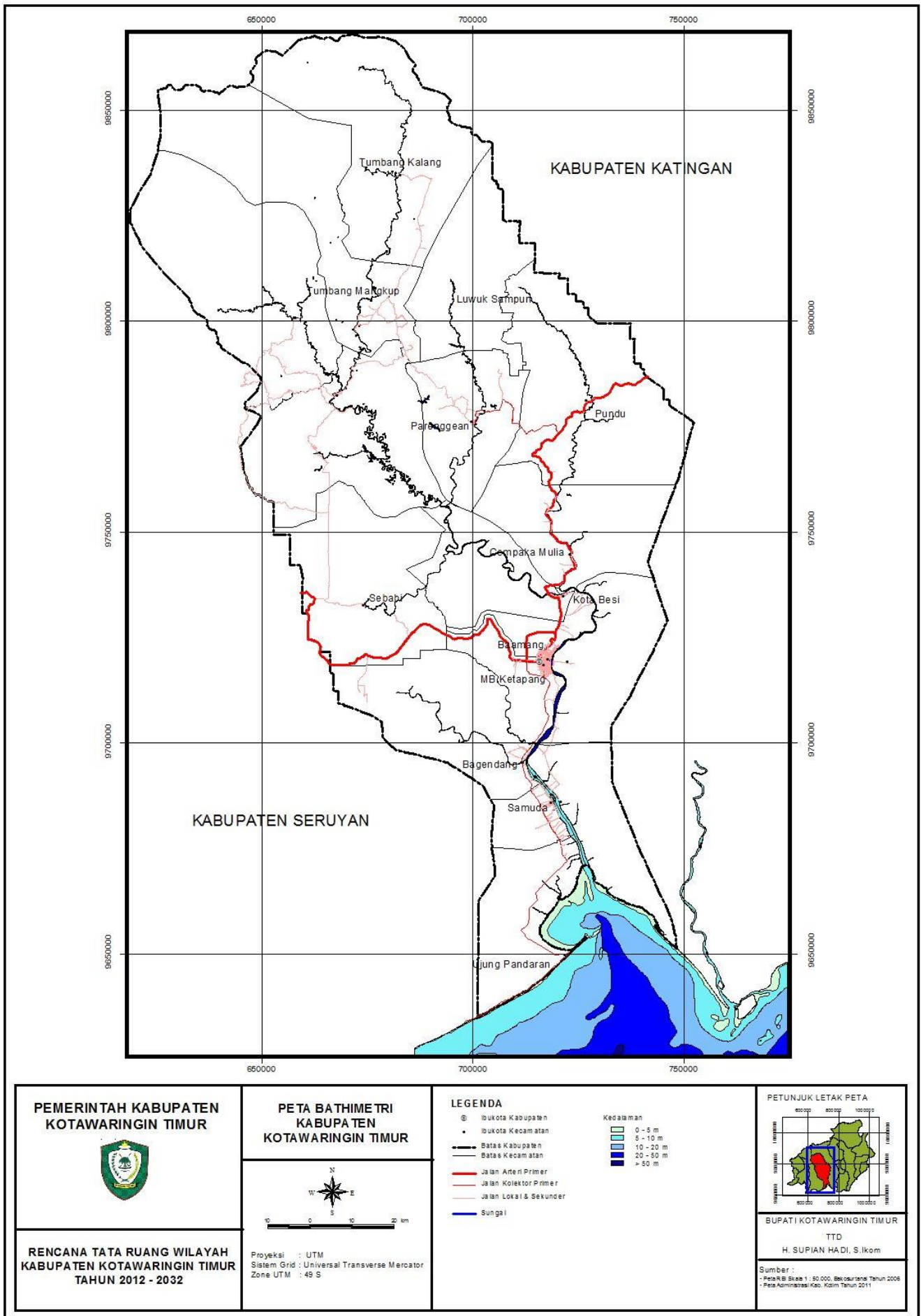
No	Stasiun	Air Pasang Tertinggi (cm)	Air Surut Terendah (cm)	Tunggang Maksimum (cm)
1.	Tanjung Keluang (03°29'30" LS & 110°40'00" BT)	+27,81	-19,54	47,35
2.	PPI Kuala Pembuang (03°24'27,9" LS & 112°33'33" BT)	+98,90	-67,76	166,66
3.	Tanjung Buaya (03°29'05" LS & 112°30'49" BT)	+97,60	-66,49	164,09
4.	Teluk Kotawaringin (03°00'30" LS & 111°22'20" BT)	+60,26	-33,42	93,68
5.	Pantai Sei Bakau (02°59'19,3" LS & 111°35'31,4" BT)	+69,78	-39,27	109,05
6.	Pantai Kubu (02°59'00" LS & 110°45'00" BT)	+76,53	-43,60	120,13
7.	Percabangan S. Kumai & S. Sekonyer (02°46'26,8" LS & 111°42'50,9" BT)	+75,15	-42,64	117,79
8.	Pelabuhan Ujungpandaran (03°09'17,58" LS & 113°00'33,6" BT)	+188,79	-132,53	321,32
9.	Teluk Sampit (03°00'10" LS & 113°28'48" BT)	+188,92	-132,62	321,54
10.	Teluk Sebangau (03°01'24" LS & 113°30'30" BT)	+188,91	-132,62	321,53
11.	Pelabuhan Pulang Pisau (02°45'52" LS & 114°15'1,8" BT)	+113,66	-103,9	217,56
12.	Gosong Rining (03°02'24" LS & 114°01'17" BT)	+117,44	-98,87	216,31
13.	Batanjung (03°21'19,1" LS & 114°14'59,1" BT)	+113,67	-103,90	217,57

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012



Gambar 2.5 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012



Gambar 2.6 Peta Bathimetri Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012

7. Ekosistem Wilayah Pesisir (Mangrove, Terumbu Karang, dan Estuaria)

Ekosistem Hutan mangrove di Pesisir Kotawaringin Timur meliputi type/bentuk pantai; bentuk muara sungai/laguna dan bentuk pulau. Hutan mangrove ini merupakan habitat alami ikan dimana berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan atau biota laut lainnya, perlindungan terhadap kehidupan pantai dan laut disamping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut dan pelindung usaha budidaya di belakangnya. Sebaran hutan mangrove di pesisir Kotawaringin Timur terdiri dari hutan mangrove primer terdapat di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Pulau Hanaut, sedangkan hutan mangrove sekunder terdapat di Kecamatan Pulau Hanaut. Luasan dan posisi hutan mangrove yang dalam areal kawasan hutan lindung dapat dilihat pada gambar 2.7.

Di wilayah Pesisir dan Laut Kotawaringin Timur mempunyai jenis –jenis flora dan fauna yang beragam baik ukuran maupun jenis. Jenis-jenis flora diantaranya adalah bakau, cemara laut, jambu mete, kelapa, nipah dan galam serta jenis tumbuhan yang hidup sebagai semak belukar. Tumbuhan yang hidup di perairan yang tergolong plankton terutama chlorophyta, cyanophyta, diatomae, pyrophyta.

Jenis fauna yang ditemukan antara lain : Bekantan, siamang, ular rawa, burung elang, udang (*Penaeus monodon*), udang manis (*Penaeus semisulcatus*), udang putih (*Penaeus merguensis*), kepiting (*Scylla serrata*), rajungan (*Portunus pelagicus*), dan kerang-kerangan. Jenis ikan yang ditemukan antara lain : ikan kakap (*Lates calcarifer*), tembang (*Sardinella longiceps*), tenggiri (*Scomberomerus commerson*), bambangan (*Lutjanus malabaricus*), kembung lelaki (*Rastrelliger kanagaruta*), kembung perempuan (*Rastrelliger neglectus*), belanak (*Valamugil speigleri*), bawal putih (*Pampus argenteus*), tongkol (*Auxis thazard*), pari kembang (*Oryzias latipes*), pari burung (*Actomyces nichofie*), cucut hiu (*Hermigaleus balfouri*), sembilang (*Plotosus cavius*), telang (*Scomberomerus guttatus*), selungsungan (*Scomberomerus australis*), selangat (*Dorosoma chacunda*) dan bandeng (*Channos channos*).

Ekosistem mangrove dapat dibedakan dalam tiga tipe utama, bentuk antai/delta, bentuk muara sungai/laguna, dan bentuk pulau. Ketiga tipe tersebut terwakili di sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang paling produktif dan merupakan sumber hara untuk perikanan pantai. Hutan ini menyokong kehidupan sejumlah besar spesies binatang dengan menyediakan tempat berbiak, berpijah, dan makan. Spesies tersebut meliputi berbagai jenis burung, ikan, kerang dan krustasea seperti udang, kepiting. Hutan bakau juga berfungsi sebagai pelindung pantai dan penstabilisasi serta berperan sebagai penyangga pencegah erosi yang disebabkan oleh arus, gelombang, dan angin. Mereka juga memainkan peranan penting sebagai pengendali banjir dan pemelihara permukaan air di bawah tanah.

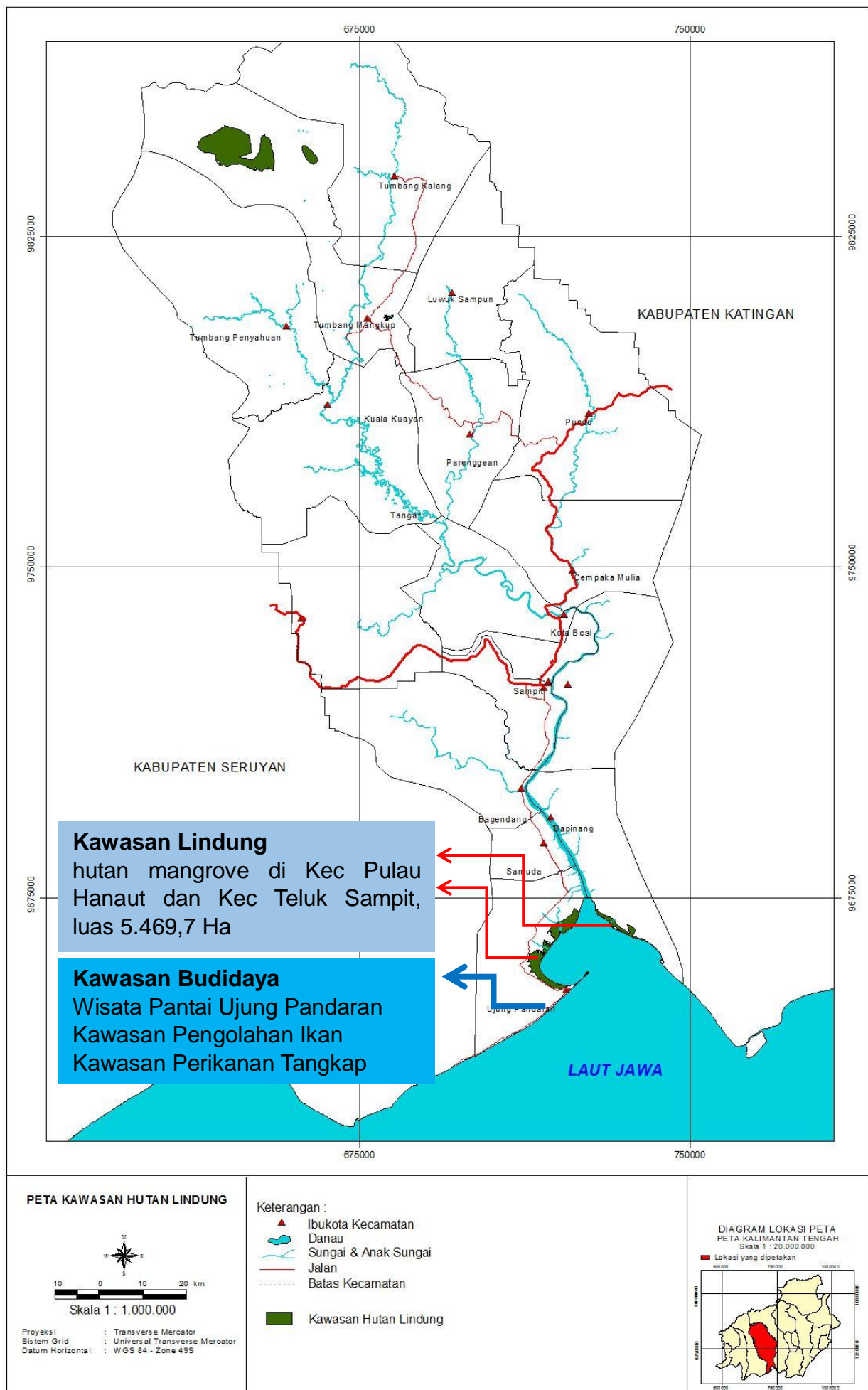
Jenis mangrove yang dominan ditemukan pada kawasan pesisir pantai Kotawaringin Timur terdapat disebelah timur (pesisir teluk sampit) antara lain Api- api

(*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*). Sementara dibagian ujung timur didominasi jenis cemara laut. Pada pantai sebelah barat jenis nipah (*Nymphe, sp.*) mendominasi vegetasi mangrove sebelah dalam, sementara pada arah keluar mendekati pantai, jenis Api-api (*Avicennia alba*) dan bakau-bakauan (*Rhizophora spp.*) yang lebih dominan. Bagian kawasan pantai paling luar yang berbatasan dengan laut umumnya berpasir dan tidak ditumbuhi vegetasi.

Pada kawasan Timur Selatan tidak ditemukan komunitas mangrove yang berarti, sedangkan pada sebelah utara teluk sampit terdapat endapan/sedimen lumpur yang mulai ditumbuhi oleh vegetasi mangrove secara alamiah dari jenis Api-api dan bakau. Dipantai barat, sedimenasi yang cukup kuat juga terjadi sehingga mendangkalkan lingkungan dermaga tradisional milik masyarakat setempat dan pertumbuhan komunitas mangrove yang cukup besar dari jenis api-api, bakau, rambai. Bibit mangrove yang tumbuh disebelah utara teluk sampit berpeluang besar berasal dari pantai barat teluk sampit yang cukup rapat ditumbuhi beberapa mangrove.

Komunitas terumbu karang tidak ditemukan pada perairan laut dangkal (pesisir) dalam wilayah kajian. Berdasarkan informasi nelayan, komunitas terumbu karang ditemukan sekitar 3 mil dari pantai, namun demikian keberadaan terumbu karang harus diperhatikan karena selain sebagai komunitas penting dalam ekosistem perairan laut (sebagai habitat berbagai jenis biota laut, nursery area, pawning area serta feeding area dan bernilai ekonomi penting, juga memiliki nilai ekologis penting sebagai natural barrier bagi daratan karena fungsinya menjadi breaker water yang melindungi daratan dari peluang abrasi gelombang.

Estuaria adalah daerah litoral yang agak tertutup (teluk) di pantai, tempat sungai bermuara dan air tawar dari sungai bercampur dengan air asin dari laut, biasanya berkaitan erat dengan pertemuan perairan sungai dengan air laut. Produktivitas estuaria dan lautan dangkal sekitar pantai menunjang perikanan pantai yang sangat kaya. Sungai Mentaya secara terus menerus membawa endapan, mineral dan zat-zat hara ke dalam estuaria, memperbaharui bahan- bahan yang hilang untuk memelihara produktivitas yang tinggi. Posisi estuaria pada gambar 2.7 diatas berada di teluk diantara hutan lindung di Kecamatan Pulau Hanaut dengan Kecamatan Teluk Sampit.



Gambar 2.7 Peta Kawasan Lindung Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.529/Menhut-II/2012 dan Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 -2035 dan Keputusan Menteri Kehutanan RI No : SK.529/Menhut-II/2012, yang mengacu pada peta pola ruang untuk penggunaan lahan Ekosistem wilayah Pesisir hutan mangrove berada pada kawasan hutan mangrove yang terdapat di Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Teluk Sampit dengan luasan kurang lebih 5.469,7 Ha (luasan tersebut setelah dikurangi usulan *holding zone*).

Kawasan budidaya pada ekosistem wilayah Pesisir untuk Kecamatan Teluk Sampit terdapat kegiatan budidaya kawasan pengolahan ikan dan prasarana kegiatan perikanan (kawasan perikanan tangkap dan kawasan pengolahan ikan terdapat di Desa Ujung Pandaran) dan wisata pantai, kedepannya berpotensi dikembangkan lagi wisata hutan mangrove.

8. Jenis Tanah

Untuk seluruh wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari tiga jenis tanah yang terbagi dalam tiga bagian geografis. Di pesisir atau di bagian Selatan terdiri dari Alluvial Marine yang memiliki kandungan hara rendah. Sedang di bagian tengah sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsol air tanah, Podsol Kuning dan Alluvial Gleihumus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala pada drainase yang terhambat. Sedang di bagian utara sebagian besar jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning, Regosol dan Litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam. Memiliki kandungan hara yang rendah dan berbukit-bukit. Kemampuan tanah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase erosi serta faktor pembatas lainnya. Secara umum kondisi kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sepanjang aliran Sungai Mentaya memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tergenang secara periodik dan tidak ada erosi.
- b. Dibagian barat wilayah kabupaten yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Baamang dan Kotabesi memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur sedang, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.
- c. Semakin ke utara kemampuan tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm, bertekstur halus, tidak pernah tergenang dan tidak ada erosi.

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.8. Secara garis besar terbagi adalah sebagai berikut :

a. Bagian Selatan

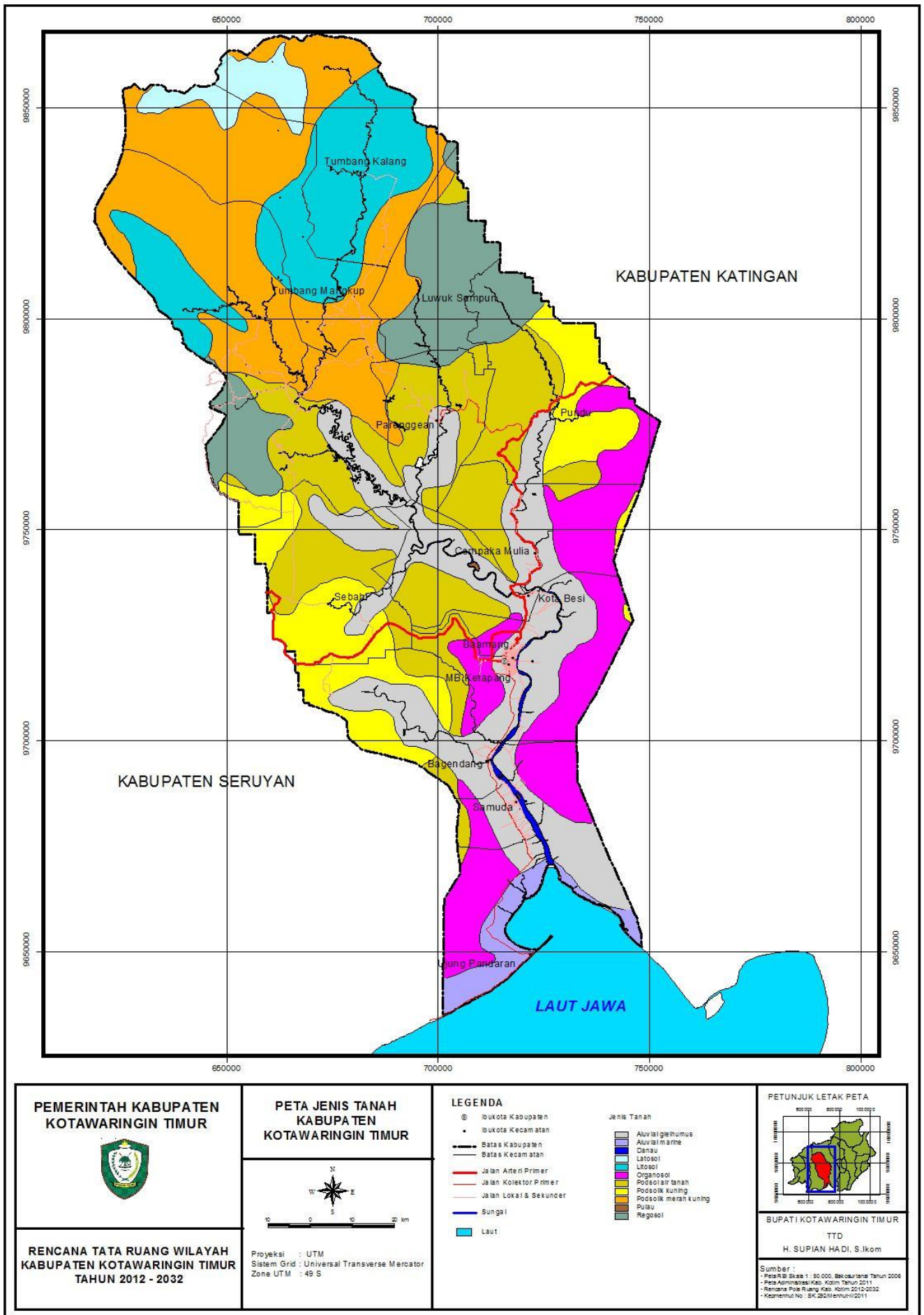
Sebagian besar jenis tanahnya adalah organosol dan alluvial glei humus yang memiliki kendala pada drainase yang terhambat namun memiliki kandungan unsur hara yang baik. Di bagian pesisir terdiri dari alluvial marine yang memiliki kandungan unsur hara rendah.

b. Bagian Tengah

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsol air tanah, podsol kuning dan alluvial glei humus yang berada di sepanjang sungai. Wilayah ini memiliki kendala drainase yang terhambat.

c. Bagian Utara

Sebagian besar jenis tanahnya adalah podsolik merah kuning, regosol dan litosol. Wilayah ini terdiri dari batuan, sebagian bersifat masam, memiliki kandungan harayang rendah dan berbukit-bukit.



Gambar 2.8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012

9. Penggunaan lahan

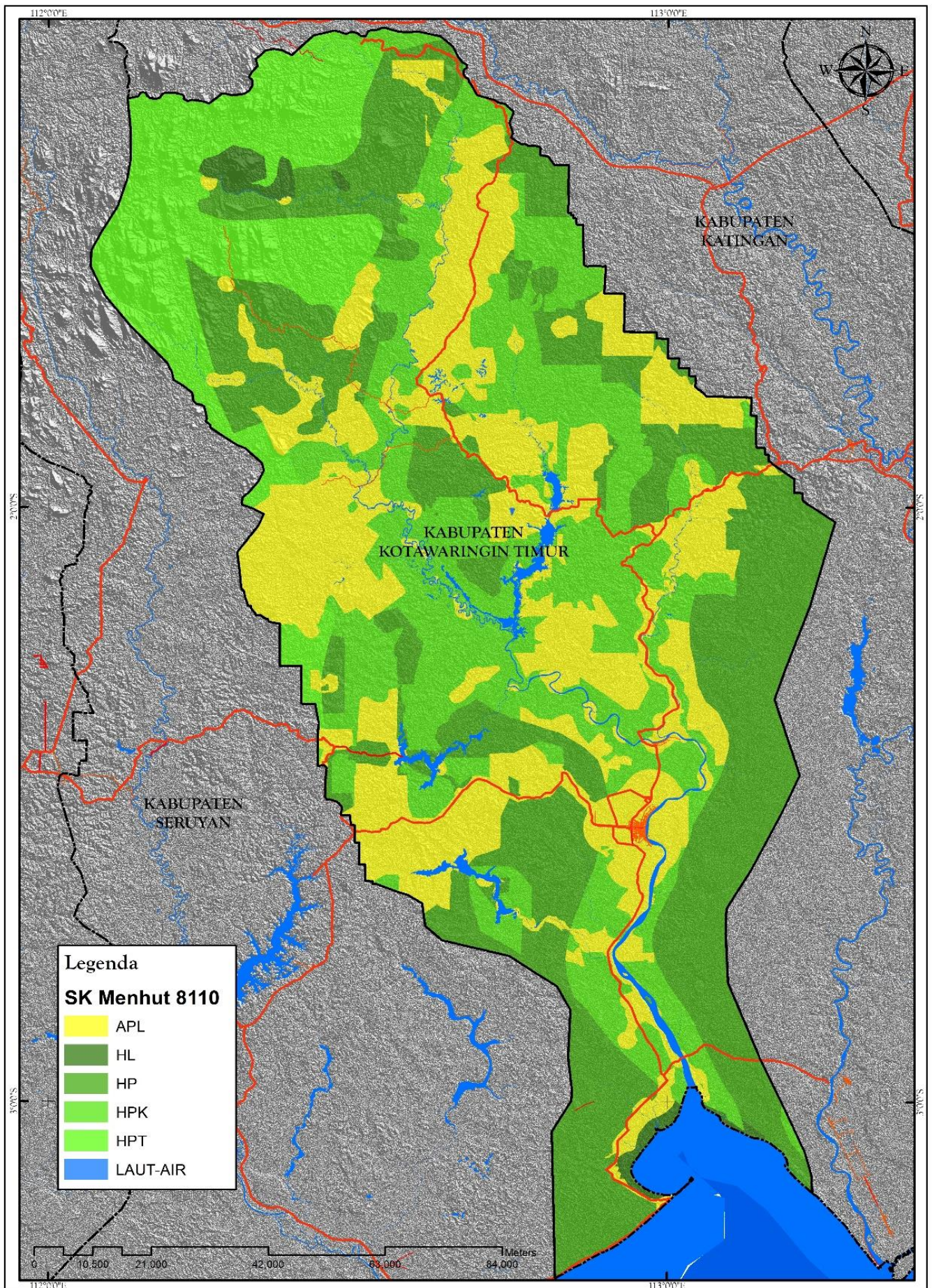
Gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.8110/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tgl 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan. Penggunaan lahan meliputi :

- a. Areal Penggunaan Lain (APL), merupakan areal bukan kawasan hutan termasuk didalamnya areal permukiman pedesaan dan perkotaan.
- b. Hutan Lindung (HL), merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi Tetap (HP), merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- d. Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
- e. Hutan Produksi Terbatas (HPT), merupakan kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
- f. Perairan, merupakan perairan darat yang terdiri atas sungai, danau, dan badan air lainnya.

Luasan untuk masing-masing penggunaan lahan atau kawasan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6. Peta penggunaan lahan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Tabel 2.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Penggunaan Lahan/Kawasan	Luas (Ha)
1	Areal Penggunaan Lain (APL)	435.987,7
2	Hutan Lindung (HL)	17.471,57
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	506.156,3
4	Hutan Produksi Konversi (HPK)	391.875,2
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	191.299,6
6	Perairan	11.794,64
	Total	1.554.585

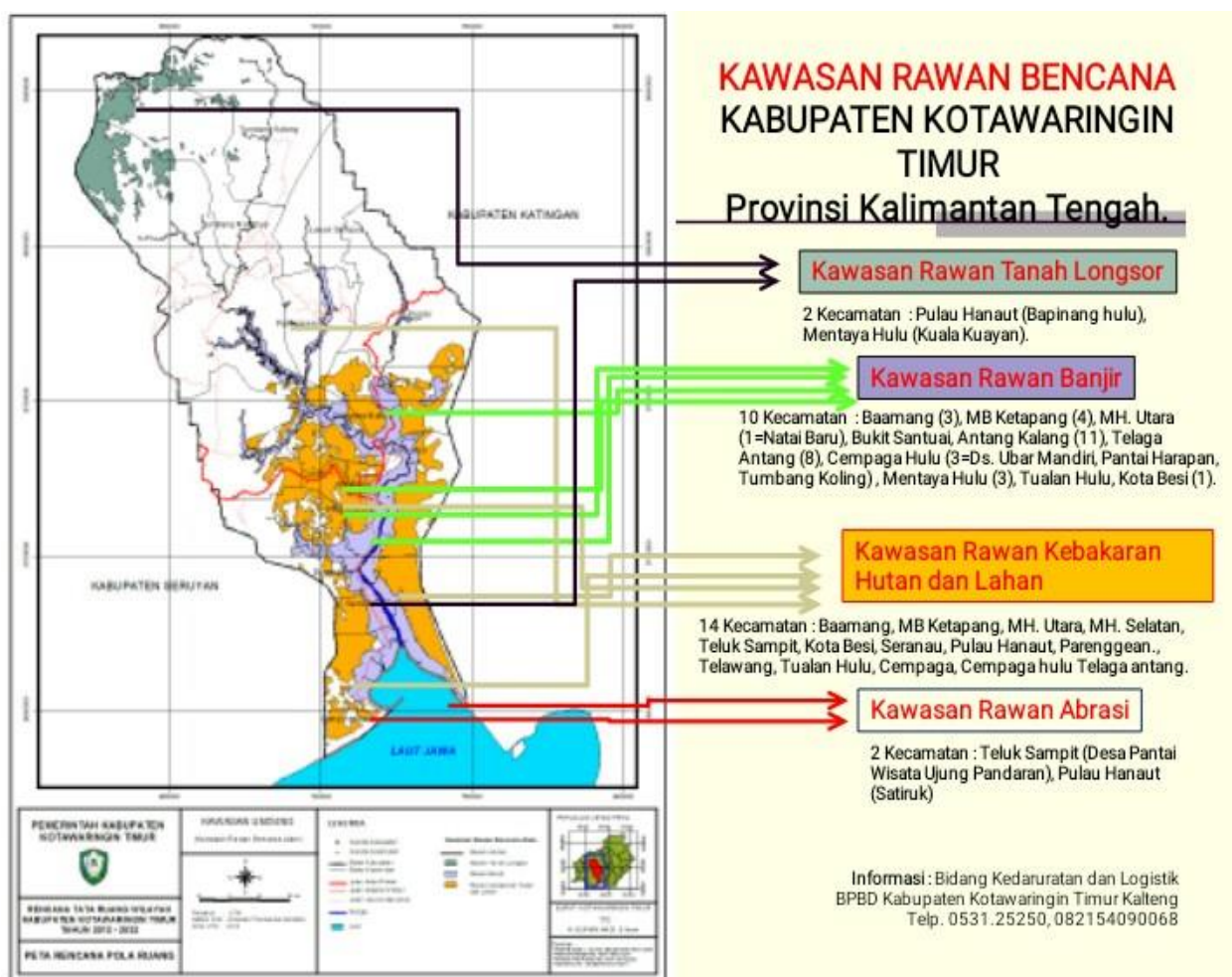


Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Sk Menhut 8110 2018, RTRW Prov. Kalteng. 2015-2035

10. Identifikasi Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peta mitigasi identifikasi wilayah rawan bencana terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana yaitu:

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor yang berada di Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Mentaya Hulu
2. Kawasan Rawan Banjir yang berada di Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Bukit Santuai, Antang Kalang, Telaga Antang, Cempaga Hulu, Menataya Hulu dan Tualan Hulu.
3. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan yang berada di Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Kota Besi, Seranau, Pulau Hanaut, Parenggean, Telawang, Tualan Hulu, Cempaga Hulu dan Telaga Antang.
4. Kawasan Rawan Abrasi yang berada di Kecamatan Teluk Sampit dan Pulau Hanaut.



Gambar 2.10 Peta Mitigasi Identifikasi Wilayah Rawan Bencana

Sumber: BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2.1.2 Aspek Demografi

1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019-2020 meningkat sebesar 3,48 persen. Bila dibandingkan laju pertumbuhan selama lima tahun terakhir yaitu 2016-2020 pertumbuhan cenderung menunjukkan tren naik yaitu 1,33 persen (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Hingga Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju dan Rerata Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2010-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020	2010 - 2020
1	Mentaya Hilir Selatan	23.750	24.000	24.649	24.668	23.000	-6.76	0,98
2	Teluk Sampit	10.201	10.000	10.588	11.125	10.600	-4.71	1,63
3	Pulau Hanaut	17.667	17.000	18.336	18.441	16.800	-8.89	0,80
4	Mentawa Baru Ketapang	85.623	86.000	88.116	98.424	98.700	0.28	2,44
5	Seranau	10.667	10.000	10.979	11.635	10.900	6.31	1,23
6	Mentaya Hilir Utara	17.482	17.000	17.943	15.808	18.800	18.92	1,66
7	Kota Besi	18.823	19.000	20.162	19.303	18.400	-4.67	2,03
8	Telawang	21.140	21.000	22.643	15.275	20.500	34.20	1,94
9	Baamang	58.068	59.000	60.006	68.309	69.700	2.03	2,97
10	Cempaga	25.063	26.000	27.241	22.426	22.300	-0.56	1,52
11	Cempaga Hulu	30.563	31.000	33.219	18.984	21.600	13.78	-0,72
12	Parenggean	28.643	29.000	29.665	25.852	26.600	2.89	-2,77
13	Tualan Hulu	11.756	28.000	12.176	6.937	7.800	12.44	-
14	Mentaya Hulu	28.300	12.000	29.311	18.200	20.500	12.63	-3,13
15	Bukit Santuai	11.863	16.000	13.397	8.282	10.400	25.57	2,51
16	Antang Kalang	15.979	11.000	16.550	12.269	13.400	9.21	-7,15
17	Telaga Antang	20.688	21.000	21.428	18.525	19.000	2.56	-
Kotawaringin Timur		436.276	446.094	456.409	414.463	428.900	3.48	1,33

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka Tahun 2017-2021; Hasil Analisis. 2021.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 25 Ribu/Km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bukit Santuai yang hanya memiliki kepadatan penduduk sebesar 6,34 Ribu/Km², sedangkan yang tertinggi yaitu pada Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sebesar 135,92 Ribu/Km². Data kepadatan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Ribu/Km ²)
1	Mentaya Hilir Selatan	23,0	318,00	72,36
2	Teluk Sampit	10,6	610,00	17,31
3	Pulau Hanaut	16,8	620,00	27,11
4	Mentawa Baru Ketapang	98,7	726,00	135,92
5	Seranau	10,9	548,00	19,84
6	Mentaya Hilir Utara	18,8	725,00	25,90
7	Kota Besi	18,4	1.889,00	9,76

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Ribu/Km ²)
8	Telawang	20,5	317,00	64,73
9	Baamang	69,7	639,00	109,10
10	Cempaga	22,3	1.253,00	17,79
11	Cempaga Hulu	21,6	1.183,00	18,25
12	Parenggean	26,6	493,15	54,00
13	Tualan Hulu	7,8	1.090,85	7,12
14	Mentaya Hulu	20,5	1.712,79	11,99
15	Bukit Santuai	10,4	1.636,00	6,34
16	Antang Kalang	13,4	1.579,00	8,46
17	Telaga Antang	19,0	1.456,21	13,02
	Kotawaringin Timur	428,9	16.796,00	25,54

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

3. Struktur Penduduk berdasarkan Sex Ratio dan Kelompok Umur

Aspek ratio jenis kelamin (*Sex Ratio*), penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak laki-laki dibanding dengan perempuan. Dari total 428,9 penduduk pada tahun 2020, terdapat 222,6 laki-laki atau 51,90 persen. Rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 107,9 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki (Tabel 2.9).

Tabel 2.9 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (Ribu)			Rasio Jenis Kelamin (L/P)
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Total	
1	Mentaya Hilir Selatan	11,7	11,3	23,0	104,0
2	Teluk Sampit	5,5	5,0	10,6	109,4
3	Pulau Hanaut	8,7	8,1	16,8	106,4
4	Mentawa Baru Ketapang	50,5	48,2	98,7	104,9
5	Seranau	5,7	5,2	10,9	108,8
6	Mentaya Hilir Utara	9,9	8,9	18,8	111,9
7	Kota Besi	9,7	8,8	18,4	110,1
8	Telawang	11,1	9,4	20,5	118,9
9	Baamang	35,5	34,2	69,7	103,7
10	Cempaga	11,6	10,7	22,3	109,1
11	Cempaga Hulu	11,5	10,1	21,6	113,1
12	Parenggean	13,8	12,8	26,6	107,6
13	Tualan Hulu	4,1	3,7	7,8	111,5
14	Mentaya Hulu	10,7	9,8	20,5	109,9
15	Bukit Santuai	5,5	4,8	10,4	114,8
16	Antang Kalang	7,2	6,2	13,4	115,4
17	Telaga Antang	9,9	9,1	19,00	108,3
	Kotawaringin Timur	222,6	206,3	428,9	107,9

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

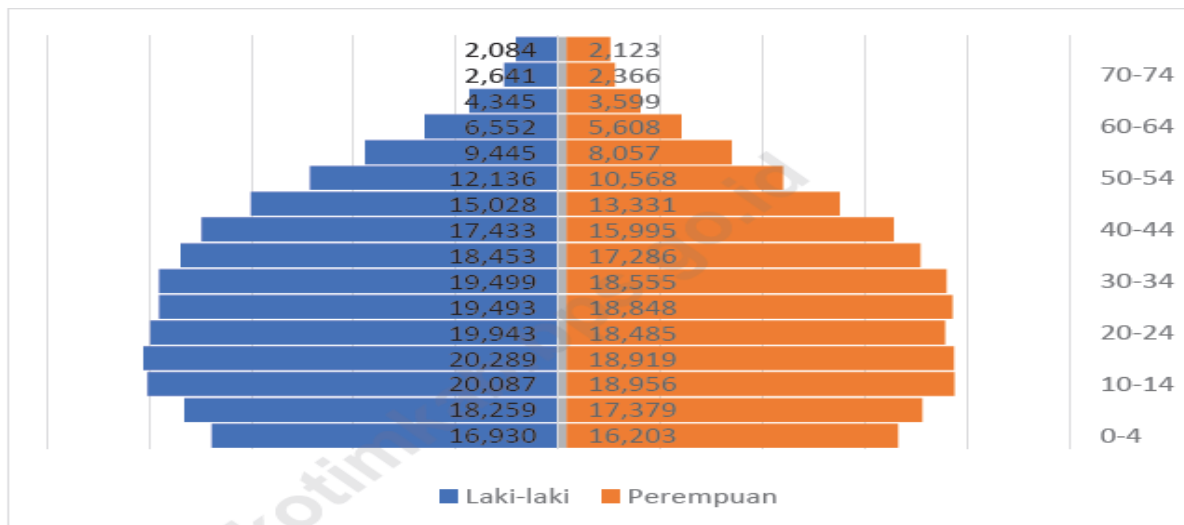
Tinjauan penduduk menurut kelompok umur menggambarkan dominasi penduduk usia anak dan usia produktif di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebaran strukturnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 dan Gambar 2.9. Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh kelompok usia produksi dengan persentase penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 70 persen, sedangkan untuk penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) sebesar 30 persen. Jumlah penduduk yang didominasi oleh usia produktif merupakan modal dasar bagi Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melakukan percepatan pembangunan daerah. Jika dikaitkan dengan angka beban ketergantungan,

jumlah penduduk produktif yang menanggung penduduk tidak produktif masih tinggi yaitu sebesar 42 persen. Ditinjau dari komposisi penduduknya, sebanyak 6,49 persen penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur masuk dalam kelompok umur 0 sampai dengan 4 tahun. Hal ini juga mengindikasikan masih tingginya angka kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.10 Struktur Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Total
1	0-4	16,9	16,2	33,1
2	5-9	18,3	17,4	35,6
3	10-14	20,1	19,0	39,0
4	15-19	20,3	18,9	39,2
5	20-24	19,9	18,5	38,4
6	25-29	19,5	18,8	38,3
7	30-34	19,5	18,6	38,1
8	35-39	18,5	17,3	35,7
9	40-44	17,4	16,0	33,4
10	45-49	15,0	13,3	28,4
11	50-54	12,1	10,6	22,7
12	55-59	9,4	8,1	17,5
13	60-64	6,6	5,6	12,2
14	65-69	4,3	3,6	7,9
15	70-75	2,6	2,4	5,0
16	>75	2,1	2,1	4,2
Kotawaringin Timur		222,6	206,3	428,9

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.11 Piramida Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto/PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,54 persen. Angka PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 mencapai angka 26.957,3 miliar rupiah. Ekonomi Kotawaringin Timur pada tahun 2020

terkontraksi sebesar 3,09 persen. Nominal ini merupakan angka terbesar pertama di Provinsi Kalimantan Tengah. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha terbesar sejak tahun 2017 mulai bergeser dari pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menuju industri pengolahan. Trend ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap hasil alam yang bersifat mentah mulai berkurang dan makin tingginya kemampuan melakukan pengolahan bahan mentah dari alam sehingga memperoleh nilai tambah/*value added* yang lebih tinggi.

Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 7,16 persen dengan migas namun pertumbuhan tanpa migas terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 5,59 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan (3,86 persen). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur masih ditopang secara dominan oleh sektor primer. Penurunan harga komoditas pertanian memberikan dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.11 – Tabel 2.14, Gambar 2.10 dan Gambar 2.11.

Tabel 2.11 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan, Atas Dasar Harga Berlaku, dan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah), 2016-2020

Tahun	PDRB ADHK		PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)	PDRB ADHB (Miliar Rupiah)
	Jumlah (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)		
2016	14.932,8	7.93	44.81	19.622,9
2017	16.118,2	7.94	50.19	22.390,7
2018	17.234,3	6.92	53.82	24.565,4
2019	18.463,5	7.13	57.49	26.812,5
2020	17.892,3	-3,09	56.63	26.957,3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Riil PDRB berdasarkan Lapangan Usaha (Persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.56	6.13	6.83	3.89	-3.10
2. Pertambangan dan Pengalihan	9.56	12.22	7.73	33.47	17.35
3. Industri Pengolahan	8.88	11.18	7.37	5.14	-2.17
4. Pengadaan Listrik dan Gas	13.18	5.65	9.24	11.55	12.01
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5.41	0.86	3.40	9.39	14.64
6. Konstruksi	5.06	4.17	4.29	5.12	-29.88
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.03	8.64	8.92	9.39	-6,82
8. Transportasi dan Pergudangan	12.22	9.41	6.76	5.81	3.59
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.74	5.21	4,94	4.20	-3.67
10. Informasi dan Komunikasi	3.48	3.52	4.42	2.02	7.49
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.01	7.06	2.90	7.36	5.57
12. Real Estate	5.04	4.80	6.34	4.43	0.44
13. Jasa Perusahaan	5.26	5.50	6.31	2.18	-27.43

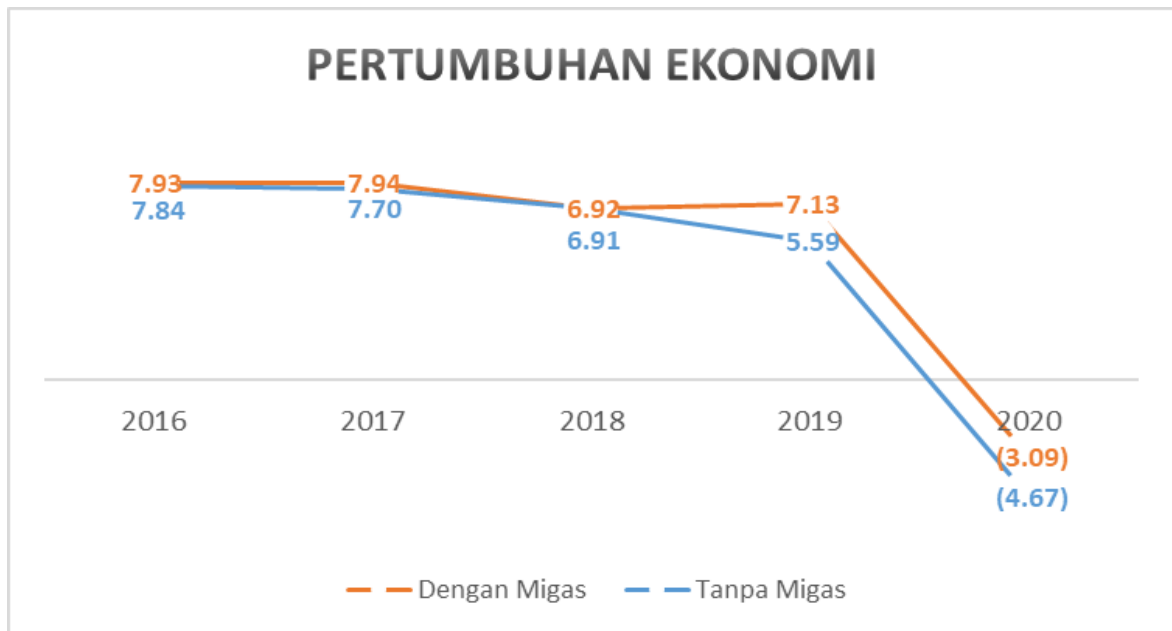
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.12	-0.28	4.99	2.69	-1,09
15. Jasa Pendidikan	5.35	4.14	7.38	3.46	8.79
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.98	4.90	8.20	0.13	1.37
17. Jasa Lainnya	5.85	6.05	7.61	5.01	-8.54
Rata-rata	7.93	7.94	6.92	7.13	-3.09

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan PDRB					
Dengan Migas	7,93	7,94	6,92	7,13	-3.09
Tanpa Migas	7,84	7,70	6,91	5,59	-4.67

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020



Gambar 2.12 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.14 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 375,2	4 773.1	5 104.1	5 282.5	5 789.8
2. Pertambangan dan Penggalian	603,6	691.8	769.8	1 081.4	1 364.9
3. Industri Pengolahan	4 356,0	5 290.9	5 641.5	5 775.6	5 843.1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	9,5	11.4	13.2	15.0	17.7
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,5	25.6	28.9	31.8	39.1
6. Konstruksi	1 89.2	2 117.8	2 366.9	2 605.3	1 898.3
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 414.3	4 015.7	4 639.9	5 413.4	5 125.7
8. Transportasi dan Pergudangan	2 143.2	2 48.1	2 665.8	2 971.2	3 090.4
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	275.6	301.0	320.7	344.8	335.9
10. Informasi dan Komunikasi	134.1	138.9	148.2	159.4	173.0
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	721.9	805.4	866.2	969.5	1 036.6
12. Real Estate	306.0	341.4	385.1	410.5	424.4
13. Jasa Perusahaan	6.8	7.4	8.4	8.9	6.6
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	423.3	429.0	474.6	502.5	498.0
15. Jasa Pendidikan	604.9	639.3	707.1	777.8	851.2
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	201.3	228.5	260.7	274.8	288.4
17. Jasa Lainnya	130.4	145.3	164.2	187.9	174.2
Produk Domestik Regional Bruto	19 622.9	22 390.7	24 565.4	26 812.5	26 957.3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.15 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3 352.8	3 558.3	3 801.4	3 949.5	3 827.2
2. Pertambangan dan Penggalian	789.9	884.1	952.4	1 271.2	1 491.7
3. Industri Pengolahan	3 410.8	3 792.2	4 071.7	4 281.1	4 188.1
4. Pengadaan Listrik dan Gas	8.5	9.0	9.8	10.9	12.2
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.0	17.2	17.7	19.4	22.2
6. Konstruksi	1 433.5	1 493.2	1 557.3	1 637.1	1 147.9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 510.5	2 727.5	2 970.8	3 249.7	3 028.0
8. Transportasi dan Pergudangan	1 429.32	1 563.6	1 669.4	1 766.4	1 829.8
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177.2	186.5	795.7	203.9	196.4
10. Informasi dan Komunikasi	123.8	128.1	133.8	136.5	146.7
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	544.3	582.8	599.6	634.8	679.6
12. Real Estate	214.6	224.9	239.2	249.8	250.9
13. Jasa Perusahaan	5.1	5.4	5.7	5.8	4.2
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	249.9	294.1	308.7	317.0	313.6
15. Jasa Pendidikan	387.1	403.1	432.8	447.8	487.2
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143.1	150.1	162.4	162.6	164.9
17. Jasa Lainnya	92.5	98.1	105.6	110.9	101.4
Produk Domestik Regional Bruto	14 932.8	16 118.2	17 234.3	18 463.5	17 892.3

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Terdapat delapan kategori yang mengalami kontraksi pada tahun 2020, antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Lainnya. Kontraksi terbesar terjadi pada sektor Konstruksi yaitu sebesar 29,88 persen. Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 17,35 persen.

Struktur perekonomian Kotawaringin Timur masih didominasi oleh tiga kategori yaitu Industri Pengolahan (21,68 persen), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (21,48 persen), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (19,01 persen). Kenaikan angka laju pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan terdapat percepatan perkembangan iklim perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur. Distribusi persentase PDRB ADHB dan ADHK dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17.

Tabel 2.16 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,30	21,32	20,78	19,70	21,48
2. Pertambangan dan Penggalian	3,08	3,09	3,13	4,03	5,06
3. Industri Pengolahan	22,20	23,63	22,97	21,54	21,68
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,06	0,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,11	0,12	0,12	0,15
6. Konstruksi	9,65	9,46	9,63	9,72	7,04
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
8. Transportasi dan Pergudangan	10,92	10,84	10,85	11,08	11,46
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,40	1,34	1,31	1,29	1,25
10. Informasi dan Komunikasi	0,68	0,62	0,60	0,59	0,64
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	3,60	3,53	3,62	3,85
12. Real Estate	1,56	1,52	1,57	1,53	1,57
13. Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,16	1,92	1,93	1,87	1,85
15. Jasa Pendidikan	3,08	2,86	2,88	2,90	3,16
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,02	1,06	1,03	1,07
17. Jasa Lainnya	0,66	0,65	0,67	0,70	0,65
Produk Domestik Regional Bruto ADHB	100	100	100	100	100

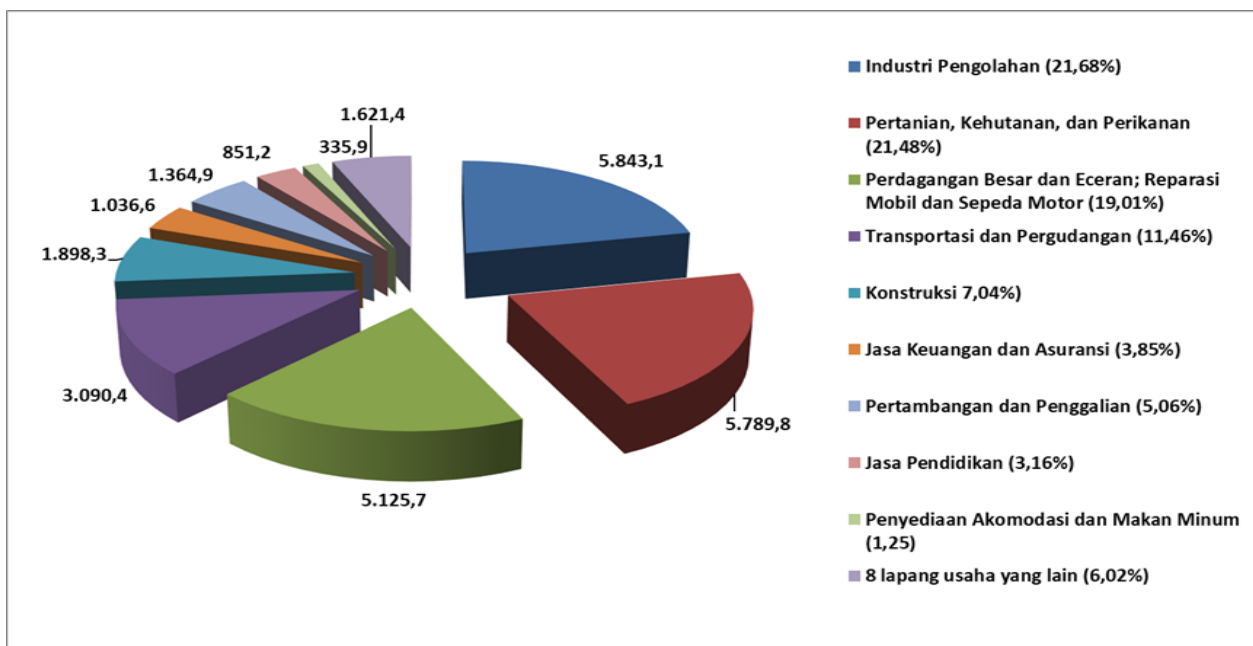
Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.17 Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,5	22,1	22,1	21,4	21,4
2. Pertambangan dan Penggalian	5,3	5,5	5,5	6,9	6,9
3. Industri Pengolahan	22,8	23,5	23,6	23,2	23,2
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
6. Konstruksi	9,6	9,3	9,1	8,9	8,9
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,8	16,9	17,2	17,6	17,6
8. Transportasi dan Pergudangan	9,6	9,7	9,6	9,5	9,5
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1
10. Informasi dan Komunikasi	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5
12. Real Estate	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
13. Jasa Perusahaan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,0	1,8	1,8	1,7	1,7
15. Jasa Pendidikan	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
17. Jasa Lainnya	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Produk Domestik Regional Bruto ADHK	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020



Gambar 2.13 Distribusi Berdasarkan PDRB Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur (persen), 2016-2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB per tahun dengan jumlah penduduk per tahun. PDRB per kapita mengindikasikan distribusi dan kontribusi PDRB riil terhadap kesejahteraan masyarakat. Perkembangan PDRB per kapita dapat dilihat pada Gambar 2.14 PDRB per Kapita Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan.



Gambar 2.14 Perkembangan PDRB dan PDRB per Kapita 2015-2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

3. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Berdasarkan data statistik, Sampit merupakan 1 dari 89 kota/kabupaten di Indonesia yang menjadi kota inflasi. Setiap minggu nya secara rutin dilakukan pencacahan lapangan untuk memantau pergerakan harga di Sampit dengan melakukan Survei Harga Konsumen/SHK. Pada tahun 2020, tercatat inflasi Kota Sampit berada pada angka 1,62. Angka ini menunjukkan terdapat kenaikan harga sebesar 1,62 persen secara umum untuk berbagai komoditas barang dan jasa selama satu tahun. Inflasi bulanan atau month to month inflation tertinggi selama 2020 terjadi pada bulan Juni, sedangkan deflasi terbesar terjadi pada bulan Agustus. Salah satu indikator dalam menilai

inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan indikator inflasi di Indonesia. Sejak Januari 2014 IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota tahun 2012 yang mencakup sekitar 225-462 komoditas. Data inflasi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan sampel amatan Kota Sampit dapat dilihat pada Tabel 2.18, Tabel 2.19, serta Gambar 2.15.

Tabel 2.18 Indeks Harga Konsumen, Laju Inflasi, dan Inflasi Kota Sampit Tahun 2020

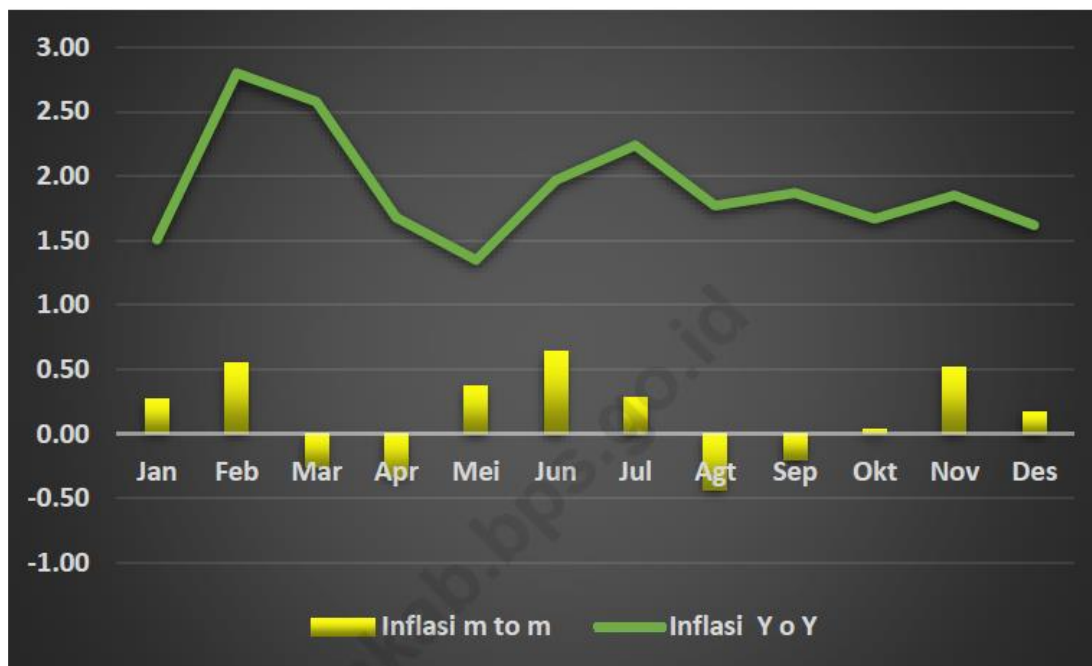
Bulan	IHK	Laju Inflasi (Month to Month / MoM)	Inflasi (Year to Year / YoY)
Januari	104.10	0.27	1.51
Februari	104.67	0.55	2.80
Maret	104.40	-0.26	2.58
April	104.06	-0.33	1.68
Mei	104.44	0.37	1.35
Juni	105.11	0.64	1.97
Juli	105.40	0.28	2.24
Agustus	104.95	-0.43	1.77
September	104.74	-0.20	1.87
Oktober	104.78	0.04	1.67
November	105.32	0.52	1.85
Desember	105.50	0.17	1.60

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.19 Laju Inflasi Kota Sampit menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020

Bulan	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
Januari	1,14	-	0.13	0.04	0.02	-1,58
Februari	1,23	-0,17	0.14	-0.07	-	0.32
Maret	-0,34	-	-0.01	0.10	-	-1,48
April	-0,37	-0,01	-	-0,02	0,07	-1,16
Mei	0.54	0.01	-0.04	-0.22	0.09	1,53
Juni	1,74	-	0.01	0.33	-	-0,46
Juli	-0,61	0,48	-0,53	0,74	0,01	3,84
Agustus	-1,41	-0,09	-0,33	-0,32	0,04	-0,03
September	-0,56	0,10	-0,07	0,05	0,05	-0,56
Oktober	0.31	-0,05	-0.02	0.15	-	-0.73
November	0.89	-	0.35	-0.24	0.12	1,12
Desember	0.30	-0,03	0.02	0.04	0.03	0.50

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.15 IHK, Laju Inflasi MoM dan Inflasi YoY tahun 2020
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

4. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin terbanyak Provinsi Kalimantan Tengah berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat tahun 2020 sebanyak 26,64 ribu jiwa atau 5,62 persen dari total keseluruhan penduduk miskin di Kalimantan Tengah sebanyak 132,94 ribu jiwa. Angka penduduk miskin Kalimantan Tengah ini menurun dibanding tahun sebelumnya sebanyak 139,93 ribu jiwa. Adapun garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebesar 485.635 rupiah. Hal ini menggambarkan terjadi penurunan secara kuantitas dan distribusi persentase (Tabel 20).

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten-Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Kabupaten-Kota	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	14.11	13.27	12.90	12.76	11.46
2	Kotawaringin Timur	27.39	27.70	28.2	27.38	26.64
3	Kapuas	19.96	18.80	18.52	18.23	18.17
4	Barito Selatan	6.09	5.95	6.16	5.99	6.12
5	Barito Utara	6.90	6.72	6.50	6.46	6.78
6	Sukamara	2.12	1.99	1.96	2.01	2.13
7	Lamandau	2.88	2.74	2.52	2.47	2.61
8	Seruyan	14.57	14.04	14.56	14.66	14.53
9	Katingan	10.10	9.51	8.73	8.51	8.23
10	Pulang Pisau	6.88	6.54	5.71	5.39	5.21
11	Gunung Mas	6.55	6.67	5.96	5.86	5.78
12	Barito Timur	8.88	8.56	8.05	7.97	7.88
13	Murung Raya	7.10	6.75	7.39	7.21	7.18
14	Palangka Raya	9.96	9.91	9.78	9.69	10.23
Kalimantan Tengah		143.49	139.16	136.93	134.59	132.94

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

BPS menghitung kemiskinan dengan melakukan pendekatan berbeda untuk mengetahui kualitas kehidupan masyarakat Kotawaringin Timur yang dihimpun dalam Indeks Pembangunan Manusia/IPM. IPM Kotawaringin Timur mengalami peningkatan

pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,31. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kotawaringin Timur telah memasuki kategori IPM tinggi. Sedangkan untuk indikator kemiskinan lain seperti Garis Kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 angkanya sebesar Rp. 446.039 rupiah dan 5,62 persen. Indikator-indikator kemiskinan berupa garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2011-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan (IKK)	Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK)
			Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (%)		
1	2011	261.807	28.38	7.43	0.74	0.12
2	2012	281.887	27.49	6.9	0.55	0.07
3	2013	300.929	27.96	6.85	0.71	0.12
4	2014	312.262	27.94	6.67	0.58	0.11
5	2015	325.234	27.26	6.42	0.61	0.10
6	2016	353.640	27.39	6.32	0.8	0.18
7	2017	381.776	27.70	6.24	0.76	0.17
8	2018	393.474	28.20	6.21	0.75	0.15
9	2019	416.777	27,38	5,90	0,92	0,24
10	2020	446.039	26,64	5,62	0,87	0,16

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Status kesejahteraan keluarga dan individu berdasarkan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Status Kesejahteraan Keluarga Dan Individu

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
	D1	D2	D3	D4	Total	D1	D2	D3	D4	Total
Mentaya Hilir Selatan	130	819	1.207	760	2.916	680	3.192	3.935	1.590	9.397
Teluk Sampit	81	567	638	210	1.496	451	2.454	1.962	429	5.296
Pulau Hanaut	201	848	962	495	2.506	1.132	3.579	3.092	1.031	8.834
Mentawa Baru/Ketapang	59	427	1.004	1.151	2.641	353	2.101	4.163	3.353	9.970
Seranau	213	703	679	339	1.934	1.078	2.686	2.242	822	6.828
Mentaya Hilir Utara	58	393	581	401	1.433	339	1.787	2.132	1.073	5.331
Kota Besi	206	659	682	397	1.944	1.136	2.692	2.420	1.150	7.398
Telawang	8	71	136	152	367	48	374	567	327	1.316
Baamang	28	342	909	1.198	2.477	165	1.780	3.901	3.699	9.545
Cempaga	118	567	669	393	1.747	685	2.555	2.344	869	6.453
Cempaga Hulu	46	301	628	450	1.425	288	1.538	2.471	1.173	5.470
Parenggean	19	153	423	709	1.304	111	663	1.669	2.137	4.580
Tualan Hulu	5	84	310	447	846	36	385	1.130	1.397	2.948
Mentaya Hulu	90	371	405	268	1.134	563	1.783	1.564	778	4.688
Bukit Santuai	148	373	169	67	757	947	1.418	389	224	2.978
Antang Kalang	81	451	447	467	1.446	487	1.932	1.429	1.358	5.206
Telaga Antang	36	280	565	807	1.688	224	1.389	2.354	2.470	6.437
Total	1.527	7.409	10.414	8.711	28.061	8.723	32.308	37.764	23.880	102.675

Sumber: TNP2K. 2020

Catatan

- Desil 1: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia)
- Desil 2: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia)
- Desil 3: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia)
- Desil 4: (Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia)

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan sosial sehingga warganya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

1. Aspek Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan manusia salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia/IPM. IPM merupakan indikator makro yang mencerminkan capaian pembangunan manusia di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. IPM Kotawaringin Timur mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 71,31. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Kotawaringin Timur telah memasuki kategori IPM tinggi. Sedangkan untuk indikator kemiskinan lain seperti Garis Kemiskinan dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 angkanya sebesar Rp. 446.039 rupiah dan 5,62 persen. Sedangkan Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 1-0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. IPM dan Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 23-25.

Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, 2016 -2020

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	72,87
2	Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	71,31
3	Kapuas	66,98	68,04	68,68	69,38	69,48
4	Barito Selatan	69,00	69,73	69,73	70,10	70,22
5	Barito Utara	68,28	69,72	69,72	70,52	70,59
6	Sukamara	66,40	66,98	67,52	67,95	68,03
7	Lamandau	68,54	69,17	69,70	70,51	70,51
8	Seruyan	65,40	66,14	67,04	67,57	67,58
9	Katingan	67,41	69,56	67,97	68,55	68,68
10	Pulang Pisau	66,49	67,00	67,54	68,32	68,45
11	Gunung Mas	69,73	69,95	70,23	70,65	70,81
12	Barito Timur	70,33	70,57	70,82	71,34	71,39
13	Murung Raya	66,96	67,16	67,56	67,89	67,98
14	Palangkaraya	79,21	79,69	80,34	80,77	80,77
	Kalimantan Tengah	69,79	67,41	70,52	70,91	71,05

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur 2011-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peringkat se-Kalimantan Tengah
2011	65,60	6
2012	66,61	5
2013	67,95	4
2014	68,45	4
2015	68,61	5
2016	69,42	5
2017	70,17	4
2018	70,56	4
2019	71,16	4
2020	71,31	4

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

Tabel 2.25 Koefisien Gini Kabupaten Kotawaringin Timur 2015-2020

Tahun	Koefisien Gini (IPM)	Klasifikasi	Keterangan
2015	0.28	Ketimpangan pendapatan rendah	Kondisi awal/nilai dasar
2016	0.32	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2017	0.35	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2018	0.34	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2019	0.30	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian
2020	0.32	Ketimpangan pendapatan sedang	Target capaian

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

a. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

IPM dari aspek pendidikan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam rangka memberikan pendidikan kepada semua penduduk adalah memberantas buta aksara. Adapun data series tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif Tercatat Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebesar 98,83 atau menurun 0,52 dari tahun sebelumnya sebesar 99,35. Angka ini menunjukkan bahwa hanya kurang dari 1 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf. Data indikator melek huruf dapat dilihat pada Gambar 2.16. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan Indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia yang merepresentasikan kemajuan perkembangan Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.26



Gambar 2.16 Dinamika Melek Huruf Usia 15+ Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

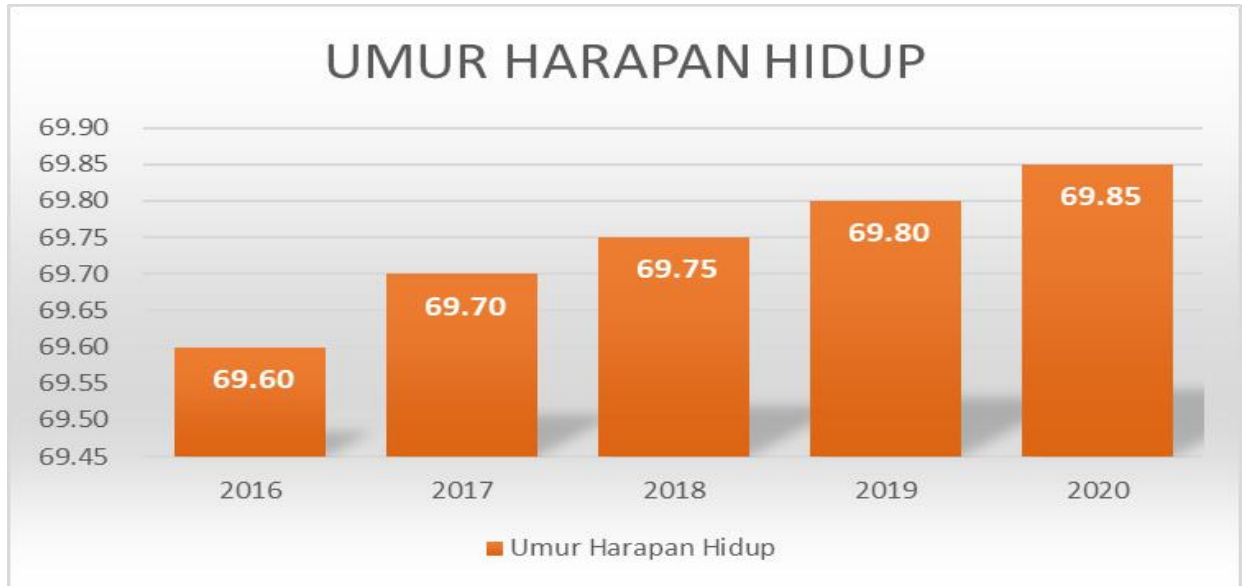
Tabel 2.26 Harapan dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah
2011	10,47	7,39
2012	10,89	7,48
2013	11,82	7,59
2014	12,04	7,69
2015	12,05	7,70
2016	12,21	7,88
2017	12,59	7,89
2018	12,68	7,90
2019	12,69	8,12
2020	12,84	8,13

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

b. Umur Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Data harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur ditunjukkan dalam umur harapan hidup yang berkisar pada rata-rata 69 tahun. Hingga tahun 2020 umur harapan hidup terus meningkat (Gambar 2.17).



Gambar 2.17 Dinamika Umur Harapan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur
Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

c. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020 sebesar 49.97 persen diantaranya adalah kelompok barang makanan dan 50.03 persen lainnya adalah kelompok bukan makanan. Dari kelompok barang makanan, komponen paling besar dalam pengeluaran per kapita adalah makanan minuman jadi yaitu sebesar 12,75 persen diikuti oleh Tembakau dan siri 6,25 persen dan padi-padian 5,85 persen. Masuknya tembakau/sirih kedalam 3 pengeluaran makanan teratas menjadi indikasi bahwa banyaknya penduduk yang mengkonsumsi rokok dalam kesehariannya, bahkan pengeluarannya mengalahkan padi-padian seperti beras yang diketahui sebagai makanan pokok mayoritas penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara untuk kelompok bukan makanan, komponen pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan, bahan bakar, penerangan dan air yaitu sebesar 27,76 persen. Angka ini turun 2,66 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 30,42 persen (Tabel 2.27-2.29 dan Gambar 2.18).

Tabel 2.27 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran dan Kelompok Barang di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020

Golongan Pengeluaran	Kelompok Barang (Rupiah)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
300.000--499.999	217.747	186.096	403.844
500.000—749.999	366.447	287.053	653.500
750.000—999.999	489.884	368.446	858.330
1.000.000—1.499.999	643.663	560.826	1.204.489
1.500.000+	1.074.678	1.379.309	2.453.987
Kotawaringin Timur	619.957	620.683	1.240.640

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.28 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

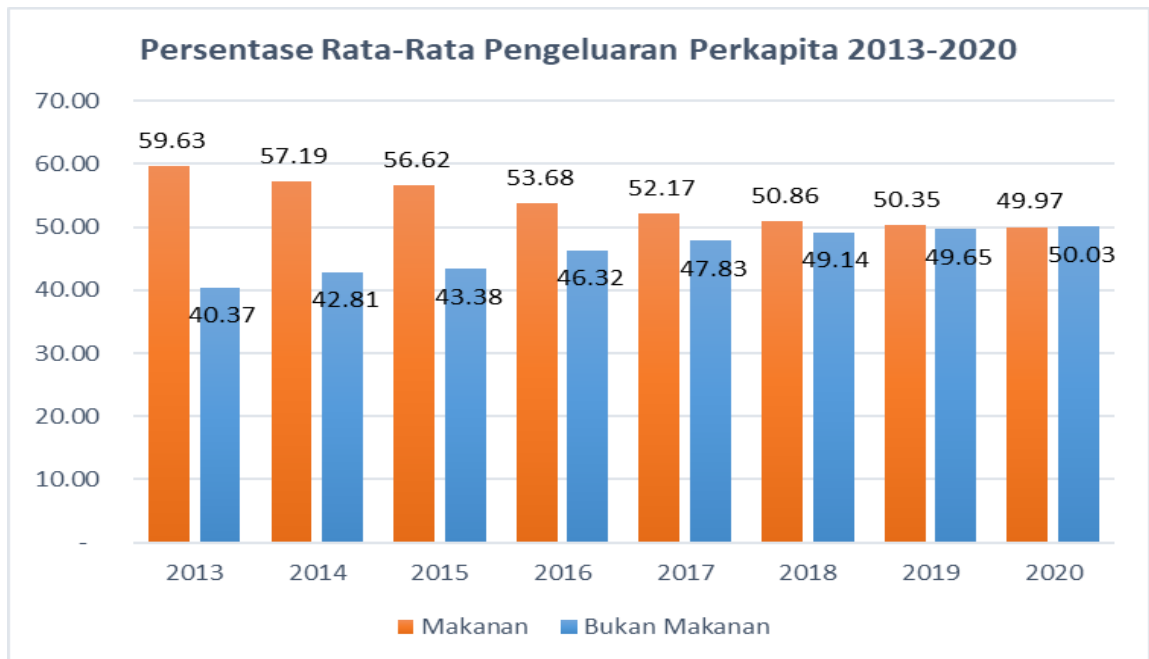
Golongan Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan		
	2018	2019	2020
Padi-padian	6.54	6.08	5.85
Umbi-umbian	0.31	0.37	0.35
Ikan	6.11	5.75	5.36
Daging	2.55	2.62	2.51
Telur dan Susu	3.71	3.12	3.47
Sayur-sayuran	3.89	3.59	4.10
Kacang-kacangan	1.01	0.89	1,06
Buah-buahan	2.24	2.13	2.59
Minyak dan lemak	1.32	1.19	1.19
Bahan minuman	1.90	1.61	1.97
Bumbu-bumbuan	1.37	1.21	1.31
Konsumsi lainnya	1.38	1.08	1.19
Makanan dan minuman jadi	11.64	13.70	12.75
Tembakau dan sirih	6.89	7.02	6.25
Kotawaringin Timur	52.17	50.35	49.97

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.29 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

Golongan Pengeluaran	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan		
	2018	2019	2020
Perumahan, bahan bakar, penerangan air	25.41	30.42	27.76
Aneka barang dan jasa	11.12	10.04	11.89
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2.25	2.59	2.32
Barang yang tahan lama	4.77	3.05	3.20
Pajak pemakaian dan premi asuransi	2.92	2.46	3.35
Keperluan pesta dan upacara	2.68	1.09	1.51
Kotawaringin Timur	47.83	49.65	50.03

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021



Gambar 2.18 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013-2020

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Nominal pengeluaran rata-rata konsumsi penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 sebesar 1.240.640 rupiah dengan pengeluaran makanan sebesar 619.957 rupiah dan bukan makanan 620.683 rupiah. Jika diperhatikan dari data tahun ke tahun, terlihat bahwa ada pergeseran komponen pengeluaran per kapita dari bahan makanan menjadi bahan bukan makanan. Secara teori kultur penduduk dengan komposisi pengeluaran non makanan yang semakin besar menandakan bahwa kemampuan ekonominya semakin membaik. Hal ini dikarenakan bahan makanan bukan lagi menjadi prioritas yang harus dipenuhi dalam rumah tangga nya.

2. Aspek Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Angka ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase pengangguran jika dibandingkan dengan tahun 2019. Besar peningkatannya adalah 0,78 persen atau dari 4,47 persen di tahun 2019 menjadi 5,25 persen di tahun 2020. Namun hal ini sejalan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK yang justru menurun dari 67,45 menjadi 67,41. TPAK menunjukan nilai rasio antara penduduk yang bekerja dengan penduduk usia 15 tahun keatas secara keseluruhan. Angka ini menunjukkan bahwa

sebagian jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja menurun dari tahun sebelumnya. Adapun menurut jenis kelaminnya, angka TPAK laki-laki masih jauh lebih tinggi dibanding perempuan. Nilainya hampir dua kali lipat yaitu 85,04 sedangkan TPAK perempuan hanya 46,02. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur banyak yang tidak bekerja jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki yang tidak bekerja. Apabila dikaji lebih dalam, hal ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2020 terjadi lonjakan TPT Perempuan, hal ini merupakan indikasi yang jelas bahwa daya saing angkatan kerja perempuan sangat rentan terhadap terjadinya COVID-19. Statistik aspek ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel 2.30 dan Tabel 2.31.

Tabel 2.30 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020

Kegiatan Utama		Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
Jiwa	Angkatan Kerja			
	Bekerja	149.074	68.855	217.929
	Pengangguran Terbuka	6.293	5.783	12.076
	Sub Total	155.367	74.638	230.005
	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	12.007	11.148	23.155
	Mengurus Rumah Tangga	4.263	71.180	75.443
	Lainnya	8.938	3.660	12.598
	Sub Total	25.208	85.988	111.196
	Total	180.575	160.626	341.201
Persen	TPAK	85.04	47.02	67.41
	TPT	4,05	7,75	5,25

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.31 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018-2020

Kegiatan Utama		Tahun		
		2018	2019	2020
Jiwa	Angkatan Kerja			
	Bekerja	217.556	220.036	217.929
	Pengangguran Terbuka	10.362	10.287	12.076
	Sub Total	227.918	230.323	230.005
	Bukan Angkatan Kerja			
	Sekolah	22.698	32.325	23.155
	Mengurus Rumah Tangga	71.580	69.882	75.443
	Lainnya	10.490	8.961	12.598
	Sub Total	104.768	111.168	111.196
	Total	332.686	341.491	341.201
Persen	TPAK	68.51	67.45	67.41
	TPT	4.55	4.47	5,25

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat angkatan kerja Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkat seiring dengan peningkatan TPAK dan penurunan TPT. Hal ini mengindikasikan aspek ketenagakerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur

terus menunjukkan tren positif selama kurun waktu 2018-2020. Ketenagakerjaan dibahas secara mendalam berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja				Bukan Angkatan Kerja	Pencari Kerja Terdaftar	Persentase Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase Bekerja			
≤ Sekolah Dasar (SD)	92.495	2.471	94.966	97,40	48.526	143.492	66,18
Sekolah Menengah Pertama	45.533	1.785	47.318	96,23	31.639	78.957	59,93
Sekolah Menengah Atas	59.050	5.673	64.723	91,23	28.529	93.252	69,41
Perguruan Tinggi	20.851	2.147	22.998	90,66	2.502	25.500	90,19
Kotawaringin Timur	217.929	12.076	230.005	94,75	111.196	341.201	67,41

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Kotawaringin Timur masih didominasi oleh lapangan pekerjaan utama Jasa. Jumlahnya cukup jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lapangan pekerjaan lain yaitu sebesar 99.972 jiwa disusul oleh lapangan pekerjaan utama Pertanian yang berjumlah 84.658 jiwa serta terakhir lapangan pekerjaan utama Industri yang berjumlah 33.299 jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih signifikannya jasa dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Menurut status pekerjaannya, penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Kotawaringin Timur 2020 mayoritas adalah buruh/karyawan/pegawai. Sebesar 93.387 penduduk 15 tahun keatas yang bekerja adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai. Adapun jumlah yang berusaha sendiri ada pada urutan kedua dengan 47.337 dan ketiga berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar dengan 28.137. Hal ini menunjukkan mulai tertariknya masyarakat untuk mengembangkan usaha sendiri/berwirausaha sendiri. Jika trend ini bisa terus dikembangkan akan memberikan dampak perekonomian yang lebih kuat dan pembukaan lapangan usaha yang lebih luas untuk penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.33 Data Ketenagakerjaan Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Lapangan Pekerjaan	Jenis Kelamin (jiwa)			Upah Pekerja Formal (Rp)	Upah Pekerja Informal (Rp)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
Pertanian	65.205	19.453	2.278.328	2.278.328	1.500.226
Industri	28.856	4.443	2.652.308	2.652.308	2.225.552
Jasa	55.013	44.959	2.554.568	2.554.568	2.262.775
Kotawaringin Timur	149.074	68.855	2.493.878	2.493.878	1.878.880

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Secara makro, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kualitas tenaga kerja dapat diamati dari 2 indikator yakni Produktivitas Total Daerah dan Rasio Ketergantungan. Produktivitas total daerah secara implisit menyatakan kontribusi tiap tenaga kerja terhadap nilai tambah pada tiap sektor penyusun PDRB. Semakin tinggi nilainya maka produktivitas tenaga kerja semakin baik. Sebaliknya, Rasio ketergantungan secara implisit menyatakan beban (usia non produktif) yang ditanggung oleh tiap usia kerja. Semakin tinggi angkanya maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung. Tren kedua indikator tersebut selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.34 sebagai berikut:

Tabel 2.34 Produktivitas Total Daerah Dan Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas Total Daerah (juta rupiah per tenaga kerja)	NA	115,28	112,92	121,87*	123,70**
Rasio Ketergantungan (persen)	43,60	43,87	43,36	35,66	41,04

Sumber: BPS Prov. Kalteng (berbagai tahun terbitan, diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**): angka sangat sementara

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kualitas tenaga kerja selama 5 tahun terakhir semakin meningkat yang terlihat dari tren positif produktivitas total daerah, namun beban yang ditanggung oleh tiap tenaga kerja juga semakin meningkat.

2.2.3 Fokus Kebudayaan

Pembangunan urusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bertujuan agar setiap komponen masyarakat tetap memegang teguh kearifan lokal dalam setiap aspek aktivitas kehidupannya. Indikator capaian pembangunan urusan kebudayaan adalah melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (Tabel 2.35).

Tabel 2.35 Indikator Capaian Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (Event yang diikuti dan diselenggarakan)	18	14	18	14	1
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2020

Pada tahun 2020 event yang diselenggarakan hanya 1 (satu) karena pada bulan Maret mulai kasus Covid-19 masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari itu dilakukan kebijakan pembatalan terkait event-event yang rencana akan dilaksanakan, adapun sarana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berupa sanggar seni sampai tahun 2020 ada 4 (empat) buah yang rata-rata berada di Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang, sedangkan Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya sampai tahun 2020 yang dilestarikan tetap 33 (tiga puluh tiga) yang tersebar di beberapa kecamatan.

2.2.4 Fokus Kepemudaan dan Olah Raga

Pembangunan bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Ketersediaan fasilitas olahraga menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Menurut data Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah fasilitas olahraga tahun 2020 sebanyak 292 unit. Jumlah ini terdiri dari bangunan fisik berupa lapangan, gedung serbaguna, kolam renang, sangar senam sampai dengan taman bermain. Terhitung sejak 2020, beberapa fasilitas olahraga yang berskala kecil seperti lapangan tenis meja tidak lagi masuk dalam kategori aset fasilitas olahraga dengan alasan mudah mengalami kerusakan dan tidak bertahan lama. Data fasilitas olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.36. Indikator capaian pembangunan urusan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.36 Fasilitas Olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Fasilitas Olahraga	Jumlah
1	Gedung Serba Guna	1
2	Lapangan Voli	103
3	Lapangan Basket	5
4	Lapangan Sepak Bola	96
5	Lapangan Bulu Tangkis	42
6	Taman Bermain	4
7	Tenis Meja	8
8	Sanggar Senam	5
9	Lapangan Golf	1
10	Kolam Renang	4
12	Lapangan Futsal	12
13	Lapangan Tennis	7
14	Lapangan Takraw	4
Kotawaringin Timur		292

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga. 202 dan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021.

Tabel 2.37 Indikator Capaian Urusan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga. 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2021.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Indikator pembangunan pendidikan kabupaten didasarkan pada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). APM adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. APK Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa

dari kelompok usia sekolah tertentu. - Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APM dan APK Kabupaten Kotawaringin Timur untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat Tabel 2.38.

Tabel 2.38 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Jenjang Pendidikan		APM Net Enrollment Rate					APK Gross Enrollment Rate				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
PAUD		19.84	27.77	29.80	29.80	29.80	88.48	89.95	49.26	49.10	49.10
SD/MI		90.03	89.81	88.32	89.43	97.92	103.88	102.84	100.61	101.43	104.66
SMP/MTs		62.30	62.30	62.44	62.72	77.95	82.87	82.22	84.68	84.69	92.83
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI											
No	Aspek	2016	2017	2018	2019	2020					
a.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	99.00	98.90	99.23	99.10	89.00					
b.	Jumlah Lembaga	266	272	296	312	324					
c.	Proses Akreditasi Lembaga	12%	16%	33%	33.50%	40%					
d.	Peserta Didik Usia 0-6 Tahun	8687	9956	11052	12698	14925					
e.	Peserta Didik Usia 4-6 Tahun	7677	7032	7970	8989	10876					
PENDIDIKAN DASAR											
No	Aspek	2016	2017	2018	2019	2020					
a.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)										
	SD/MI (%)	97.10	97.50	97.60	98.00	98.90					
	SMP/MTS (%)	91.67	92.52	92.70	93.00	98.99					
b.	Usia 7 -12 Tahun (Jumlah)	43.289	43.291	43.294	43.297	43.297					
c.	Usia 13 - 15 Tahun (Jumlah)	14.430	14.431	14.433	14.435	14.435					
d.	Anak Putus Sekolah SD (%)	0.38	0.33	0.28	0.23	0.23					
e.	Anak Putus Sekolah SMP (%)	0.41	0.36	0.31	0.26	0.26					
f.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata	1:30	1:30	1:25	1:23	1:23					
g.	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata Pendidikan Dasar	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20					

Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id>, 2021, Dinas Pendidikan Kab. Kotim. 2021

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), serta Satuan PAUD Sejenis (SPS). Data jumlah satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39 Jumlah Satuan PAUD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	TK/RA			KB			TPA			SPS			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	0	17	17	0	3	3	0	0	0	0	0	0	20
Teluk Sampit	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Pulau Hanaut	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Mentawa Baru/Ketapang	1	53	54	0	12	12	0	1	1	0	1	1	68
Seranau	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Mentaya Hilir Utara	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	0	0	12
Kota Besi	1	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Telawang	1	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Baamang	0	30	30	0	11	11	0	1	1	0	0	0	42
Cempaga	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	14
Cempaga Hulu	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Parenggean	1	29	30	0	4	4	0	0	0	0	3	3	37
Tualan Hulu	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	1	1	13
Mentaya Hulu	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	0	0	21
Bukit Santuai	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Antang Kalang	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Telaga Antang	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021

b. Sekolah Dasar

Sekolah dasar terdiri atas sekolah dasar reguler (SD) dan satuan pendidikan kerjasama sekolah dasar (SPK SD) baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta. Data jumlah satuan sekolah dasar di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40 Jumlah Satuan SD di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	SD + SPK SD			MI			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	22	1	23	0	5	5	28
Teluk Sampit	10	0	10	0	1	1	11
Pulau Hanaut	19	0	19	0	5	5	24
Mentawa Baru/Ketapang	34	9	43	1	3	4	47
Seranau	12	1	13	0	1	1	14
Mentaya Hilir Utara	13	2	15	0	2	2	17
Kota Besi	20	0	20	0	0	0	20
Telawang	15	4	19	0	0	0	19
Baamang	21	2	23	0	2	2	25
Cempaga	21	2	23	1	2	3	26
Cempaga Hulu	20	4	24	0	2	2	26

Kecamatan	SD + SPK SD			MI			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	22	1	23	0	5	5	28
Parenggean	21	2	23	0	1	1	24
Tualan Hulu	11	6	17	0	0	0	17
Mentaya Hulu	22	12	34	0	2	2	36
Bukit Santuai	12	5	17	0	0	0	17
Antang Kalang	16	4	20	0	2	2	22
Telaga Antang	18	3	21	0	0	0	21
Kotawaringin Timur	307	57	364	2	28	30	394

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Pengukuran kualitas pendidikan didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid, dan Rasio guru-murid. Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid sebagai indikator kemampuan unit sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah / Jumlah Murid	Jumlah Murid	54.814	54.745	53.879	53.470	51.890
	Jumlah Sekolah	368	369	369	397	394
	Rasio (%)	149.0	148.4	146.0	134.7	131,7

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Rasio guru-murid sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar, semakin rendah rasionya maka semakin baik karena menggambarkan intensifitas kegiatan belajar mengajar. Rasio guru-murid pada Tabel 2.42

Tabel 2.42 Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar dengan Penduduk Usia Sekolah Dasar Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru-Murid	Jumlah Guru	3.448	3.108	3.188	3.142	3.170
	Jumlah Murid	54.814	54.745	53.879	53.470	51.890
	Rasio	15	17	16	17	17

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

c. Sekolah Menengah Pertama

Sekolah menengah pertama terdiri atas sekolah menengah pertama reguler (SMP) dan satuan pendidikan kerjasama sekolah menengah pertama (SPK SMP) baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta. Data jumlah satuan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kotawaringin Timur per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43 Jumlah Satuan SMP di Kabupaten Kotawaringin Timur per Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	SMP + SPK SMP			MTs			Total
	N	S	Jml	N	S	Jml	
Mentaya Hilir Selatan	3	1	4	1	2	3	7
Teluk Sampit	4	0	4	0	1	1	5
Pulau Hanaut	6	0	6	0	1	1	7
Mentawa Baru/Ketapang	6	8	14	1	3	4	18
Seranau	4	1	5	0	0	0	5
Mentaya Hilir Utara	3	2	5	0	0	0	5
Kota Besi	5	1	6	0	1	1	7
Telawang	4	3	7	0	1	1	8
Baamang	5	3	8	0	3	3	11
Cempaga	4	0	4	0	1	1	5
Cempaga Hulu	5	2	7	0	1	1	8
Parenggean	8	1	9	0	2	2	11
Tualan Hulu	2	1	3	0	0	0	3
Mentaya Hulu	5	4	9	0	1	1	10
Bukit Santuai	2	2	4	0	0	0	4
Antang Kalang	7	0	7	0	0	0	7
Telaga Antang	4	1	5	0	1	1	6
Kotawaringin Timur	77	30	107	2	18	20	127

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021 Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Pengukuran kualitas pendidikan didasarkan pada 2 (dua) metode yaitu Rasio ketersediaan sekolah dasar dengan jumlah murid, dan Rasio guru-murid. Rasio ketersediaan sekolah menengah pertama dengan jumlah murid sebagai indikator kemampuan unit sekolah melaksanakan kegiatan pendidikan menengah pertama dapat dilihat pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Sekolah / Jumlah Murid	Jumlah Murid	18.124	18.504	18.597	18.888	23.682
	Jumlah Sekolah	108	109	108	127	128
	Rasio (%)	167.8	169.8	172.2	148.7	185,0

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Rasio guru-murid sebagai indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar, semakin rendah rasionya maka semakin baik karena menggambarkan intensifitas kegiatan belajar mengajar. Rasio guru-murid pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama dengan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru-Murid	Jumlah Guru	1.219	1.132	1.115	1.121	1.405
	Jumlah Murid	18.124	18.504	18.597	18.888	23.682
	Rasio	14.9	16.3	16.7	16.8	16,0

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id> . 2021, Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

d. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) ini adalah seberapa besar persentase siswa yang melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA. Indikator AM adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase (Tabel 2.46).

Tabel 2.46 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melanjutkan (AM)	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
	AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97,91	98,91	98,95	98,96	98,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi sekolah khususnya ruang kelas menjadi indikator kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai tingkatan pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Ruang Kelas Bangunan Baik	Sekolah PAUD (%)	87	88	80	90	91
	Sekolah Pendidikan SD/MI (%)	73	74	75	76	77
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs (%)	64,50	66,00	67,50	69,00	69,50

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

f. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Kualifikasi tenaga pendidik dengan pendidikan S1/D-IV/S2/S3 menggambarkan perkembangan kualitas tenaga pendidik sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar. Data kondisi fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48 Perkembangan Kondisi Fasilitas Pendidikan (Ruang Kelas) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

Indikator	Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Kualifikasi Tenaga Pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3 (%)	40,39	45,50	60,00	65,00	69,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

g. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan dengan jumlah PKBM dan SKB serta peserta didik yang meningkat setiap tahunnya. Data kondisi pendidikan kesetaraan dapat dilihat pada Tabel 2.49.

Tabel 2.49 Perkembangan Kondisi Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKBM dan SKB	12	12	12	14	14
Jumlah Peserta Didik	883	955	1377	1488	1849
Jumlah Guru	56	56	67	75	57

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan rangkaian upaya yang secara sadar dilakukan masyarakat untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Hasilnya dapat dirasakan bila terjadi perubahan ataupun peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam rentang waktu tertentu. Program pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kesepakatan global, nasional, serta renstra Kabupaten.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dan diharapkan dapat menyentuh semua aspek kehidupan dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang ditandai perilaku bersih dan sehat, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta seharusnya memiliki derajat kesehatan yang optimal.

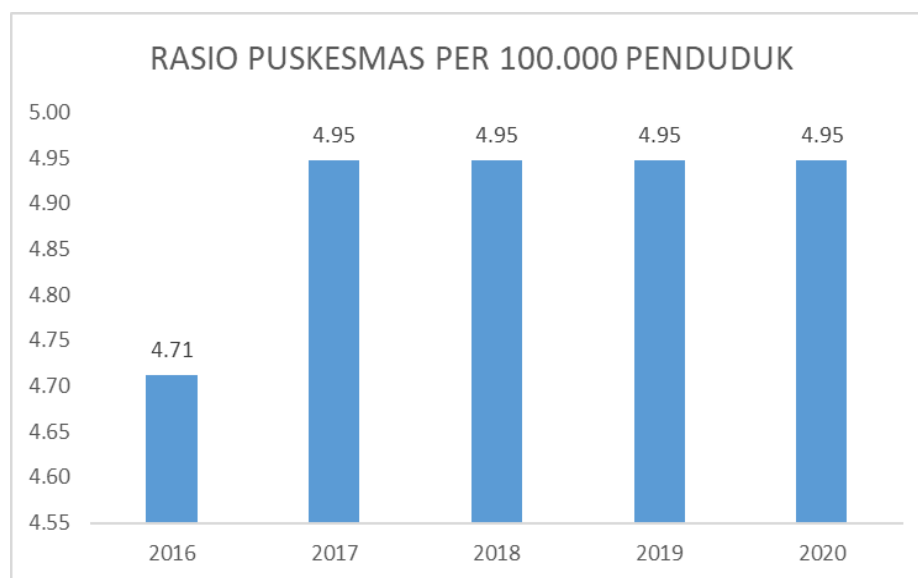
Derajat kesehatan yang optimal bisa tercapai, apabila sarana kesehatan memadai dan sumber daya kesehatan (SDM) dalam memberikan pelayanan terpenuhi. Saran kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini terdiri dari puskesmas, rumah sakit dan sarana kefarmasian.

A. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, kinerjanya sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 sebanyak 21 unit yang terdiri dari 8 puskesmas perawatan dan 13 puskesmas non perawatan.

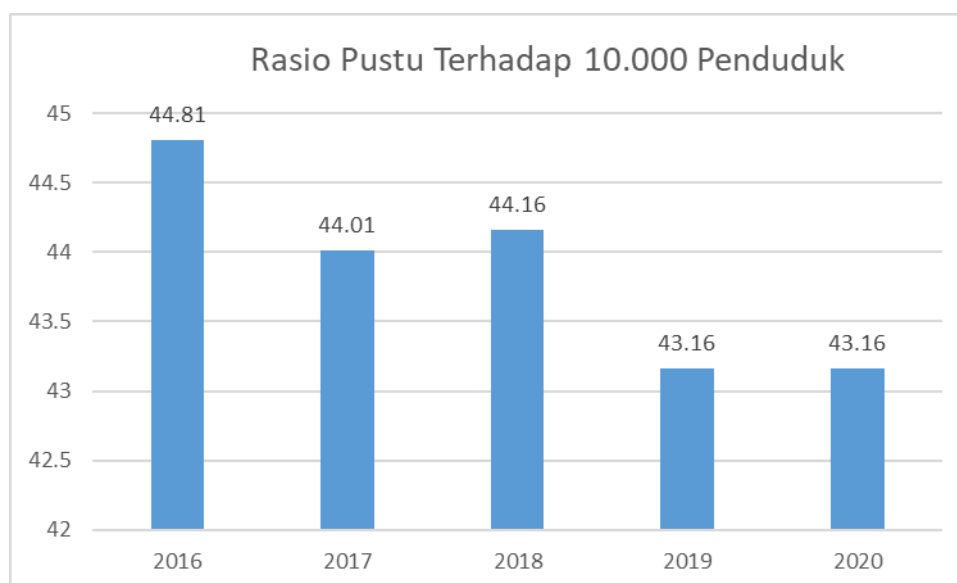
Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk sebesar 4,8 atau 5 puskesmas. Ini berarti setiap 100.000 penduduk dilayani 5 unit puskesmas atau setiap puskesmas melayani kurang lebih 20.000 jiwa.



Gambar 2.19 Perkembangan Jumlah Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021

Upaya Kabupaten Kotawaringin Timur dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di desa-desa salah satunya dengan peningkatan sarana puskesmas pembantu. Rasio puskesmas pembantu terhadap 10.000 penduduk pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.19 sebagai berikut :



Gambar 2.20 Perkembangan Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021

Rasio tertinggi terdapat pada tahun 2016 yaitu 44,81 puskesmas pembantu terhadap 10.000 penduduk dengan jumlahnya sebanyak 141 puskesmas pembantu. Sedangkan rasio terendah pada tahun 2020. Jumlah puskesmas pembantu di

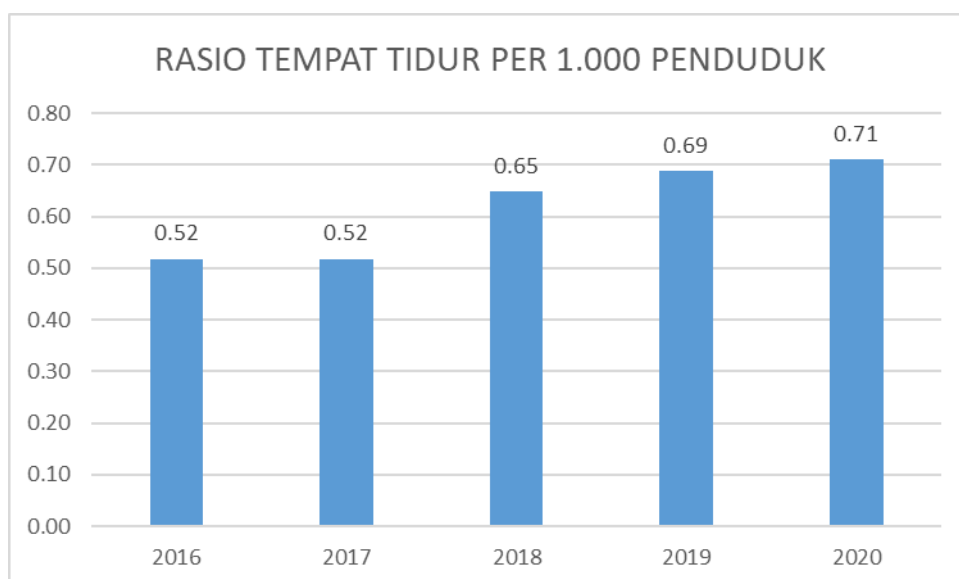
Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 sebanyak 145. Rasio terhadap 10.000 penduduk sebesar 43,16 puskesmas pembantu.

B. Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan dari beberapa sarana kesehatan seperti puskesmas dan klinik baik yang berstatus kepemilikan pemerintah maupun swasta.

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana rumah sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah rumah sakit dan tempat tidurnya serta rasionya terhadap jumlah penduduk. Selain rumah sakit dr. Murjani Sampit dengan type B, terdapat dua rumah sakit pratama di Kecamatan Parenggean dan di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Rasio tempat tidur dalam lima tahun terakhir 0,52 - 0,71 atau dalam 1.000 penduduk sebesar kurang dari 1 tempat tidur menurut standar WHO 5 tt : 1.000 penduduk artinya masih terdapat atau belum sesuai target.

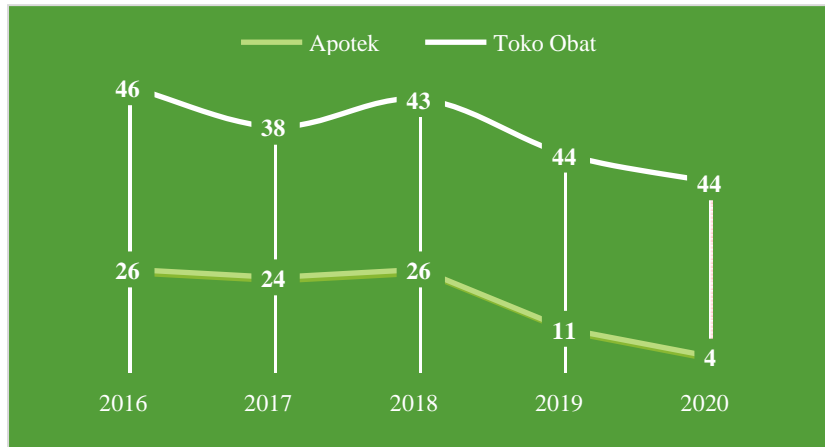


Gambar 2.21 Rasio Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit Per 1000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2021

C. Sarana Kefarmasian

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan ketersediaan sarana kesehatan adalah jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. Tahun 2020 di Kabupaten Kotawaringin Timur ada 1 pedagang besar farmasi. Sedangkan jumlah apotek dan toko obat di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.22 sebagai berikut :



Gambar 2.22 Perkembangan Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020

Sarana kesehatan selain Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana kefarmasian, ada juga sarana kesehatan yang bersumber dari masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Polindes/Poskesdes, Posbindu, Toga, pos obat desa dan sebagainya.

D. Pos Pelayanan Terpadu

Posyandu menyelenggarakan minimal lima program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare. Penyelenggaraan Posyandu bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi, dan ibu –ibu hamil, melahirkan nifas), membudayakan keluarga kecil bahagia sejahtera, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan kesehatan, KB dan lainnya dan sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera.

Banyaknya Posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 berjumlah 331 posyandu, namun yang aktif (posyandu dengan strata purnama dan mandiri) hanya 5,7%. Rasio perkembangan jumlah posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020 terhadap balita di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar 2.23 sebagai berikut :

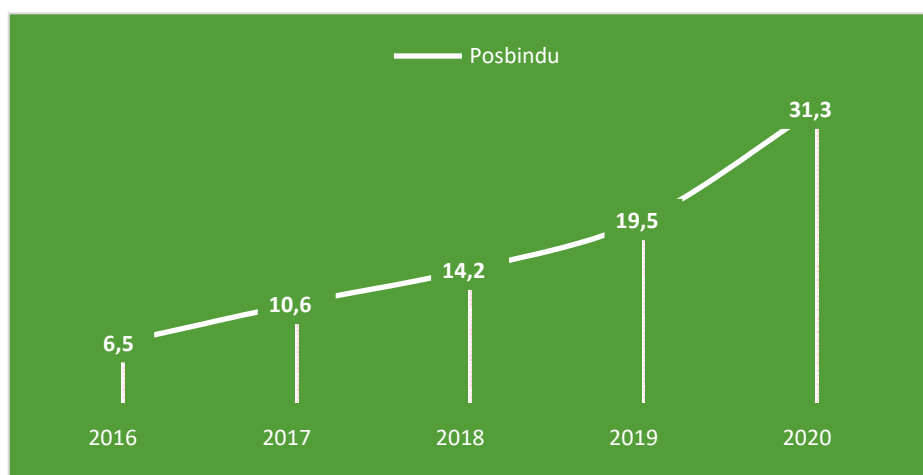


Gambar 2.23 Rasio Posyandu terhadap Balita di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kotim Tahun 2020

E. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)

Posbindu merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindaklanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Posbindu mulai dibentuk pada tahun 2015. Jumlah Posbindu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 143 posbindu. Perkembangan Posbindu di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar 2.24 sebagai berikut :



Gambar 2.24 Perkembangan Persentase Jumlah Posbindu di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Bidang P2P Dinkes Kotim Tahun 2020

Gambar 2.24 menunjukkan persentase jumlah Posbindu dalam 100.000 penduduk selama lima tahun terakhir. Persentase terkecil pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,5%. Sedangkan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 31,3% posbindu dalam 100.000 penduduk. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019 yaitu 19,5% posbindu dalam 100.000 penduduk.

Didalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat disamping sarana kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting didalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu. Sumber daya manusia kesehatan di daerah terdiri dari sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di unit kesehatan (sarana pelayanan dan non pelayanan) di kabupaten dan kecamatan. Sumber daya manusia Kesehatan tersebut bekerja di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas.

Data Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terkumpul dari 17 kecamatan belum sepenuhnya dapat menggambarkan SDM Kesehatan secara lengkap. Hal ini dikarenakan belum memiliki data SDM Kesehatan secara lengkap dari sarana kesehatan yang ada di kecamatan yaitu klinik-klinik swasta.

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat.

Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

F. Jumlah Rasio Dokter di Sarana Kesehatan

Jumlah tenaga dokter yang tersebar di puskesmas tahun 2020 sebanyak 61 dokter, sedangkan di rumah sakit sebanyak 72 dokter. Maka rasio dokter dan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 1:3432. Bila dilihat rasio ideal WHO dokter dan penduduk adalah 1:2500, maka dokter yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini belum memenuhi standar ideal.

Tabel 2.50 Perkembangan Capaian Rasio Dokter Per satuan Penduduk di Kab. Kotawaringin Timur tahun 2016-2020

No.	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	27,68	24,07	23,54	29,14	29,14

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020

G. Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan dan Kebidanan di Sarana Kesehatan

Tenaga keperawatan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas tenaga kesehatan yang berlatar belakang pendidikan SPK, DIII Keperawatan, S1 Keperawatan dan S2 Keperawatan. Jumlah tenaga kesehatan perawat di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 sebanyak 577 perawat, maka rasio perawat dengan penduduk 1:791 orang. Jika melihat rasio perawat ideal yaitu 1:800-1000 orang, maka perawat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum memenuhi standar rasio perawat ideal. Sedangkan untuk tenaga kebidanan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas bidan yang berasal dari lulusan PPB A, PPB C, D3/D4 kebidanan dan S1 Kebidanan. Jumlah tenaga kesehatan bidan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 348 bidan, dengan rasio 1:1312 orang. Bila dilihat dari rasio jumlah ideal (rasio bidan 1:1000 orang) kebutuhan bidan di Kabupaten Kotawaringin Timur belum terpenuhi. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan tersebut adalah melalui pengangkatan tenaga kontrak yang ditempatkan di desa-desa yang masih kekurangan. Rasio tenaga keperawatan dan kebidanan dapat dilihat pada tabel 2.51 sebagai berikut :

Tabel 2.51 Rasio Tenaga Keperawatan dan Kebidanan Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No.	Tenaga Keperawatan/bidan	Absolut	Rasio
1	Perawat	577	126
2	Bidan	348	76

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinkes Kotim 2020

H. Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Sarana Kesehatan

Tenaga kesehatan masyarakat merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Hal ini didasarkan atas kewajiban utama tenaga kesehatan masyarakat bersama dengan tenaga kesehatan lainnya adalah untuk mengupayakan masyarakat agar hidup sehat dan sejahtera baik dari segi fisik, mental, sosial dan ekonomi. Jumlah tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 6 orang.

Tenaga kesehatan lingkungan atau Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Sanitarian bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk mengelola dan menegakkan undang-undang yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan memberikan dukungan untuk meminimalkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja. Jumlah tenaga kesehatan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 27 orang.

Tenaga gizi merupakan tenaga kesehatan yang berperan melakukan pelayanan gizi yaitu suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Jumlah tenaga gizi di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebanyak 41 orang. Berikut rasio tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan gizi :

Tabel 2.52 Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi Per 100.000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No.	Tenaga Keperawatan/bidan	Absolut	Rasio
1	Kesehatan Masyarakat	6	1
2	Kesehatan Lingkungan	27	6
3	Gizi	41	9

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinkes Kotim 2020

I. Jumlah dan Rasio Tenaga Teknik Biomedika, Keterampilan Fisik dan Keteknisian Medik di Sarana Kesehatan

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlunya teknologi kesehatan berupa alat-alat medis. Dengan demikian, dibutuhkannya tenaga teknik biomedika yaitu tenaga ahli dibidang teknologi alat-alat medis agar alat-alat

kesehatan memiliki manfaat dan kualitas yang baik. Jumlah Tenaga teknik biomedika di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 11 orang.

Tenaga keterampilan fisik merupakan tenaga kesehatan yang menangani masalah kesehatan dan rehabilitasi seputar fisik manusia. Jumlah tenaga keterampilan fisik di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 6 orang.

Keteknisian medik terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Jumlah tenaga keteknisian medik di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 48 orang.

Ahli laboratorium medik adalah tenaga kesehatan dan ilmuwan berketerampilan tinggi yang melaksanakan dan mengevaluasi prosedur laboratorium dengan memanfaatkan berbagai sumber daya. Jumlah tenaga ahli laboratorium medik di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 15 orang.

Rasio teknik biomedika, keterampilan fisik, keteknisian medik dan ahli laboratorium medik di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 2.53 sebagai berikut :

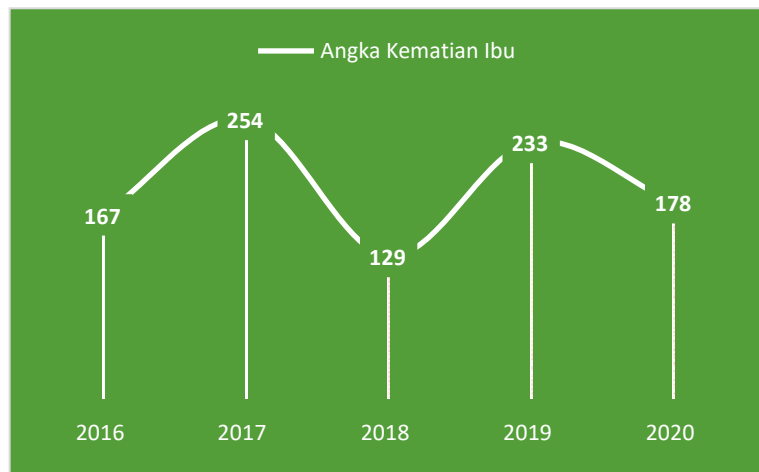
Tabel 2.53 Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No.	Tenaga Kesehatan	Absolut	Rasio
1	Teknik Biomedika	11	2
2	Keterampilan Fisik	6	1
3	Keteknisian Medis	48	11
4	Ahli Laboratorium Medik	15	3

Sumber : Subbag Kepegawaian Dinkes Kotim 2020

J. Jumlah dan Angka Kematian Ibu

AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.25 sebagai berikut:



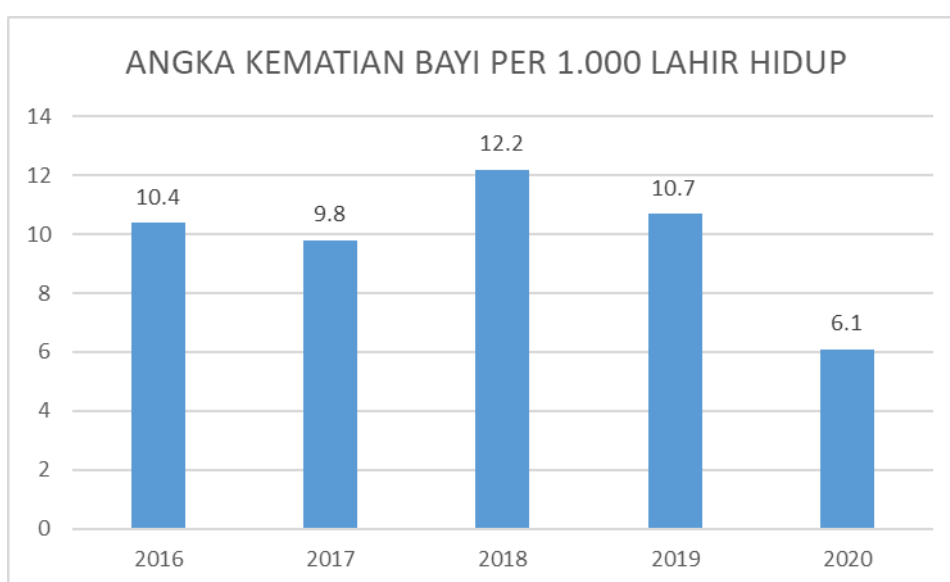
Gambar 2.25 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kotim Tahun 2020

Gambar 2.22 menunjukkan angka kematian ibu tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun tidak serendah tahun 2018. Angka kematian tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 178 dari 9.012 perempuan jumlah lahir hidup. Sehingga didapat angka kematian ibu sebesar 178.

K. Jumlah dan Angka Kematian Bayi dan Balita Per-1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggalnya. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil. Jumlah dan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.26 berikut :



Gambar 2.26 Jumlah dan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup (Dilaporkan) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Sumber : Bidang Kesmas Dinkes Kotim Tahun 2021

Di Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah kematian balita yang dilaporkan pada tahun 2020 adalah sebesar 6 anak balita, dengan AKABA sebesar 0,6 per 1000 kelahiran hidup. Dalam 5 tahun terakhir baik jumlah maupun angka kematian balita tertinggi terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah pada tahun 2020.

L. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

Yang dimaksud dengan komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sedangkan Penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi kebidanan yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 2.54 berikut :

Tabel 2.54 Capaian indikator Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	68.10	39.81	65.02	58.43	78.01

Sumber : Profil Kesehatan 2020

Dalam lima tahun terakhir penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Kotawaringin Timur tertinggi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2017. Pada tahun 2019 sebesar 58,4% dengan jumlah 1.199 dari perkiraan 20% dari jumlah ibu hamil yaitu 2.053 ibu hamil, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 65%.

M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian UCI (Universal Child Immunization) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan imunisasi secara lengkap pada kelompok bayi. Cakupan UCI menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Kementerian kesehatan menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa atau kelurahan. Pencapaian UCI di Kabupaten Kotawaringin Timur selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55 sebagai berikut :

Tabel 2.55 Persentase Desa *Universal Child Immunization (UCI)* di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60.0	55.14	79.46	65.41	65.41

Sumber : Profil Kesehatan, 2020

Tabel 2.55 menunjukkan pencapaian UCI kumulatif di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020 masih berkisar 55%-79,5%. Dengan jumlah

desa atau kelurahan sebanyak 185, sedangkan desa atau kelurahan UCI banyak 121. Sehingga cakupannya sebesar 65,4%, masih di bawah target yaitu 90%. Mobilitas masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang masih tinggi dan data bayi yang belum riil menyebabkan masih belum tercapainya target UCI imunisasi desa/kelurahan.

N. Penyakit Tuberculosis / TB Paru

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan TB adalah *Case Notifikasi Rate* (CNR), yaitu angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk dalam wilayah tertentu.

Tuberculosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium Tuberculosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak (*droplet nuclei*). Sekali batuk dapat menghasilkan sekitar 3000 percikan dahak.

Di Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar mencapai 100%. Sedangkan untuk penemuan kasus TB dengan BTA positif selama tahun 2016-2020 dalam 100.000 penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.56 sebagai berikut:


Tabel 2.56 CNR Seluruh Kasus TBC di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2020

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tuberculosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Profil Kesehatan 2020

Tabel 2.57 CNR Seluruh Kasus TBC di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

NO.	FASKES	TARGET KASUS BARU	TARGET SASARAN TERDUGA TB	PENEMUAN ORANG TERDUGA TB				TOTAL PENEMUAN	CAPAIAN TARGET KASUS BARU				TOTAL CAPAIAN	CDR				CDR 2020	CAPAIAN SPM				SPM 2020
				I	II	III	IV		I	II	III	IV		TW I	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Ujung Pandaran	25	137	14	2	40	11	67	5	2	8	0	15	79%	31%	126%	0%	59%	41%	6%	116%	32%	49%
2	Samuda	59	320	81	44	28	94	247	12	7	5	5	29	81%	47%	34%	34%	49%	101%	55%	35%	117%	77%
3	Bapinang	44	238	6	3	12	3	24	3	3	3	1	10	27%	27%	27%	9%	23%	10%	5%	20%	5%	10%
4	Bagendang	44	236	18	12	7	4	41	8	2	5	6	21	73%	18%	46%	55%	48%	31%	20%	12%	7%	17%
5	Ketapang I	96	516	71	16	6	67	160	5	7	6	8	26	21%	29%	25%	33%	27%	55%	12%	5%	52%	31%
6	Ketapang II	101	545	82	40	60	35	217	23	9	11	8	51	91%	36%	44%	32%	51%	60%	29%	44%	26%	40%
7	Pasir Putih	17	93	8	2	7	9	26	7	4	6	6	23	163%	93%	139%	139%	134%	34%	9%	30%	39%	28%
8	Mentaya Seberang	27	144	18	18	18	9	54	3	3	6	6	6	45%	45%	0%	0%	23%	50%	50%	50%	0%	38%
9	Baamang I	88	475	70	19	26	23	138	20	5	5	2	32	91%	23%	23%	9%	36%	59%	16%	22%	19%	29%
10	Baamang II	57	308	12	13	13	25	63	14	9	2	7	32	98%	63%	14%	49%	56%	16%	0%	17%	0%	8%
11	Kota Besi	47	254	15	13	13	10	51	8	3	6	10	27	68%	26%	51%	85%	57%	24%	20%	20%	16%	20%
12	Cempaka Mulia	63	338	54	27	53	29	163	10	4	6	4	24	64%	26%	38%	26%	38%	64%	32%	63%	34%	48%
13	Pundu	76	412	15	8	15	15	53	8	5	3	9	25	42%	26%	16%	47%	33%	15%	8%	15%	15%	13%
14	Parenggean I	57	309	44	14	7	20	85	11	8	4	10	33	77%	56%	28%	70%	58%	57%	18%	9%	26%	27%
15	Parenggean II	18	99	7	3	3	3	16	7	3	3	3	16	153%	65%	65%	65%	87%	28%	12%	12%	12%	16%
16	Kuala Kuayan	73	396	21	4	9	4	38	8	3	6	4	21	44%	16%	33%	22%	29%	21%	4%	9%	4%	10%
17	Tumbang Sangai	52	279	12	15	18	6	51	9	9	10	5	33	70%	70%	77%	39%	64%	17%	22%	26%	9%	18%
18	Tumbang Kalang	40	215	10	10	3	12	35	9	1	3	11	24	90%	10%	30%	110%	60%	19%	19%	6%	22%	16%
19	Sebati	53	285	42	4	32	10	88	12	2	4	6	24	91%	15%	30%	45%	45%	59%	6%	45%	14%	31%
20	Tumbang Penyahuan	27	145	2	8	17	3	30	4	4	5	3	16	59%	59%	74%	45%	59%	6%	22%	47%	8%	21%
21	Tualan Hulu	25	136	3	2	1	1	7	1	1	2	1	5	16%	16%	32%	16%	20%	9%	6%	3%	3%	5%
22	RSUD dr. Murjani			270	135	139	141	685	2	5	3	1	11										
	Kab. Kotawaringin Timur	1089	5881	875	399	527	500	2301	189	99	106	110	504	69%	36%	39%	40%	46%	60%	27%	36%	34%	39%

Keterangan:
 : Tidak ada laporan

O. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh asupan gizi waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar nasional.

Dampak stunting bukan sekadar tinggi badan anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya.

Berdasarkan data riset kesehatan daerah (Riskesdas) Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai Kabupaten dengan prevalensi tertinggi stuntingnya di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar 48,84%. Salah satu faktor yang menyumbang tingginya angka stunting di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur diantaranya asupan gizi yang tidak seimbang. Untuk itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berusaha menekan masalah stunting. Masalah stunting ini tidak lepas dari pola asuh dan juga bagaimana cara memberikan asupan gizi pada bayi dan juga balita.

Meski demikian, Dinkes hanya memiliki sekitar 30 persen saja terlibat dalam penanganan. “Stunting ini memang harus dilakukan secara kompak antar dinas terkait. Jadi, hal ini memang diharapkan dapat menjadi semangat bagi Kotawaringin Timur sendiri agar masalah stunting bisa berkurang dari tahun ke tahun.

Langkah penting lagi, dalam pencegahan stunting ini adalah peran orang tua dalam memberikan perhatian terhadap asupan gizi pada bayi atau balita. Mengingat, penanganan masalah stunting ini lebih banyak dilakukan oleh orang tua. “Mereka yang mengetahui tumbang kembang anaknya.

Pemerintah mendorong aksi konvergensi untuk percepat pencegahan stunting melalui intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama terhadap kelompok prioritas. Untuk mendorong percepatan penurunan angka stunting, setiap tahun ditjen Otda mengadakan lomba aksi konvergensi, yang diikuti oleh seluruh Kabupaten di Indonesia yang menjadi lokus stunting. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun melakukan penilaian aksi konvergensi stunting pada Kabupaten lokus, agar bisa diikuti pada tingkat Nasional.

Pada tahun 2019, dilakukan penilaian terhadap aksi 1-4 pada tiga Kabupaten lokus stunting, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Barito Timur dan Kapuas

dengan hasil Juara 1 Kabupaten kotawaringin Timur dan Juara II Kabupaten Barito Selatan dan Juara III.

Pada tahun 2020 , kembali dilakukan penilaian pada aksi 1 – 4 yang diikuti oleh lima Kabupaten lokus yakni Kabupaten Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Barito Timur, Kapuas dan Barito Selatan. Keluar sebagai juara I Kabupaten Kotawaringin Timur, Juara II Kabupaten Barito Timur dan juara III Kabupaten Barito Selatan.

Tabel 2.58 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Posyandu	Pustu	Polindes	Klinik/Balai Kesehatan
1	Mentaya Hilir Selatan	1	-	1	16	7	7	1
2	Teluk Sampit	-	-	1	9	4	2	-
3	Pulau Hanaut	-	-	1	27	11	10	-
4	Mentawa Baru Ketapang	1	1	3	36	9	-	8
5	Seranau	-	-	1	8	5	5	-
6	Mentaya Hilir Utara	-	-	1	14	7	9	4
7	Kota Besi	-	-	1	12	9	6	-
8	Telawang	-	-	1	18	5	7	3
9	Baamang	-	-	2	19	6	-	-
10	Cempaga	-	-	1	20	7	7	-
11	Cempaga Hulu	-	-	1	23	8	9	1
12	Parenggean	1	-	2	20	8	6	2
13	Tualan Hulu	-	-	1	12	9	4	4
14	Mentaya Hulu	-	-	1	24	13	5	4
15	Bukit Santuai	-	-	1	15	11	7	3
16	Antang Kalang	-	-	1	17	12	5	1
17	Telaga Antang	-	-	1	18	14	10	-
Kotawaringin Timur		3	1	21	308	145	99	31

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, data tentang sepuluh penyakit terbanyak selama tahun 2019 diposisi teratas adalah infeksi pernafasan atas akut, tidak terspesifikasi. Penyakit ini menjadi penyakit dengan penderita terbanyak sepanjang tahun beruntun sejak tahun 2016. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebakaran lahan setiap tahunnya sehingga mengakibatkan asap yang membuat pernafasan terganggu. Sedangkan untuk jumlah kasus lainnya yang paling banyak diderita adalah penyakit hipertensi esensial, sebanyak 11.008 dan pengakit disepsia 5.750 kasus (Tabel 2.59). Adapun temuan lain dari data Dinas Kesehatan adalah meningkatnya jumlah bayi lahir dengan berat kurang/BBLR dari 149 di tahun 2019 menjadi 171 di tahun 2020, dirujuk 5 orang dan ditemukannya bayi dengan gizi buruk sebanyak 6 orang (Tabel 2.60).

Tabel 2.59 Kasus Penyakit Terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus
1	Infeksi pernafasan akut, tidak terspesifikasi	19.973
2	Hipertensi esensial (primer)	11.008
3	Dispepsia	5.750
4	Mialgia	4.006
5	Diare dan gastroenteritis yang diduga disebabkan oleh infeksi	3.712
6	Nasofangitis akut (common cold)	3.180
7	Gastritis akut	2.702
8	Demam tanpa diketahui penyebab	2.660
9	Sakit kepala (pusing)	2.361
10	Dermatitis kontak alergi	2.297

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2020

Tabel 2.60 Jumlah BBLR di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Bayi Lahir	BBLR		Gizi Buruk
			Jumlah	Dirujuk	
1	Mentaya Hilir Selatan	544	17	-	-
2	Teluk Sampit	247	3	-	-
3	Pulau Hanaut	421	17	1	-
4	Mentawa Baru Ketapang	2.276	24	2	-
5	Seranau	266	2	-	-
6	Mentaya Hilir Utara	411	5	-	-
7	Kota Besi	417	7	-	-
8	Telawang	412	12	1	3
9	Baamang	1.626	17	-	-
10	Cempaga	574	4	-	1
11	Cempaga Hulu	452	12	1	-
12	Parenggean	625	16	-	-
13	Tualan Hulu	115	1	-	-
14	Mentaya Hulu	412	3	-	2
15	Bukit Santuai	213	15	-	-
16	Antang Kalang	298	5	-	-
17	Telaga Antang	388	11	-	-
Kotawaringin Timur 2020		9.697	171	5	6
2019		9.051	149	3	11
2018		8.580	122	-	5
2017		7.781	89	-	6
2016		9.254	133	-	11

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Indikator capaian urusan kesehatan terdiri atas : 1) rasio posyandu per satuan balita; 2) rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu per satuan penduduk; 3) rasio rumah sakit per satuan penduduk; 4) rasio dokter per satuan penduduk; 5) rasio tenaga medis per satuan penduduk; 6) cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani; 7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan; 8) Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI); 9) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 10) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA); 11) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD); 12) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin; 13) Cakupan kunjungan bayi; 14) cakupan

puskesmas; 15) cakupan puskesmas pembantu. Indikator capaian urusan kesehatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61 Indikator Capaian Urusan Kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000 balita)	6.96	7.20	9.46	7.49	8.00
2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Dan Pustu Per Satuan Penduduk (per 100.000)	44.81	44.01	44.16	43.16	43.16
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (per 100.000)	0.47	0.46	0.45	0.44	0.44
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	27.68	24.07	23.54	29.14	29.14
5	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	204.56	206.75	197.94	202.67	202.67
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	68.10	39.81	65.02	58.43	78.01
7	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	73.60	74.68	82.16	87.97	88.41
8	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60.0	55.14	79.46	65.41	65.41
9	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Tuberkulosis Bakteri Tahan Asam (TBC BTA)	100	100	100	100	100
11	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	100	100	100	100	100
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-
13	Cakupan Kunjungan Bayi	69.0	75.5	73.4	73.5	73.5
14	Cakupan Puskesmas	117.6	123.5	123.5	123.5	123.5
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	76.8	76.8	76.8	78.4	78.4
16	Cakupan Penanganan ODGJ	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sisi sektor transportasi, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peranan yang penting khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudahan akses transportasi menjadi sendi sendi utama penggerak perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki semua jalur akses transportasi mulai dari laut, darat dan udara. Pada transportasi darat, tahun 2019 tercatat bahwa panjang jalan yang dikelola pemerintah kabupaten sepanjang 2.024,26 km yang menghubungkan semua kecamatan. Kecamatan dengan panjang jalan terpendek adalah Kecamatan Tualan Hulu yaitu hanya 7,2 kilometer atau hanya 0,3 persen dari keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Menurut data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat hanya 17,51 persen jalan yang telah teraspal. Meskipun persentasenya meningkat dari 2 tahun sebelumnya namun masih sangat kecil dibanding yang belum teraspal. Kondisi kontur tanah gambut menjadi salah satu penghambat pengaspalan jalan. Sedangkan untuk kondisi jalan, masih menurut Dinas PU sebanyak 18,72 persen dalam kondisi baik, sedangkan jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat secara total sebesar 61,64 persen (Tabel 2.62).

Tabel 2.62 Data Jaringan Jalan (Kilometer) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020

No	Kecamatan	Panjang Jalan Kabupaten	Perkerasan			Kondisi Jalan			
			Aspal	Tidak di Aspal	Lainnya	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Mentaya Hilir Selatan	185.73	23.54	23.66	140.67	21.34	70.55	89.36	4.20
2	Teluk Sampit	12.75	-	1.65	11.10	30.10	5.95	1.70	2.00
3	Pulau Hanaut	107.92	-	14.50	93.42	-	14.5	33.70	59.72
4	Mentawa Baru Ketapang	247.5	164.93	22.58	64.98	161.77	50.23	23.75	11.75
5	Seranau	82.76	-	9.60	73.16	5.60	32.60	1.40	43.16
6	Mentaya Hilir Utara	152.25	19.75	3.50	129.00	19.25	39.14	85.36	8.50
7	Kota Besi	79.75	5.50	15.10	59.15	14.50	39.10	13.15	13.00
8	Telawang	113.5	20.80	15.59	77.11	46.71	21.00	33.09	12.70
9	Baamang	234.07	80.80	41.34	117.87	89.51	61.83	73.29	9.44
10	Cempaga	65.01	5.45	3.5	42.99	3.75	7.50	9.65	44.11
11	Cempaga Hulu	50.39	5.15	3	42.24	29.92	3.00	13.97	3.50
12	Parenggean	118.11	17.81	12.10	88.20	20.71	33.00	26.30	38.10
13	Tualan Hulu	7.2	-	1	6.20	2.00	4.00	1.20	-
14	Mentaya Hulu	316.55	0.50	39.23	276.82	15.27	58.40	104.37	138.51
15	Bukit Santuai	87.3	-	11.50	75.80	10.70	7.80	32.30	36.50
16	Antang Kalang	145.4	'	36.41	108.99	4.29	37.70	70.69	32.72
17	Telaga Antang	17.87	6.57	1	10.3	-	1.00	15.30	1.57
Kotawaringin Timur		2.024.06	2.024.06	350.79	255.27	1.418.00	448.43	487.30	628.85

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

Tabel 2.63 Indikator Capaian Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	242,64	259,13	364,48	371,08	363,34
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	1.792.594	1.882.223	1.976,33	2.075,14	2.015,14
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	647,50	679,87	713,86	749,55	749,55
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	669,53	710,93	721.143	726,56	667,53
5	Rumah tinggal bersanitasi	-	51,07	51,16	51,66	71,44
6	Lingkungan Pemukiman	-	-	-	-	-
7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.495	1.458	279	9.800	9.800
8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	153	153	153	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
9	Panjang Jembatan (meter)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	3.566,5	3.592,5	3.612,5	3.612,5	3.612,5
	b. Jumlah Jembatan Beton	358	365	365	431,5	471,5
	c. Jumlah Jembatan Baja	750	870	750	750	750
10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	38	40	40	12	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	56	54	54	54	54
	b. Jumlah Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Jembatan Baja	-	-	-	-	-
12	Rasio jaringan irigasi	0,91	1,66	1,49	1,35	1,32
13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	17,91	19,69	23,70	24,03	24,03
14	Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
15	Cakupan pelayanan air minum/bersih (Org)	475/469	441/079	436/276	456/409	466/366
16	Penduduk berakses air minum	295/271	320/421	334/264	350/489	389/246
17	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	26.050	25.739	26.930	27.941	30.330
18	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	34,97	35,15%	34,95%	35,43%	35,42%
19	Penduduk berakses/terlayani air bersih	145.546	147.274	152.464	157.312	161.646

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021, PDAM Kab. Kotim 2021,

Pembangunan infrastruktur baik di bidang jalan, jembatan, dan irigasi merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jaringan infrastruktur yang baik, dapat mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah. Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pada umumnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, tetapi masih berada pada tingkatan yang belum memadai guna mendukung pergerakan pembangunan disegala sektor. Kinerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat

dari capaian kinerja indikator di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Indikator capaian urusan pekerjaan umum pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu: 1) panjang jalan dalam kondisi baik; 2) Panjang Jalan dilalui roda 4; 3) Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4); 4) Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam); 5) Rumah tinggal bersanitasi; 6) Lingkungan Pemukiman; 7) Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat; 8) jumlah jembatan kayu, beton, dan baja; 9) panjang jembatan kayu, beton, baja; 10) Jembatan kayu, beton, baja dalam kondisi baik (buah); 11) Jembatan kayu, beton, baja dalam kondisi rusak (buah); 12) rasio jaringan irigasi; 13) luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik. Kinerja capaian untuk masing-masing indikator hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	18,83	22,59	26,36	30,13	33,89
2	Jumlah IMB yang diterbitkan	459	326	391	742	759
3	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

Urusan wajib penataan ruang bertujuan untuk memastikan ruang publik perkotaan dan rencana pembangunan perkotaan berjalan dengan baik dan seimbang dan berkualitas. Indikator capaian urusan penataa ruang yaitu: 1) Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB; 2) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan; 3) Ruang publik yang berubah peruntukannya. Kinerja capaian indikator urusan wajib penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.65 Indikator Capaian Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BAPPELITBANGDA Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pemenuhan kebutuhan air bersih, kualitas rumah, dan menjadi indikator dalam melihat perkembangan pembangunan perumahan. Secara umum terjadi peningkatan positif untuk semua indikator di Kabupaten Kotawaringin Timur. Data-data pendukung urusan wajib perumahan dapat dilihat pada Tabel 2.66 dan Tabel 2.67.

Tabel 2.66 Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Rata-Rata Rasio Anggota Keluarga Kab. Kotim	Jumlah Penduduk Kab. Kotim	Standar Kebutuhan Air Bersih per Orang per Hari	Jumlah Kebutuhan Air Bersih Penduduk (Liter/Hari)	Liter/Detik
2015	3.81	426.176	60 Liter/Hari (Permen PU No.14 Tahun 2010)	25.570.560	296
2016		436.276		26.176.560	303
2017		446.094		26.765.640	310
2018		456.409		27.384.540	317
2019		414.463		24.867.780	288

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka tahun 2020; Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim dan PDAM

Tabel 2.67 Kapasitas Produksi PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Kapasitas Terpasang PDAM (L/det)	Debit Produksi PDAM (L/det)
2016	430	315
2017	516	360
2018	595	386
2019	595	466
2020	895	524

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka tahun 2021; Dinas PUPRPRKP Kab. Kotim dan PDAM

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Indikator capaian untuk urusan wajib perumahan mencakup: 1) Rumah tangga yang menggunakan air bersih; 2) Cakupan pelayanan air minum/bersih; 3) Penduduk berakses air minum; 4) Rumah Tidak Layak Huni; 5) Kawasan kumuh. Kinerja capaian masing-masing indikator hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68 Indikator Capaian Urusan Perumahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tidak Layak Huni	27.601	6.991	25.078	24.497	24.101
2	Kawasan kumuh (Ha)	49,42	41,16	33,60	21,08	12,52

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Kinerja bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat didasarkan pada indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk, Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten, Penegakan PERDA, Cakupan patroli petugas Satpol PP, Rasio Petugas Perlindungan, serta Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69 Kinerja Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1.99	2.21	2.74	2.64	2.64
2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.148	3.148	3.595	3.595	3.595
3	Penegakan PERDA	453 kasus	464 kasus	563 kasus	525 kasus	525 kasus
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	756 kali	756 kali	720 kali	720 kali	720 kali
5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	72.16	70.57	78.77	86.74	86.74

Sumber : Satpol PP Kab. Kotim, BPBD Kab. Kotim, dan BPS Kab. Kotim

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Kinerja bidang sosial terdiri atas indikator ketersediaan panti asuhan, jumlah penerima bansos, serta jumlah kegiatan Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Kinerja Urusan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana sosial :					
	- Panti Asuhan	9	8	8	8	8
2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	42	11	7	4	4
3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5	2	2	4	4

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kotim

Tabel 2.71 Data PMKS Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)	1074	1257	1421	1590	1764
2.	Lanjut Usia	3092	3092	3092	13000	13000
3.	Anak Dalam/Luar Panti	288	288	288	288	288
4.	Gelandangan dan Pengemis	24	26	27	35	6
5.	Tuna Susila	69	69	9	13	31
6.	Korban NAPZA	26	29	36	36	36

Sumber : Dinas Sosial Kab. Kotim

2.3.2 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Kinerja bidang ketenagakerjaan didasarkan pada indikator Angkatan kerja (orang), Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen), Pencari kerja yang ditempatkan (orang), Tingkat pengangguran terbuka (Persen), Keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan (Persen), Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angkatan kerja (orang)	206.026	204.286	227.252	230.323	230.005
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (Persen)	NA	63,21	68.51	67.45	67,41
3.	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	-	95	96	95	207
4.	Tingkat pengangguran terbuka (Persen)	NA	4,92	4.55	4.47	5,25
5.	Keselamatan dan perlindungan pekerja oleh perusahaan (Persen)	70,11	72,11	-	-	-
6.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (Kasus)	20 kasus	20 kasus	30 kasus	30 kasus	30 kasus

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri atas indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Rasio KDRT, Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Partisipasi angkatan kerja perempuan, Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaiannya hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73 Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,14	2,80	2,72	3,03	2,94
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	8,52	8,58	17,90	17,80	20,30
3	Rasio KDRT	0.032	0.038	0.038	0.028	0.022
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-	-	-
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	-	35,00	43,10	43,50	71,12
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Kinerja bidang ketahanan pangan didasarkan pada indikator ketersediaan regulasi ketahanan pangan, serta ketersediaan pangan utama (Ton). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74 Kinerja Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama (Ton)	92.43	97.81	104.05	109.53	91.22

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Indikator capaian urusan wajib pertanahan meliputi: 1) Persentas luas tanah bersertifikat; 2) Penyelesaian kasus tanah negara; 3) Penyelesaian izin lokasi. Kinerja capaian urusan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75 Kinerja Urusan Pertanahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-20120

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase luas lahan bersertifikat	1.6	0.17	0.9	0.4	0.4
2	Penyelesaian kasus tanah negara (jumlah kasus)	-	-	16	15	15
3	Penyelesaian izin lokasi (jumlah izin)	4	2	4	11	11

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Indikator capaian urusan wajib lingkungan hidup meliputi persentase panganan sampah, persentase penduduk dengan akses air minum, pencemaran status mutu air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, dan penegakkan hukum lingkungan. Kinerja capaian urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Penanganan Sampah	*0	58,85	58,68	57,33	57,33
3	Pencemaran status mutu air	**TR	**TR	**TR	**TR	**TR
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	15	15	15	15	15
5	Penegakan hukum lingkungan	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotim

Catatan :

*)Tahun 2016 Penanganan Sampah masih dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Tata Kota dan Kebersihan Sampai dengan Juli 2020

**TR = Tercemar Ringan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang Undang No. 24 tahun 2013 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya. Indikator capaian urusan wajib kependudukan dan catatan sipil meliputi: 1) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk; 2) Rasio anak berakte kelahiran; 3) Rasio pasangan berakte nikah; 4) Kepemilikan KTP; 5) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk; 6) Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur; 7) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Kinerja capaian urusan kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	108.174	108.025	107.551	106.874	107.060
2	Rasio anak berakte kelahiran	1.026	94.776	107.610	121.356	698
3	Rasio pasangan berakte nikah	128	468	91.000	288.00	1.271
4	Kepemilikan KTP	222.239	283.275	262.879	265.983	265.983
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	8.934	19.907	13.770	14.350	6.800
6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	406.429	409.502	411.852	214.117	214.938
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	283.806	283.725	280.123	280.162	284.117

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa didasarkan pada indikator PKK aktif, dan BUMDes aktif. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78 Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PKK aktif	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa
2	Posyandu aktif	305	315	327	331	308
3	BUMDes Aktif	25	40	56	70	70

Sumber : BPS Kab. Kotim

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun bahwa Indeks Desa

Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Berdasarkan IDM ini, maka status desa dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori yakni:

- a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Adapun perkembangan status desa di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan IDM selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.79 sebagai berikut:

Tabel 2.79 Status Desa Berdasarkan IDM Tahun 2018-2020

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Mandiri	1	2	2
2	Maju	7	8	15
3	Berkembang	36	56	59
4	Tertinggal	69	77	65
5	Sangat Tertinggal	55	25	27

Sumber: DPMD Kab. Kotim (berbagai tahun terbitan, diolah)

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri atas indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif, Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK.R), Jumlah PKKBD, Jumlah Sub. PKKBD, serta Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80 Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2.60	2.50	2.29	2.24	2.24
2.	Rasio akseptor KB	78.1	77.1	74.1	78.3	78.3
3.	Cakupan peserta KB aktif	19.2	21.4	24.6	43.2	43.2
4.	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	16	17	17
5.	Bina Keluarga Balita (BKB)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	25	27	31
6.	Bina Keluarga Remaja (BKR)	60	70	87	111	424
7.	Bina Keluarga Lansia (BKL)	28	37	50	70	212
8.	UPPKS	11	12	11	14	14
9.	PIK.R	7	10	12	12	12
10.	PKKBD	150	165	166	168	185
11.	Sub. PKKBD	120	120	120	125	118
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2	3	4	4	3

Sumber : Badan P3AP2KB Kab. Kotim

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perhubungan terkait dengan transportasi darat, laut, dan udara yang diselenggarakan urusannya oleh pemerintah. Indikator capaian urusan wajib perhubungan meliputi: 1) Jumlah Arus penumpang angkutan umum; 2) Rasio ijin trayek; 3) Jumlah uji KIR angkutan umum; 4) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis; 5) Angkutan darat; 6) Kepemilikan KIR angkutan umum; 7) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR); 8) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum; 9) Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu). Kinerja capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Indikator Capaian Urusan Perhubungan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)					
	Angkutan sungai	25.356	22.834	160.805	-	-
	Angkutan jalan	26.968	26.968	32.346	35.004	22.976
	Angkutan laut	142.119	104.575	104.512	151.111	205.563
	Angkutan udara	257.512	313.622	417.540	233.109	94.904
2	Rasio Ijin Trayek	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	424	477	711	1.114	1.059
4	Jumlah Terminal	1	1	1	1	1
	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
	Jumlah Pelabuhan	2	2	2	2	2
5	Angkutan					
	Persentase Layanan Angkutan Darat	37	39	40	39	38
	Angkutan sungai (unit kapal)	2.097	5.784	14.007	21.727	23.433
	Angkutan jalan (unit)	10.242	10.278	10.878	9.840	6.624
6	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Prosentase)	22	23	24	24	25

No	Indikator Capaian	Kinerja Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (menit)	30	30	25	25	25
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
9	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	100	100	100	100	100
10	Jumlah bongkar muat barang (kg)					
	Angkutan laut	1.509	1.930	4.021	3.241	777.306
	Angkutan udara	1.1168.738	964.722	1.574.939	1.141.049	899.333
	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kinerja bidang komunikasi dan informatika didasarkan pada indikator Jumlah Tower Telekomunikasi, Jumlah surat kabar nasional/lokal, Jumlah penyiaran radio/TV lokal, Website milik pemerintah daerah Pameran/expo. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.82.

Tabel 2.82 Kinerja Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tower Telekomunikasi	108	117	118	134	134
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/3	7/4	7/3	4/1	4/1
4	Website milik pemerintah daerah	13	18	24	27	27
5	Pameran/expo	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika (diolah)

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kinerja bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah didasarkan pada indikator jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.83.

Tabel 2.83 Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi/Koperasi Sekunder	-	-	-	-	
	2. Jumlah Koperasi Primer	366	308	320	325	339
	3. Koperasi Aktif	264	239	250	255	269
	4. Koperasi Tidak Aktif	102	69	70	70	70
	5. Koperasi KUD	30	28	28	28	20
	6. Koperasi Non KUD	336	280	292	297	
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:					
	Mikro	12.759	17.859	22.962	26.183	
	Kecil	1.759	2.197	2.736	3.033	
	Menengah	31	31	31	31	31

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kotim

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Kinerja bidang penanaman modal didasarkan pada indikator Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam Rp.Miliar), dan Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.Miliar). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.84.

Tabel 2.84 Kinerja Urusan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN (dalam Rp.Miliar)	10.420,57	8.746,54	15.021,38	5.530,51	759.226,18
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.Miliar)	6.372.151	2.072.151	1.034.300	2.489.919	407.006
		11.758,95	17.315,59	25.645,01	34.298,63	573.167,41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja bidang kepemudaan dan olahraga didasarkan pada indikator Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Kegiatan/Even Olahraga, Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah, Lapangan Olahraga, Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah, serta Jumlah Gadung Olahraga Milik Swasta. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.85.

Tabel 2.85 Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	ASPEK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gadung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kotim

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Kinerja bidang statistik didasarkan pada indikator ketersediaan Buku "Kabupaten dalam angka", dan Buku "PDRB Kabupaten". Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86 Kinerja Statistik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : BPS Kab. Kotim

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kinerja bidang kebudayaan dan pariwisata didasarkan pada indikator Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda/Situs/Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, serta Kunjungan Wisata. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87 Kinerja Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	14
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Kinerja bidang perpustakaan didasarkan pada indikator Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88 Kinerja Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.955	12.424	12.796	12.061	954
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.188 Judul	35.829 Judul	37.318 Judul	39.519 Judul	39.519 Judul

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotim

2.3.3 Fokus Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Kinerja bidang kelautan dan perikanan didasarkan pada indikator produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan, dan kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89 Kinerja Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	8.878,70	8.967,60	9.027,30	9.111,50	9.554,90
	b. Nilai produksi peraian laut (Juta Rupiah)	133.180.500	134.514.000	135.409.500	136.672.500	603.942.554
	c. Perairan umum (ton)	2.959,60	2.989,20	3.019,30	3.049,30	3.769,56
	d. Nilai produksi PUD (Juta Rupiah)	76.949.600	77.719.200	78.496.600	79.281.800	42.076.055
2.	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	41,80	42,50	44,21	45,01	45,00
3.	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	5,27	5,39	6,11	6,75	5,36

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Kinerja bidang pariwisata didasarkan pada indikator kunjungan wisata. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Kinerja Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan Wisata	91.300	126.574	87.972	240.392	58.610

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan terhadap kunjungan wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur diakibatkan dampak Pandemi Covid-19 yang mulai melanda pada awal tahun, hal ini mengalami penurunan pertumbuhan yang sebelumnya meningkat terus dari tahun 2016 sampai 2019, penurunan pertumbuhan sebesar 75,62 Persen.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Kinerja bidang pertanian (pertanian pangan dan perkebunan) didasarkan pada indikator produksi dan kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.91 dan Tabel 2.92.

Tabel 2.91 Kinerja Pertanian Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	84.529 Ton	78.430 Ton	89.445 Ton	66.636 Ton	57.726 Ton
	b. Jagung	0 Ton	176 Ton	247 Ton	3.261 Ton	2.453 Ton
	c. Kedelai	20 Ton	12 Ton	26 Ton	9 Ton	11 Ton
	d. Kacang Tanah	66 Ton	60 Ton	80 Ton	40 Ton	-
	e. Ubi Kayu	5.225 Ton	24.653 Ton	32.897 Ton	24.409 Ton	10.225 Ton
	f. Ubi Jalar	456 Ton	570 Ton	751 Ton	981 Ton	1.267 Ton

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	1.25	1.09	1.07	0.69	0.69

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.92 Kinerja Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perkebunan Rakyat per Hektar					
	a. Karet	22.192,59	22.461,90	22.452,13	22.452,09	22.497,94
	b. Kelapa	4.345,28	4.556,76	5.202,72	5.242,42	5.247,62
	c. Kopi	92,80	92,96	92,96	92,96	92,96
	d. Lada	0.40	0.25	0.25	0.25	0.25
	e. Kakao	-	0.51	0.51	0.51	0.51
	f. Kelapa Sawit	24.373,27	28.579,65	28.739,12	28.737,73	28.995,41
2.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,00

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.93 Kinerja Pertanian Hortikultura Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerjan Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Sayur dan Buah-buahan (Kuintal)					
	a. Cabai Besar	Na	1.041	5.654	1.836	3.034
	b. Bawang Merah	Na	213	417	298	228
	c. Cabai Rawit	Na	3.604	4.171	4.056	6.284
	d. Kacang Panjang	Na	4.165	4.801	4.593	7.288
	e. Ketimun	Na	4.471	4.844	4.660	7.475
	f. Tomat	Na	2.543	2.314	2.314	7.055
	g. Jahe	Na	262,68	532,94	633,81	1.619,37
	h. Laos/Lengkuas	Na	266,22	404,07	1.097,89	3.926,89
	i. Mangga	Na	472	3.924	2.289	707
	j. Durian	Na	728	14.656	11.076	2.946
	k. Jeruk	Na	7.416	13.939	7.853	9.863
	l. Pisang	Na	36.842	51.555	16.563	11.979
	m. Rambutan	Na	1.115	21.416	8.954	2.190
	n. Nenas	Na	8.253	8.168	3.093	2.293
2.	Kontribusi sektor tanaman Hortikultura terhadap PDRB	0,25	0,17	0,16	0,13	0,10

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

Tabel 2.94 Kinerja Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah PERTANIAN	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Daging dan Telur (Kg)					
	a. Sapi Potong	751.746	Na	577.356	784.212	971.028
	b. Kerbau	57.586	Na	15.573	14.320	9.540
	c. Kambing	88.834	Na	111.473	99.123	96.273
	d. Babi	155.584	Na	448.065	413.865	400.050
	e. Ayam Buras	709.301	Na	271.199	273.987	273.987
	f. Itik	30.454	Na	50.361	44.876	44.876
	g. Ayam Petelur	383.859	Na	4.900	6.062	257.250
	h. Telur Ayam Buras	203.478	Na	232.988	242.996	240.803
	i. Telur Itik/Itik Manila	166.859	Na	224.818	202.556	210.543
2.	Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB	0,96	0,91	0,90	0,90	0,94

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Kinerja bidang kehutanan didasarkan pada indikator kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.94.

Tabel 2.95 Kinerja Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0.56	0.46	0.46	0.30	-3,10

Sumber: BPS Kab. Kotim

5. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja bidang Energi dan Sumber Daya Mineral didasarkan pada indikator kontribusi sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96 Kinerja ESDM Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	3.08	3.09	3.13	4.03	5.06

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng dan BPS Kab. Kotim

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Kinerja bidang perdagangan didasarkan pada indikator indikator sektor, dan ekspor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97 Kinerja Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
2	Ekspor bersih perdagangan (USD)	54.509.028,30	88.888.591,60	45.535.719,20	67.814.038,10	219.390.906,10

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

7. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Kinerja bidang perindustrian didasarkan pada kontribusi sektor dan pertumbuhan sektor. Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98 Kinerja Perindustrian Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22.20%	23.56%	22.98%	21.52%	21,68%
2	Pertumbuhan industri	5.15	9.24	-0.66	-2.71	-2.71

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Kotim dan BPS Kab. Kotim

2.3.4 Fokus Pelayanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan pentahapan rencana jangka panjang yang berlaku selama 20 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), rencana jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta rencana kerja 1 tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Ketiga dokumen tersebut merupakan indikator kinerja bidang perencanaan. Ketiganya dijalankan secara berkesinambungan, dalam arti RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur pada periode selanjutnya yaitu periode 2021-2026 merupakan rencana pembangunan yang merefleksikan dan mengakomodir tahapan keempat dari RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan RKPD bertindak sebagai *guidance* tahunan bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai urusan yang didasarkan pada RPJMD yang berlaku.

2.3.5 Fokus Pelayanan Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik didasarkan pada indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM/Ormas/OKP, Kegiatan pembinaan politik daerah, Jumlah LSM (aktif). Capaian indikator masing-masing dapat dilihat pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99 Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	2
3	Jumlah LSM (aktif)	65	61	65	71	71

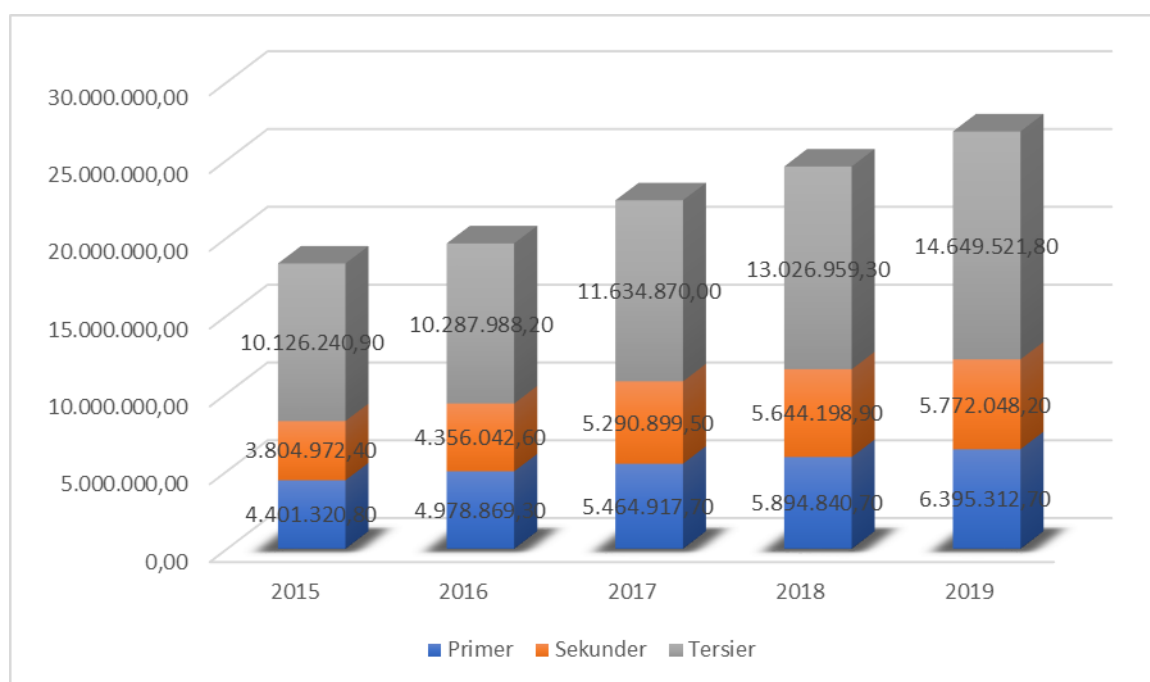
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kotim

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

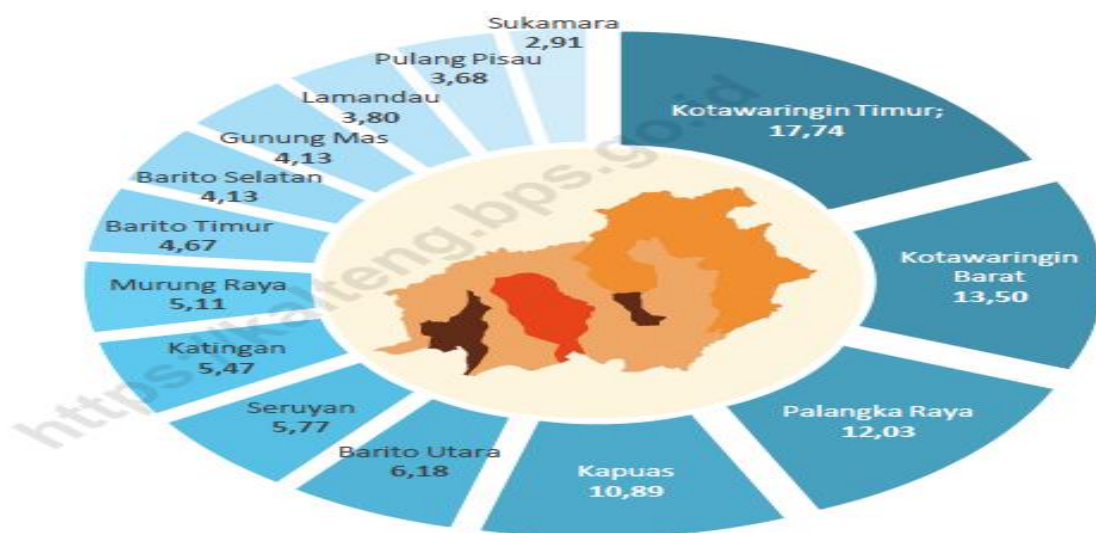
Struktur ekonomi daerah terdiri atas perbandingan kontribusi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam membentuk perekonomian daerah. Struktur perekonomian menunjukkan potensi perekonomian daerah sekaligus fokus utama pembangunan ekonomi secara empiris. Sektor primer diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Sektor sekunder diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha industri pengolahan. Sedangkan sektor tersier diwakili oleh pendapatan daerah dari lapangan usaha lainnya. Perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.27.



Gambar 2.27 Struktur Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 2015-2019

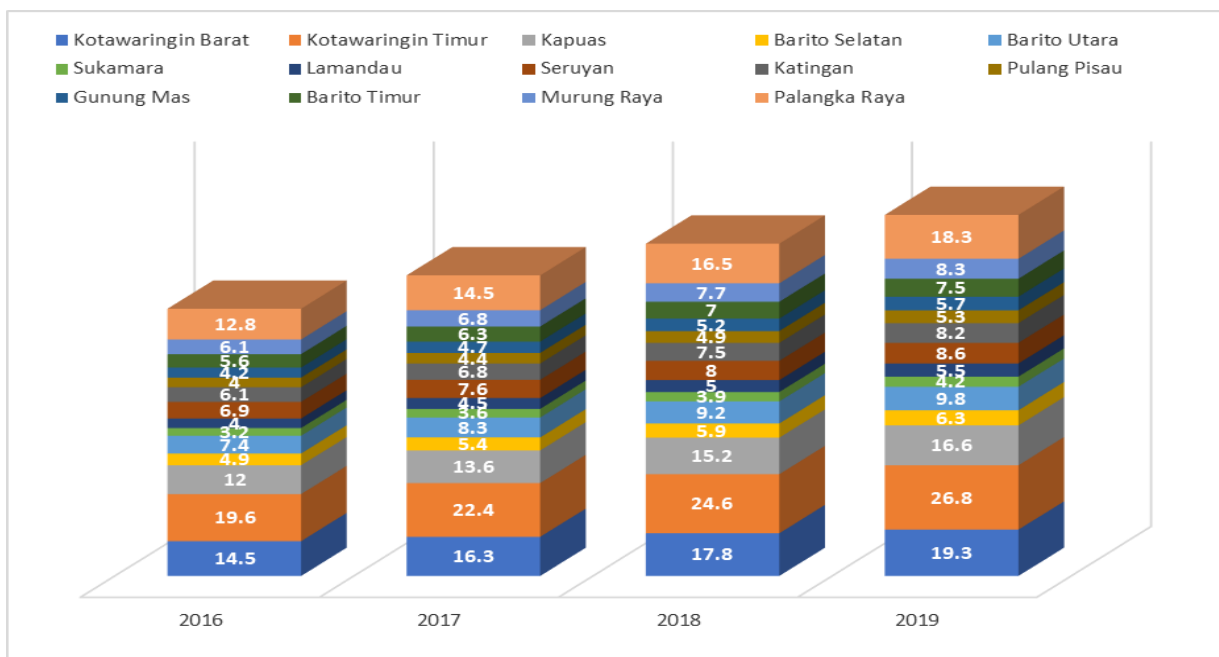
Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sektor tersier merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020, Kabupaten Kotawaringin Timur masih menjadi kabupaten dengan kontribusi terbesar pembentuk PDRB Provinsi Kalteng (Gambar 2.28 dan 2.29), kedua hal tersebut secara umum menggambarkan bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur (bersama dengan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pusat ekonomi terbesar kedua) merupakan pusat bagi perdagangan dan jasa serta fungsi pelayanan umum khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah bagian tengah-barat.



Gambar 2.28 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021



Gambar 2.29 Kontribusi Kabupaten Kotawaringin Timur dalam PDRB Provinsi Kalteng Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2019

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi daerah mengindikasikan perkembangan agregat pendapatan daerah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya, yang dihitung menggunakan angka PDRB harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.30. Karena tidak ada sumber cadangan migas maka laju pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan pada kompilasi dari kontribusi lapangan usaha kepad PDRB kabupaten. Data memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam rata-rata laju pertumbuhan.



Gambar 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020
Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

1. Tinjauan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan harga konstan, serta persentasenya masing-masing menurut pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.100. dan 2.101.

Tabel 2.100 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah) Periode 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	7.699,5	5.320,5	8.584,3	5.528,1	9.339,3	5.864,5	10.161,8	6.149,2	10.324,4	6.147,1
2	Konsumsi LNPR	184,0	127,0	197,5	132,6	224,1	144,2	258,2	159,1	264,0	159,9
3	Konsumsi Pemerintah	1.402,1	1.006,9	1.478,7	1.008,2	1.550,4	1.050,2	1.662,7	1.120,1	1.658,4	1.079,3
4	PMTB	8.776,1	6.241,7	9.447,4	6.453,6	10.157,0	6.834,1	10.856,0	7.007,0	10.408,1	6.316,9
5	Perubahan Inventori	189,0	113,3	128,7	43,7	116,8	43,8	116,6	43,8	146,9	43,6
6	Ekspor	17.656,1	13.379,2	20.567,2	15.110,8	23.142,2	16.541,1	24.864,8	17.768,9	25.264,3	17.827,9
7	Impor	16.284,0	11.255,9	18.013,1	12.158,8	19.964,3	13.243,6	21.107,7	13.784,6	21.108,8	13.682,4
Total PDRB		19.622,9	14.932,8	22.390,7	16.118,2	24.565,4	17.234,3	26.812,5	18.463,5	26.957,3	17.892,3

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara Tahun dasar

Tabel 2.101 PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Pengeluaran (Persentase)
Periode 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga	39,24	35,63	38,34	34,30	38,02	35,63	37,90	34,30	38,30	33,03
2	Konsumsi LNPR	0,94	0,85	0,88	0,82	0,91	0,85	0,96	0,82	0,98	0,86
3	Konsumsi Pemerintah	7,15	6,74	6,60	6,26	6,31	6,74	6,20	6,26	6,15	6,07
4	PMTB	44,72	41,80	42,19	40,04	41,35	41,80	40,49	40,04	38,61	38,30
5	Perubahan Inventori	0,96	0,76	0,57	0,27	0,48	0,76	0,44	0,27	0,54	0,24
6	Ekspor	6,99	14,22	11,41	18,32	12,94	14,22	14,01	18,32	15,41	21,50
7	Impor	39,24	35,63	38,34	34,30	39,02	35,63	37,90	34,30	38,30	33,03
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara Tahun dasar

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 PDRB Persentase laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Komponen Pengeluaran Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,89	3,90	6,08	4,85	-0,03
2	Konsumsi LNPR	2,80	4,39	8,79	10,30	0,50
3	Konsumsi Pemerintah	-6,78	0,13	4,16	6,66	-3,64
4	PMTB	3,70	3,39	5,90	3,53	-9,85
5	Perubahan Inventori	189,0	128,7	116,8	116,6	146,90
6	Ekspor	17.656,1	20.567,2	23.142,2	24.864,8	25.264,3
7	Impor	16.284,0	18.013,0	19.963,7	21.107,7	21.108,8
Rata-Rata		7,93	7,94	6,92	7,13	-3,09

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Tabel 2.103 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga					
	ADHB (Miliar Rp)	7.699,5	8.584,3	9.339,3	10.161,8	10.324,4
	ADHK (Miliar Rp)	5.320,5	5.528,1	5.864,5	6.149,2	6.147,1
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	39,24	38,34	38,02	37,90	38,30
3	Rata-rata konsumsi per-Kapita penduduk/tahun					
	ADHB (Ribu Rp)	17.648,3	19.243,2	20.462,5	21.789,4	21.688,7
	ADHK (Ribu Rp)	12.195,2	12.392,3	12.849,2	13.185,3	12.913,2
4	Pertumbuhan (%)					
	Total Konsumsi Akhir Rumah Tangga	4,89	3,90	6,08	4,85	4,91
	Total Konsumsi Per Rumah Tangga	2,46	1,62	3,69	2,62	-1,90
	Total Konsumsi Per Kapita	2,46	1,62	3,69	2,62	-2,06
5	Jumlah Penduduk (000 orang)	436,3	446,1	456,4	466,4	476,0

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

Tabel 2.104 Perkembangan Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)

No	Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	43,23	43,49	44,05	44,25	43,92
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,89	3,63	3,48	3,54	3,62
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	16,54	16,38	15,80	15,71	15,77
4	Kesehatan & Pendidikan	4,76	4,65	4,59	4,66	4,99
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	24,54	25,13	25,59	25,33	24,69
6	Hotel & Restoran	2,43	2,42	2,46	2,45	2,42
7	Lainnya	4,61	4,30	4,04	4,07	4,59
Total Konsumsi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

Tabel 2.105 Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020 (dalam persen, berdasarkan PDRB ADHB)

No	Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	3,30	3,63	6,34	4,76	0,08
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,02	0,41	4,23	6,69	-2,31
3	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,67	3,79	3,91	5,26	0,37
4	Kesehatan & Pendidikan	4,01	3,36	4,14	5,07	4,18
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	8,89	5,57	8,56	4,64	-2,10
6	Hotel & Restoran	4,26	5,77	7,13	5,82	-0,63
7	Lainnya	2,65	0,74	1,53	3,23	6,85
Total Konsumsi		4,89	3,90	6,08	4,85	-0,03

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

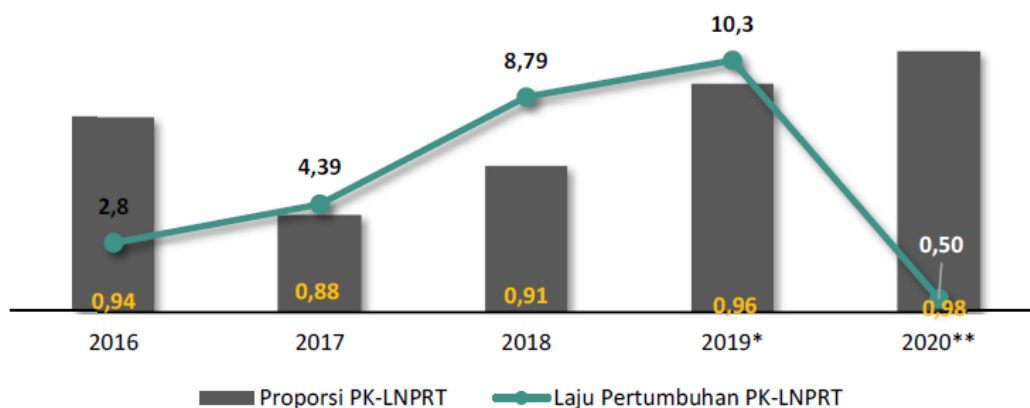
Keterangan:

*) : angka sementara

**) : angka sangat sementara

3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku). Distribusi persentase dan laju pertumbuhan LNPRT dapat dilihat pada Gambar 2.31.



*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Gambar 2.31 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan LNPRT Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

4. Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tidak signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*). Pertumbuhan dan persentase konsumsi akhir pemerintah dapat dilihat pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106 Pertumbuhan dan Persentase Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2019
1	Total Konsumsi Akhir Pemerintah					
a	ADHB (Miliar Rp)	1.402,1	1.478,7	1.550,4	1.662,7	1.658,4
b	ADHK (Miliar Rp)	1.006,9	1.008,2	1.050,2	1.120,1	1.079,3
2	Persentase terhadap PDRB (%ADHB)	7,15	6,60	6,31	6,20	6,15
3	Konsumsi Pemerintah per-Kapita penduduk					
a	ADHB (Ribuan Rp)	3.213,9	3.314,8	3.396,9	3.565,2	3.483,8
b	ADHK 2010 (Ribuan Rp)	2.307,9	2.260,1	2.301,0	2.401,7	2.267,2
4	Pertumbuhan (%)					
a	Total konsumsi pemerintah	-6,78	0,13	4,16	6,66	-3,64
b	Konsumsi perkapita penduduk	-8,94	-2,07	1,81	4,38	-5,60
5	Jumlah penduduk (000 org)	436,3	446,1	456,4	466,4	476,0

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

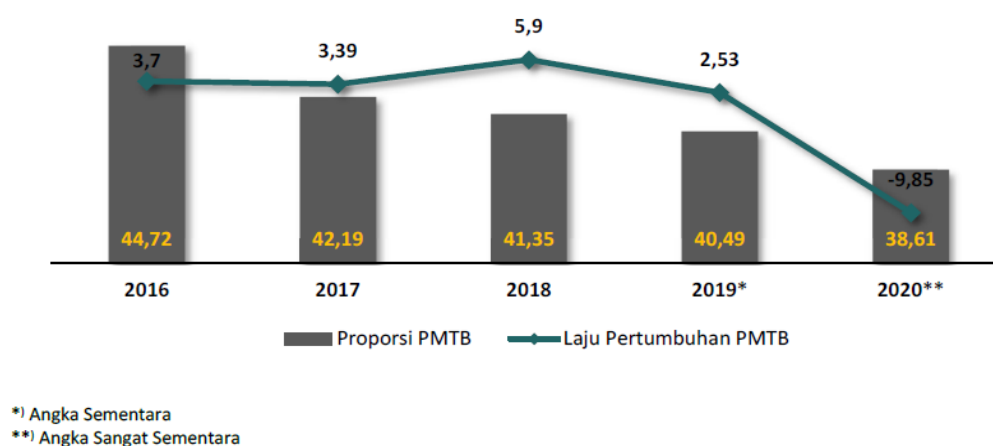
Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Komponen pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (*fisik*). Persentase dan laju pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.32.



Gambar 2.32 Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PMTB Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2020

Sumber: Hasil Perhitungan dari Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2021

6. Perkembangan Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan kuantum inventori pada satu periode. Penyebab terbentuknya perubahan inventori adalah pembelian, penjualan, digunakan dalam proses produksi, transfer, hilang, rusak, penambahan berat pada ternak dan lain-lain.

Tabel 2.107 Pertumbuhan dan Persentase Perubahan Inventori Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Total PMTB					
a	ADHB (Miliar Rp)	189,0	128,7	116,8	116,6	146,9
b	ADHK (Miliar Rp)	113,3	43,7	43,8	43,8	43,6
2	Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,96	0,57	0,48	0,44	0,54

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

7. Perkembangan Net Ekspor

Net Ekspor didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor dan impor. Sama halnya dengan

perubahan inventori, ekspor netto juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor lebih besar daripada impor, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2016 hingga 2020, nilai ekspor Kabupaten Kotawaringin Timur selalu bernilai positif baik atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Hal tersebut berarti bahwa neraca perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami surplus, atau nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Pada lima tahun terakhir, proporsi net ekspor terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan hingga mencapai 15,41 persen pada tahun 2020.

Tabel 2.108 Pertumbuhan dan Persentase Net Ekspor Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Total Net Ekspor					
a	ADHB (Miliar Rp)	1.372,1	2.554,1	3.177,9	3.757,1	4.155,5
b	ADHK (Miliar Rp)	2.123,4	2.952,0	3.297,4	3.984,4	4.145,5
2	Proporsi terhadap PDRB (%ADHB)	6,99	11,41	12,94	14,01	15,41

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

8. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio atau “ICOR” merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter “Nilai Tambah”.

Tabel 2.109 Pertumbuhan dan Persentase ICOR Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
PDRB ADHK (Miliar Rp)	14.932,8	16.118,2	17.234,3	18.463,5	17.892,3
Perubahan PDRB ADHK (Miliar Rp)	1.096,8	1.185,4	1.116,1	1.229,2	-571,2
PMTB ADHK (Miliar Rp)	6.241,7	6.453,6	6.834,1	7.007,0	6.317,0
ICOR	5,69	5,44	6,12	5,70	-11,06

Sumber: PDRB (BPS, 2021; diolah)

Keterangan:

*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

9. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Tren NTP di Kabupaten Kotawaringin Timur pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.110 di bawah ini:

Tabel 2.110 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun		
	2018	2019	2020
NTP	81,01	81,14*	80,73**

Sumber: BPS Prov. Kalteng (berbagai tahun terbitan, diolah)

Keterangan:

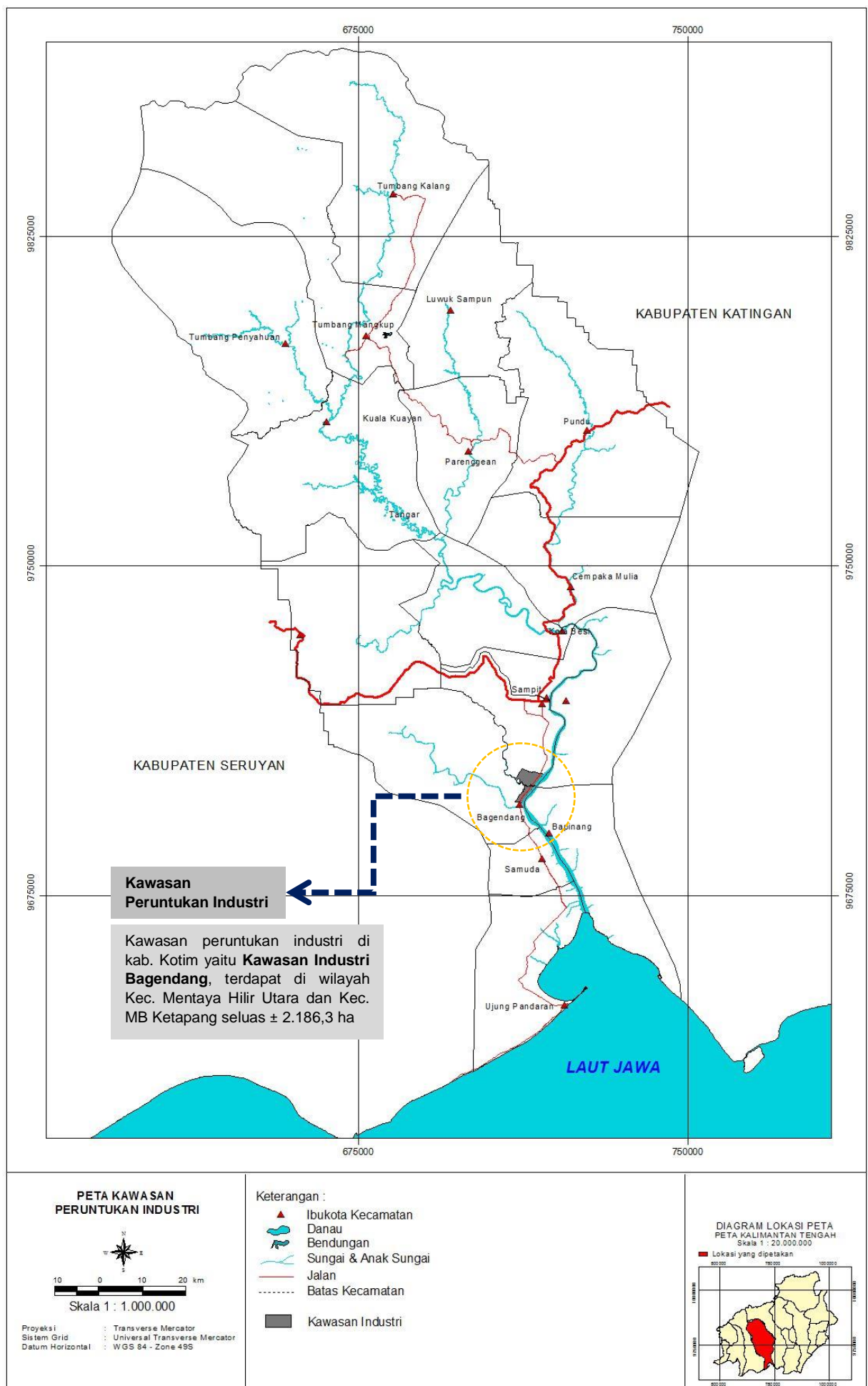
*) : angka sementara

***) : angka sangat sementara

Tabel di atas memperlihatkan terjadi penurunan NTP sebesar 0,41 poin dari 81,14 pada tahun 2019 menjadi 80,73 pada tahun 2020 sebagai dampak atas pandemi COVID-19 pada sektor pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur.

10. Rencana Kawasan Industri Bagendang

Dalam mendukung Rencana pembentukan Kawasan Industri Bagendang sudah terbentuk produk hukum berupa Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 10 Juni 2021 tentang RDTR Kawasan Peruntukan Industri Bagendang tahun 2021-2041, produk hukum ini sebagai pijakan awal dalam penetapan kawasan Bagendang sebagai Kawasan Industri, selanjutnya melalui Perangkat Daerah teknis untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) untuk mendukung pengembangan industri di Kabupaten Kotawaringin Timur agar bisa terencana dan terarah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian pasal 70 huruf d yaitu Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan Industri dapat dilakukan melalui penyusunan: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk deliniasi kawasan industri dapat dilihat pada gambar 2.33.



Gambar 2.33 Peta Kawasan Industri Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim. 2012

2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Menurut POLRES Kabupaten Kotawaringin Timur, tindak pidana yang terjadi pada periode 2019-2020 mengalami penurunan. Jumlah tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 131 kejadian dibandingkan kejadian tindak pidana tahun sebelumnya 168 kasus. Jumlah kasus tindak pidana yang telah diselesaikan ada sebanyak 75 kasus. Angka Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana relative sama. Sedangkan selang waktu terjadinya tindak pidana tahun 2020 adalah 66 Jam 52 menit 35 detik. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan resiko seseorang terkena tindak kejahatan di Kabupaten Kotawaringin Timur jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.111 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2020

No	Kepolisian Resort	2018	2019	2020
1	Polres Kotim	-	72	-
2	Mentaya Hilir Selatan & Teluk Sampit	10	2	8
3	Pulau Hanaut	-	1	1
4	Mentawa Baru Ketapang & Seranau	32	20	20
5	Mentaya Hilir Utara	1	4	3
6	Kota Besi & Telawang	12	12	12
7	Baamang	29	21	22
8	Cempaga	11	1	3
9	Cempaga Hulu	27	5	11
10	Parenggean & Tualan Hulu	22	8	3
11	Mentaya Hulu & Bukit Santuai	9	10	10
12	Antang Kalang & Telaga Antang	7	9	8
Kotawaringin Timur		160	165	101

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka. 2021

2. Lama Proses Perijinan

Pengurusan proses perizinan yang cukup lama telah menjadi salah satu kendala utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.112 Waktu Proses Perijinan, di DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Jenis Izin	Standar Waktu (dalam hari kerja)
1	Izin Gangguan (IG/HO)	Baru: 7, Perpanjangan: 3
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3
3	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3
4	Tanda Daftar Industri (TDI)	5
5	Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP)	5
6	Izin Usaha Industri (IUI)	5
7	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	5
8	Persetujuan Bangunan Gedung	14

No.	Jenis Izin	Standar Waktu (dalam hari kerja)
9	Izin Reklame	7
10	Izin Usaha Angkutan (IUA)	7

Sumber: DPMPTSP Kab. Kotim

a. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Pajak Hotel (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Walet; (10) PBB Perdesaan dan Perkotaan; (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB); dan (12) Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp. 66.511.053.231,14. Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.112.

3. Fokus Fasilitas Wilayah/infrastruktur

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur peran tata ruang sangat berpengaruh terhadap tercapainya pembangunan, karena tata ruang mengatur pemanfaatan lahan dan pembangunan secara spasial. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya yaitu ketaatan RTRW antaranya kesesuaian kondisi existing dengan peta pola ruang peta RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 2.113 Target Ketaatan terhadap RTRW 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Ketaatan RTRW	75.15	76.62	78.09	79.57	81.04	82.51

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur

Tata ruang juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya wilayah-wilayah produktif pada setiap wilayah. Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur bukan hanya berada pada kawasan perkotaan namun juga berada pada kawasan pedesaan, sehingga mendorong terwujudnya wilayah produktif yang dapat mendukung ekonomi kawasan.

Tabel 2.114 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Pendapatan Pajak Daerah	53.246.842.390	73.380.787.337	71.504.270.674,50	72.419.846.672,00	66.511.053.231,14
1	Pajak Hotel	1.320.681.119,00	2.009.351.039,00	2.375.348.850,00	2.717.695.868,00	1.879.313.602,00
2	Pajak Restoran	4.631.976.760,00	4.913.059.545,00	6.009.338.796,00	6.586.848.334,00	3.874.623.149,00
3	Pajak Hiburan	784.362.756,00	1.232.251.922,00	1.707.871.121,00	1.859.956.639,00	687.389.714,00
4	Pajak Reklame	1.684.296.993,00	1.926.486.208,00	729.265.142,00	980.106.992,00	1.274.869.280,00
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	14.852.436.692,00	19.468.519.234,00	22.589.640.831,00	24.869.791.999,00	25.696.331.056,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.558.552.895,00	1.410.094.255,00	2.464.524.935,00	3.171.175.325,00	2.488.079.015,00
7	Pajak Parkir	169.211.500,00	215.086.764,00	287.740.770,00	308.861.000,00	283.596.626,00
8	Pajak Air Tanah	29.153.000,00	53.182.600,00	108.830.800,00	158.892.000,00	197.982.420,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	172.486.270,00	379.044.016,00	351.582.180,00	618.469.400,00	517.852.890,00
10	Pajak Bumi & Bangunan	3.603.452.109,00	7.510.813.918,00	6.456.024.456,00	6.872.102.279,00	8.731.856.118,00
11	Bea Prolehan Hak atas tanah & Bangunan	24.440.232.296,00	34.251.897.836,00	28.368.667.623,00	24.158.189.271,00	20.311.943.523,00

Sumber: Bapenda Kab. Kotim

Jenis Retribusi Daerah yang menjadi tiga bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi perizinan tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan sebesar Rp.11.044.261.155,50. Adapun perincian pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.061.679.900	2.482.471.972	1.120.984.600,00	2.630.234.160,00	1.488.092.850,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	254.158.000	243.350.000	225.574.000,00	273.178.000	267.976.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	530.584.000	2.353.858.600	1.527.899.050,00	1.398.624.815,00	324.870.460,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	2.266.714.508	2.127.126.792	-	-	-
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	630.151.000	639.163.464	717.447.000,00	1.097.745.500,00	862.621.800,00
7	Retribusi Biaya Cetak Peta	160.000	168.898	80.000,00	-	-
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	128.000.000	138.232.836	-	-	-
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.069.745	1.319.815.031	-	-	261.122.934,00
10	Retribusi Terminal	22.400.000	24.134.056	30.900.000,00	55.300.000,00	50.000.000,00
11	Retribusi Rumah Potong Hewan	172.275.000	187.390.704	57.380.000,00	59.167.500,00	33.022.500,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung	1.135.491.243	1.341.290.038	1.928.515.691,00	2.169.086.898,50	3.405.374.024,50
13	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	113.500.000	114.200.484	158.000.000,00	109.000.000,00	115.450.000,00
14	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	2.783.544.033	3.032.966.669	-	-	-
15	Retribusi Izin Trayek	1.810.000	1.951.783	1.875.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
16	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.200.000	1.210.338	-	-	-
17	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	413.007.900	424.318.078	346.967.700,00	247.060.008,00	281.132.676,00
18	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	228.581.938	237.400.332	187.968.000,00	188.253.641,00	188.253.641,00
19	Pendapatan Denda Retribusi	117.540.659	121.634.936	50.739.890,00	25.788.550,00	23.073.100,00
20	Retribusi Tempat Pariwisata	59.134.000	60.046.805	56.034.000,00	13.480.000,00	7.252.000,00
21	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.876.000	8.268.209	32.887.300,00	30.095.000,00	15.260.000,00
22	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	5.617.450	6.144.196	435.379.600,00	409.166.679,00	268.924.248,00

Sumber: Bapenda Kab. Kotim

Analisis pertumbuhan PAD 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan PAD setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi PAD pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.116.

Tabel 2.116 Analisis Pertumbuhan PAD 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020
1	RPJMD	200.510.303.775	212.160.453.086	227.571.476.198	247.636.652.909
2	APBD	192.444.121.009	212.034.758.021	245.907.566.075	419.646.803.645
3	Realisasi	196.603.717.114	200.129.417.179	220.447.371.225	232.885.875.083

(% Realisasi thd target) APBD	102.16	94.39	89.65	55.70
-----------------------------------	--------	-------	-------	-------

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
Pertumbuhan Realisasi	1.76	9.22	5.34	16.32	5.44

Analisis pertumbuhan Dana perimbangan 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.117.

Tabel 2.117 Analisis Pertumbuhan Dana Perimbangan 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020
1	RPJMD	1.258.030.649.750	1.299.015.143.695	1.345.455.140.152	1.394.019.536.574
2	APBD	1.149.656.835.000	1.128.582.157.000	1.284.523.823.000	1.045.078.758.000
3	Realisasi	1.101.878.062.697	1.133.632.012.934	1.224.889.582.116	1.162.794.042.143

(% Realisasi thd target) APBD	95.84	100.45	95.36	97,30
----------------------------------	-------	--------	-------	-------

	2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
Pertumbuhan Realisasi	2.80	7.45	-5.34	4.91	1.64

Analisis pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 tahun sebelumnya menjadi gambaran pertumbuhan setiap tahunnya, sehingga dapat membantu proyeksi Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun selanjutnya. Hasil analisis menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.118.

Tabel 2.118 Analisis Pertumbuhan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 4 Tahun Sebelumnya

No	Target PAD	2017	2018	2019	2020	
1	RPJMD	200.947.968.500	210.995.367.000	226.545.135.500	243.837.843.700	
2	APBD	222.453.020.700	321.515.752.300	323.570.742.302	395.561.150.300	
3	Realisasi	231.190.420.687	312.989.946.612	340.933.429.655	221.360.677.387	
(% Realisasi thd target) APBD			103.93	97.35	105.37	79.66
		2017 - 2018	2018 - 2019	2019 - 2020	Jumlah	Rata2
	Pertumbuhan Realisasi	26.13	8.20	-54.02	-19.69	-6.56

Tabel Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020, menunjukkan capaian kerja yang dicapai pada setiap bidang, urusan, ataupun indikator-indikator yang ada. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.119.

Tabel 2.119 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2020

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
1	Pertumbuhan Ekonomi	7,93	7,94	6,92	7,13	-3,09
2	PDRB per Kapita	44,81	50,19	53,82	57,49	56,63
3	Laju Inflasi	2,46	3,29	6,02	2,02	1,62
4	Pertumbuhan Penduduk	2,37	2,25	2,31	2,18	1,33
5	Tingkat Kemiskinan	6,32	6,24	6,21	5,90	5,25
1.2	Kesejahteraan Sosial					
1.2.1	Pendidikan					
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,42	70,17	70,56	71,16	71,31
2	Harapan Lama Sekolah	12,21	12,59	12,68	12,69	12,84
3	Rata-Rata Lama Sekolah	7,88	7,89	7,90	8,12	8,13
4	Angka Harapan Hidup	69,60	69,70	69,75	69,80	69,85
5	Pengeluaran per Kapita	-	-	1.146.321	1.184.033	1.240.640
1.2.2	Ketenagakerjaan					
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	NA	63,21	68,51	67,45	67,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	NA	4,92	4,55	4,47	5,25
1.3	Seni Budaya dan Olahraga					
1.3.1	Kebudayaan					
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	1
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33
1.3.2	Olah Raga					
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga (Selain Milik Swasta)	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gedung Olahraga (Milik Swasta)	15	15	15	15	15

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2)	PELAYANAN UMUM					
2.1	Pelayanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
a	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	19,84	27,77	29,80	29,80	29,80
b	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	88,48	89,95	49,26	49,10	49,10
2	Pendidikan Dasar					
a	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	97,10	97,50	97,60	98,00	98,90
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	91,67	92,52	92,70	93,00	98,99
b	Usia 7-12 Tahun	43.289	43.291	43.294	43.297	43.297
c	Usia 13-15 Tahun	14.430	14.431	14.433	14.435	14.435
d	Anak Putus Sekolah SD (%)	0,38	0,33	0,28	0,23	0,23
e	Anak Putus Sekolah SMP (%)	0,41	0,36	0,31	0,26	0,26
f	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata	1:30	1:30	1:25	1:23	1:23
g	Rasio Guru/Murid Menurut perkelas Rata-rata Pendidikan Dasar	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
h	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SD/MI/Paket A	90,03	89,81	88,32	89,43	97,92
	APM SMP/MTs/Paket B	62,30	62,30	62,44	62,72	77,28
i	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK SD/MI/Paket A	103,88	102,84	100,61	101,43	104,66
	APK SMP/MTs/Paket B	82,87	82,22	84,68	84,69	92,83
j	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah					
	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah Pendidikan Dasar	149.0	148.4	146.0	134.7	131.7
k	Rasio Guru/Murid					
	Rasio guru/murid Pendidikan Dasar	15	17	16	17	17
l	Rasio Guru/Murid Menurut Perkelas Rata-Rata					
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Dasar	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
4	Angka Melanjutkan (AM)					
a	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100
b	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	97.91	98.91	98.95	98.96	98.98
5	Fasilitas Pendidikan					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
a	Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kondisi ruang kelas bangunan baik	87	88	80	90	91
b	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi ruang kelas bangunan baik	73	74	75	76	77
c	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi ruang kelas bangunan baik	64,50	66,00	67,50	69,00	69,50
6	Kualifikasi Tenaga Pendidik					
a	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2/S3	40,39	45,50	60,00	65,00	69,00
2.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
1	Rasio posyandu per satuan balita	6,96	7,20	9,46	7,49	8,00
2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	44,81	44,01	44,16	43,16	43,16
3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,47	0,46	0,45	0,44	0,44
4	Rasio dokter per satuan penduduk	27,68	24,07	23,54	29,14	29,14
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	204,56	206,75	197,94	202,67	202,67
6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68,10	39,81	65,02	58,43	78,01
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	73,60	74,68	82,16	87,97	88,41
8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	60,0	55,14	79,46	65,41	65,41
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	-	-	-
13	Cakupan kunjungan bayi	69,0	75,5	73,4	73,5	73,5
14	Cakupan puskesmas	117,6	123,5	123,5	123,5	123,5
15	Cakupan pembantu puskesmas	76,8	76,8	76,8	78,4	78,4
16	Jumlah Penanganan ODGJ	100	100	100	100	100
2.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi baik	242,64	259,13	364,48	371,08	363,34
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	1.792,594	1.882,223	1.976,33	2.075,14	2.015,14

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	647,50	679,87	713,86	749,55	749,55
4	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 KM/Jam)	669.530	710.930	721.143	726.560	667,53
5	Rumah tinggal bersanitasi	-	51,07	51,16	51,66	71,44
6	Lingkungan Pemukiman	--	-	-	-	-
7	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	1.495	1.458	279	9.800	9.800
8	Jenis Jembatan (buah)					
	a. Jumlah Jembatan Kayu	153	153	153	153	153
	b. Jumlah Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jumlah Jembatan Baja	10	12	12	12	12
9	Panjang Jembatan (meter)					
	a. Jembatan Kayu	3.566,5	3.592,5	3.612,5	3.612,5	3.612,5
	b. Jembatan Beton	358	365	365	431,50	471,5
	c. Jembatan Baja	750	870	750	750	750
10	Jembatan dalam kondisi baik (buah)					
	a. Jembatan Kayu	38	40	40	12	153
	b. Jembatan Beton	36	38	38	66	67
	c. Jembatan Baja	10	12	12	12	12
11	Jembatan dalam kondisi rusak (buah)					
	a. Jembatan Kayu	56	54	54	54	54
	b. Jembatan Beton	-	-	-	-	-
	c. Jembatan Baja	-	-	-	-	-
12	Rasio jaringan irigasi	0,91	1,66	1,49	1,35	1,32
13	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	17,91	19,69	23,70	24,03	24,03
14	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	459	326	391	742	759
15	Rumah tangga yang menggunakan air bersih (%)	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
16	Cakupan pelayanan air minum/bersih (Org)	441/079	436/276	456/409	466/366	466/366
17	Penduduk berakses air minum	320/421	334/264	350/489	389/246	389/246
18	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	25.739	26.930	27.941	28.876	30.330
19	Rumah Tangga pengguna air bersih	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
20	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	-	-	-	-

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
21	Jumlah IMB yang diterbitkan	459	326	391	742	759
22	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-	-	--
2.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan					
1	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	72,64	76,62	80,11	85,39	85,39
2	Cakupan pelayanan air minum/bersih	441/079	436/276	456/409	466/366	466/366
3	Penduduk berakses air minum	320/421	334/264	350/489	389/246	389/246
4	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM (KK)	25.739	26.930	27.941	28.876	30.330
5	Rumah Tidak Layak Huni (unit)	27.601	6.991	25.078	24.497	24.101
6	Rumah Tangga pengguna air bersih	-	-	-	-	-
7	Kawasan kumuh	49,42	41,16	33,60	21,08	12,52
2.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,99	2,21	2,74	2,64	2,64
2	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	3.148	3.148	3.595	3.595	3.595
3	Penegakan PERDA	453 kasus	464 kasus	563 kasus	525 kasus	525 kasus
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP	756 kali	756 kali	720 kali	720 kali	720 kali
5	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten per 10.000 Penduduk	72,16	70,57	78,77	86,74	86,74
2.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
1	Sarana sosial : Panti Asuhan	9	8	8	8	8
2	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	42	11	7	4	4
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5	2	2	4	4
2.2	Pelayanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
2.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1	Angkatan kerja	206.026	204.286	227.252	230.323	230.053
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	NA	63,21	68,51	67,45	67,41
3	Pencari kerja yang ditempatkan	-	95	96	95	207
4	Tingkat pengangguran terbuka	NA	4,92	4,55	4,47	5,25
5	Keselamatan dan perlindungan	70,11	72,11	-	-	-
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	20 kasus	20 kasus	30 kasus	30 kasus	30 kasus
2.2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,14	2,80	2,72	3,03	2,94
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	8,52	8,58	17,90	17,80	20,30
3	Rasio KDRT	0.032	0.038	0.038	0.028	0.022
4	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	NA	NA	NA	NA	NA
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	NA	35,00	43,10	43,50	71,12
6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
2.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
1	Regulasi ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Ketersediaan pangan utama	92,43	97,81	104,05	109,53	91,22
2.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					
1	Persentase luas lahan bersertifikat	1,60	0,17	0,90	0,40	0,40
2	Penyelesaian kasus tanah negara	-	-	16	15	15
3	Penyelesaian izin lokasi	4	2	4	11	11
2.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
1	Persentase Penanganan Sampah	*0	58.85	58.68	57.33	57.33
2	Persentase penduduk berakses air minum	0	0	0	0	0
3	Pencemaran status mutu air	**TR	**TR	**TR	**TR	**TR
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan	15 Perusahaan
5	Penegakan hukum lingkungan	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus
2.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	108.174	108.025	107.551	106.874	107.060
2	Rasio anak berakte kelahiran	1.026	94.776	107.610	121.356	698
3	Rasio pasangan berakte nikah	128	468	91.000	288.00	1.271
4	Kepemilikan KTP	222.239	283.275	262.879	265.983	265.983
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	8.934	19.907	13.770	14.350	6.800
6	Ketersediaan Database kependudukan skala Kabupaten Kotawaringin Timur	406.429	409.502	411.852	214.117	214.938
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	283.806	283.725	280.123	280.162	284.117
2.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	PKK aktif	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa	17 Kec 168 Desa
2	Posyandu aktif	305	315	327	331	308

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	BUMDes aktif	25	40	56	70	70
2.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,60	2,50	2,29	2,24	2.24
2	Rasio akseptor KB	78,10	77,10	74,10	78,30	78.3
3	Cakupan peserta KB aktif	19,20	21,40	24,60	43,20	43.2
4.	Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	16	17	17
5.	Bina Keluarga Balita (BKB)	Tidak Ada Data	Tidak Ada Data	25	27	31
6.	Bina Keluarga Remaja (BKR)	60	70	87	111	424
7.	Bina Keluarga Lansia (BKL)	28	37	50	70	212
8.	UPPKS	11	12	11	14	14
9.	PIK.R	7	10	12	12	12
10.	PKKBD	150	165	166	168	185
11.	Sub. PKKBD	120	120	120	125	118
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-1	-2	-3	-4	3
2.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
1	Jumlah Arus penumpang angkutan umum					
	Angkutan sungai	25.356	22.834	160.805	-	-
	Angkutan jalan	26.968	26.968	32.346	35.004	22.976
	Angkutan laut	142.119	104.575	104.512	151.111	205.563
	Angkutan udara	257.512	313.622	417.540	233.109	94.904
2	Rasio ijin trayek	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	424	477	711	1.114	1.059
4	Jumlah Terminal	1	1	1	1	1
5	Jumlah Bandara	1	1	1	1	1
6	Jumlah Pelabuhan	2	2	2	2	2
7	Jumlah Angkutan darat	-	-	-	-	-
	Angkutan sungai (unit kapal)	2.097	5.784	14.007	21.727	23.433
	Angkutan jalan (unit)	10.242	10.242	10.878	9.840	6.624
8	Kepemilikan KIR angkutan umum	9.139	9.807	9.960	9.953	7.638
9	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	30	30	25	25	25
10	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
11	Pemasangan rambu-rambu lalu lintas (jumlah rambu)	100	100	100	100	100
2.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tower telokomunikasi	108	117	118	134	134
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	4/5	4/5	5/5	5/5	5/5
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	6/3	7/4	7/3	4/1	4/1
4	Website milik pemerintah daerah	13	18	24	27	27
5	Pameran/expo	1	1	1	1	1
2.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
1	Koperasi,Usaha Mikro,Kecil dan Menengah					
	1. Jumlah Induk Koperasi / Koperasi Sekunder	-	-	-	-	-
	2. Jumlah Koperasi Primer	366	308	320	325	339
	3. Koperasi Aktif	264	239	250	255	269
	4. Koperasi Tidak Aktif	102	69	70	70	70
	5. Koperasi KUD	30	28	28	28	20
	6. Koperasi Non KUD	336	280	292	297	-
2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:					
	Mikro	12.759	17.859	22.962	26.183	-
	Kecil	1.759	2.197	2.736	3.033	-
	Menengah	31	31	31	31	31
2.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
1	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMDN(dalam Rp.Miliar)	10.420,57	8.746,54	15.021,38	5.530,51	759.226,18
2	Jumlah Nilai Investasi berskala nasional PMA (dalam US\$. Ribu dan dalam Rp.Miliar)	6.372.151	2.072.151	1.034.300	2.489.919	407.006
		11.758,95	17.315,59	25.645,01	34.298,63	573.167,41
2.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
1	Jumlah Organisasi Olahraga	23	23	24	24	24
2	Jumlah Kegiatan/Even Olahraga	3	4	2	2	2
3	Gelanggang/Balai Remaja Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
4	Lapangan Olahraga	1	1	1	1	1
5	Jumlah Gedung Olahraga Milik Pemerintah	4	4	4	4	4
6	Jumlah Gadung Olahraga Milik Swasta	15	15	15	15	15
2.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku "PDRB Kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	18	14	18	14	14
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3	3	4	4	4
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	33	33	33	33	33
4	Kunjungan Wisata	90.616	126.574	89.178	241.718	58.610
2.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
1	Jumlah perpustakaan					
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	15.955	12.424	12.796	12.061	954
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35.188 Judul	35.829 Judul	37.318 Judul	39.519 Judul	39.519 Judul
2.3	Pelayanan Urusan Pemerintahan Pilihan					
2.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi Perikanan Tangkap					
	a. Perairan laut (Ton)	8.878,70	8.967,60	9.027,30	9.111,50	9.554,90
	b. Nilai produksi perairan laut (Rp.000)	133.180.500	134.514.000	135.409.500	136.672.500	603.942.554
	c. Perairan umum (ton)	2.959,60	2.989,20	3.019,30	3.049,30	3.769,56
	d. Nilai produksi PUD (Rp.000)	76.949.600	77.719.200	78.496.600	79.281.800	42.076.055
2	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/Kap/Tahun)	41,80	42,50	44,21	45,01	45,00
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	5,27	5,39	6,11	6,75	5,36
2.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
1	Kunjungan Wisata	91.300	126.574	87.972	240.392	58.610
2.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
1	Produksi Padi atau bahan utama lokal lainnya per Hektar					
	a. Padi	84.529 Ton	78.430 Ton	89.445 Ton	66.636 Ton	57.726 Ton
	b. Jagung	0 Ton	176 Ton	247 Ton	3.261 Ton	2.453 Ton
	c. Kedelai	20 Ton	12 Ton	26 Ton	9 Ton	11 Ton
	d. Kacang Tanah	66 Ton	60 Ton	80 Ton	40 Ton	-
	e. Ubi Kayu	5.225 Ton	24.653 Ton	32.897 Ton	24.409 Ton	10.225 Ton
	f. Ubi Jalar	456 Ton	570 Ton	751 Ton	981 Ton	1.267 Ton
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	22,30	21,32	20,78	19,70	21,48
4	Kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	1,25	1,09	1,07	0,69	0,69
5	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,09
6	Produksi Perkebunan Rakyat per Hektar	22.192,59	22.461,90	22.452,13	22.452,08	22.497,94

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	a. Karet	4.345,28	4.55,76	5.202,72	5.242,39	5.247,62
	b. Kelapa	92,80	92,96	92,96	92,96	92,96
	c. Kopi	0,40	0,25	0,25	0,25	0,25
	d. Lada	-	0,51	0,51	0,51	0,51
	e. Kakao	24.373.27	28.579.65	28.739.12	28.737.73	28.995,41
	f. Kelapa Sawit	-	-	-	-	-
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	19,74	18,99	18,44	17,45	19,26
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,25	0,17	0,16	0,13	0,10
9	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	17,65	17,18	16,66	16,09	16,00
2.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan					
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,56	0,46	0,46	0,30	-3,10
2.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	3,08	3,09	3,13	4,03	5,06
2.3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
1	Kontribusi sektor perdagangan (sub sektor perdagangan besar dan eceran) terhadap PDRB	17,40	17,93	18,89	20,19	19,01
2	Ekspor bersih perdagangan	54.509.028,30	88.888.591,60	45.535.719,20	67.814.038,10	219.390.906,10
2.3.7	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	22,20%	23,63%	22,98%	21,52%	21,68%
2	Pertumbuhan industri	5,15	9,24	-0,66	-2,71	-2,71
2.3.8	Urusan Pemerintahan Bidang Ketransmigrasian					
1	Transmigran Swakarsa	-	-	-	-	-
2.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah					
2.4.1	Perencanaan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.5	Unsur Pemerintahan Umum					

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik					
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	2	2
3	Jumlah LSM (aktif)	65	61	65	71	71
3)	DAYA SAING DAERAH					
3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah					
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
		ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK	ADHB/ADHK
1	Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	7.699,5/5.320,4	8.584,3/5.528,1	9.339,3/5.864,5	9.956,4/6.099,9	10.324,4/6.147,1
2	Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)	184,0/127,0	197,5/132,5	224,1/144,2	258,2/159,1	264,0/159,9
3	Konsumsi Pemerintah	1.402,1/1006,8	1.47,70/1.008,2	1.550,4/1.050,2	1.662,7/1.120,1	1.658,4/1.079,3
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.776,1/6241,7	9.447,4/6.453,5	10.157,0/6.834,1	10.989,9/7.074,1	10.408,1/6.316,9
5	Perubahan Inventori	189,0/113,2	128,6/43,6	116,8/45,1	111,7/43,4	146,9/43,6
6	Ekspor	1.372,1/2.123,3	2.554,1/2.952,0	3.178,4/3.296,8	3.837,9/3.971,4	25.264,3/17.827,9
7	Impor	16.284,0/11.255,9	18.013,1/12.158,8	19.964,3/13.243,6	21.107,7/13.784,6	21.108,8/13.682,4
3.1.2	Iklim Berinvestasi					
1	Angka Kriminalitas	91	115	160	165	101
2	Pendapatan Pajak Daerah	53.246.842.390	73.380.787.337	71.504.270.674,50	72.419.846.672,00	66.511.053.231,14
a	Pajak Hotel	1.320.681.119,00	2.009.351.039,00	2.375.348.850,00	2.717.695.868,00	1.879.313.602,00
b	Pajak Restoran	4.631.976.760,00	4.913.059.545,00	6.009.338.796,00	6.586.848.334,00	3.874.623.149,00
c	Pajak Hiburan	784.362.756,00	1.232.251.922,00	1.707.871.121,00	1.859.956.639,00	687.389.714,00
d	Pajak Reklame	1.684.296.993,00	1.926.486.208,00	729.265.142,00	980.106.992,00	1.274.869.280,00
e	Pajak Penerangan Jalan Umum	14.852.436.692,00	19.468.519.234,00	22.589.640.831,00	24.869.791.999,00	25.696.331.056,00
f	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.558.552.895,00	1.410.094.255,00	2.464.524.935,00	3.171.175.325,00	2.488.079.015,00
g	Pajak Parkir	169.211.500,00	215.086.764,00	287.740.770,00	308.861.000,00	283.596.626,00
h	Pajak Air Tanah	29.153.000,00	53.182.600,00	108.830.800,00	158.892.000,00	197.982.420,00
i	Pajak Sarang Burung Walet	172.486.270,00	379.044.016,00	351.582.180,00	618.469.400,00	517.852.890,00
j	Pajak Bumi & Bangunan	3.603.452.109,00	7.510.813.918,00	6.456.024.456,00	6.872.102.279,00	8.731.856.118,00
k	Bea Prolehan Hak atas tanah & Bangunan	24.440.232.296,00	34.251.897.836,00	28.368.667.623,00	24.158.189.271,00	20.311.943.523,00
3	Retribusi Daerah					
a	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.061.679.900	2.482.471.972	1.120.984.600,00	2.630.234.160,00	1.488.092.850,00

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	254.158.000	243.350.000	225.574.000,00	273.178.000	267.976.000,00
c	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	-	-	-	-	-
d	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	530.584.000	2.353.858.600	1.527.899.050,00	1.398.624.815,00	324.870.460,00
e	Retribusi Pelayanan Pasar	2.266.714.508	2.127.126.792	-	-	-
f	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	630.151.000	639.163.464	717.447.000,00	1.097.745.500,00	862.621.800,00
g	Retribusi Biaya Cetak Peta	160.000	168.898	80.000,00	,	-
h	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	128.000.000	138.232.836	396.438.369,00	,	-
i	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.263.069.745	1.319.815.031	-	-	261.122.934,00
j	Retribusi Terminal	22.400.000	24.134.056	30.900.000,00	55.300.000,00	50.000.000,00
k	Retribusi Rumah Potong Hewan	172.275.000	187.390.704	57.380.000,00	59.167.500,00	33.022.500,00
l	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung	1.135.491.243	1.341.290.038	1.928.515.691,00	2.169.086.898,50	3.405.374.024,50
m	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	113.500.000	114.200.484	158.000.000,00	109.000.000,00	115.450.000,00
n	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	2.783.544.033	3.032.966.669	-	-	-
o	Retribusi Izin Trayek	1.810.000	1.951.783	1.875.000,00	2.050.000,00	1.000.000,00
p	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	1.200.000	1.210.338	,	-	-
q	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	413.007.900	424.318.078	346.967.700,00	247.060.008,00	281.132.676,00
r	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang	228.581.938	237.400.332	187.968.000,00	188.253.641,00	188.253.641,00
s	Pendapatan Denda Retribusi	117.540.659	121.634.936	50.739.890,00	25.788.550,00	23.073.100,00
t	Retribusi Tempat Pariwisata	59.134.000	60.046.805	56.034.000,00	13.480.000,00	7.252.000,00
u	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	7.876.000	8.268.209	32.887.300,00	30.095.000,00	15.260.000,00
v	Retribusi Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya	5.617.450	6.144.196	435.379.600,00	409.166.679,00	268.924.248,00

4. Komoditi Unggulan Daerah (*One Village One Product*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memilih dan menetapkan satu desa di setiap kecamatan yang menjadi model satu desa unggulan pada satu kecamatan memiliki produk unggulan yang akan dikembangkan dapat dilihat pada tabel 2.120 dibawah.

Tabel 2.120 Desa Unggulan dan Sektor/ Produk Unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
1	Mentawa Baru Ketapang	Kelurahan Sawahan	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Pasir Putih	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Mentawa Baru Hulu	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Mentawa Baru Hilir	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Ketapang	Perdagangan dan Jasa
		Banguang Makmur	Holtikultura dan Peternakan
		Bapeang	Holtikultura dan Peternakan
		Bapanggung Raya	Holtikultura dan Peternakan
		Pelangsian	Holtikultura dan Peternakan
		Eka Bahurui	Holtikultura dan Peternakan
		Telaga Baru	Holtikultura dan Peternakan
2	Baamang	Kelurahan Baamang Tengah	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Baamang Hilir	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Baamang Hulu	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Baamang Barat	Perdagangan dan Jasa
		Kelurahan Tanah Mas	Holtikultura dan Peternakan
		Tinduk	Holtikultura, Peternakan dan Rotan
3	Seranau	Kelurahan Mentaya Seberang	Rotan dan Holtikultura
		Batuah	Karet dan Rotan
		Seragam Jaya	Holtikultura dan Peternakan
		Ganepo	Holtikultura dan Peternakan
		Terantang	Karet dan Rotan
		Terantang Hilir	Karet dan Rotan
4	Mentaya Hilir Utara	Pondok Damar	Perkebunan
		Bagendang Hilir	Kawasan Industri
		Bagendang Tengah	Kawasan Industri
		Natai Baru	Perkebunan
		Bagendang Hulu	Kawasan Industri
		Sumber Makmur	Peternakan, Holtikultura dan Pengolahan limbah ternak
		Bagendang Permai	Kawasan Industri
5	Pulau Hanaut	Satiruk	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Serambut	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Bantian	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Bapinang Hilir Laut	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Hantipan	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
			Peternakan
		Babirah	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Bapinang Hilir	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Babaung	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Penyaguan	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Bamadu	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Bapinang Hulu	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Hanaut	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Makarti Jaya	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
		Rawa Sari	Tanaman Pangan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan
6	Mentaya Hilir Selatan	Jaya Karet	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Basirih Hulu	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Jaya Kelapa	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Basirih Hilir	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Samuda Kota	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Handil Sohor	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Samuda Kecil	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Samuda Besar	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Sebamban	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perkebunan
		Sei Ijum Raya	Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
7	Teluk Sampit	Desa Ujung Pandaran	Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan
		Desa Lampuyang	Tanaman Pangan dan Peternakan
		Desa Kuin Permai	Tanaman Pangan
		Desa Regei Lestari	Tanaman Pangan
		Desa Basawang	Tanaman Pangan
		Desa Parebok	Tanaman Pangan
8	Kota Besi	Kelurahan Kota Besi Hul	Hortikultura dan Tanaman Pangan
		Kelurahan Kota Besi Hilir	Hortikultura dan Tanaman Pangan
		Soren	Perkebunan
		Bajarum	Perkebunan dan Perikanan
		Kandan	Perkebunan
		Camba	Perkebunan dan Perikanan
		Simpur	Perkebunan
		Pamalian	Perkebunan
		Rasau Tumbuh	Perkebunan
		Palangan	Perkebunan
		Hanjalipan	Perkebunan
9	Telawang	Biru Maju	Perkebunan dan Hortikultura
		Sumber Makmur	Perkebunan dan Peternakan
		Sebab	Perkebunan, Perdagangan dan Jasa
		Penyang	Perkebunan
		Tanah Putih	Perkebunan
		Kenyala	Perkebunan
10	Cempaga	Luwuk Bunter	Perkebunan
		Sungai Paring	Perkebunan
		Cempaka Mulia Timur	Perkebunan
		Cempaka Mulia Barat	Perkebunan
		Jemaras	Perkebunan
		Luwuk Ranggan	Perkebunan
		Patai	Perkebunan
		Rubung Buyung	Perkebunan
11	Cempaga Hulu	Pantai Harapan	Perkebunan
		Sungai Ubar Mandiri	Perkebunan
		Bukit Raya	Perkebunan
		Parit	Perkebunan
		Sudan	Perkebunan
		Keruing	Perkebunan
		Pelantaran	Perdagangan, Jasa dan Perkebunan
		Pundu	Perdagangan, Jasa dan Perkebunan
		Bukit Batu	Perkebunan
		Tumbang Koling	Perkebunan
		Selucing	Perkebunan
12	Parenggean	Kelurahan Parenggean	Perdagangan, Jasa dan Perkebunan
		Sari Harapan	Perkebunan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
		Karang Sari	Perkebunan dan Peternakan
		Sumber Makmur	Perkebunan
		Menjalin	Perkebunan
		Barunang Miri	Perkebunan
		Tehang	Perkebunan
		Bandar Agung	Perkebunan
		Mekar Jaya	Perkebunan
		B.Tunggal Jaya	Perkebunan
		Bukit Harapan	Perkebunan
		Karya Bersama	Perkebunan
		Karang Tunggal	Perkebunan dan Peternakan
		Bजारau	Perkebunan
		Kabuau	Perkebunan
13	Tualan Hulu	Cempaka Putih	Perkebunan
		Jatiwaringin	Perkebunan
		Damar Makmur	Perkebunan
		Bukit Makmur	Perkebunan
		Tumbang Mujan	Perkebunan
		Wonosari	Perkebunan
		Merah	Perkebunan
		Tanjung Jorong	Perkebunan
		Sebungsu	Perkebunan
		Mekar Sari	Perkebunan
		Luwuk Sampun	Perkebunan
14	Mentaya Hulu	Tangar	Perdagangan, Jasa dan Perkebunan
		Ba'Ampah	Perkebunan
		Kawan Batu	Perkebunan
		Tanjung Bantur	Perkebunan
		Penda Durian	Perkebunan
		Pahirangan	Perkebunan
		Satiung	Perkebunan
		Santilik	Perkebunan
		Tangkarobah	Perkebunan
		Pemantang	Perkebunan
		Tumbang Sapiri	Perkebunan
		Bawan	Perkebunan
		Tanjung Jariangau	Perkebunan
		Kapuk	Perkebunan
		Pantap	Perkebunan
		Kelurahan Kuala Kuayan	Perdagangan, Jasa dan Perkebunan
15	Bukit Santuai	Tumbang Tilap	Perkebunan
		Tumbang Kaminting	Perkebunan
		Tanah Haluan	Perkebunan
		Tumbang Panyahuan	Perkebunan
		Tumbang Batu	Perkebunan
		Tumbang Getas	Perkebunan
		Tumbang Sapia	Perkebunan
		Tewai Hara	Perkebunan
		Tumbang Payang	Perkebunan
		Tumbang Kania	Perkebunan
		Tumbang Torung	Perkebunan
		Lunuk Bagantung	Perkebunan
		Tumbang Tawan	Perkebunan

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	SEKTOR/PRODUK UNGGULAN
		Tumbang Saluang	Perkebunan
16	Antang Kalang	Tumbang Kalang	Perkebunan
		Waringin Agung	Perkebunan
		Mulya Agung	Perkebunan
		Bhakti Karya	Perkebunan
		Gunung Makmur	Perkebunan
		Tumbang Sepayang	Perkebunan
		Tumbang Gagu	Perkebunan
		Tumbang Hejan	Perkebunan
		Tumbang Manya	Perkebunan
		Sungai Hanya	Perkebunan
		Kuluk Telawang	Perkebunan
		Sungai Puring	Perkebunan
		Tumbang Ngahan	Perkebunan
		Tumbang Ramei	Perkebunan
		Buntut Nusa	Perkebunan
17	Telaga Antang	Tumbang Boloi	Perkebunan
		Luwuk Kuwan	Perkebunan
		Rantau Tampang	Perkebunan
		Tumbang Mangkup	Perkebunan
		Rantau Katang	Perkebunan
		Tumbang Sangai	Perkebunan
		Tukang Langit	Perkebunan
		Beringin Agung	Perkebunan
		Agung Mulya	Perkebunan
		Batu Agung	Perkebunan
		Bukit Indah	Perkebunan
		Tumbang Puan	Perkebunan
		Rantau Suang	Perkebunan
		Rantau Sawang	Perkebunan
		Tanjung Harapan	Perkebunan
		Buana Mustika	Perkebunan
		Tri Buana	Perkebunan
		Tumbang Bajanei	Perkebunan

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN

Penyusunan APBD merupakan bagian penting dalam tahap pembangunan daerah. Hal tersebut karena penyusunan anggaran harus menyelaraskan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Tujuan dari penyusunan ini sendiri berfokus pada penyelarasan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya, mengalokasikan sumberdaya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran secara baik.

Uraian kinerja keuangan Kabupaten Kotawaringin Timur disajikan dalam periode tahun 2011-2019, dengan penyajian datanya diuraikan dari tahun 2010 sebagai tahun dasar periode tahun 2011-2019, serta untuk menunjukkan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya. Data kinerja keuangan tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 disajikan berdasarkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Untuk kinerja keuangan APBD Tahun Anggaran 2020 sudah menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tetapi untuk struktur APBD tahun 2020 masih memakai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

APBD Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki struktur yang terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yaitu, Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yaitu, Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Sedangkan untuk komponen APBD terdiri atas:

1. Komponen Pendapatan:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
 - 2) Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
2. Komponen Belanja:
 - a) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan

- Belanja Tidak Terduga; dan
- b) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
1. Komponen Pembiayaan:
- a) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
 - c) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Berikut adalah ringkasan perubahan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 APBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020

URAIAN		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN		828.734.509.480,00	927.039.481.418,50	1.174.156.171.006,29	1.271.049.106.072,36	1.417.508.897.992,25	1.612.919.456.649,57	1.613.878.776.709,00	1.662.132.667.321,00	1.854.002.131.377,00	1.860.286.711.945,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH		63.335.570.000,00	88.262.410.000,00	125.658.370.288,00	142.921.120.244,30	159.190.201.323,84	180.025.392.949,57	241.768.921.009,00	212.034.758.021,00	245.907.566.075,00	419.646.803.645,00
1	Pendapatan Pajak Daerah	17.363.596.000,00	7.847.440.000,00	21.579.670.288,00	36.510.240.126,59	36.510.240.126,59	39.512.434.000,00	43.099.211.024,00	57.860.874.120,00	73.500.000.000,00	265.329.103.951,00
2	Hasil Retribusi Daerah	8.054.196.000,00	91.810.119.947,00	9.848.177.500,00	12.701.331.000,00	12.813.831.709,00	14.248.193.800,00	11.617.214.804,00	12.336.617.454,00	16.367.494.800,00	12.719.779.033,00
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.750.000.000,00	2.500.000.000,00	4.410.332.000,00	5.747.690.957,16	5.747.690.957,16	5.698.978.749,57	4.238.380.644,00	8.100.233.590,00	8.391.483.475,00	8.595.948.859,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.167.778.000,00	67.253.845.000,00	89.820.190.500,00	116.070.366.000,00	102.623.510.178,68	120.565.786.400,00	182.814.114.537,00	133.737.032.857,00	147.648.587.800,00	133.001.971.802,00
DANA PERIMBANGAN		665.680.085.000,00	725.023.516.000,00	859.593.730.132,00	944.011.377.298,00	968.514.728.265,00	1.241.515.046.000,00	1.149.656.835.000,00	1.128.582.157.000,00	1.284.523.823.000,00	1.045.078.758.000,00
1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Hasil Pajak	88.065.422.000,00	76.176.635.000,00	93.916.473.132,00	135.464.302.000,00	127.086.625.265,00	145.723.581.000,00	110.194.165.000,00	93.569.859.000,00	139.888.833.000,00	92.729.145.000,00
2	Dana Alokasi Umum	531.968.763.000,00	618.026.440.000,00	708.665.917.000,00	788.804.313.000,00	788.804.313.000,00	832.526.925.000,00	820.559.562.000,00	820.559.562.000,00	843.967.281.000,00	772.439.994.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	45.645.900.000,00	30.820.440.000,00	57.011.340.000,00	53.011.650.000,00	52.625.790.000,00	263.264.540.000,00	218.903.108.000,00	214.452.736.000,00	300.667.709.000,00	179.909.619.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		99.718.854.480,00	41.317.673.265,00	188.904.070.286,29	184.116.608.530,06	289.801.968.403,41	191.379.017.700,00	222.453.020.700,00	321.515.752.300,00	323.570.742.302,00	395.561.150.300,00
1	Pendapatan Hibah	1.702.475.000,00	1.256.638.265,00	0,00	6.450.543.000,00	75.163.988.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	87.522.620.000,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	41.000.000.000,00	72.435.882.153,50	93.112.287.286,29	102.610.032.705,25	63.817.651.494,23	81.148.532.700,00	81.148.532.700,00	87.741.572.300,00	87.741.572.302,00	121.741.572.300,00
3	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	57.016.379.480,00	39.911.035.000,00	89.642.183.000,00	95.606.603.000,00	95.606.603.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	34.750.000.000,00	12.464.431.000,00	28.297.573.000,00
4	Bantuan Keuangandari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	150.000.000,00	6.149.600.000,00	7.830.000.000,00	55.213.725,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.230.485.000,00	133.804.488.000,00	129.483.060.000,00	153.823.619.000,00	157.999.385.000,00
BELANJA		864.416.958.000,00	968.736.121.500,50	1.313.501.419.830,00	1.410.032.040.729,26	1.466.904.089.587,80	1.512.626.847.318,51	1.751.422.707.767,78	1.876.990.951.800,92	2.081.893.231.259,86	1.965.002.119.526,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG		413.406.329.400,00	480.343.013.600,00	578.968.375.567,00	594.818.997.347,26	749.026.115.978,50	716.639.615.383,51	863.790.828.424,76	855.227.755.639,00	973.119.731.686,00	984.356.298.833,00
BELANJA LANGSUNG		451.010.628.600,00	488.393.107.900,00	734.533.044.263,00	815.213.043.382,00	717.877.973.609,30	795.987.231.935,00	887.631.879.343,02	1.021.763.196.161,92	1.108.773.499.573,86	980.645.820.693,00
SURPLUS (DEFISIT)		(35.682.448.520,00)	(41.696.640.081,50)	(139.345.248.823,71)	(138.982.934.656,90)	0	(2.921.367.644.107,51)	(137.543.931.058,78)	(214.858.284.479,92)	(227.891.099.882,86)	(106.266.427.552,00)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		86.543.921.662.53,00	167.695.093.142,98	254.729.225.901,31	264.718.349.099,90	321.122.895.048,43	218.151.879.443,61	321.122.895.048,43	374.580.242.114,98	355.761.093.144,17	211.545.776.170,45
1	Siapa Tahun Anggaran Sebelumnya	78.518.921.662.53,00	159.670.093.142,98	254.729.225.901,31	264.171.866.099,90	321.122.895.048,43	159.319.785.279,84	321.122.895.048,43	374.580.242.114,98	355.761.093.144,17	211.545.776.170,45
2	Penerimaan kembali Pinjaman	8.025.000.000,00	8.025.000.000,00	0,00	3.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan kembali investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		7.174.000.000,00	7.174.000.000,00	9.974.000.000,00	15.369.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	15.955.000.000,00	13.000.000.000,00
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.174.000.000,00	7.174.000.000,00	9.974.000.000,00	15.369.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	15.955.000.000,00	13.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		79.369.921.662,53	160.521.093.142,98	244.755.225.901,31	249.349.349.099,90	309.752.895.048,43	202.781.879.443,61	309.752.895.048,43	359.210.242.114,98		116.449.373.095,45

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotawaringin Timur

Komponen Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

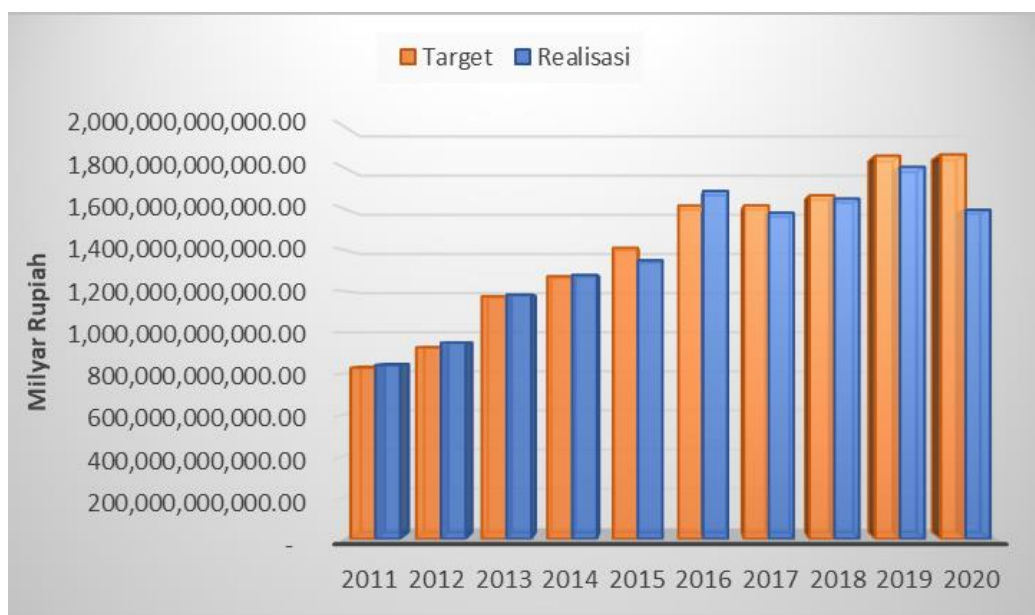
1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun ke tahun terus meningkat. Realisasi setiap tahunnya fluktuatif, namun tetap disekitaran ataupun hampir mencapai 100 persen. Hal tersebut ini dapat dilihat dalam target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011 sampai dengan 2020 (Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah / (Berkurang)
2010	671.397.469.600,00	672.110.541.949,69	100,11	713.072.349,69
2011	828.734.509.480,00	841.969.411.205,22	101,60	13.234.901.725,22
2012	927.039.481.418,50	949.653.397.938,75	102,44	22.613.916.520,25
2013	1.174.156.171.006,29	1.183.154.186.108,20	100,77	8.998.015.101,91
2014	1.271.049.106.072,36	1.277.963.486.669,73	100,54	6.914.380.597,37
2015	1.408.740.796.789,00	1.348.777.186.814,38	95,74	(59.963.609.974,62)
2016	1.612.919.456.649,57	1.683.342.255.828,07	104,37	70.422.799.179
2017	1.613.878.776.709,00	1.579.048.584.267,91	97,84	(34.830.192.442)
2018	1.662.132.667.321,00	1.646.602.710.973,29	99,07	(15.529.956.347,71)
2019	1.854.002.131.377,00	1.800.055.382.996,63	97,09	(68.698.428.891)
2020	1.858.735.691.974,00	1.617.040.594.614,87	87,00	(241.695.097.359,13)
Rata-rata	1.352.980.568.945,16	1.327.247.067.215,16	98,10	(25.733.501.730,00)

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2020

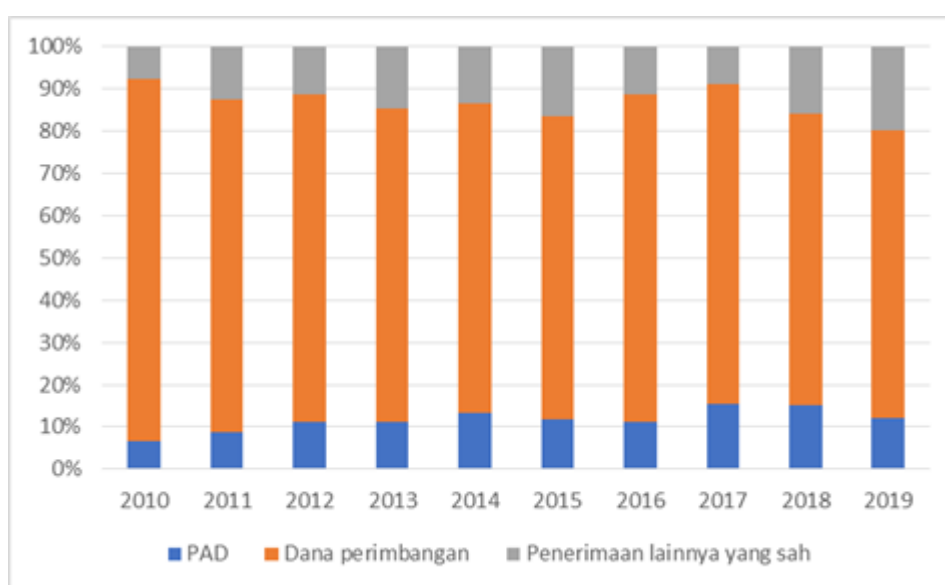
Berdasarkan data tersebut juga terlihat, rata-rata target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.267.903.456.641,46 dengan realisasi sebesar Rp. 1.298.267.714.475,19. Selain data tersebut terdapat juga data presentase proporsi komponen pendapatan terhadap total

pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun Anggaran 2011-2020 ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.

Tabel 3.3 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	6.66	8.67	11.15	11.20	13.40	11.80	11.25	15.58	15.27	12.24
Dana perimbangan	85.61	78.91	77.62	74.10	73.07	71.81	77.54	75.67	68.85	68.04
Penerimaan lainnya yang sah	7.73	12.42	11.23	14.70	13.53	16.39	11.21	8.75	15.88	19.70
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.2 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Dari tabel di atas terlihat bahwa proporsi PAD pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi dari tahun 2010-2019. Namun, tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 12.24 persen jika dibandingkan dengan kontribusi PAD tahun 2018 yang sebesar 15.27 persen. Semakin besar kontribusi PAD atas pendapatan daerah, menunjukkan kemandirian daerah semakin besar. Dari data di atas menunjukkan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017.

Untuk Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah dan Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.4 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Jenis Penerimaan	Realisasi (juta rupiah)									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PAD	44.794,24	72.949,67	105.884,70	132.536,66	171.262,04	159.171,94	189.462,86	245.980,10	251.497,99	220.447,37
Dana Perimbangan	575.401,78	664.506,28	737.149,38	876.666,28	933.853,50	968.516,73	1.203.679,29	1.101.878,06	1.133.632,01	1.224.889,58
Penerimaan lainnya yang sah	51.914,52	104.513,46	106.619,31	173.951,24	172.847,95	212.808,52	290.274,96	231.190,42	261.472,69	354.718,42
Total	672.110,54	841.969,41	949.653,40	1.183.154,19	1.277.963,49	1.340.497,19	1.683.417,12	1.579.048,58	1.646.602,71	1.800.055,38

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.5 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah dan Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020

Jenis Penerimaan	Realisasi (juta rupiah)	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)
	2020	2020
PAD	232.885,87	14,40
Pendapatan Transfer	1.162.794,04	71,91
Lain-lain Pendapatan yang Sah	221.360,67	13,69
Total	1.617.040,59	100,00

Sumber: Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Target dan realisasi pendapatan daerah periode Tahun Anggaran 2010-2019 tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
- 2) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara keseluruhan selama Tahun Anggaran 2010-2019, rata-rata target tahunan sebesar Rp. 152.159.231.167,06 dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 159.400.585.752,66. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	50.648.575.000,00	44.794.244.729,69	88,44	(5.854.330.270,31)
2011	63.335.570.000,00	72.949.668.894,22	115,17	9.614.098.894,22
2012	88.262.410.000,00	105.884.703.503,79	119,96	17,622.293.503,79
2013	125.658.370.288,00	132.536.664.627,77	105,47	6.878.294.339,77
2014	142.921.120.244,30	171.262.043.654,20	119,82	28.340.923.409,90
2015	171.029.628.083,75	159.190.201.323,84	93,08	(11.839.426.759,91)
2016	180.025.392.949,57	189.462.859.915,05	105,24	9.437.466.965,48
2017	241.768.921.009,00	245.980.100.883,59	101,74	4.211.179.874,59
2018	212.034.758.021,00	251.497.998.769,28	118,61	39.463.240.748,28
2019	245.907.566.075,00	220.447.371.225,15	89,65	(25.460.194.849,85)
Rata-rata	152.159.231.167,06	159.400.585.752,66	105,72	7.580.697.827,81

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

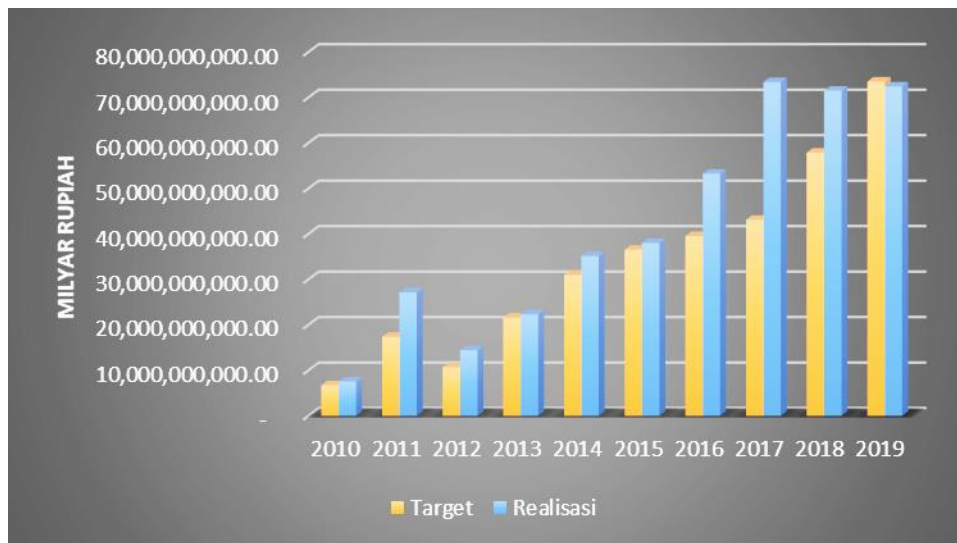
Sedangkan untuk realisasi pajak daerah periode Tahun Anggaran 2010-2018 secara keseluruhan melampaui dari target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2019 realisasi yang dicapai hanya 98,53 persen. Rata-rata target pajak daerah sebesar Rp. 33.776.912.755,86 dengan realisasi mencapai Rp. 41.500.269.399,45 yang dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	6.716.977.000,00	7.538.581.275,00	112,23	821.604.275,00
2011	17.363.596.000,00	27.102.148.741,00	156,08	9.738.552.741,00
2012	10.661.125.000,00	14.392.611.416,00	135,00	3.731.486.416,00
2013	21.579.670.288,00	22.304.176.891,00	103,35	724.506.603,00
2014	30.965.000.000,00	35.108.260.119,00	113,38	4.143.260.119,00
2015	36.510.240.126,59	38.005.168.479,00	104,09	1.494.928.352,41
2016	39.512.434.000,00	53.246.842.390,00	134,76	13.734.408.390,00
2017	43.099.211.024,00	73.380.787.337,00	170,26	30.281.576.313,00
2018	57.860.874.120,00	71.504.270.674,50	123,58	(13.643.396.555)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2019	73.500.000.000,00	72.419.846.672,00	98,53	(1.080.153.328,00)
Rata-rata	33.776.912.755,86	41.500.269.399,45	125,13	4.994.677.332,64

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: Update Data BPKAD dan BAPPEDA. 2020

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan data retribusi daerah Tahun Anggaran 2010-2019, rata-rata target retribusi daerah sebesar Rp. 11.583.713.879,10 dengan rata-rata realisasi mencapai Rp. 11.626.116.301,60 yang dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	25.157.668.000,00	24.047.097.465,00	95,58	(1.110.570.535,00)
2011	8.054.196.000,00	9.400.067.400,00	116,71	1.345.871.400,00
2012	7.847.440.000,00	8.877.075.525,00	113,12	1.029.635.525,00
2013	9.848.177.500,00	11.231.584.343,00	114,04	1.383.406.843,00
2014	10.171.694.400,00	10.296.258.196,00	101,22	124.563.796,00
2015	12.626.331.000,00	12.813.831.709,00	100,89	112.500.709,00
2016	14.248.193.800,00	13.558.085.627,00	95,16	(690.108.173,00)
2017	11.617.214.804,00	10.333.307.851,00	88,95	(1.283.906.953,00)
2018	12.336.617.454,00	13.108.956.030,00	106,26	772.338.576,00
2019	16.367.494.800,00	15.597.735.179,50	95,30	(769.759.620,50)
Rata-rata	12.827.502.775,80	12.926.399.932,55	102,72	91.397.156,75

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Data penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari bagian laba perusahaan milik daerah Tahun Anggaran 2010-2019 menunjukkan rata-rata target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.

4.852.142.176,00 dengan realisasi mencapai Rp. 5.215.097.287,28 yang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	2.830.000.000,00	2.366.423.253,39	83,62	(463.576.746,61)
2011	2.750.000.000,00	3.385.127.292,92	123,10	635.127.292,92
2012	2.500.000.000,00	3.453.051.017,68	138,12	953.051.017,68
2013	4.410.332.000,00	4.092.453.073,65	92,79	(317.878.926,35)
2014	3.854.322.344,30	3.854.322.344,30	100,00	0,00
2015	5.747.690.957,16	5.747.690.957,16	100,00	0,00
2016	5.698.978.749,57	5.772.223.972,70	101,29	73.245.223,13
2017	4.238.380.644,00	7.220.337.721,00	170,36	2.981.957.077,00
2018	8.100.233.590,00	8.134.426.028,00	100,42	(34.192.438)
2019	8.391.483.475,00	8.124.917.212,00	96,82	(266.566.263)
Rata-rata	4.852.142.176,00	5.215.097.287,28	110,65	356.116.623,68

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Penerimaan Lain-lain PAD yang sah utamanya berasal dari banyak sumber, yaitu :

(a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (f) Pendapatan Denda Pajak; (g) Pendapatan Denda Retribusi; (h) Pendapatan dari Pengembalian; (i) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (j) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (k) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Berdasarkan data pada Tabel 3.10 terkait Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode Tahun Anggaran 2010- 2019, rata-rata target Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 95.762.693.459,43 dengan realisasi mencapai Rp. 93.017.962.844,05.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	15.943.930.000,00	10.842.142.736,30	68,00	(5.101.787.263,70)
2011	35.167.778.000,00	33.062.325.460,30	94,01	(2.105.452.539,70)
2012	67.253.845.000,00	79.161.965.545,11	117,70	11.908.120.545,11
2013	89.820.190.500,00	94.908.450.320,12	105,66	5.088.259.820,12
2014	97.930.103.500,00	122.003.202.994,90	124,58	24.073.099.494,90
2015	116.070.366.000,00	102.623.510.178,68	88,41	(13.446.855.821,32)
2016	120.565.786.400,00	116.878.542.761,33	96,94	(3.687.243.638,67)
2017	133.489.314.537,27	155.041.145.474,59	79,16	(27.823.642.832,42)
2018	133.737.032.857,00	91.353.470.807,51	68,31	42.383.562.049
2019	147.648.587.800,00	124.304.872.161,65	84,19	(23.343.715.638,35)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
Rata-rata	95.762.693.459,43	93.017.962.844,05	92,70	(2.652.126.892,51)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

2). Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri atas: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Secara keseluruhan berdasarkan data, rata-rata target sebesar Rp. 954.160.504.043,00 dengan realisasi mencapai Rp. 942.017.289.581,10 yang dapat dilihat dari Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	565.738.206.000,00	575.401.780.795,00	101,70	9.663.574.795,00
2011	665.680.085.000,00	664.506.278.946,00	99,82	(1.173.806.054,00)
2012	725.023.516.000,00	737.149.384.210,00	101,67	12.125.868.210,00
2013	859.593.730.132,00	876.666.277.680,00	101,99	17.072.547.548,00
2014	944.011.377.298,00	933.853.496.212,00	98,92	(10.157.881.086,00)
2015	977.280.265.000,00	968.516.728.265,00	99,10	(8.763.536.735,00)
2016	1.241.515.046.000,00	1.203.679.291.956,00	96,95	(37.835.754.044,00)
2017	1.149.656.835.000,00	1.101.878.062.697,00	95,84	(47.778.772.303,00)
2018	1.128.582.157.000,00	1.133.632.012.934,00	100,45	(5.049.855.934)
2019	1.284.523.823.000,00	1.224.889.582.116,00	95,36	(59.634.240.884,00)
Rata-rata	954.160.504.043,00	942.017.289.581,10	98,90	(20.091.284.030,63)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

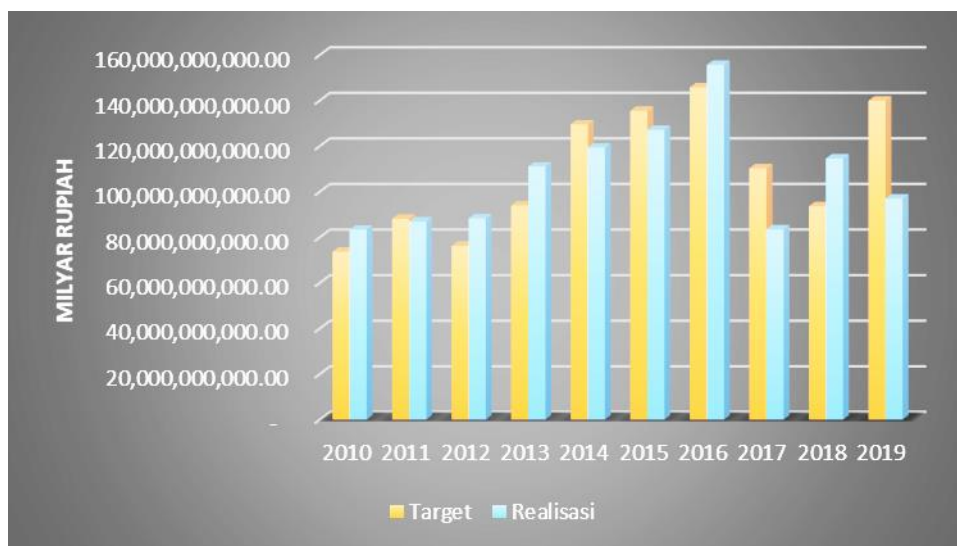
Berdasarkan data pada Tabel 3.12 terkait Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak menunjukan rata-rata target penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari selama Tahun Anggaran 2010-2019 adalah sebesar Rp. 108.613.930.043,00 dengan realisasi mencapai Rp. 106.649.424.509,70.

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	73.667.544.000,00	83.331.118.795,00	113,17	9.663.574.795,00
2011	88.065.422.000,00	86.891.615.946,00	98,67	(1.173.806.054,00)
2012	76.176.636.000,00	88.302.504.210,00	115,92	12.125.868.210,00
2013	93.916.473.132,00	110.989.020.680,00	118,18	17.072.547.548,00
2014	129.472.485.298,00	119.314.604.212,00	92,15	(10.157.881.086,00)
2015	135.464.302.000,00	127.086.625.265,00	93,82	(8.377.676.735,00)
2016	145.723.581.000,00	155.603.036.556,00	106,78	9.879.455.556,00
2017	110.194.165.000,00	83.458.818.125,00	75,74	(26.735.346.875,00)
2018	93.569.859.000,00	114.547.516.189,00	122,42	(20.977.657.189)
2019	139.888.833.000,00	96.969.385.119,00	69,32	(42.919.447.881,00)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
Rata-rata	108.613.930.043,00	106.649.424.509,70	100,62	(6.160.036.971,10)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.4 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.13 terkait Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum selama Tahun Anggaran 2010-2019 menunjukkan rata-rata target penerimaan sebesar Rp. 720.366.741.700,00 dengan realisasi juga mencapai Rp. 720.366.741.700,00.

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	459.745.862.000,00	459.745.862.000,00	100,00	0,00
2011	531.968.763.000,00	531.968.763.000,00	100,00	0,00
2012	618.026.440.000,00	618.026.440.000,00	100,00	0,00
2013	708.665.917.000,00	708.665.917.000,00	100,00	0,00
2014	778.842.792.000,00	778.842.792.000,00	100,00	0,00
2015	788.804.313.000,00	788.804.313.000,00	100,00	0,00
2016	832.526.925.000,00	832.526.925.000,00	100,00	0,00
2017	820.559.562.000,00	820.559.562.000,00	100,00	0,00
2018	820.559.562.000,00	820.559.562.000,00	99,99	68.008.000
2019	843.967.281.000,00	843.967.281.000,00	100,00	0,00
Rata-rata	720.366.741.700,00	720.366.741.700,00	100,00	6.800.800,00

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.14 terkait Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus selama Tahun Anggaran 2010-2019 menunjukkan rata-rata target sebesar Rp. 125.179.832.300,00 dengan realisasi mencapai Rp. 115.007.924.171,40.

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	32.324.800.000,00	32.324.800.000,00	100,00	0,00
2011	45.645.900.000,00	45.645.900.000,00	100,00	0,00
2012	30.820.440.000,00	30.820.440.000,00	100,00	0,00
2013	57.011.340.000,00	57.011.340.000,00	100,00	0,00
2014	35.696.100.000,00	35.696.100.000,00	100,00	0,00
2015	53.011.650.000,00	52.625.790.000,00	99,27	(385.860.000,00)
2016	263.264.540.000,00	215.549.330.400,00	81,88	(47.715.209.600,00)
2017	218.903.108.000,00	197.859.682.572,00	90,39	(21.043.425.428,00)
2018	214.452.736.000,00	198.592.942.745,00	92,60	15.859.793.255
2019	300.667.709.000,00	283.952.915.997,00	94,44	(16.714.793.003)
Rata-rata	125.179.832.300,00	115.007.924.171,40	95,86	(6.999.949.477,60)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

3). Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari : (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota/Lainnya, (d) Dana Transfer Pusat, (e) Dana Insentif Daerah (DID), dan (f) Lain-lain Penerimaan.

Berdasarkan data Tabel 3.15 menunjukkan rata-rata target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode Tahun Anggaran 2010-2019 sebesar Rp. 196.085.321.232,21 dengan rata-rata realisasi mencapai Rp. 203.730.496.241,02.

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	55.010.688.600,00	51.914.516.425,00	94,37	(3.096.172.175,00)
2011	99.718.854.480,00	104.513.463.365,00	104,81	4.794.608.885,00
2012	113.753.555.418,50	106.619.310.224,96	93,73	(7.134.245.193,54)
2013	188.904.070.586,29	173.951.243.800,43	92,08	(14.952.826.785,86)
2014	184.116.606.530,06	172.847.946.803,53	93,88	(11.268.659.726,53)
2015	260.430.903.705,25	289.801.968.403,41	111,28	29.371.064.698,16
2016	191.379.017.700,00	290.274.963.775,02	151,68	98.895.946.075,02
2017	222.453.020.700,00	231.190.420.687,32	103,93	8.737.399.987,32
2018	321.515.752.300,00	261.472.699.270,01	81,33	31.485.464.044
2019	323.570.742.302,00	354.718.429.655,48	109,63	31.147.687.353,48
Rata-rata	196.085.321.232,21	203.730.496.241,02	103,67	16.798.026.716,21

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.16 Tahun Anggaran 2010-2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah yang berasal dari Pemerintah diakumulasikan memiliki target sebesar Rp. 14.949.189.626,50 dengan realisasi mencapai Rp. 23.425.765.282,83.

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Pendapatan Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	1.000.000.000,00	297.525.000,00	29,75	(702.475.000,00)
2011	1.702.475.000,00	962.701.735,00	56,55	(739.773.265,00)
2012	1.256.638.265,00	1.031.798.310,00	82,11	(224.839.955,00)
2013	0,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2014	0,00	528.353.000,00	-	528.353.000,00
2015	6.450.543.000,00	75.163.988.909,18	1.165,24	68.713.445.909,18
2016	0,00	83.411.674.124,10	-	83.411.674.124,10
2017	0,00	4.382.456.000,00	-	4.382.456.000,00
2018	69.541.120.000,00	300.000.000,00	0,43	(69.241.120.000,00)
2019	69.541.120.000,00	68.169.155.750,00	98,03	(1.371.964.250,00)
Rata-rata	14.949.189.626,50	23.425.765.282,83	238,69	8.476.575.656,33

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.17 terkait lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana penyesuaian Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target sebesar Rp. 435.766.236.080,00 dengan realisasi mencapai Rp. 438.951.391.280,00.

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	20.010.688.600,00	19.209.763.600,00	96,00	(800.925.000,00)
2011	57.016.379.480,00	56.721.831.680,00	99,48	(294.547.800,00)
2012	39.911.035.000,00	41.395.584.000,00	103,72	1.484.549.000,00
2013	89.642.183.000,00	89.642.183.000,00	100,00	0,00
2014	73.864.916.000,00	73.864.916.000,00	100,00	0,00
2015	95.606.603.000,00	95.606.603.000,00	100,00	0,00
2016	5.000.000.000,00	7.796.079.000,00	155,92	2.796.079.000,00
2017	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	0,00
2018	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	-	-
2019	12.464.431.000,00	12.464.431.000,00	100,00	-
Rata-rata	435.766.236.080,00	438.951.391.280,00	955,12	3.185.155.200,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.18 terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana bagi hasil pajak provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target sebesar Rp. 78.336.010.497,71 dengan realisasi mencapai Rp. 77.620.837.350,19.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	34.000.000.000,00	32.407.227.825,00	95,32	(1.592.772.175,00)
2011	41.000.000.000,00	46.828.929.950,00	114,22	5.828.929.950,00
2012	72.435.882.153,50	64.041.927.914,96	88,41	(8.393.954.238,54)
2013	93.112.287.586,29	78.149.460.800,43	83,93	(14.962.826.785,86)
2014	102.421.692.530,06	90.624.677.803,53	88,48	(11.797.014.726,53)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2015	102.610.032.705,25	63.817.651.494,23	62,19	(38.792.381.211,02)
2016	81.148.532.700,00	93.836.725.650,92	115,64	12.688.192.950,92
2017	81.148.532.700,00	85.503.476.687,32	105,37	4.354.943.987,32
2018	87.741.572.300,00	99.921.151.470,01	113,88	(12.179.579.170,01)
2019	87.741.572.302,00	121.077.143.905,48	137,99	33.335.571.603,48
Rata-rata	78.336.010.497,71	77.620.837.350,19	100,54	3.151.088.981,52

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.19 terkait dana penyesuaian dan otonomi khusus Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target sebesar Rp. 43.576.623.608,00 dengan realisasi mencapai Rp. 43.783.130.608,00.

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	20.010.688.600,00	19.109.763.600,00	95,50	900.925.000,00
2011	57.016.379.480,00	57.186.295.480,00	100,30	169.916.000,00
2012	39.911.035.000,00	39.911.035.000,00	100,00	-
2013	89.642.183.000,00	89.642.183.000,00	100,00	-
2014	73.864.916.000,00	73.864.916.000,00	100,00	-
2015	95.606.603.000,00	95.606.603.000,00	100,00	-
2016	5.000.000.000,00	7.796.079.000,00	155,92	2.796.079.000
2017	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	-
2018	34.750.000.000,00	34.750.000.000,00	100,00	-
2019	12.464.431.000,00	12.464.431.000,00	100,00	-
Rata-rata	43.576.623.608,00	43.783.130.608,00	100,47	(206.507.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Berdasarkan data pada Tabel 3.20 terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota/lainnya Tahun Anggaran 2012-2015 memiliki target sebesar Rp. 5.777.400.000,00 dengan realisasi mencapai Rp. 5.602.400.000,00. Sedangkan untuk tahun 2010-2011 dan 2016-2019 tidak ada bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota/lainnya

Tabel 3.20 Target dan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2011-2020

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
2013	6.149.600.000,00	6.149.600.000,00	100,00	-
2014	7.830.000.000,00	7.830.000.000,00	100,00	-
2015	8.980.000.000,00	8.280.000.000,00	92,20	(700.000.000,00)
2016	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
Rata-rata	5.777.400.000,00	5.602.400.000,00	98,05	(700.000.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2011 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Berdasarkan data pada Tabel 3.21 terkait pendapatan lainnya Tahun Anggaran 2015-2019 memiliki target sebesar Rp. 56.927.537.700,00 dengan realisasi mencapai Rp. 56.793.279.625,06. Sedangkan untuk tahun 2010-2014 tidak ada penerimaan pendapatan lainnya.

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Pendapatan Lainnya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	-	-	-
2011	-	-	-	-
2012	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	46.933.725.000,00	46.933.725.000,00	100,00	-
2016	105.230.485.000,00	105.230.485.000,00	100,00	-
2017	133.804.488.000,00	133.804.488.000,00	100,00	-
2018	129.483.060.000,00	128.459.206.809,55	99,21	(1.023.853.190,00)
2019	153.823.619.000,00	153.504.891.441,00	99,79	(318.727.559,00)
Rata-rata	56.927.537.700,00	56.793.279.625,06	99,76	(134.258.074,94)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.22 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2014–2019

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
1	Pendapatan	8,01	5,54	24,81	(6,20)	4,28	9,32	10,05
1.1	Pendapatan Asli Daerah	29,22	(7,05)	19,02	29,83	2,24	(12,35)	12,30
1.1.1	Pajak Daerah	57,41	8,25	40,10	37,81	(2,56)	1,28	28,18
1.1.2	Retribusi Daerah	(8,33)	24,45	5,81	(23,78)	26,86	18,99	10,07
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan	(5,82)	49,12	0,43	25,09	12,66	8,05	14,27
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	28,55	(15,88)	13,89	32,65	(41,08)	36,07	10,58
1.2	Dana Perimbangan	6,52	3,71	24,28	(8,46)	2,88	8,05	7,99
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	7,50	6,51	22,44	(46,36)	37,25	(15,35)	5,38
1.2.2	Dana Alokasi Umum	9,90	1,28	5,54	(1,44)	0,00	2,85	4,69
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	(37,39)	47,43	309,59	(8,21)	0,37	42,98	62,82
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	(0,63)	67,66	0,16	(20,35)	13,10	35,66	22,68
1.3.1	Hibah	5.183,53	14.126,09	10,97	(94,75)	(93,15)	22.623,05	5.950,96
1.3.2	Dana darurat							

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata pertumbuhan
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	15,96	(29,58)	47,04	(8,88)	16,86	21,17	12,09
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	(17,60)	29,43	(91,85)	(3,80)	363,33	(64,13)	47,42
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	27,33	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,27

Sumber : Data sudah diolah, BPKAD dan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur. 2019

Data pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2014-2019 menunjukkan rata-rata paling tinggi berada pada tahun 2019 yang mencapai 1.621,96 persen. Hibah, memiliki rata-rata tertinggi yakni 5.950,96 persen, dengan Dana Alokasi Umum memiliki rata-rata terkecil yakni 4,69 persen.

Kontribusi terbesar PAD Kabupaten Kotawaringin Timur bersumber dari pajak daerah, yaitu rata-rata 28,18 persen pada tahun 2014-2020. Kontribusi terbesar kedua dan ketiga PAD berturut-turut adalah Hasil Pengelolaan Keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah yang masing-masing sebesar 14,27 persen dan 10,58 persen. Struktur pendapatan ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan sangat banyak yang berasal dari pemerintah (APBN), atau secara umum APBD Kabupaten Kotawaringin Timur masih belum mandiri. Salah satu kelemahan dari struktur pendapatan seperti ini adalah relatif tingginya ketidakpastian pendapatan dalam rangka perencanaan anggaran. Selain itu aliran dana perimbangan juga tidak sepenuhnya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga mungkin terjadi keterlambatan proses pencairan dan lain sebagainya. Sebaliknya bila sumber pendapatan terbesar berasal dari PAD, maka proyeksi pendapatan akan lebih dapat diprediksi dengan baik, sehingga mempermudah perencanaan program dan kegiatan. Dengan memperhatikan pertumbuhan PAD yang dominan, ada kecenderungan potensi peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 30 klafikasi pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer yang meliputi :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat,

- b. Transfer antar Daerah.
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi :
 - a. Hibah,
 - b. Dana Darurat,
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk itu kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebagaimana tabel 3.23 dibawah ini :

Tabel 3.23 Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan	265.329.103.951,00	66.053.008.127,00	24,89
Pendapatan Retribusi Daerah	12.719.779.033,00	11.020.245.446,50	86,64
Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	8.595.948.859,00	8.595.948.859,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.450.951.831,00	147.216.672.651,39	111,99
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	418.095.783.674,00	232.885.875.083,89	55,70
PENDAPATAN TRANSFER			
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil Pajak	58.086.341.000,00	45.948.877.470,00	79,10
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	34.642.804.000,00	47.266.965.170,00	136,44
Dana Alokasi Umum	772.439.994.000,00	770.071.494.000,00	99,69
Dana Alokasi Khusus	179.909.619.000,00	181.455.042.554,00	100,86
Jumlah	1.045.078.758.000,00	1.044.742.379.194,00	99,97
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
Dana Otonomi Khusus	-	-	-
Dana Penyesuaian	28.297.573.000,00	28.297.831.000,00	100,00
Jumlah	28.297.573.000,00	28.297.831.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	121.741.572.300,00	89.753.831.949,98	73,72
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-
Jumlah	121.741.572.300,00	89.753.831.949,98	73,72
Jumlah Pendapatan Transfer	1.195.117.903.300,00	1.162.794.042.143,98	97,30
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	87.522.620.000,00	63.428.760.000,00	72,47
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
Pendapatan Lainnya	157.999.385.000,00	157.931.917.387,00	99,96
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	245.522.005.000,00	221.360.677.387,00	90,16
Jumlah Pendapatan	1.858.735.691.974,00	1.617.040.594.614,87	87,00

Sumber : Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

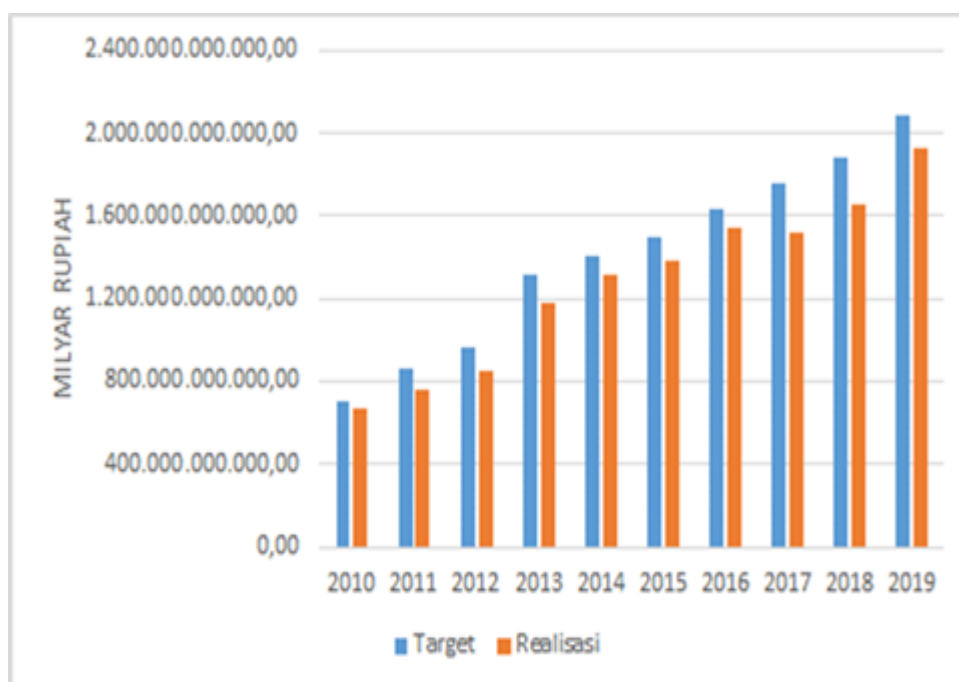
2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah Tahun Anggaran 2010-2019 disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Periode Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki rata-rata target belanja daerah sebesar Rp. 1.410.466.439.185,88 dengan realisasi mencapai Rp. 1.277.443.205.566,56 hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	705.106.666.100,00	664.240.295.017,19	94,20	(40.866.371.082,81)
2011	864.416.958.000,00	762.076.799.865,77	88,16	(102.340.158.134,23)
2012	968.736.121.500,00	847.606.409.561,42	87,50	(121.129.711.938,58)
2013	1.313.501.419.830,00	1.177.022.175.993,95	89,61	(136.479.243.836,05)
2014	1.410.032.040.729,26	1.309.277.060.826,42	92,85	(100.754.979.902,84)
2015	1.501.156.061.789,21	1.382.697.264.622,12	92,11	(118.458.797.167,09)
2016	1.631.408.233.081,73	1.540.102.862.809,64	94,40	(91.305.370.272,09)
2017	1.751.422.707.767,78	1.512.906.458.534,97	86,38	(238.516.249.232,81)
2018	1.876.990.951.800,92	1.650.196.620.850,78	87,92	(226.794.330.950,14)
2019	2.081.893.231.259,86	1.928.306.107.583,39	92,62	(153.587.123.676,47)
Rata-rata	1.410.466.439.185,88	1.277.443.205.566,56	90,58	(133.023.233.619,31)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Belanja daerah terbagi ke dalam dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Berikut adalah uraian terkait BTL dan BL Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019.

1) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri atas: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, (g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten dan (h) Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan data pada Tabel 3.25 Tahun Anggaran 2010-2019 rata-rata realisasi mencapai Rp. 675.851.612.670,41 dari target sebesar Rp. 615.785.653.344,01.

Tabel 3.25 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2010	356.481.459.798,15	338.297.880.240,19	94,90	(18.183.579.557,96)
2011	413.406.329.400,00	380.497.101.840,00	92,04	(32.909.227.560,00)
2012	480.343.013.600,00	415.798.912.518,00	86,56	(64.544.101.082,00)
2013	578.968.375.567,00	513.810.046.129,75	88,75	(65.158.329.437,25)
2014	594.818.997.347,26	555.982.875.843,00	93,47	(38.836.121.504,26)
2015	783.278.088.179,91	731.350.658.794,50	93,37	(51.927.429.385,41)
2016	859.081.547.062,00	758.619.288.937,80	88,31	(100.462.258.124,20)
2017	863.790.828.424,76	774.871.359.705,00	89,71	(88.919.468.719,76)
2018	855.227.755.639,00	790.919.068.124,00	92,48	(64.308.687.515,00)
2019	973.119.731.686,00	897.709.341.307,87	92,25	(75.410.390.378,13)
Rata-rata	675.851.612.670,41	615.785.653.344,01	91,18	(60.065.959.326,40)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.26 menjelaskan Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target rata-rata sebesar Rp.491.916.033.442,32 dengan realisasi mencapai Rp.451.829.178.958,41.

Tabel 3.26 Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/(Berkurang)
2010	309.418.783.998,15	293.712.060.383,00	94,92	(15.706.723.615,15)
2011	362.134.754.400,00	335.628.121.860,00	92,68	(26.506.632.540,00)
2012	419.155.153.950,00	373.659.031.968,00	89,15	(45.496.121.982,00)
2013	454.070.884.370,00	417.576.467.516,75	91,96	(36.494.416.853,25)
2014	457.263.417.311,00	443.890.067.463,00	97,08	(13.373.349.848,00)
2015	524.243.021.929,00	504.045.307.962,50	96,15	(20.197.713.966,50)
2016	604.864.587.317,00	517.257.055.373,80	85,52	(87.607.531.943,20)
2017	586.787.553.475,00	518.810.698.895,00	88,42	(67.976.854.580,00)
2018	577.493.640.514,00	536.092.983.365,00	92,83	(41.400.657.149,00)
2019	623.728.537.159,00	577.619.994.797,00	92,61	(46.108.542.362,00)
Rata-rata	491.916.033.442,32	451.829.178.958,41	92,13	(40.086.854.483,91)

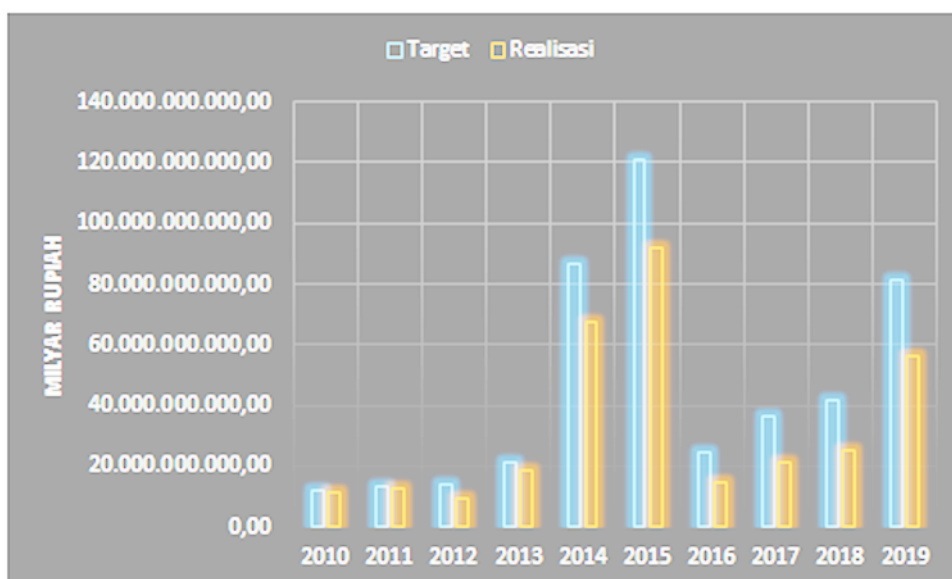
Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.27 menjelaskan Belanja Hibah selama Tahun Anggaran 2010-2019 rata-rata realisasinya mencapai Rp.32.793.863.416,79 dari target sebesar Rp. 45.188.614.671,60.

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	11.950.000.000,00	11.191.357.426,00	93,65	(758.642.574,00)
2011	13.552.640.000,00	12.800.182.750,00	94,45	(752.457.250,00)
2012	13.912.277.000,00	9.020.977.000,00	64,84	(4.891.300.000,00)
2013	20.956.139.379,00	18.245.650.393,00	87,07	(2.710.488.986,00)
2014	86.391.917.140,00	67.258.157.641,00	77,85	(19.133.759.499,00)
2015	120.912.425.125,00	91.949.427.504,00	76,05	(28.962.997.621,00)
2016	24.718.810.000,00	14.388.368.865,00	58,21	(10.330.441.135,00)
2017	36.569.832.000,00	21.406.856.345,00	58,54	(15.162.975.655,00)
2018	41.490.340.000,00	25.284.136.523,00	60,94	(16.206.203.477,00)
2019	81.431.766.072,00	56.393.519.720,87	69,25	(25.038.246.351,13)
Rata-rata	45.188.614.671,60	32.793.863.416,79	74,09	(12.394.751.254,81)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.28 menjelaskan Belanja Bantuan Sosial periode Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki jumlah target sebesar Rp.12.510.766.179,00 dengan realisasi mencapai Rp.7.941.259.688,00. Target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup signifikan disebabkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 3.28 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	10.635.435.800,00	9.446.895.000,00	88,82	(1.188.540.800,00)
2011	10.160.045.000,00	8.814.920.980,00	86,76	(1.345.124.020,00)
2012	14.862.407.650,00	6.972.852.550,00	46,92	(7.889.555.100,00)
2013	70.233.741.547,00	45.176.100.100,00	64,32	(25.057.641.447,00)
2014	4.663.938.866,2	1.232.850.000,00	26,43	(3.431.088.866,26)
2015	4.481.664.353,00	3.509.797.150,00	78,31	(971.867.203,00)
2016	1.416.030.326,00	343.362.500,00	24,25	(1.072.667.826,00)
2017	3.173.291.074,76	471.780.000,00	14,87	(2.701.511.074,76)
2018	2.037.323.935,00	432.116.000,00	21,21	1.605.207.935,00
2019	3.443.783.238,00	3.011.922.600,00	87,46	431.860.638,00
Rata-rata	125.107.661.790,02	79.412.596.880,00	63,48	45.695.064.910,02

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa rata-rata realisasinya mencapai Rp.3.409.171.611,70 dari rata-rata target sebesar Rp.3.409.171.611,70. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29 Target dan Realisasi Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	885.100.000,00	885.100.000,00	100,00	0,00
2011	938.100.000,00	0,00	0,00	(938.100.000,00)
2012	1.961.000.000,00	938.100.000,00	47,84	(1.022.900.000,00)
2013	938.100.000,00	938.100.000,00	100,00	0,00
2014	980.500.000,00	927.500.000,00	94,59	(53.000.000,00)
2015	3.451.758.982,00	3.451.758.982,00	100,00	0,00
2016	5.376.062.780,00	5.376.062.780,00	100,00	0,00
2017	5.564.686.985,00	5.564.686.985,00	100,00	0,00
2018	7.019.749.200,00	7.019.749.200,00	100,00	0,00
2019	8.990.658.170,00	8.990.658.170,00	100,00	0,00
Rata-rata	3.610.571.611,70	3.409.171.611,70	84,24	(201.400.000,00)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.30 menjelaskan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target sebesar Rp. 1.214.256.267.657,91 dengan realisasi mencapai Rp. 1.192.208.822.241,00.

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	22.342.140.000,00	22.105.450.000,00	98,94	(236.690.000,00)
2011	25.120.790.000,00	22.595.860.000,00	89,95	(2.524.930.000,00)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2012	28.452.175.000,00	25.102.683.000,00	88,23	(3.349.492.000,00)
2013	31.769.510.271,00	31.141.738.120,00	98,02	(627.772.151,00)
2014	44.519.224.030,00	42.065.817.030,00	94,49	(2.453.407.000,00)
2015	129.189.217.790,91	127.751.655.196,00	98,89	(1.437.562.594,91)
2016	221.706.056.639,00	221.049.008.419,00	99,70	(657.048.220,00)
2017	230.695.464.890,00	227.713.952.290,00	98,71	(2.981.512.600,00)
2018	225.686.701.990,00	221.301.447.390,00	98,06	(4.385.254.600,00)
2019	254.774.987.047,00	251.381.210.796,00	98,67	(3.393.776.251,00)
Rata-rata	1.214.256.267.657,91	1.192.208.822.241,00	98,18	(2.204.744.541,69)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.31 menjelaskan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki target sebesar Rp.12.000.000.000,00 dengan realisasi mencapai Rp.5.912.344.441,19. Penganggaran belanja tidak terduga tidak dapat diprediksi karena merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa, bersifat berjaga-jaga.

Tabel 3.31 Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	1.250.000.000,00	957.017.431,19	76,56	(292.982.568,81)
2011	1.500.000.000,00	658.016.250,00	43,87	(841.983.750,00)
2012	2.000.000.000,00	105.268.000,00	5,26	(1.894.732.000,00)
2013	1.000.000.000,00	731.990.000,00	73,20	(268.010.000,00)
2014	1.000.000.000,00	607.853.700,00	60,79	(392.146.300,00)
2015	1.000.000.000,00	642.712.000,00	64,27	(357.288.000,00)
2016	1.000.000.000,00	205.431.000,00	20,54	(794.569.000,00)
2017	1.000.000.000,00	903.385.190,00	90,34	(96.614.810,00)
2018	1.500.000.000,00	788.635.646,00	52,58	(711.364.354,00)
2019	750.000.000,00	312.035.224,00	41,60	(437.964.776,00)
Rata-rata	12.000.000.000,00	5.912.344.441,19	49,27	(6.087.655.558,81)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

2) Belanja Langsung (BL)

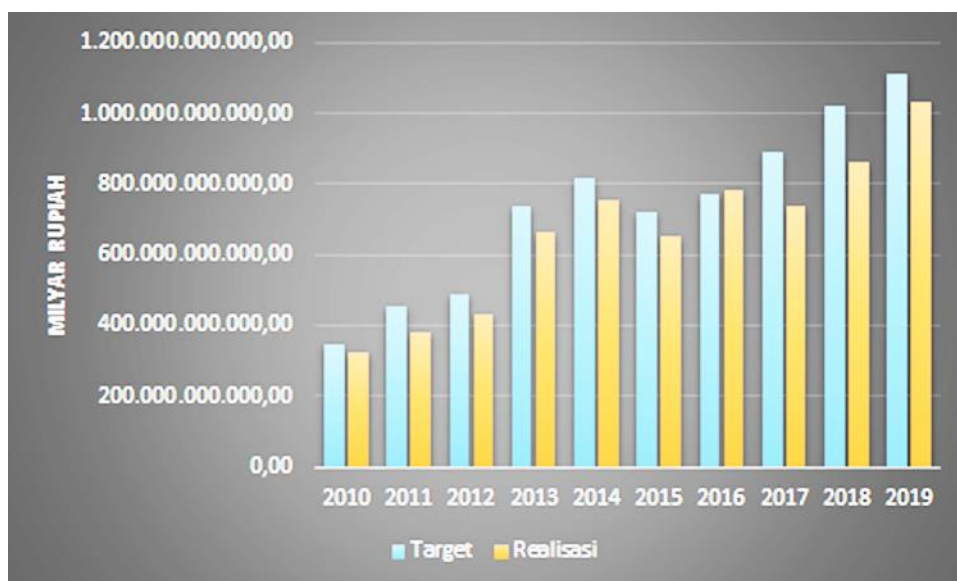
Belanja Langsung terdiri dari: (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa, serta (c) Belanja Modal. Tabel 3.32 menjelaskan Tahun Anggaran 2010-2017, rata-rata realisasi Belanja Langsung mencapai Rp.661.657.552.223,45 dari rata-rata target yang telah sebesar Rp.734.614.826.515,47.

Tabel 3.32 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2010	348.625.206.301,85	325.942.414.777,00	93,49	(22.682.791.524,85)
2011	451.010.628.600,00	381.579.698.025,77	84,61	(69.430.930.574,23)
2012	488.393.107.900,00	431.807.497.043,42	88,41	(56.585.610.856,58)

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2013	734.533.044.263,00	663.212.129.864,20	90,29	(71.320.914.398,80)
2014	815.213.043.382,00	753.294.184.992,42	92,40	(61.918.858.389,58)
2015	717.877.973.609,30	651.346.605.827,62	90,73	(66.531.367.781,68)
2016	772.326.686.019,73	781.483.573.871,84	101,19	9.156.887.852,11
2017	887.631.879.343,02	738.035.098.829,97	83,15	(149.596.780.513,05)
2018	1.021.763.196.161,92	859.277.552.726,78	84,10	(162.485.643.435,14)
2019	1.108.773.499.573,86	1.030.596.766.275,52	92,95	(78.176.733.298,34)
Rata-rata	734.614.826.515,47	661.657.552.223,45	90,13	(24.824.798.945,32)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.7 Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.33 menjelaskan Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki rata-rata target sebesar Rp.29.958.179.435,19 dengan realisasi mencapai Rp.26.781.802.649,70.

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Belanja Pegawai pada Belanja Langsung Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)
2010	34.060.378.964,85	31.314.781.500,00	91,94	(2.745.597.464,85)
2011	40.188.125.580,00	36.153.886.276,00	89,96	(4.034.239.304,00)
2012	49.981.361.379,00	45.870.692.846,00	91,78	(4.110.668.533,00)
2013	54.803.337.423,00	50.321.179.107,00	91,82	(4.482.158.316,00)
2014	18.721.836.350,00	15.581.797.450,00	83,23	(3.140.038.900,00)
2015	16.545.452.000,00	14.899.168.700,00	90,05	(1.646.283.300,00)
2016	18.407.957.200,00	16.149.775.208,00	87,73	(2.258.181.992,00)
2017	24.046.667.444,00	21.111.972.153,00	87,80	(2.934.695.291,00)
2018	22.390.497.334,00	18.533.829.240,00	82,78	(3.856.668.094,00)
2019	20.436.180.677,00	17.880.944.017,00	87,50	(2.555.236.660,00)
Rata-rata	29.958.179.435,19	26.781.802.649,70	88,46	(3.176.376.785,49)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.34 menjelaskan Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010-2019 memiliki rata-rata target sebesar Rp.372.521.126.094,60 dengan realisasi mencapai Rp.341.841.464.748,15.

Tabel 3.34 Target dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	158.345.121.938,00	147.783.868.465,00	93,33	(10.561.253.473,00)
2011	207.948.223.429,00	189.210.174.562,77	90,99	(18.738.048.866,23)
2012	236.992.994.701,00	212.977.106.532,00	89,87	(24.015.888.169,00)
2013	292.277.295.585,00	246.871.192.884,29	84,46	(45.406.102.700,71)
2014	354.318.543.873,00	310.581.887.911,92	87,66	(43.736.655.961,08)
2015	397.148.184.786,30	350.862.589.015,62	88,35	(46.285.595.770,68)
2016	444.480.312.068,80	471.698.329.114,46	106,12	27.218.017.045,66
2017	520.972.354.316,02	460.837.530.372,73	88,46	(60.134.823.943,29)
2018	543.554.728.521,74	496.539.351.140,15	91,35	47.015.377.381,59
2019	569.173.501.727,13	531.052.617.482,52	93,30	38.120.884.244,61
Rata-rata	372.521.126.094,60	341.841.464.748,15	91,39	(13.652.409.021,21)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Tabel 3.35 menjelaskan Belanja Modal pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2010-2019 rata-rata realisasinya mencapai Rp.263.059.408.891,68 dari target sebesar Rp.293.296.677.797,62.

Tabel 3.35 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	156.219.705.399,00	146.843.764.812,00	94,00	(9.375.940.587,00)
2011	202.874.279.591,00	156.215.637.187,00	77,00	(46.658.642.404,00)
2012	201.418.751.820,00	172.959.697.665,42	85,87	(28.459.054.154,58)
2013	387.452.411.255,00	366.019.757.872,91	94,47	(21.432.653.382,09)
2014	442.172.663.159,00	427.130.499.630,50	96,60	(15.042.163.528,50)
2015	304.184.336.823,00	285.584.848.112,00	93,89	(18.599.488.711,00)
2016	309.438.416.750,93	293.635.469.549,38	94,89	(15.802.947.201,55)
2017	342.612.857.583,00	256.085.596.304,24	74,74	(86.527.261.278,76)
2018	455.817.970.306,18	344.204.372.346,63	75,51	(111.613.597.959,55)
2019	519.163.817.169,73	481.663.204.776,00	92,78	(37.500.612.393,73)
Rata-rata	332.135.520.985,68	293.034.284.825,61	87,98	(9.278.394.089,42)

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019



Gambar 3.8 Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2019

Sumber: Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019

Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 klafikasi belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi yang meliputi :
 - a. Belanja Pegawai,
 - b. Belanja Barang,
 - c. Belanja Bunga,
 - d. Belanja Subsidi,
 - e. Belanja Hibah,
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal yang meliputi :
 - a. Belanja Tanah,
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin,
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung,
 - d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya,
 - f. Belanja Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga meliputi Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer yang meliputi :
 - a. Belanja Bagi Hasil,
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Untuk itu kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2020 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.36 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	596.410.662.051,00	542.079.537.068,00	90,89
Belanja Barang	567.658.036.247,00	508.381.372.559,35	89,56
Belanja Bunga	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	-
Belanja Hibah	134.200.384.812,00	79.864.906.818,00	69,93
Belanja Bantuan Sosial	4.626.478.153,00	3.724.228.095,00	80,50
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
Jumlah Belanja Operasional	1.282.895.561.263,00	1.134.050.044.540,35	88,40
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	428.750.000,00	386.000.000,00	90,03
Belanja Peralatan dan Mesin	60.976.820.932,00	46.868.724.590,00	76,86
Belanja Gedung dan Bangunan	183.648.027.626,00	118.949.579.168,00	65,85
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.351.878.076,00	115.896.162.631,00	79,19
Belanja Aset Tetap lainnya	1.272.405.000,00	1.249.373.100,00	98,19
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	389.677.881.634,00	283.349.837.489,00	72,71
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	34.814.428.400,00	34.267.423.954,00	98,43
Jumlah Belanja Tidak Terduga	34.814.428.400,00	34.267.423.954,00	98,43
Jumlah Belanja	1.707.387.871.297,00	1.453.723.735.983,00	85,02
TRANSFER			
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak Daerah	7.500.000.000,00	-	-
Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.028.875.183,00	-	-
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	9.528.875.183,00	-	-
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	247.030.727.300,00	230.548.946.570,00	93,33
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	809.645.746,00	809.645.746,00	100,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	248.085.373.046,00	231.603.592.316,00	93,36
Jumlah Transfer	257.614.248.229,00	231.603.592.316,00	89,90
Jumlah Belanja dan Transfer	1.965.002.119.526,00	1.683.270.898.299,35	85,66
<i>Surplus/(defisit)</i>	<i>(106.266.427.552,00)</i>	<i>(66.230.303.684,48)</i>	<i>62,32</i>

Sumber : Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

3. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun 2010-2019 Penerimaan Pembiayaan antara lain berasal berbagai sumber, yaitu: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) koreksi (*contra post*), (c) Pencairan Dana Cadangan, (d) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan,(e) Penerimaan Pinjaman Daerah, (f) Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan (g) penerimaan piutang daerah.

Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 70 Penerimaan Pembiayaan terdiri berasal berbagai sumber, yaitu: (a) SiLPA, (b) Pencairan Dana Cadangan, (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (d) Penerimaan Pinjaman Daerah, (e) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman, dan (f) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 3.37 menjelaskan Tahun Anggaran 2010-2020 terdiri dari: Penggunaan SiLPA, Koreksi (*contra post*), dan Pencairan Dana Cadangan. Rata-rata target sebesar Rp. 232.496.222.514,00 dengan rata-rata realisasinya mencapai Rp. 233.151.065.529,36.

Tabel 3.37 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2020

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	70.113.949.412,00	71.488.451.403,68	101,96	1.374.501.991,68
2011	86.543.921.662,53	86.951.481.803,53	100,47	407.560.141,00
2012	167.695.093.142,98	159.856.237.523,98	95,33	(7.838.855.619,00)
2013	254.729.225.901,31	268.560.338.985,65	105,43	13.831.113.084,34
2014	264.718.349.099,90	264.833.253.599,90	100,04	114.904.500,00
2015	218.151.679.443,21	218.184.389.443,21	100,01	32.710.000,00
2017	321.122.895.048,43	319.758.983.491,04	99,58	(1.363.911.557,39)
2018	374.580.242.114,98	374.580.242.114,98	100,00	0,00
2019	355.761.093.144,17	355.751.500.757,21	100,00	(9.592.386,96)
2020	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00	0,00
Rata-rata	232.496.222.514,00	233.151.065.529,36	100,28	654.843.015,37

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

Tabel 3.38 menunjukkan Tahun Anggaran 2010-2020 rata-rata realisasi SiLPA mencapai Rp. 244.911.707.636,22.

Tabel 3.38 Rincian Estimasi dan Realisasi SiLPA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2010-2020

Tahun Anggaran	Estimasi Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
2010	-	78.518.921.662,53	-	78.518.921.662,53
2011	-	159.670.093.142,98	-	159.670.093.142,98
2012	-	268.556.855.985,65	-	268.556.855.985,65
2013	-	264.718.349.099,90	-	264.718.349.099,90
2014	-	213.201.964.494,21	-	213.201.964.494,21
2015	202.781.679.443,21	202.814.389.443,21	100,02	32.710.000,00
2017	321.122.895.048,43	319.758.983.491,04	99,58	(1.363.911.557,39)
2018	374.580.242.114,98	374.580.242.114,98	100,00	0,00
2019	355.761.093.144,17	355.751.500.757,21	100,00	(9.592.386,96)
2020	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00	0,00
Rata-rata	146.579.168.592,12	244.911.707.636,22	59,85	98.332.539.044,09

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010-2019 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri atas Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019 sebesar Rp.15.955.000.000,00.

Pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 70 Penerimaan Pembiayaan terdiri berasal berbagai sumber, yaitu: (a) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, (b) Penyertaan Modal Daerah, (c) Pembentukan Dana Cadangan, (d) Pemberian Pinjaman Daerah, dan (e) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 3.39 menjelaskan Pembiayaan yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 serta Pembiayaan Neto dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Tabel 3.39 Laporan Pembiayaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SiLPA	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	211.545.776.170,45	211.545.776.170,45	100,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	61,54
Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.000.000.000,00	8.000.000.000,00	61,54
Pembiayaan Neto	198.545.776.170,45	203.545.776.170,45	102,52
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	92.279.348.618,45	137.315.472.485,97	148,80

Sumber : Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2020

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk :

1. Mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur

kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

2. Mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban kewajiban jangka panjangnya melalui rasio solvabilitas. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
- Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

3. Melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah melalui rasio aktivitas.

- Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$. Dimana : $\text{Perputaran piutang} = \frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang}}$
 $\text{rata-rata piutang} = \frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{perputaran piutang}}$. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang}) : 2$.
- Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$. Dimana : $\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{nilai persediaan}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$
 $\text{rata-rata nilai persediaan} = \frac{\text{nilai persediaan}}{\text{perputaran persediaan}}$. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan}) : 2$.

Tabel 3.40 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020 (dalam Rupiah)

URAIAN	PERTUMBUHAN (Rp)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020*
ASET LANCAR						
Kas	183.178.561.712,00	321.126.280.518,43	374.580.242.114,98	355.761.698.085,17	211.624.800.037,45	236.181.025.989,29
Piutang	60.636.032.246,31	59.804.922.495,59	70.485.191.463,23	87.469.474.613,90	102.134.996.571,79	116.778.741.410,42
Penyisihan Piutang	(38.019.471.488,84)	(36.056.988.900,06)	(36.484.138.012,38)	(33.215.894.369,73)	(33.626.223.633,34)	(32.642.675.260,31)
Beban Dibayar Dimuka	-	-	743.540,00	-	-	-
Persediaan	32.289.154.524,13	31.128.703.247,49	31.960.887.279,23	33.809.720.459,74	22.538.889.715,38	20.934.573.714,09
JUMLAH ASET LANCAR	238.084.276.993,60	376.002.917.361,45	440.542.926.385,06	443.824.998.789,08	302.672.462.691,28	335.992.628.260,16
INVESTASI JANGKA PANJANG						
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	70.290.625.719,97	72.670.489.434,97	103.481.761.465,97	114.442.133.101,97	127.679.466.962,97	149.366.713.224,768
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	70.290.625.719,97	72.670.489.434,97	103.481.761.465,97	114.442.133.101,97	127.679.466.962,97	149.366.713.224,768
ASET TETAP						
Tanah	766.931.011.342,76	811.081.869.263,33	822.338.040.692,33	823.756.097.364,66	834.619.470.913,66	852.638.535.557,034
Peralatan dan Mesin	288.425.864.189,42	349.709.036.376,98	390.397.500.956,07	443.463.478.340,91	504.559.003.385,06	580.560.873.025,03
Gedung dan Bangunan	1.002.974.373.063,37	1.087.237.096.883,18	1.151.423.616.342,82	1.250.765.001.463,83	1.347.899.220.437,83	1.451.345.785.800,48
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.085.552.853.201,89	1.219.736.743.478,90	1.316.340.628.178,28	1.378.815.820.682,15	1.477.561.813.274,88	1.596.463.869.712,92
Aset Tetap Lainnya	13.372.930.117,00	13.446.716.939,00	15.493.990.462,00	15.930.955.716,00	17.710.848.158,00	19.028.960.665,12
Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.362.388.330,54	51.032.970.895,54	43.014.842.572,54	154.313.291.358,54	339.158.981.866,54	646.248.149.259,66
Akumulasi Penyusutan	(867.679.511.814,31)	(1.013.494.342.144,56)	(1.162.596.507.207,24)	(1.310.834.750.510,48)	(1.471.003.845.134,61)	(1.678.732.834.066,91)
JUMLAH ASET TETAP	2.340.939.908.430,67	2.518.750.091.692,37	2.576.412.111.996,80	2.756.209.894.415,61	3.050.505.492.901,36	3.260.541.517.068,61
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	2.551.893.800,00	2.600.293.800,00	2.957.136.300,00	2.952.398.300,00	4.210.407.800,00	4.821.646.570,69

URAIAN		PERTUMBUHAN (Rp)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020*
Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(1.521.087.660,00)	(1.945.125.920,00)	(2.264.861.180,00)	(2.496.952.640,00)	(2.964.112.466,67)	(3.507.076.830,08)
Aset Lain-Lain		103.433.423.148,81	99.137.126.699,88	96.419.265.454,88	67.069.984.736,16	55.677.632.906,88	48.116.583.015,51
JUMLAH ASET LAINNYA		104.464.229.288,81	99.792.294.579,88	97.111.540.574,88	67.525.430.396,16	56.923.928.240,21	49.335.293.900,72
JUMLAH ASET		2.753.779.040.433,05	3.067.215.793.068,67	3.217.548.340.422,71	3.382.002.456.702,82	3.537.781.350.795,82	3.767.742.498.094,29
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	3.385.470,00	-	604.941,00	39.117,00	-
Utang Bunga		-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		298.000.000,00	380.950.000,00	276.400.000,00	164.300.000,00	136.000.000,00	116.487.152,22
Utang Beban		31.271.912.416,00	16.878.837.077,00	12.984.569.492,00	14.345.072.370,00	29.078.982.066,00	32.284.284.030,73
Utang Jangka Pendek Lainnya		121.721.000,00	121.721.000,00	2.981.512.200,00	-	78.984.750,00	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		-	-	-	-	-	-
TOTAL UTANG		31.393.633.416,00	17.003.943.547,00	15.966.081.692,00	14.345.677.311,00	29.158.005.933,00	32.158.647.416,42
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		31.691.633.416,00	17.384.893.547,00	16.242.481.692,00	14.509.977.311,00	29.294.005.933,00	32.187.325.996,70
EKUITAS		2.722.087.407.017,05	3.049.830.899.521,67	3.201.325.441.978,71	3.367.492.479.391,82	3.508.487.344.862,82	3.739.915.695.655,16
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS		2.753.779.040.433,05	3.067.215.793.068,67	3.217.567.923.670,71	3.382.002.456.702,82	3.537.781.350.795,82	3.767.742.486.830,10

Sumber: BPKAD Kab. Kotim 2021

*Hasil Proyeksi

Tabel 3.41 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020 (dalam Persen)

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)				
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020*
ASET LANCAR					
Kas	75.31	16.65	-5.02	--40.52	11.6
Piutang	-1.37	17.86	24.1	16.77	14.34
Penyisihan Piutang	-5.16	1.18	-8.96	1.24	-2.92
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	
Persediaan	-3.59	2.67	5.78	-33.34	-7.12
JUMLAH ASET LANCAR	57.93	17.16	0.75	-31.8	11.01
INVESTASI JANGKA PANJANG					
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	3.39	42.4	10.59	11.57	16.99
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	3.39	42.4	10.59	11.57	16.99
ASET TETAP					
Tanah	5.76	1.39	0.17	1.32	2.16
Peralatan dan Mesin	21.25	11.63	13.59	13.78	15.06
Gedung dan Bangunan	8.4	5.9	8.63	7.77	7.67
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.36	7.92	4.75	7.16	8.05
Aset Tetap Lainnya	0.55	15.23	2.82	11.17	7.44
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-0.64	-15.71	258.74	119.79	90.54
Akumulasi Penyusutan	16.81	14.71	12.75	12.22	14.12
JUMLAH ASET TETAP	7.6	2.29	6.98	10.68	6.89
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	1.9	13.72	-0.16	42.61	14.52
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	27.88	16.44	10.25	18.71	18.32
Aset Lain-Lain	-4.15	-2.74	-30.44	-16.99	-13.58
JUMLAH ASET LAINNYA	-4.47	-2.69	-30.47	-15.7	-13.33

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)				
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020*
JUMLAH ASET	11.38	4.9	5.11	4.61	6.5
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-93.53	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	27.84	-27.44	-40.56	-17.22	-14.35
Utang Beban	-46.03	-23.07	10.48	102.71	11.02
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	2349.46	-	-	-
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-
TOTAL UTANG	-45.84	-6.1	-10.15	103.25	10.29
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-45.14	-6.57	-10.67	101.89	9.88
EKUITAS	12.04	4.97	5.19	4.19	6.6
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	11.38	4.9	5.11	4.61	6.5

Sumber: BPKAD Kab. Kotim 2021

*Hasil Proyeksi

Tabel 3.42 Analisis Rasio Keuangan untuk Neraca Daerah. 2015-2020

INDIKATOR	Tahun						Hasil Analisa
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
RASIO LIKUIDITAS							Walaupun menunjukkan tren penurunan bila melihat perbandingan Rasio lancar dan Rasio Quick tahun 2017-2018 terhadap Rasio lancar dan Rasio Quick tahun 2019-2020, namun secara keseluruhan Rasio likuiditas Kabupaten Kotawaringin Timur masih dapat dikatakan baik karena kedua indikator menunjukkan nilai positif.
Rasio Lancar	7,512527798	21,62814034	27,12288274	30,58757359	10,3322319	10,3322319	
Rasio Quick	6,49	19,84	25,16	28,26	9,56	9,56	
RASIO SOLVABILITAS							Walaupun sempat menunjukkan tren penurunan bila melihat Perbandingan Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal tahun 2015-2016 terhadap Rasio lancar dan Rasio Quick tahun 2019-2020, namun kemudian kedua indikator menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2020. secara keseluruhan Rasio Solvabilitas Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dikatakan baik karena kedua indikator menunjukkan nilai positif.
Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,011400201	0,005543772	0,004962189	0,00424177	0,00824189	0,00824189	
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,011532926	0,005575373	0,004987335	0,004260047	0,008310706	0,008310706	
RASIO AKTIVITAS							Kemampuan daerah merubah piutang menjadi kas menunjukkan tren perlambatan hingga tahun 2020, namun relatif baik karena pada tahun 2020, berada pada kisaran 7-8 hari
Rata-Rata Umur Piutang	3,515309496	3,409780047	0,00	6,13873083	7,747081901	7,898282654	
Rata-Rata Umur Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sumber: Hasil Analisa. 2021

3.2 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang ada menjelaskan perbandingan realisasi pendapatan daerah sebagai pemasukan daerah dan realisasi belanja daerah sebagai pengeluaran daerah. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2018, 2019 dan 2020 realisasi belanja daerah lebih besar dari realisasi pendapatan daerah yang diterima. Namun, secara keseluruhan proporsi rata-rata realisasi keduanya mencapai 99,24%.

Tabel 3.43 Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran Daerah Tahun 2010-2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	%
2010	672.110.541.949,69	664.240.295.017,19	98,83
2011	841.969.411.205,22	762.076.799.865,77	90,51
2012	949.653.397.938,75	847.606.409.561,42	89,25
2013	1.183.154.186.108,20	1.177.022.175.993,95	99,48
2014	1.277.963.486.669,73	1.309.277.060.826,42	102,45
2015	1.348.777.186.814,38	1.382.697.264.622,12	102,51
2016	1.683.342.255.828,07	1.540.102.862.809,64	91,49
2017	1.579.048.584.267,91	1.512.906.458.534,97	95,81
2018	1.630.651.598.873,57	1.650.196.620.850,78	101,20
2019	1.785.303.702.485,56	1.928.306.107.583,39	108,01
2020	1.617.040.594.614,87	1.683.270.898.299,35	104,10
Rata-rata	1.324.455.904.250,54	1.314.336.632.178,64	99,24

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan hal penting dalam analisis keuangan, dalam analisis ini menyajikan data terkait defisit riil anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dapat tergambar kondisi kemampuan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2019 terjadi defisit anggaran mencapai Rp.158.957.405.097,83 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 66.230.303.684,48. Hal tersebut dapat dilihat pada Table 3.44 berikut ini.

Tabel 3.44 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2020

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	672.110.541.949,69	841.969.411.205,22	949.653.397.938,75	1.183.154.186.108,20	1.277.963.486.669,73	1.348.777.186.814,38	1.683.342.255.828,07	1.579.048.584.267,91	1.630.651.598.873,57	1.785.303.702.485,56	1.617.040.594.614,87
	Dikurangi realisasi:											
2	Belanja Daerah	664.240.295.017,19	762.076.799.865,77	847.606.409.561,42	1.177.022.175.993,95	1.309.277.060.826,42	1.382.697.264.622,12	1.540.102.862.809,64	1.512.906.458.534,97	1.650.196.620.850,78	1.928.306.107.583,39	1.683.270.898.299,35

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	839.776.673,65	7.174.000.000,00	7.174.000.000,00	9.974.000.000,00	15.368.000.000,00	15.370.000.000,00	5.370.000.000,00	11.370.000.000,00	15.370.000.000,00	15.955.000.000,00	8.000.000.000,00
	Defisit riil	7.030.470.258,85	72.718.611.339,45	94.872.988.377,33	1.173.180.186.108,20	(46.681.574.156,69)	(49.290.077.807,74)	137.869.393.018,43	54.772.125.732,94	(34.915.021.977,21)	(158.957.405.097,83)	(66.230.303.684,48)

3.3 PROYEKSI KEUANGAN

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Terdapat beberapa sumber dalam pendapatan daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapat Daerah Yang Sah. Dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini akan membahas sumber-sumber pendapatan daerah tersebut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang didapatkan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2021 sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang masih menjadi target hingga tahun 2026 berdasarkan peraturan daerah yang ada adalah sebagai berikut:

A. Pajak Daerah:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan (Sumber lain : PLN);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

B. Retribusi Daerah:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha;
3. Retribusi Perijinan Tertentu.

C. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan:

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Kalteng (Dividen).

D. Lain-Lain PAD yang Sah:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yg Tidak Dipisahkan :
 - a. Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4 (Hasil Lelang);
 - b. Penjualan Hasil Pertanian;
 - c. Penjualan Hasil Peternakan;
 - d. Penjualan Hasil Perikanan;
 - e. Penjualan Bahan-Bahan Bekas bangunan;
 - f. Penjualan Barang Persediaan (Peralatan Pertanian).
2. Jasa Giro;
3. Bunga Deposito;
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
5. Denda Atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
6. Denda Pajak;
7. Denda Retribusi;
8. Pendapatan dari Pengembalian;
9. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
10. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari RSUD dr. Murjani Sampit dan Akademi Keperawatan;
11. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
12. Pendapatan Lainnya.

Secara realistis dan berdasarkan potensi yang ada, proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2021 sampai dengan 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.45. Sedangkan untuk dapat menaikkan dari proyeksi yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan strategi-strategi sebagai berikut:

Intensifikasi:

1. Dengan melakukan evaluasi Peraturan terkait dengan pendapatan daerah yang ada untuk dilakukan revisi bagi peraturan daerah maupun Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini baik tarif yang ditetapkan maupun mekanisme yang dilakukan;
2. Peningkatan SDM Perangkat Daerah pemungut baik kemampuan maupun jumlah personilnya;
3. Updating data base pendapatan secara berkala;

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta peningkatan Teknologi Informasi bagi Perangkat Daerah pemungut;
5. Melakukan koordinasi, sinergitas, dan kerjasama secara intensif dengan PD terkait dengan pendapatan daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Ekstensifikasi:

1. Pembentukan BUMD;
2. Pembangunan pasar-pasar baru yang dikelola oleh pemerintah kabupaten di sejumlah kecamatan;
1. Menggali potensi baru sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dana perimbangan merupakan salah satu Pendapatan Daerah dalam Pendapatan Transfer pada Transfer Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dirinci lagi menjadi Dana Transfer Umum yang terdiri atas DBH dan DAU dan Dana Transfer Khusus yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sedangkan transfer antar daerah yaitu pendapatan bagi hasil pajak. Proyeksi pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer tidak bisa dibuat dengan melakukan pendekatan potensi, tetapi dilihat dengan analisa trend pertumbuhan dana perimbangan 5 tahun ke belakang.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan 5 tahun yang lalu, dana hibah yang bisa diproyeksi. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 3.45.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam perda tentang APBD tahun berkenaan.
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja APBD harus menyentuh secara langsung ke masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas. Kebijakan dalam APBD direncanakan terutama didasarkan pada :

- a. Untuk membiayai urusan pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Urusan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, Urusan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, serta urusan Penunjang, yang disesuaikan dengan kewenangannya;
- b. Membiayai program-program pembangunan pendukung 7 prioritas pembangunan daerah;
- c. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dana pendidikan minimal 20% dari total APBD;
- d. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana untuk dana kesehatan minimal 10 % dari total APBD;
- e. Kewajiban untuk memenuhi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana untuk Alokasi Dana Desa minimal 10 % dari Dana Perimbangan di luar DAK.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.45.

Tabel 3.45 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

Uraian	Tahun Anggaran					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	276,725,263,000.00	247,214,693,000.00	259,552,924,000.00	272,508,064,000.00	286,110,961,000.00	300,393,999,000.00
Pajak Daerah	119,469,561,063.00	77,182,500,000.00	81,041,625,000.00	85,093,706,250.00	89,348,391,550.00	93,815,811,100.00
Retribusi Daerah	16,817,494,800.00	23,104,398,000.00	24,237,114,250.00	25,426,463,800.00	26,675,280,750.00	27,986,534,750.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,391,483,475.00	8,391,483,000.00	8,811,057,150.00	9,251,610,000.00	9,714,190,500.00	10,199,900,050.00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	132,046,723,662.00	138,536,312,000.00	145,463,127,600.00	152,736,283,950.00	160,373,098,200.00	168,391,753,100.00
PENDAPATAN TRANSFER	1,416,514,646,300.00	1,150,352,832,000.00	1,196,320,473,000.00	1,256,136,497,000.00	1,318,943,322,000.00	1,384,890,488,000.00
Transfer Pemerintah Pusat	1,286,773,074,000.00	1,041,611,260,000.00	1,091,489,559,450.00	1,144,453,323,550.00	1,200,715,980,500.00	1,260,507,545,400.00
- Dana Bagi Hasil	118,309,935,000.00	118,309,935,000.00	130,140,928,500.00	143,155,021,350.00	157,470,523,500.00	173,217,575,850.00
- Dana Alokasi Umum	760,946,119,000.00	760,946,119,000.00	798,993,424,950.00	838,943,096,200.00	880,890,251,000.00	924,934,763,550.00
- Dana Alokasi Khusus	245,161,814,000.00	-	-	-	-	-
- Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
- Dana Desa	162,355,206,000.00	162,355,206,000.00	162,355,206,000.00	162,355,206,000.00	162,355,206,000.00	162,355,206,000.00
Transfer Antar Daerah	129,741,572,300.00	108,741,572,000.00	104,830,913,550.00	111,683,173,450.00	118,227,341,500.00	124,382,942,600.00
- Pendapatan Bagi Hasil	129,741,572,300.00	108,741,572,000.00	104,830,913,550.00	111,683,173,450.00	118,227,341,500.00	124,382,942,600.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69,541,120,000.00	75,104,409,600.00	78,859,630,080.00	82,802,611,584.00	86,942,742,163.20	91,289,879,271.36
Hibah	69,541,120,000.00	75,104,409,600.00	78,859,630,080	82,802,611,584	86,942,742,163	91,289,879,271
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	1,762,781,029,300.00	1,472,671,934,600.00	1,534,733,027,080.00	1,611,447,172,584.00	1,691,997,025,163.20	1,776,574,366,271.36
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1,265,012,442,122.00	1,009,880,903,650.00	1,067,943,155,475.00	1,128,849,363,625.00	1,192,735,811,700.00	1,259,745,000,900.00
Belanja Pegawai	646,215,148,056.00	678,368,325,600.00	680,267,327,650.00	680,365,327,850.00	681,262,325,800.00	681,350,325,850.00
Belanja Barang & Jasa	549,244,706,847.00	244,993,976,700.00	296,831,296,450.00	353,097,277,825.00	411,317,390,000.00	473,230,774,350.00
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun Anggaran					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	68,412,555,219.00	75,104,409,600.00	78,859,630,000.00	82,802,611,500.00	86,942,742,150.00	91,289,879,250.00
Belanja Bantuan Sosial	1,140,032,000.00	11,414,191,750.00	11,984,901,375.00	12,584,146,450.00	13,213,353,750.00	13,874,021,450.00
BELANJA MODAL	315,019,342,048.00	190,236,529,750.00	199,748,356,250.00	209,735,774,050.00	220,222,562,750.00	231,233,690,900.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
BELANJA TRANSFER	266,627,262,686.00	260,554,501,200.00	266,041,515,275.00	271,862,034,825.00	278,038,650,700.00	284,595,674,450.00
Belanja Bagi Hasil	13,583,705,586.00	10,028,689,800.00	10,527,873,925.00	11,052,017,050.00	11,602,367,250.00	12,180,234,500.00
Belanja Bantuan Keuangan	253,043,557,100.00	250,525,811,400.00	255,513,641,350.00	260,810,017,775.00	266,436,283,450.00	272,415,439,950.00
JUMLAH BELANJA	1,847,659,046,856.00	1,472,671,934,600.00	1,534,733,027,000.00	1,611,447,172,500.00	1,691,997,025,150.00	1,776,574,366,250.00
Surplus / (Defisit)	(84,878,017,556.00)	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	89,150,608,300.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	-	-
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	89,150,608,300.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	-	-
Pengeluaran Pembiayaan						
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,890,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	-	-
Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-	-
Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10,890,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	12,299,000,000.00	-	-

Uraian	Tahun Anggaran					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Pembiayaan Netto	78,260,608,300.00	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kab. Kotim 2021

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 PERMASALAHAN

Perumusan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dilaksanakan dengan mengakomodir permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi saat ini dengan melihat kondisi empiris dilapangan, perbandingan muatan-muatan dokumen perencanaan secara vertical dan horizontal, serta isu-isu pembangunan regional, nasional, dan global. Identifikasi permasalahan pembangunan dikaji berdasarkan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
 - a. Belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - b. Jumlah minimum guru masih belum terpenuhi
 - c. Program dan kegiatan terhambat oleh pandemi Covid-19, kenaikan jabatan kepala sekolah terhambat karena sertifikasi-perjalanan dinas tidak dapat dilakukan. Kemudian proses belajar mengajar terganggu terutama karena belum semua sekolah, guru, dan peserta didik terlayani jaringan internet/paket internet untuk menunjang pembelajaran daring

2. Kesehatan
 - a. Fluktuasi penambahan kasus Covid-19
 - b. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan belum sesuai kebutuhan. Sebagian wilayah khususnya perkotaan jumlah tenaga kesehatan sudah terpenuhi. Untuk wilayah terpencil dan sangat terpencil tenaga terutama dokter masih sangat terbatas.
 - c. Keterbatasan sarana dan prasarana serta peralatan sebagai sarana pokok dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat terutama di daerah terpencil dan sangat terpencil.
 - d. Pelayanan tujukan yang tersedia masih terbatas. Jumlah puskesmas perawatan dan rumah sakit yang terbatas. Pemanfaatan lebih cenderung hanya oleh masyarakat di sekitar fasilitas tersebut.
 - e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Terutama masih terdapat masyarakat yang BAB di daerah aliran sungai.
 - f. Kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu sangat rendah terutama bayi yang telah melewati umur 1 tahun dan telah mendapatkan imunisasi lengkap.
 - g. Pencapaian SPM belum optimal akibat lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan program. Data target sasaran merupakan angka prediksi yang belum sepenuhnya

mencerminkan keadaan sebenarnya sehingga mempersulit pencapaian target realisasi. Sistem pelaporan belum berjalan dengan baik.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Belum selesainya Peninjauan Kembali dan revisi RTRW, sebagai dasar kepastian pemanfaatan lahan untuk pembangunan
- b. Belum adanya regulasi di daerah tentang ketertiban umum, RDTR, e-government, dan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan, serta turunan beberapa peraturan perundangan terbaru yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan public
- c. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada diantaranya trantibum dan ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan RTRW
- d. Belum optimalnya regulasi di daerah maupun dokumen pendukung untuk perencanaan pembangunan infrastruktur di daerah
- e. Kondisi jalan & jembatan belum semuanya baik
- f. Belum optimalnya sistem drainase dalam kota
- g. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
- h. Belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar yang telah terbangun
- i. Peninjauan kembali dan revisi RTRW belum selesai, sebagai dasar kepastian pemanfaatan lahan untuk pembangunan
- j. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dan adanya kegiatan prioritas yang tidak bisa dilelang karena lahan pada lokasi pekerjaan belum clear and clean dan adanya lokasi pekerjaan yang masih dalam kawasan hutan.
- k. Belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran drainase.
- l. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dan masih banyak daerah irigasi yang bersetatus kawasan hutan.
- m. Belum optimalnya pelaksanaan program perencanaan pengembangan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan rencana taat ruang yang telah disusun.
- n. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, sehingga jaringan air bersih dan sanitasi di wilayah perdesaan belum bisa berfungsi maksimal.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Masih terdapat kawasan kumuh di perkotaan
- b. Belum terkelolanya Tempat Pemakaman Umum
- c. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan

- d. Masih tingginya angka backlog
 - e. Belum optimalnya pelayanan jaringan air bersih/minum permukiman
 - f. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi permukiman
 - g. Masih tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - h. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan – kegiatan yang ada di Bidang Perumahan.
 - i. Belum selesainya Penyusunan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - j. Belum selesainya Penyusunan Perda Rencana Pembangunan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - k. Belum diriviewnya dokumen RP2KPKP dan RP3KP
 - l. Belum adanya masterplan penataan bantaran/ sempadan sungai
 - m. Interusi air laut di wilayah selatan menyebabkan infrastruktur SPAM cepat mengalami kerusakan
 - n. Biaya investasi untuk perpipaan air bersih ke luar ibukota kecamatan tinggi
5. Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a. Kurangnya SDM dalam upaya memaksimalkan capaian kinerja bidang.
 - b. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring ke daerah – daerah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan dinas/operasional).
 - c. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran Ormas/LSM akan pentingnya perpanjangan kembali status ormas/LSM dan melakukan pendaftaran terhadap keberadaan ormas/LSM.
 - d. Kurangnya inovasi dan pengetahuan terhadap layanan data ormas/LSM berbasis online.
 - e. Terbatasnya dukungan dana operasional bagi Komunitas Intelijen Daerah untuk melakukan pemantauan ke lapangan.
 - f. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas operasional deteksi dini di lapangan.
 - g. Belum optimalnya dana pada Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa
 - h. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP serta kualitas dari personil Satpol PP itu sendiri;
 - i. Kurangnya prasarana public (gedung kantor) dalam rangka kelancaran operasional Satpol PP;
 - j. Minimnya pemahaman PERDA dan PERKADA oleh anggota Satpol PP;
 - k. Minimnya dukungan dari stakeholder;
 - l. Minimnya pendampingan hukum yudikatif;

- m. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Kebersihan Dan Keindahan (K3);
- n. Masih tingginya pelanggaran perbuatan asusila sebagaimana diatur dalam Perda No.3 Tahun 2008;
- o. Masih tingginya pelanggaran tidak memiliki KTP diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2015;
- p. Masih adanya pelanggaran mengemis, mengamen dan gelandangan diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008;
- q. Masih adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap ijin mendirikan bangunan (Perda Nomor 6 Tahun 2010);
- r. Masih banyaknya pelanggaran pedagang kaki lima di jalur hijau (Perda Nomor 3 Tahun 2004);
- s. Minimnya ketersediaan dana untuk pembinaan anggota linmas kecamatan, kelurahan dan desa se Kab. Kotim;
- t. Kurangnya minat masyarakat untuk menjadi anggota linmas, karena sifat keanggotaannya suka rela.

6. Sosial

- a. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi keempat, serta jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah (BPS. 2020)
- b. Belum optimalnya pemberian bantuan sosial di bidang rehabilitasi sosial.

4.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
 - a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada dibawah rata-rata provinsi
 - b. Minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Pembangunan Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Penataan Persebaran Penduduk, serta pengaturan Penduduk dan Pembangunan Administrasi Kependudukan belum menjadi pembahasan pada buku Grand Design Kependudukan Kab. Kotawaringin Timur dan belum menjadi agenda pada RPJMD sebelumnya
 - b. Dalam hal pembangunan di kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) masih banyak OPD yang belum melakukan integritas programnya. Sehingga lebih dari 50%

Kampung KB belum terlihat kemajuannya meski sudah memasuki tahun ke-4 dalam penyelenggaraan program. Termasuk dukungan melalui dana desa/alokasi dana desa belum terintegrasi.

- c. Belum optimalnya dukungan untuk operasional pelayanan KB MKJP terutama untuk MOP dan MOW
- d. Kurangnya koordinasi dalam menyampaikan data yang berkaitan dengan jumlahnperkeluarga disebabkan untuk menunjang kegiatan ke-17 Kecamatan dalam pendataan tidak adanya menu dalam anggaran di 5 tahun kebelakang.
- e. Alokasi Dana yang sangat minim
- f. Kekurangan SDM
- g. Sulitnya koordinasi dengan pegawai lapangan disebabkan jaringan internet yang sulit
- h. Fasilitas penunjang yang kurang

3. Pangan

- a. Belum ada regulasi tetap terutama dalam hal penyediaan cadangan pangan pemerintah yang pada saat tertentu sangat diperlukan dalam rangka penanganan apabila terjadi rawan pangan akibat bencana.
- b. Belum ada aksi yang signifikan dari berbagai pihak terutama instansi pemerintah terkait sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dewan ketahanan pangan
- c. Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan (*FSVA/Food Security and Vulnerability*) belum familiar di karenakan belum ada sosialisasi sehingga belum ada tindak lanjut sebagai penanganan daerah prioritas yang rentan terhadap pangan.
- d. Belum optimalnya pelayanan terhadap penanganan ketahanan pangan
- e. Masih kurangnya pengetahuan ibu – ibu dari kelompok Wanita Tani (KWT) dalam hal pemanfaatan lahan pekarangan sehingga diperlukan adanya pelatihan atau bimbingan untuk pemanfaatan lahan pekarangan agar dapat membantu perekonomian serta mencukupi gizi keluarga.
- f. Pemberian hibah bantuan Saprodi masih belum bisa menjangkau untuk daerah – daerah terpencil dikarenakan belum ada petugas lapangan yang bisa mengawasi untuk kegiatan tersebut sehingga sulit dalam hal memonitoring dan evaluasi nya.
- g. Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang Dan Aman (B2SA) kurang. Kegiatan ini yang bertujuan untuk menggali pangan lokal yang seharusnya di ikuti oleh semua kecamatan.

4. Pertanian

- a. Banyak bidang tanah non-produktif dengan pemilik tidak berada di tempat, banyak pula bidang tanah yang tidak jelas kepemilikannya
- b. Masih banyak ditemui tumpang tindih surat kepemilikan

- c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemasangan / pemeliharaan patok batas tanah untuk menghindari konflik lahan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Aspek persentase penanganan sampah
 - Pelaksanaan pelayanan persampahan masih dilaksanakan dalam kota Sampit saja (2 Kecamatan).
 - Belum disahkannya Perda Persampahan yang baru, sedangkan Perda Persampahan yang ada sudah tidak relevan (Tahun 2007);
 - Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memilah sampah dari rumah;
 - Sarana dan prasarana kebersihan yang masih kurang;
 - Perlu dibangun Landfill baru karena yang ada saat ini sudah penuh;
 - Perlu peremajaan alat berat di TPA.
- b. Aspek pencemaran status mutu air
 - Belum optimalnya anggaran dalam melaksanakan cek kualitas air, tanah dan udara yang wajib dilaksanakan dalam satu tahun;
 - Kurangnya SDM pengambil contoh uji;
 - Belum terakreditasinya laboratorium;
 - SDM yang belum mendapatkan pelatihan teknis dibidang laboratorium sesuai kompetensinya;
 - Peralatan laboratorium yang sudah rusak agar dapat diperbaharui dan dilengkapi sehingga parameter pengujian dapat ditambah, seperti pengadaan alat analisa air, tanah dan udara.
- c. Aspek cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal
 - Kurangnya SDM;
 - Sarana dan prasarana kurang;
 - Peran serta masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan;
- d. Aspek penegakan hukum lingkungan
 - Kurangnya SDM;
 - Sarana dan prasarana kurang;
 - Peran serta masyarakat kurang aktif dalam mengikuti kegiatan;
 - Belum optimalnya anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Bidang pendaftaran penduduk :
 - Perangkat komputer pelayanan masih kurang
 - Jaringan VPN sering mengalami gangguan
 - Kekurangan tenaga ahli/sumber daya manusia bidang administrasi kependudukan

- b. Bidang Pencatatan Sipil
 - Sering terjadinya ketidaksinkronan data antara kartu keluarga dan akta kelahiran
 - Ketidakjujuran masyarakat dalam pengurusan akta kematian
 - Banyak masyarakat yang tidak mengerti pembuatan akta kelahiran secara online
 - Masih banyak perbedaan data antara dokumen pendukung yang satu dengan yang lain
 - Kendala pelayanan jemput bola yaitu: a) Kurang tersedianya sinyal untuk pencatatan akta kelahiran di desa, b) Kendaraan yang digunakan kurang memadai karena jarak yang jauh dan medan/jalan yang rusak, c) Peralatan Komputer/PC printer untuk pelayanan masih kurang

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kemampuan SDM perangkat desa yang masih rendah
- b. Kendala jaringan komunikasi sehingga data dan informasi lambat diterima
- c. Kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur wilayah desa yang berbeda – beda sehingga terdapat desa yang sulit dijangkau
- d. Kurang pemahaman pemerintah desa terkait pentingnya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa dan perekonomian masyarakat.
- e. Kurangnya pemahaman pengurus PKK Desa/Kelurahan untuk pengembangan program – program didesa dan kelompok binaan PKK.
- f. Kurangnya dukungan SOPD lain yang terkait, dalam peningkatan perekonomian desa.

8. Perhubungan

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum
- b. Masih relatif rendahnya rasio Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan panjang jalan
- c. Masih rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas
- d. Keterbatasan lahan untuk pengembangan bandara H. Asan Sampit
- e. Belum optimalnya peran angkutan sungai sebagai pendukung pelabuhan laut serta sebagai sumber PAD yang potensial
- f. Belum optimalnya tata kelola data sektor perhubungan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan transportasi
- g. Belum terintegrasinya trayek angkutan darat, udara laut
- h. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum karena kurangnya kuantitas sarana angkutan, fasilitas utama, dan fasilitas pendukung khususnya pada terminal yang sudah ada
- i. Angkutan perkotaan belum terwujud
- j. Trayek dan terminal/pelabuhan dari dan menuju seluruh wilayah kecamatan belum tersedia

- k. Belum tersedia lahan pengembangan terminal angkutan barang Pelabuhan Pelangsian
 - l. Pelayanan kebutuhan pelengkapan jalan belum tersedia sesuai standar
 - m. Persimpangan bersinyal secara keseluruhan belum memiliki alat pemantau lalu lintas dan management traffic.
 - n. Balai pengujian kendaraan bermotor hanya 1 untuk memenuhi pelayanan 13 kecamatan
 - o. Pengelolaan perparkiran belum optimal
 - p. Proses pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara H. Asan a masih belum selesai
9. Komunikasi dan Informatika
- a. Belum optimalnya cakupan layanan telekomunikasi
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan TIK oleh Perangkat Daerah
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik sektoral dan persandian untuk keamanan informasi
 - d. Belum adanya regulasi di daerah terkait implementasi e-government
10. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- a. Kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan
 - b. Belum ada integrasi antara koperasi dan BUMDes yang dibiayai melalui dana desa
 - c. Sarana dan prasarana khususnya untuk promosi
 - d. SDM koperasi belum mampu melaksanakan tupoksinya sehingga banyak koperasi yang tidak berjalan.
 - e. Kurangnya tenaga pendamping koperasi dan UKM
11. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Kurangnya ketersediaan dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga
 - b. Kurangnya promosi yang dilakukan kepada masyarakat (halayak umum) tentang pentingnya berolahraga
 - c. Kurangnya koordinasi antara Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan SOPD terkait
12. Kebudayaan
- a. Program dan kegiatan terhambat pandemi
 - b. Terbatasnya fasilitas untuk mengakomodir antusiasme masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni, budaya dan cagar budaya;
 - c. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan masih relatif rendah dalam ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan dan peningkatan pengembangan SDM kelembagaan;

- d. Masih rendahnya koordinasi Pelaku Usaha bidang kebudayaan dalam mengembangkan secara optimal potensi yang ada, amenities dan aksesibilitas;

13. Perpustakaan dan Kearsipan

a. Bidang Perpustakaan

- Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten
- Perpustakaan daerah belum memiliki jabatan fungsional pustakawan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan daerah
- Anggaran untuk meningkatkan prasarana dan sarana perpustakaan masih belum maksimal, sehingga prasarana dan sarana perpustakaan yang dimiliki perpustakaan daerah masih belum selesai berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- Belum optimalnya pembinaan perpustakaan di daerah berupa: a) Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, b) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, c) Kegiatan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan, d) Kegiatan monitoring dan evaluasi

b. Bidang Kearsipan

- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dibidang kearsipan.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana seperti depo arsip, ruang pengelolaan arsip.
- Kurangnya SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam mengelola kearsipan daerah.
- Masih belum adanya peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

4.1.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Anggaran belum dapat mengakomodir program dan kegiatan secara optimal
- b. Akses transportasi sulit menuju desa – desa khususnya disekitar wilayah utara seperti pada Kecamatan Bukit Santuai (Desa Tumbang Batu, Desa Tumbang Kawan, dan Desa Tumbang Saluang) yang harus ditempuh lagi menggunakan transportasi air dimana desa – desa tersebut merupakan daerah nelayan perairan umum daratan yang cukup mendominasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pariwisata

- a. Belum terjadwalnya secara baik dan komitmen kegiatan event – event di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga kurang mendukung promosi kepariwisataan;

- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata masih relatif rendah dalam ini disebabkan oleh kurangnya pelaksanaan dan peningkatan pengembangan SDM kelembagaan;
 - c. Masih rendahnya koordinasi Pelaku Usaha bidang pariwisata dalam mengembangkan secara optimal potensi yang ada, amenitas dan aksesibilitas;
 - d. Penyerapan PAD bidang pariwisata masih jauh dari sasaran dikarenakan oleh pengaruh iklim yang ekstrim, pandemic covid-19, disamping itu target PAD yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
3. Pertanian
- a. Perluasan areal tanam tidak dapat dilakukan khususnya di daerah yang termasuk kawasan hutan produksi, perlu secepatnya kepastian pemanfaatan dari RTRW.
 - b. Belum adanya perda lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian sebagai lahan yang tidak boleh beralih fungsi ke kepentingan apapun.
 - c. Manajemen usaha tani dan kualitas produk relatif rendah, sehingga kalah bersaing dengan produk yang masuk dari luar daerah.
 - d. Beralihnya fungsi lahan pertanian yang potensial untuk kemudian dijadikan areal tanaman kelapa sawit.
 - e. Perilaku (pendidikan, sikap, kemampuan, dan keetrampilan) petani yang dirasakan sulit berinteraksi dengan teknologi yang dianjurkan dan informasi pasar serta kecenderungan untuk mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan.
 - f. Sistem irigasi belum memadai, pertanian mengandalkan tadah hujan
4. Perdagangan dan perindustrian
- a. Belum optimalnya pelaksanaan program
 - b. Kurang koordinasi antar instansi terkait pembangunan industri kecil dan menengah
 - c. Pembinaan terhadap pelaku usaha yang tidak berlanjut/tidak ada *follow up* tindak lanjut karena kekurangan SDM
 - d. Pandemi covid – 19 mengurangi arus perdagangan
5. Transmigrasi
- a. Minimnya anggaran untuk melaksanakan tugas urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi khususnya pengadaan data

4.1.4 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1. Masih terbatasnya kuantitas ASN berkompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Pola pikir dan budaya kerja ASN yang belum sepenuhnya mengedepankan profesionalitas, transparansi dan kemandirian terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik;
3. Updating data kepegawaian belum dilakukan secara rutin;
4. Penggalian pendapatan asli daerah belum optimal;
5. Pengelolaan pendapatan belum berbasis teknologi informasi;

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah permasalahan pembangunan yang dijadikan prioritas Pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang, Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya:

1. Isu strategis dan Sasaran serta Kebijakan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024;
2. Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah terpilih;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lain yang mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Isu strategis dalam rencana tata ruang yang berlaku dan mempengaruhi Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari:
 - a. RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, periode 5 tahun terakhir
 - b. Isu Strategis yang diangkat dari situasi dan kondisi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.
6. Isu strategis yang dirumuskan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7. Janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD ini berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.2.1 Rencana Pembangunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Visi dan misi pembangunan Negara Republik Indonesia pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi pembangunan yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
 - b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
 - c. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
 - d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
 - e. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
 - f. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
 - g. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
 - h. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
 - i. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu:

***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH
(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***

Penjabaran dan perwujudan visi pembangunan tersebut dilakukan melalui 8 misi pembangunan meliputi:

- a. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
- b. Pengelolaan Infrastruktur
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
- d. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
- e. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
- f. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
- g. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam

h. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, isu-isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

- a. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
- b. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing
- c. Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah
- d. Pemerataan kesejahteraan masyarakat
- e. Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
- g. Penggalan potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi
- h. Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025

Posisi Kabupaten Kotawaringin Timur sangat strategis dan memberi keuntungan kompetitif dan komparatif. Namun demikian persaingan antar daerah dan globalisasi akan meningkat sehingga memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan daya saing daerah dalam memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesadaran akan budaya dan kearifan lokal dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari merupakan keharusan jika ingin mencapai visi menjadikan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten yang:

*”Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional” /
disingkat menjadi motto “Damai dan Mantap”.*

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari adalah mewujudkan keasrian kabupaten Kotawaringin Timur yang hijau dengan alam lingkungan yang lestari. Kelestarian lingkungan hidup ini untuk memberikan ruang yang layak bagi generasi mendatang. Lestari juga berarti mempertahankan tradisi dan situs-situs sejarah yang bermanfaat bagi pendidikan dan pariwisata. Tradisi dan situs sejarah dilestarikan agar masyarakat Kotawaringin Timur memiliki identitas budaya dan tidak melupakan masa lalunya.

- b. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Artinya bahwa untuk mencapai Kotawaringin Timur yang maju diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi kepada daerahnya. Sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam memajukan suatu daerah.
- c. Mengembangkan Industri Pengolahan adalah mewujudkan agroindustri di Kabupaten Kotawaringin Timur baik industri hilir maupun industri hulu. Dengan pengembangan industri ini maka perekonomian Kotawaringin Timur tidak akan bergantung lagi pada sektor primer tetapi tercipta diversifikasi kegiatan ekonomi yang lain. Dengan pengembangan sektor industri diharapkan akan terjadi Peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan kesempatan kerja, dan nilai tambah produk pertanian.
- d. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. Ini berarti bahwa pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kotawaringin Timur disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Dengan pendekatan agro ekosistem yang sesuai, produk pertanian akan memiliki daya saing yang tinggi.
- e. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman adalah sebuah kondisi yang mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saling Tenggang rasa akan adanya perbedaan baik perbedaan agama ataupun suku. Rasa aman ini akan terwujud jika warga Kabupaten Kotawaringin Timur bersatu dan menjalankan kehidupannya secara demokratis.
- f. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. Artinya untuk mewujudkan Kotawaringin Timur yang maju diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga dapat mencapai fasilitas ini dengan biaya murah dan bermutu tinggi. Dengan demikian pelayanan fasilitas sosial ini dapat melayani seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok.
- g. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. Berarti bahwa dalam setiap tindakan didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang berfungsi untuk menjaga akhlak dan moralitas baik pegawai maupun penduduk Kotawaringin Timur pada umumnya.
- h. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi adalah pemerataan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada ibukota kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kota besar. Selain itu juga mengembangkan Kabupaten Kotawaringin timur sebagai daerah yang ideal untuk meningkatkan investasi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- i. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan pelayanan ini akan

meningkatkan pula produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan.

- j. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan. Bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dan kebakaran, baik kebakaran di permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan.
 - k. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adalah menanamkan etos kerja, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian dapat melayani masyarakat secara profesional.
 - l. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan, meningkatkan koordinasi pembangunan dengan kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang berbatasan
- a. RPJMD Kabupaten Seruyan

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan periode 2018-2023 adalah:

“memajukan Kabupaten Seruyan Sehat (Sejahtera, Elok, Harmonis, Aman, dan Tentram)”

Penjabaran visi pembangunan tersebut ke dalam misi dirumuskan sebagai berikut:

- Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional.
- Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal.
- Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat.
- Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga perdagangan, dan koperasi.
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
- Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.
- Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan.
- Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.
- Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.

- b. RPJMD Kabupaten Katingan

Visi pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 adalah:

Katingan "Bermartabat" Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna:

- **BERBUDAYA** : masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur.
- **MAJU** : Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupun non fisik, menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya.
- **RELIGIUS** : masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain.
- **TERINTEGRASI** : pembangunan dilakukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan.
- **BEKESINAMBUNGAN** : pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- **AMAN** : Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman.
- **TERBUKA** : Katingan memiliki akses transportasi, komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian.

Sejahtera adalah : pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tenteram.

Misi Pembangunan Kabupaten Katingan yaitu:

- Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum.
- Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.
- Memantapkan pembangunan perdesaan.
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.
- Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.
- Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.

- Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.

4.2.2 Perbandingan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhadap Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Perbandingan secara vertikal)

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yaitu Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Isu-isu strategis terbagi atas isu-isu strategis wilayah yang didalamnya mencakup indicator-indikator pembangunan kewilayahan yang berlaku untuk semua daerah di Indoensia. Indikator pembangunan dimaksud terdiri atas persentase kemiskinan, persentase tingkat pengangguran, dan nilai kesenjangan wilayah. Berdasarkan ketiga komponen indicator tersebut, persentase dan nilai rata-rata di tingkat nasional dan perbandingannya dengan capaian Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Isu-Isu Strategis Nasional terhadap kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur

Isu-Isu Strategis Pembangunan	Kewilayahan				Analisis
	Rata-Rata Nasional	Rata-Rata Pulau Kalimantan	Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur	
Penduduk Miskin (%)	13,14	5,93	4,98	5,9	Walaupun sudah jauh dibawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional dan Pulau Kalimantan, namun rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (rata-rata dihitung dengan perbandingan dibandingkan terhadap Kabupaten Kota Lain didalam provinsi)
Tingkat Pengangguran (%)	5,14	5,0	4,01	4,47	Walaupun tingkat pengangguran sudah dibawah rata-rata persentase nasional dan Pulau Kalimantan, namun tingkat pengangguran di Kabupaten Kotawaringin Timur masih berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah (rata-rata dihitung dengan perbandingan dibandingkan terhadap Kabupaten Kota Lain didalam provinsi)
Kesenjangan Antar Wilayah (%) – Williamson Index	0,36	0,69	1.7*	0,013*	Ketimpangan distribusi pendapatan dan di Kabupaten Kotawaringin Timur rendah (mendekati 0), hal ini mengindikaasikan pemerataan pendapatan cenderung tinggi. Jauh lebih baik dari rata-rata nasional, rata-rata pulau kalimantan, dan rata-rata Provinsi Kalimantan

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, *hasil analisa tahun 2020

Berdasarkan ketiga isu strategis pembangunan tersebut, penyebab dari masing-masing komponen indikator dijabarkan dari sudut pandang pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam satu dekade terakhir ekonomi Indonesia tumbuh positif. Namun, elastisitasnya terhadap tingkat kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat. Hal ini terjadi antara lain karena sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi seperti sektor keuangan dan jasa bukan merupakan sektor andalan penghidupan bagi masyarakat miskin dan rentan. Sebagai contoh, sektor pertanian yang menjadi tumpuan penghidupan mayoritas tenaga kerja, khususnya tenaga kerja miskin, memiliki produktivitas yang rendah serta kontribusi terhadap PDRB yang cenderung menurun. Di sisi lain, rata-rata pendapatan sektor tersebut merupakan yang terendah. Rendahnya produktivitas di sektor ini karena masih minimnya kepemilikan aset produktif, minimnya akses terhadap pembiayaan serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Bila ditinjau dari kondisi Kabupaten Kotawaringin Timur sektor utama penyumbang PDRB terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; pertanian (pertanian dalam arti luas termasuk didalamnya perkebunan, perikanan, kehutanan); serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor utama yang menunjang ekonomi masyarakat, terbukti dalam perbandingan (Tabel 4.1) implikasi pertumbuhan ketiga sektor tersebut berdampak positif terhadap jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Selain ketiga isu strategis tersebut, isu-isu pembangunan nasional lainnya dan hubungan dengan isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional terhadap kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur

Aspek Isu Strategis	Isu Strategis Nasional	Kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	Analisis
Lingkungan	Tutupan Hutan berkurang dari 50% (93,4 Juta ha) tahun 2017 hingga tinggal 38% (71,4 juta ha) dari total lahan Indonesia (188 juta ha) pada tahun 2045	Berdasarkan rilis BPS Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016-2020, tutupan kawasan hutan yaitu total luasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Konversi telah berkurang sebesar 50 persen	Status kawasan hutan di daerah ditentukan oleh 2 komponen utama, yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK Menhut & LHK) sebagai dasar penentuan dan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai <i>legal standing</i> penetapan. SK Menhut & LHK terbaru untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah adalah SK MenLHK 8108 Tahun 2018, sedangkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 merupakan peraturan daerah dengan sumber data kehutanan tahun 2012. Perlu dilakukan peninjauan kembali sampai dengan revisi pada produk tata ruang yang berlaku saat ini sehingga didapatkan luasan pasti dan legal kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur
Ketahanan Pangan	Peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen. Tidak sebanding dengan produksi pangan yang banyak dipengaruhi oleh faktor musim, serta ketersediaan dan kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi. Ketidakpastian produksi menyebabkan fluktuasi harga pangan; sebagai contoh, fluktuasi harga beras rata-rata 0,6 persen per bulan. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya tawar petani (nilai tukar petani) yang rendah yaitu sebesar rata-rata 101,3 pada tahun 2017. Terkait produktivitas pangan, indikator pembangunan nasional hingga 2024 mensyaratkan peningkatan persentase irigasi premium dan irigasi baru, serta peningkatan persentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).	Rata-rata kebutuhan pangan khususnya komoditas padi per kapita per tahun Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 52037,12 Ton/Tahun (Hasil Analisis. 2020). Hasil produksi lokal saat ini masih mencukupi dengan total produksi hingga tahun 2019 sebesar 65759 Ton. Dari aspek keberlanjutan ketahanan pangan lokal khususnya komoditas padi, menunjukkan tren negatif, bila ditinjau dari sisi <i>demand</i> , pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur hingga tahun 2020 adalah sebesar 2,18 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun, sebaliknya dari sisi supply terjadi penurunan produktivitas padi dari 70308 Ton/Tahun di 2016 menjadi 65759 Ton/Tahun di 2019.	Peningkatan produktivitas pangan terhambat oleh: 1. Pemanfaatan lahan untuk peningkatan areal tanam komoditi pangan belum mendapat kepastian hukum khususnya berdasarkan Perda RTRW yang ada 2. Belum ada penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Sistem pengairan masih mengandalkan tadah hujan, belum terlaksana rencana atau program pembangunan irigasi teknis untuk menunjang produktivitas
Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan menghadapi tantangan, di antaranya: (1) dominasi perikanan skala kecil dan penggunaan teknologi sederhana, (2) tingginya biaya input produksi, (3) rendahnya akses permodalan untuk peningkatan usaha, (4)	Terdapat 974 rumah tangga perikanan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, berdasarkan nilai produktivitas perikanan tangkap di perairan umum daratan, Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada urutan ke-2 dengan produksi tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah	Permasalahan dalam pembangunan perikanan perairan umum daratan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah akses transportasi sulit menuju desa – desa khususnya disekitar wilayah utara seperti pada Kecamatan Bukit Santuai (Desa Tumbang Batu, Desa Tumbang Kawan, dan

Aspek Isu Strategis	Isu Strategis Nasional	Kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	Analisis
	sarana prasarana kelautan dan perikanan belum memadai, seperti pelabuhan perikanan, sistem pembenihan dan induk, sistem rantai dingin, pertambahan garam, serta sarana prasarana pendukung lainnya, (5) perizinan yang belum efektif dan efisien, (6) rendahnya integrasi hulu hilir perikanan dan persoalan rantai nilai produk, dan (7) degradasi ekosistem dan pengaruh perubahan iklim terhadap lingkungan laut.		Desa Tumbang Saluang) selain melalui jalan darat, harus ditempuh lagi menggunakan transportasi air. Desa – desa tersebut merupakan daerah nelayan perairan umum daratan yang cukup potensial di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
UMKM dan Investasi	Daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu terus ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong UMKM untuk naik kelas. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97 persen. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, akselerasi pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Upaya untuk meningkatkan skala usaha UMKM saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Fasilitasi UMKM untuk berkoperasi terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan kapasitas koperasi untuk menjadi usaha yang modern dan profesional. Peningkatan keterkaitan usaha antar UMKM, kemitraan usaha antara UMKM dan usaha besar, serta kewirusahaan juga terus didorong. Namun, baru sekitar 7,0 persen Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.	Usaha kecil dan menengah dari berbagai jenis usaha dan jenis industri berkembang baik khususnya di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Berdasarkan data jumlah ijin usaha yang diajukan masyarakat melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terjadi peningkatan hingga 400 persen antara tahun 2018-2019 hal ini menunjukkan geliat positif perkembangan ekonomi masyarakat. Bila ditinjau di tingkat Provinsi, Kabupaten Kotawaringin Timur belum menjadi pilihan utama dalam pengembangan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini dapat dilihat dari total peningkatan jumlah unit usaha, total jumlah peningkatan serapan tenaga kerja kedalam unit usaha, total peningkatan nilai investasi, serta total nilai produksi.	Permasalahan pengembangan usaha kecil dan menengah saat ini adalah jangkuan konsumen terhadap pelaku usaha berkurang baik dari sisi daya beli maupun dari aksesibilitas terutama disebabkan oleh pandemi Covid-19. Perdagangan dan jasa melalui jejaring media sosial (online) menjadi salah satu alternatif yang dapat menunjang tetap berjalannya kegiatan usaha kecil dan menengah. Saat ini telah tersedia provider transportasi orang dan barang online baik lokal dan nasional di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya peningkatan investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan komitmen pemerintah melalui penyediaan instrumen dasar perijinan seperti instrument tata ruang 2. Peningkatan insentif dunia usaha seperti kemudahan labeling dan sertifikasi, permodalan, serta promosi
Ketenagakerjaan	Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespon perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas Agustus, 2019), lebih rendah	Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menunjukkan perbaikan, dapat dilihat melalui tren menurun 3 tahun terakhir, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi.	Permasalahan terkait ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk masih jauh lebih cepat dibanding penambahan jumlah lapangan kerja. Ada hal menarik yang patut menjadi perhatian yaitu jika dilihat data series sejak tahun 2013 (kecuali data tahun 2016 yang tidak tersedia karena SAKERNAS tahunan tidak terselenggara) maka setiap tahunnya jumlah penduduk

Aspek Isu Strategis	Isu Strategis Nasional	Kondisi saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur	Analisis
	<p>dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya mismatch antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.</p>		<p>15 tahun keatas yang bekerja selalu meningkat, namun peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa penyediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan laju jumlah penduduk setiap tahunnya.</p> <p>2. Proporsi terbesar dari kelompok umum 15 tahun keatas yang bekerja adalah pada rentang usia 35-39. Serapan tenaga kerja kelompok umur yang lebih produktif pada rentang kelompok umur 20-24 (lulusan SMA-SMK-Perguruan Tinggi) dan 25-29 (lulusan SMA-Perguruan Tinggi jenjang Strata 2) belum optimal.</p>
Ekspor	<p>Rasio nilai ekspor/PDB Indonesia baru mencapai 19,0 persen, atau jauh di bawah Thailand (69,0 persen), Vietnam (93,0 persen) dan Singapura (172,0 persen). Keunggulan sumber daya alam yang ada di Indonesia juga belum banyak diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti ditunjukkan dengan ekspor produk Indonesia yang didominasi oleh komoditas (lebih dari 50 persen), terutama olahan CPO, logam dasar, karet dan makanan.</p>	<p>Dalam kurun waktu 2015-2019, net ekspor barang dan jasa Kabupaten Kotawaringin Timur tumbuh hingga hampir 3 kali lipat, di tahun 2020 mencapai 3.9 triliun rupiah. Berdasarkan pelabuhan muat, Pelabuhan Sampit menempati urutan pertama volume ekspor terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah, dan nomor dua setelah Pelabuhan Kumai dari aspek <i>FOB Value</i>.</p>	<p>tiga komoditas ekspor unggulan dari Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Yakni palm kernel expeller (PKE), palm kernel olein (PKO) dan karet lempengan, yang notabene merupakan produk perusahaan-perusahaan besar. Aksesibilitas produk lain yang berasal dari masyarakat terutama UMKM belum optimal terutama terkendala kemampuan produksi, sertifikasi, dan labeling.</p>

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Provinsi Kalteng Dalam Angka 2020, Kabupaten Kotim Dalam Angka 2020

4.2.3 Perbandingan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang Berbatasan terhadap Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur (Perbandingan secara Horizontal)

Perbandingan dan adaptasi isu strategis pembangunan kabupaten yang berbatasan terhadap kondisi yang sama di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Isu-Isu Strategis Pembangunan Nasional terhadap kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur

Aspek Isu Strategis	Misi Kabupaten Seruyan	Misi Kabupaten Katingan	Analisis
Birokrasi	Menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum.	Kedua kabupaten menjadikan penyelenggaraan birokrasi yang baik sebagai prioritas, telah tergambarkan di RPMD Kabupaten Kotim sebelumnya dan perlu dipertahankan
Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Mewujudkan mutu pendidikan yang lebih berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya. 	Prioritisasi terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan sosial telah dilakukan oleh kedua kabupaten, telah pula dilakukan pada RPMD Kabupaten Kotim sebelumnya dan perlu dipertahankan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Mulai dari industri kecil, industri rumah tangga perdagangan, dan koperasi. Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, dan kehutanan 	Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.	Prioritisasi terhadap aspek ekonomi telah dilakukan oleh kedua kabupaten, telah pula dilakukan pada RPMD Kabupaten Kotim sebelumnya dan perlu dipertahankan
Transportasi / Aksesibilitas	Mewujudkan Pelabuhan Laut Teluk Segintung sebagai pintu gerbang ekonomi Kabupaten Seruyan.	-	Terlalu spesifik sebagai isu strategis maupun sebagai jabaran misi. Tidak harus diakomodir isu yang sama pada Kabupaten Kotawaringin Timur
Infrastruktur	-	Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.	Infrastruktur menjadi poin penting dalam prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu kembali menjadi yang di prioritaskan dalam RPJMD

Aspek Isu Strategis	Misi Kabupaten Seruyan	Misi Kabupaten Katingan	Analisis
			Kabupaten Kotim selanjutnya.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam	.	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.	Prioritisasi pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam perlu dipertahankan dalam RPJMD Kabupaten Kotim selanjutnya
Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya. Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja.	-	Prioritisasi terhadap aspek SDM dan Ketenagakerjaan telah dilakukan oleh Kabupaten Seruyan, telah pula dilakukan pada RPMD Kabupaten Kotim sebelumnya dan perlu dipertahankan
Keamanan	Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI.	-	Prioritisasi terhadap aspek keamanan telah dilakukan oleh Kabupaten Seruyan, telah pula dilakukan pada RPMD Kabupaten Kotim sebelumnya dan perlu dipertahankan
Pemerataan Pembangunan	-	Memantapkan pembangunan perdesaan.	Pembangunan dari pedesaan menjadi poin penting dalam prioritas pembangunan nasional, sehingga perlu kembali menjadi yang di prioritaskan dalam RPJMD Kabupaten Kotim selanjutnya.

Sumber: Perda No.6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Seruyan Tahun 2018-2023, Perda No.5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Katingan Tahun 2018-2023, Perda No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No.8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Kotim Tahun 2016-2021

4.2.4 Rencana Tata Ruang

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028

Rencana tata ruang merupakan instrumen yang mengatur perwujudan struktur ruang, pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang suatu wilayah agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjabarkan tujuan penataan ruang wilayah nasional adalah Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
 - f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
 - h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
 - i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035, tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2035 adalah “mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”. Kebijakan penataan ruangnya meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
 - b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
 - c. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;
 - d. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
 - e. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
 - f. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;
 - g. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
 - h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 – 2035 memiliki tujuan penataan ruang yaitu:

“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industry pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”.

Kebijakan penataan ruang meliputi:

- a. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
- b. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam;
- c. Pengembangan pertanian dalam arti luas;
- d. Pengembangan industri pengolahan;
- e. Pengembangan pelayanan transportasi;
- f. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kotawaringin Timur Tahun 2015-2035, secara umum dapat digambarkan rencana pembangunan daerah yang bersifat kewilayahan, dimana pusat-pusat kegiatan yang berupa ibukota kabupaten, dan ibukota kecamatan yang ditetapkan menjadi pusat kegiatan maupun desa-desa yang ditetapkan menjadi pusat pelayanan harus dilengkapi dengan sarana dan prasaranya. Begitu juga wilayah-wilayah sebagai pusat pengembangan produk unggulan.

A. Pusat-Pusat Kegiatan

Dalam RTRWN Sampit yang menjadi ibukota Kabupaten Kotawaringin Timur ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena disamping sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kota Sampit juga menjadi salah satu kota yang menjadi pusat pengembangan perekonomian Kalimantan Tengah dengan adanya Bandara H. Asan, maupun Pelabuhan Bagendang yang ditetapkan sebagai salah satu pengembangan Tol Laut dalam RPJMN. Dalam RTRWK ada 3 ibukota kecamatan yang ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Lingkungan Promosi (PKLp) yaitu Parenggean yang merupakan pusat kegiatan wilayah Utara, Samuda sebagai pusat kegiatan wilayah Selatan, dan Simpang Seabi sebagai pusat kegiatan wilayah Barat, seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Sedangkan 11 Ibu Kota kecamatan lainnya ditetapkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditetapkan di:

- Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang;
- Beringin Agung di Kecamatan Telaga Antang;
- Lempuyang di Kecamatan Teluk Sampit;
- Tangar di Kecamatan Mentaya Hulu;
- Bagendang Tengah di Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
- Pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu;

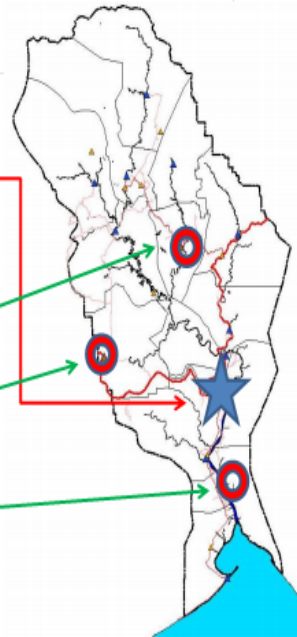
- Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang; dan
- Tumbang Batu di Kecamatan Bukit Santuai.

Pusat-pusat kegiatan

Sampit sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (**PKW**)

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (**PKLP**)

**Parenggean
Simpang Sebabi
Samuda**



Gambar 4.1 Pusat-Pusat Kegiatan

B. Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

1. Wilayah Perkebunan

Wilayah utara secara umum dikembangkan sebagai wilayah pengembangan perkebunan yang pada umumnya adalah Kelapa Sawit, karet dan rotan, terutama di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu, Telaga Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, Parenggean, Cempaga Hulu, dan Kecamatan Telawang

2. Wilayah Pertanian Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan pada umumnya dikembangkan di wilayah selatan sebagai lahan pasang surut, yaitu di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Kecamatan Seranau. Di beberapa kecamatan ini masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan produksinya melalui perluasan lahan maupun upaya intensifikasi. Wilayah ini juga merupakan wilayah perkebunan kelapa yang masih menjanjikan untuk dikembangkan dengan pembinaan yang lebih intensif.

3. Wilayah Pengembangan Holtikultura

Holtikultura sangat potensi untuk dikembangkan di wilayah Tengah mengingat kondisi wilayahnya dan jenis tanahnya yang cocok, yaitu di Kecamatan Cempaga, Kota Besi, Baamang, dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

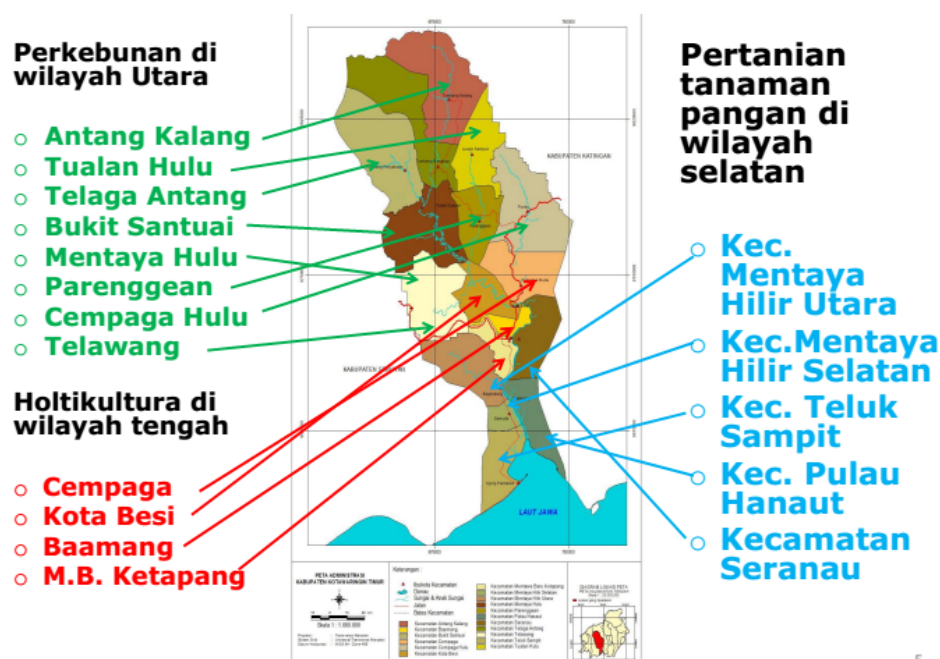
4. Sentra Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi 2 yaitu perikanan tangkap di Kecamatan Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, dan perikanan

budidaya di Kecamatan Kota Besi. Sedangkan di Desa Sungai Ijum Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dikembangkan menjadi Minapolitan.

5. Sentra Pengembangan Peternakan Sapi dan Desa unggulan Peternakan Sapi
Desa Sumber Makmur di Kecamatan Telawang, Desa Karang Sari di Kecamatan Parenggean, dan Desa Sumber Makmur di Kecamatan Mentaya Hilir Utara saat ini merupakan sentra pengembangan peternakan sapi yang mendukung kebutuhan daging di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu juga Desa Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang, Desa Waringin Agung di Kecamatan Telaga Antang, dan Desa Babaluh di Kecamatan Pulau Hanaut merupakan tiga desa yang salah satu produk unggulannya adalah peternakan sapi diharapkan dapat mendukung pasokan daging dari tiga desa yang telah menjadi sentra peternakan sapi.

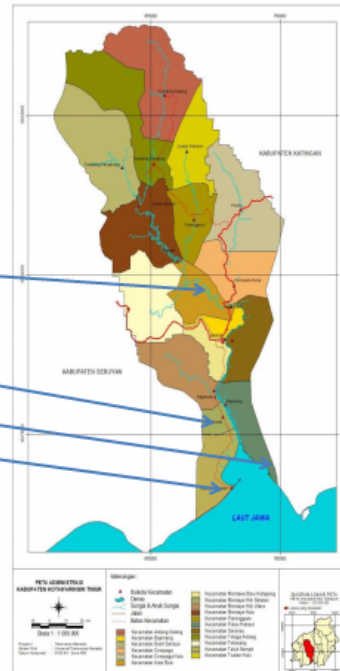
Kelima kawasan tersebut di atas disajikan pada Gambar 4.2, 4.3, dan 4.4 berikut ini:



Gambar 4.2 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

Sentra Perikanan

- Desa Bajarum s/d
- Desa Hanjalipan
- Desa Sungai Ijum
- Desa Satiruk
- Desa Ujung Pandaran



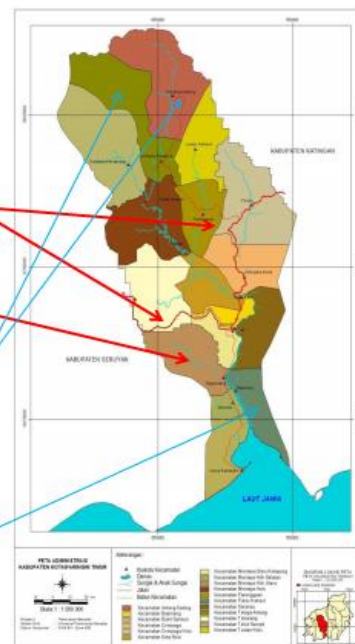
Gambar 4.3 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

❖ Pengembangan Sentra Peternakan Sapi

- Kecamatan Telawang
 - **Desa Sumber Makmur**
- Kecamatan Parenggean
 - **Desa Karang Sari**
- Kecamatan Mentaya Hilir Utara
 - **Sumber Makmur**

❖ Komoditi unggulan peternakan sapi

- Kecamatan Antang Kalang
 - **Desa Gunung Makmur**
- Telaga Antang
 - **Desa Waringin Agung**
- Kecamatan Pulau Hanaut
 - **Desa Babaluh**

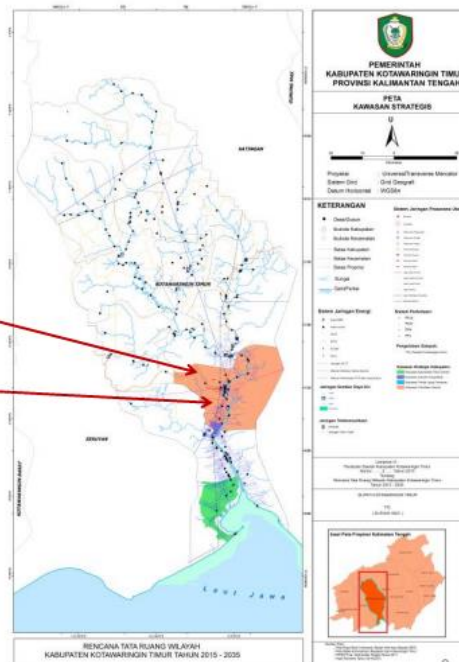


Gambar 4.4 Wilayah Pengembangan Produk Unggulan

C. Pusat Perdagangan Dan Jasa

Sebagai Ibu Kota Kabupaten, Kota Sampit otomatis akan menjadi wilayah perdagangan dan jasa yang terpusat di Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, seperti yang terlihat pada Gambar 4.5.

- **BAAMANG**
- **M.B. KETAPANG**

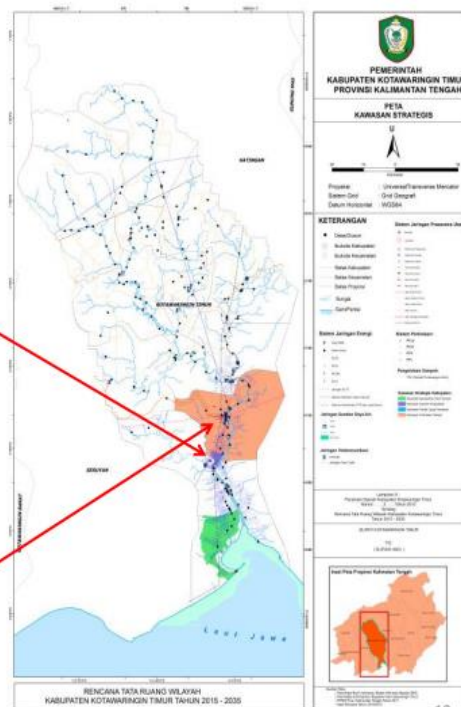


Gambar 4.5 Pusat Perdagangan dan Jasa

D. Kawasan Industri Dan Pergudangan

Kawasan Industri ditetapkan di Km 17 jalan H.M. Arsyad, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang sampai dengan Desa Bagendang Hulu seluas 2.186,3 Ha yang didukung dengan Pelabuhan Multipurpose yang berada di wilayah tersebut. Untuk mendukung keberadaan Kawasan Industri tersebut juga ditetapkan Kawasan Pergudangan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (Dari Ring Road Selatan dan Desa Telaga Baru sampai Kawasan Industri), seperti yang terlihat pada Gambar 4.6.

- **Kawasan Industri**
(dari M.B. Ketapang Km 17 s/d M.H Utara Desa Bagendang Hulu)
- **Kawasan Pergudangan**
M.B. Ketapang (Dari Ring Road Selatan & Desa Telaga Baru s/d Kawasan Industri)



Gambar 4.6 Kawasan Industri dan Pergudangan

4.2.5 Perbandingan Isu Strategis Penataan Ruang Nasional terhadap Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur

Perbandingan isu strategis penataan ruang ditinjau berdasarkan harmonisasi tujuan dan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional berdasarkan aspek isu strategis yang muncul didalamnya terhadap tujuan dan kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan tujuan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur. Perbandingan dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Isu-Isu Strategis Penataan Ruang Nasional terhadap kondisi Isu Strategis Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aspek	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Analisis Isu Strategis
Tujuan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; 2. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 3. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 4. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang; 6. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 7. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah; 8. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan 9. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. 	<p>“mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”</p>	<p>“Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industry pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis dari tujuan penataan ruang nasional meliputi 6 aspek yaitu: livabilitas (poin 1), pembangunan berkelanjutan (poin 1 dan 2), keterpaduan penataan ruang (poin 3, 4, dan 5), kesejahteraan masyarakat (poin 6), pemerataan pembangunan (poin 7 dan 8), serta pertahanan dan keamanan (poin 9). 2. Dari keenam poin tersebut, tujuan penataan ruang dari Provinsi Kalimantan tengah berkesesuaian pada poin kesejahteraan masyarakat dan keterpaduan penataan ruang (tergambarkan pada penyebutan sektor agribisnis, agroindustri, energi, dan pangan yang merupakan sektor utama pendukung ekonomi masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah serta keempat sektor tersebut berkesesuaian dengan sektor-sektor unggulan dalam Perpres No.3 Tahun 2012 tentang RTRW Pulau Kalimantan). Selain itu tujuan penataan ruang dari Provinsi Kalimantan tengah berkesesuaian pula dengan poin keberlanjutan (tergambarkan dalam penyebutan “mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup) 3. Muatan isu strategis dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur telah berkesesuaian dengan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah, ditambah dengan narasi “berbasis pelayanan transportasi” yang mewakili isu strategis pemerataan pembangunan dari RTRW Nasional.

Aspek	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Analisis Isu Strategis
Kebijakan Penataan Ruang	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; 3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian; 4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; 5. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi; 6. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi; 7. Pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan 8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan; 2. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam; 3. Pengembangan pertanian dalam arti luas; 4. Pengembangan industri pengolahan; 5. Pengembangan pelayanan transportasi; 6. Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poin 1 dan 2 kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah terkait isu strategis pemerataan pembangunan, berkesesuaian dengan poin 5 dan 6 kebijakan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Transportasi dan Pemanfaatan Ruang (pembangunan sarana-Prasarana) 2. Poin 3, 4, 5, dan 7 kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan pembangunan sektoral berkesesuaian dengan Poin 3 dan 4 kebijakan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur 3. Poin 6 kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan isu strategis pembangunan berkelanjutan berkesesuaian dengan Poin 1 dan 2 kebijakan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur

Sumber: PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN Tahun 2008-2028 dan PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalteng 2015-2035, Perda No. 5 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Kotim 2015-2035

4.2.6 Perkembangan Penataan Ruang Lainnya

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir setelah diperdaknya RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat beberapa perubahan baik dalam literatur maupun sumber data yang bersumber dari kebijakan nasional, beberapa perbaruan tersebut yaitu:

1. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Setelah Direktorat Penataan Ruang bergabung ke dalam Badan Pertanahan Nasional pada medio 2014, terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang, salah satunya perbaruan pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
2. Terbitnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2017. Merupakan perubahan dari Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/UM/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. Merupakan panduan untuk menyusun basis data dalam peta tata ruang sebagai upaya percepatan investasi melalui *one single submission system (OSS System)*, dimana basis data peta tata ruang dijadikan sebagai prasyarat utama dalam perijinan
4. Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan rencana pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Salah satu UU yang termasuk dalam UU Cipta Kerja yang disusun dengan menganut sistem Omnibus Law adalah UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Aspek tata ruang yang dibahas pada UU Cipta Kerja (dan nantinya juga oleh PP Penyelenggaraan Penataan Ruang yang rencana akan ditetapkan pada tahun 2021) adalah penajaman pada aspek investasi, dimana tata ruang sebagai ujung tombak proses perijinan.

4.2.7 Isu Pembangunan Dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan

Hidup Strategis, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, salah satu dokumen perencanaan yang diwajibkan untuk disertai dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Dengan demikian, seiring dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini dilakukan KLHS.

Beberapa hal yang penting untuk diintegrasikan dari KLHS ke dalam RPJMD ini adalah Isu-Isu Strategis, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun rencana program strategis. Berikut adalah penelaahan isu-isu strategis yang dihasilkan dalam pembahasan KLHS dengan isu-isu strategis yang dicantumkan dalam RPJMD. Dalam hal ini ternyata keduanya masih dalam substansi yang sama. Integrasi isu strategis KLHS dengan isu strategis RPJMD dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4.5 Integrasi Isu Strategis KLHS dalam Isu Strategis RPJMD

No	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis RPJMD
1	Penyediaan Layanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan)	Kualitas dan Daya Saing SDM
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi	Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
4	Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	
5	Penyediaan Fasilitas Sanitasi	Pembangunan Infrastruktur
6	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya Daerah
7	Pemenuhan Pangan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
8	Pengentasan Kemiskinan	
9	Optimalisasi Pertanian	

4.2.8 Isu Pembangunan pada Wilayah yang Lebih Luas

Isu pembangunan yang terjadi pada wilayah yang lebih luas, namun secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

1. Pemindahan Ibukota Negara, upaya pemindahan ibu kota Indonesia dimulai sejak tahun 2019 pada masa kepresidenan Joko Widodo. Melalui rapat terbatas pemerintah pada tanggal 29 April 2019, Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota baru akan dibangun di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
2. Penetapan Kawasan Strategis Metropolitan Baru Indonesia melalui PP No. 13 Tahun 2017, salah satunya Kawasan Metropolitan Banjar Bakula, saat ini sedang dalam tahap penyusunan dan akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden pada tahun 2021.

4.2.9 Isu Strategis dari Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan

Identifikasi isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan dirumuskan dengan melihat urgensi permasalahan pembangunan yang didapatkan dari masukan pelaksanaan urusan pemerintah oleh seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Urgensi dinilai berdasarkan seberapa sering permasalahan yang sama muncul baik pada urusan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, maupun pada Urusan Pilihan. Perumusan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan

Urgensi Permasalahan	Urusan	Sektor/Bidang Terkait	Kesimpulan terhadap Masukan SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Covid-19	Wajib Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan 	Penanggulangan dan pengurangan dampak pandemi perlu dilaksanakan terus-menerus
	Wajib Non Pelayanan Dasar	Kebudayaan	
	Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Perdagangan 	
Keterbatasan sumberdaya	Wajib Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat • Sosial 	Pengelolaan anggaran pada masing-masing SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal
	Wajib Non Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagakerjaan • Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Pangan • Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana • Perhubungan • Komunikasi dan Informatika • Koperasi dan UKM • Kepemudaan dan Olahraga • Perpustakaan dan Kearsipan 	
	Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Kelautan dan Perikanan • Perdagangan dan Perindustrian • Transmigrasi 	
Standar Pelayanan	Wajib Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Ketentraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat 	Pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas

Urgensi Permasalahan	Urusan	Sektor/Bidang Terkait	Kesimpulan terhadap Masukan SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
	Wajib Non Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Lingkungan Hidup dan Penanggulangan bencana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perhubungan Komunikasi dan Informatika Koperasi dan UKM Kebudayaan Perpustakaan dan Kearsipan 	pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah belum optimal
Dasar hukum dan kebijakan	Wajib Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 	Perlunya disusun (bila belum tersedia) atau perlunya dilaksanakan peninjauan kembali dan revisi (bila telah tersedia) terhadap dokumen: <ol style="list-style-type: none"> Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang Rencana Induk Kepariwisata Rencana Pembangunan Industri Kajian dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Rencana Penanggulangan Bencana <i>Grand Deisgn</i> Pembangunan Kependudukan
	Wajib Non Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pangan Pertanian 	
	Urusan Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian Pariwisata Perindustrian dan perdagangan 	
Indikator Pembangunan	Wajib Pelayanan Dasar	Sosial	Belum tercapainya secara optimal indikator pembangunan khususnya kemiskinan dan angka pengangguran
	Wajib Non Pelayanan Dasar	Ketenagakerjaan	

Berdasarkan hasil identifikasi, maka perumusan isu strategis dari situasi dan kondisi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

1. Penanggulangan dan pengurangan dampak pandemi perlu dilaksanakan terus-menerus
2. Pengelolaan anggaran pada masing-masing SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal
3. Pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah belum optimal

4. Perlunya disusun (bila belum tersedia) atau perlunya dilaksanakan peninjauan kembali dan revisi (bila telah tersedia) terhadap dokumen:
 - Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang
 - Rencana Induk Kepariwisataaan
 - Rencana Pembangunan Industri
 - Kajian dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - Rencana Penanggulangan Bencana
 - *Grand Design* Pembangunan Kependudukan
5. Belum tercapainya secara optimal indikator pembangunan khususnya kemiskinan dan angka pengangguran

Hubungan antara isu strategis dari situasi dan kondisi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan isu strategis nasional (berdasarkan jabaran misi RPJMN 2020-2024) dan isu strategis pembangunan jangka panjang Kab. Kotim (berdasarkan jabaran misi RPJP Kab. Kotim 2005-2025) dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan

No	Isu Strategis Kab. Kotim	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis RPJP Kab. Kotim
1	Penanggulangan dan pengurangan dampak pandemi perlu dilaksanakan terus-menerus	Misi: 7	Misi: 2
2	Pengelolaan anggaran pada masing-masing SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal	Misi: 1, 2, 3, 4, 8	Misi: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12
3	Pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah belum optimal	Misi: 1, 2, 3, 4, 7, 8	Misi: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12
4	Perlunya disusun (bila belum tersedia) atau perlunya dilaksanakan peninjauan kembali dan revisi (bila telah tersedia) terhadap dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang • Rencana Induk Kepariwisataaan • Rencana Pembangunan Industri • Kajian dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan • Rencana Penanggulangan Bencana • Grand Deisgn Pembangunan Kependudukan 	Misi: 4, 9	Misi: 1, 3, 9, 10
5	Belum tercapainya secara optimal indikator pembangunan khususnya kemiskinan dan angka pengangguran	Misi: 1, 2, 3, 6, 7	Misi: 5, 8, 9

4.2.10 Sustainable Development Goals / SDGs

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals*

(MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. SDGS Indonesia dilaksanakan melalui Empat Pilar SDGS yaitu social, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola:

1. Pilar Pembangunan Sosial, Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pilar Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
3. Pilar Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Keempat pilar pembangunan SDGs tersebut kemudian diterjemahkan dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (Tabel 4.8).

Tabel 4.8 Isu strategis berdasarkan Situasi dan Kondisi Identifikasi Permasalahan Urusan Pemerintahan

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan
Pilar Pembangunan Sosial	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun	Terdiri atas 5+2 target dan 14 Indikator capaian
	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Terdiri atas 5+3 target dan 16 Indikator capaian
	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Terdiri atas 7+3 target dan 31 Indikator capaian
	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Terdiri atas 6+3 target dan 14 Indikator capaian
	Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	Terdiri atas 5+3 target dan 12 Indikator capaian
Pilar Pembangunan Ekonomi	Tujuan 7: Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua	Terdiri atas 3+1 target dan 7 Indikator capaian
	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	Terdiri atas 10+1 target dan 19 Indikator capaian
	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	Terdiri atas 5+2 target dan 21 Indikator capaian
	Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Terdiri atas 6 target dan 17 Indikator capaian
	Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	Terdiri atas 14 target dan 25 Indikator capaian
Pilar Pembangunan Lingkungan	Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	Terdiri atas 6 target dan 10 Indikator capaian
	Tujuan 11: Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan	Terdiri atas 7+3 target dan 17

Pilar Pembangunan Berkelanjutan	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Keterangan
		Indikator capaian
	Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab	Terdiri atas 7+3 target dan 17 Indikator capaian
	Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	Terdiri atas 3+1 target dan 9 Indikator capaian
	Tujuan 14: Ekosistem Lautan	Terdiri atas 5+2 target dan 10 Indikator capaian
	Tujuan 15: Ekosistem Daratan	Terdiri atas 9+3 target dan 14 Indikator capaian
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Terdiri atas 9+2 target dan 36 Indikator capaian

Sumber: <http://sdgsindonesia.or.id/>

Penjabaran lengkap dari target dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dilihat pada <http://sdgsindonesia.or.id/>. Secara umum target dan indikator SDGs direfleksikan pada tataran nasional dalam RPJMN terbaru yaitu periode 2020-2024, sehingga capaiannya dapat diakomodir di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara umum berdasarkan telaah isu strategis sebelumnya, Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini telah mengakomodir isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi, hanya secara dinamis belum mengakomodir isu-isu strategis terbaru dan yang diprediksi akan mempengaruhi arah pembangunan kedepan. Sehingga, tentunya target dan indikator SDGs telah pun masuk dalam aspek-aspek yang diakomodir.

Target dan indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/ Kota berdasarkan Permendagri No. 100/2018 tentang penerapan SPM.

Tabel 4.9 Capaian Penerapan SPM Bidang Air Minum dan Air Limbah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun

Arah dan kebijakan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berdasarkan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 antara lain:

- 1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui : (a) Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah; (b) Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai; (c) Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang; (d) Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi (Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi (e) Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta (f) Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
- 2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui: (a) Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta (b) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).
- 3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:
 - (a) Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan; (b) Peningkatan dan pembangunan SPAM; (c) Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan); (d) Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan (e) Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus; (f) Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
- 4) Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;

Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

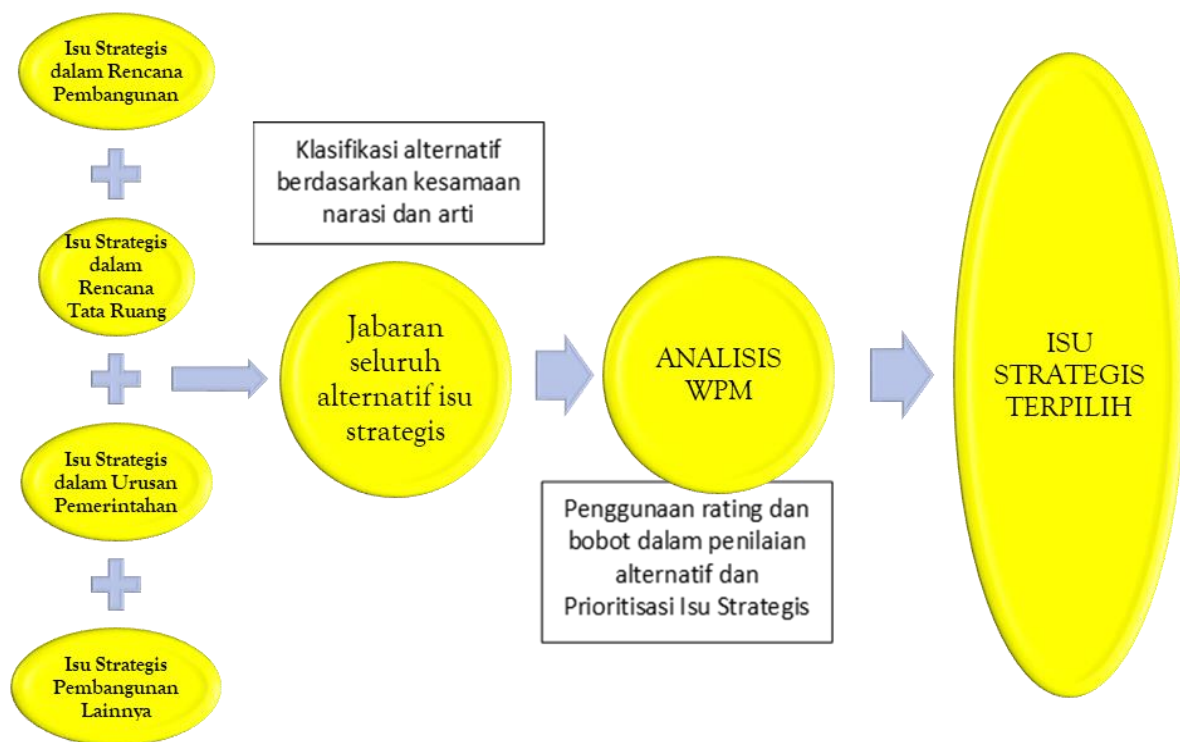
- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui:

- (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
- 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
- 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (*incremental approach*); dan (h) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).
- 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
- 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman meliputi: i) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman; iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi; v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90 persen RT) (*Major Project*); vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (*Major Project*).

4.2.11 Penentuan dan Prioritisasi Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur

Penentuan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan dengan pendekatan *Multi Criteria Decision Making* (MDCM) menggunakan metode *Weighted Product Model* (WPM). Penggunaan pendekatan MDCM dengan metode WPM didasarkan pada pertimbangan bahwa Isu strategis tidak memiliki bentuk baku, namun dapat ditemukan bentuk dan kesamaannya pada hampir dokumen perencanaan. Sehingga dapat dianalogikan sebagai suatu alternatif pilihan yang dapat ditentukan kualitasnya (indikator utama menggunakan skala nominal) yaitu “ada/tidak ada” sebagai kriteria. Karena bersifat seperti alternatif dan keadannya dapat diukur dengan menggunakan kriteria tertentu maka telah memenuhi fitur umum yang ada dalam penggunaan MDCM. Perhitungan menggunakan metode *Weight Product Model* (WPM) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode WPM adalah menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Keunggulan metode ini dapat memberikan informasi yang mudah dan terukur tentang bagaimana keputusan diambil. Tahap pertama adalah penjabaran seluruh alternatif yang tersedia, alternatif yaitu “isu strategis” yang tersedia dari berbagai sumber khususnya pada dokumen RPJMD ini adalah melalui telaah dokumen perencanaan terdahulu dan aspirasi dari SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bagan alur prosesnya dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.7 Bagan Alur Penentuan Isu Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur

Tabel 4.10 Penjabaran seluruh alternatif isu strategis pembangunan yang terkait dengan Kabupaten Kotawaringin Timur

RPJMN	RPJMD Prov. Kalteng	RPJP Kab. Kotim	RPJMD Kab. Seruyan	RPJMD Kab. Katingan	RTRWN	RTRW Prov. Kalteng	RTRW Kab. Kotim
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan 2. Pengurangan angka pengangguran dan peningkatan kualitas ketenagakerjaan 3. Pemerataan pembangunan 4. Konservasi kawasan hutan 5. Ketahanan pangan 6. Pembangunan sektor perikanan 7. Peningkatan investasi dan daya saing umkm 8. Peningkatan ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan 2. penanganan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing 4. Pengembangan green economy dan green government 5. Pemerataan kesejahteraan masyarakat 6. sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan 7. pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas 8. Optimalisasi investasi 9. Good Governance 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kelestarian alam 2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia 3. Mengembangkan Industri Pengolahan 4. Mengembangkan sektor pertanian 5. Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman 6. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial 7. Masyarakat yang Beriman dan Bertakwa 8. Pemerataan Pembangunan 9. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman 10. Pencegahan dan Penanganan Bencana 11. Profesionalisme Pegawai 12. Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Peyelenggaraan Birokrasi 2. Peningkatan kualitas Pendidikan 3. Peningkatan pelayanan Kesehatan dan Sosial 4. Pembangunan ekonomi kerakyatan 5. Pembangunan transportasi laut 6. Pembangunan ekonomi sektoral 7. Pertahanan dan keamanan 8. Pemerataan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Peyelenggaraan Birokrasi 2. Peningkatan kualitas pendidikan 3. Peningkatan pelayanan kesehatan 4. Mewujudkan kesetaraan gender dan menyukseskan keluarga berencana 5. Pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan 6. Peningkatan ketersediaan infrastruktur 7. Pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkesinambungan 8. Pembangunan pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 2. Pembangunan berkelanjutan 3. Keterpaduan penataan ruang 4. Kesejahteraan masyarakat 5. Pemerataan pembangunan 6. Pertahanan dan keamanan 7. Pembangunan transportasi, sarana, dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpaduan penataan ruang 2. Kesejahteraan masyarakat 3. Pembangunan berkelanjutan 4. Pembangunan transportasi, sarana, dan prasarana 5. Pembangunan sektoral 	

Terdapat 62 isu strategis dari 8 dokumen perencanaan sebelumnya yang menjadi masukan bagi penentuan isu strategis Kabupaten Kotawaringin Timur. Klasifikasi terhadap alternatif isu-isu strategis pembangunan yang telah terhimpun tersebut dilakukan dengan pendekatan kesamaan bentuk narasi dan kesamaan arti kemudian menghasilkan 12 isu strategis sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan
2. Pengurangan Angka Pengangguran
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Pemerataan Pembangunan hingga ke Pedesaan
5. Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal
6. Ketahanan Pangan
7. Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan
8. Peningkatan Investasi dan Ekspor
9. Penanganan dan Mitigasi Bencana
10. Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance
11. Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas
12. Penguatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan

Dalam penilaian dengan metode WPG, ada 3 sumber yang tidak digunakan secara langsung dalam penilaian yaitu SDGS, Hasil kompilasi Isu Strategis berdasarkan Urusan Pemerintahan, serta RPJPD Kab. Kotim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **SDGS**, Terkait dengan indikator dan target pembangunan berkelanjutan pada skala nasional yang tertuang dalam SDGs, perbandingan dan klasifikasi tidak dimasukkan karena pengejawantahan dari SDGs tersebut telah tertuang dalam RPJMN yang pada tahapan ini telah turut diperbandingkan.
2. **Hasil kompilasi Isu Strategis berdasarkan Urusan Pemerintahan**, Terkait isu strategis dari urusan pemerintahan yang didapatkan dari proses partisipatif dari SOPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diklasifikasikan sebagai berikut (Tabel 4.11):

Tabel 4.11 Isu Strategis berdasarkan Urusan Pemerintahan dibandingkan Hasil Klasifikasi Isu Strategis

Isu Strategis Urusan Pemerintahan	Hasil Klasifikasi Isu Strategis
Penanggulangan dan pengurangan dampak pandemi perlu dilaksanakan terus-menerus	Terkait dengan pemenuhan pelayanan kesehatan serta ketahanan sosial masyarakat menghadapi pandemi, maka isu ini telah diakomodir dalam isu strategis ke-3 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat”
Pengelolaan anggaran pada masing-masing SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur belum optimal	Telah diakomodir pada isu strategis ke-10 yaitu “reformasi birokrasi”
Pemenuhan standar pelayanan minimum khususnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas	Telah diakomodir pada isu strategis ke-3 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat”, isu strategis ke-10 yaitu “reformasi birokrasi”,

Isu Strategis Urusan Pemerintahan	Hasil Klasifikasi Isu Strategis
pendukung penyelenggaraan urusan pemerintah belum optimal	serta isu strategis ke-11 yaitu “Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas”
Perlu disusun (bila belum tersedia) atau perlunya dilaksanakan peninjauan kembali dan revisi (bila telah tersedia) terhadap dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang 2. Rencana Induk Kepariwisata 3. Rencana Pembangunan Industri 4. Kajian dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 5. Rencana Penanggulangan Bencana 6. <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan 	Telah diakomodir pada isu strategis ke-3 yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat”, ke-5 yaitu “Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal”, isu ke-7 yaitu “Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan“, serta isu ke-9 yaitu “Penanganan dan Mitigasi Bencana”.
Belum tercapainya secara optimal indikator pembangunan khususnya kemiskinan dan angka pengangguran	Telah diakomodir pada isu ke-1 yaitu “Pengentasan Kemiskinan” dan isu ke-2 yaitu “Pengurangan Angka Pengangguran”

3. RPJPD Kab. Kotim, Dokumen RPJPD tetap akan digunakan dalam penilaian kriteria karena secara substansi merupakan landasan berpikir yang menjadi acuan pembangunan jangka panjang. Namun tidak digunakan dalam penentuan bobot. Hal ini dikarenakan salah satu indikator penentuan bobot kriteria adalah indikator aktual, dimana isu strategis yang ada dalam dokumen perencanaan dinilai relevansinya pada kondisi saat ini. Karena RPJPD merupakan dokumen rencana jangka panjang, disahkan dan berlaku pada tahun 2005 maka tentu relevansinya pada kondisi saat ini telah berkurang.

Penentuan prioritas dari isu strategis dilakukan dengan menggunakan metode analisis Weighted Product Model (WPM) dengan rumus sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j} \quad \text{dan} \quad V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}}{\prod_{j=1}^n X_j^*}$$

Dimana:

- S / V : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vector S (dalam hal ini mewakili prioritas)
- X : Nilai Kriteria (Menggunakan skala pengukuran ordinal dengan kuantifikasi 3 = Ada, 1 = Tidak Ada). Ada / Tidak Ada mewakili penilaian apakah “isu strategis” dimaksud muncul atau tidak dalam dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi acuan. Pemilihan satuan ordinal 1 dan 3 untuk memberikan gambaran rentang penilaian dan penanda bahwa keberadaan isu strategis dalam dokumen perencanaan berarti nilai lebih baik
- W : Bobot kriteria, penentuan bobot akan dijelaskan selanjutnya.
- i : Alternatif (adalah isu-isu strategis)
- j : Kriteria (adalah dokumen-dokumen perencanaan)
- n : Banyak kriteria
- * : Banyak kriteria yang telah dinilai pada vector S

Tabel 4.12 Alternatif, Kriteria serta Penilaian Kriteria

No	Alternatif Isu Strategis	Kriteria (Dokumen) ada (3) / tidak ada (1)							
		RPJMN	RPJMD Prov. Kalteng	RPJPD Kab. Kotim	RPJMD Kab. Seruyan	RPJMD Kab. Katingan	RTRWN	RTRW Prov. Kalteng	RTRW Kab. Kotim
1	Pengentasan Kemiskinan	3	1	1	1	1	1	1	1
2	Pengurangan Angka Pengangguran	3	1	1	1	1	1	1	1
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	3	3	3	3	3	1	1	1
4	Pemerataan Pembangunan hingga ke Pedesaan	3	3	3	3	1	3	1	1
5	Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal	3	3	3	1	3	3	3	3
6	Ketahanan Pangan	3	3	3	1	3	1	1	1
7	Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan	3	3	3	3	3	1	1	1
8	Peningkatan Investasi dan Ekspor	3	3	1	1	1	1	1	1
9	Penanganan dan Mitigasi Bencana	1	3	3	1	1	1	1	1
10	Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance	1	3	3	3	3	1	1	1
11	Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas	1	3	3	3	3	3	3	3
12	Penguatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan	1	1	3	3	1	3	1	1

Bobot untuk masing-masing kriteria ditentukan berdasarkan indikator *recency*. Penentuan bobot ditentukan secara subjektif kualitatif oleh penyusun dengan uraian indikator yang jelas untuk menghindari bias dalam penilaian. Uraian terhadap indikator *recency* sebagai berikut. Dalam menentukan persepsi dari kebaruan digunakan 3 indikator dasar yaitu *recency* atau derajat kebaruan dalam arti kerangka waktu, *novelty* atau derajat kebaruan dalam kerangka inovasi, dan *scarcity* atau derajat kelangkaan. Indikator *recency* menggunakan ukuran dasar selisih waktu, semakin sedikit selisih waktu dari objek yang diteliti dengan kondisi aktual saat ini maka semakin tinggi skor atau semakin baik persepsinya.

Range Nilai yang digunakan dalam pengukuran indikator *recency* adalah periode 2015-2020 menyesuaikan dengan periodisasi rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 yaitu selama 5 tahun. Berdasarkan indikator ini maka dokumen perencanaan terdahulu yang menjadi rujukan penentuan kriteria dari alternatif isu strategis akan dibobotkan menggunakan skala ordinal, dari yang terbaru hingga yang terlama dengan kuantifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.13. Khusus untuk dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur akan diberikan bobot terendah secara subjektif karena jangkauan perencanaannya yang panjang dan waktu penetapannya yaitu sejak tahun 2005. Pertimbangan bahwa dokumen RPJPD tetap digunakan dalam penilaian *Weighted Product Model* (WPM) adalah, walaupun nilai *recency*-nya rendah, namun secara substantif merupakan landasan berpikir yang menjadi acuan pembangunan jangka panjang bagi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 4.13 Penentuan Bobot Penilaian

Kriteria (Dokumen Perencanaan Terdahulu)	Tahun Berlaku	Bobot Nilai	Normalisasi Nilai ($n/\sum n$)
RPJMN	2020	5	0.29
RPJMD Prov. Kalteng	2016	1	0.06
RPJMD Kab. Seruyan	2018	3	0.18
RPJMD Kab. Katingan	2018	3	0.18
RTRWN	2017	3	0.18
RTRW Prov. Kalteng	2015	1	0.06
RTRW Kab. Kotim	2015	1	0.06
RPJPD Kab. Kotim	2005	1	0.06 (diberikan skor terendah karena range diluar)
Penentuan Range Penilaian	$= (n_{Max} - n_{Min}) / kelas \rightarrow = (2020 - 2015) / 3$ $= 1.67$ atau dibulatkan menjadi 2. Maka range skala ordinal penilaian adalah 1 = kurang aktual (tahun 2015 dan 2016) 3 = Cukup Aktual (tahun 2017 dan 2018) 5 = Sangat Aktual (tahun 2019 dan 2020) Range Nilai yang digunakan dalam pengukuran indikator <i>recency</i> adalah periode 2015-2020 menyesuaikan dengan periodisasi rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 yaitu selama 5 tahun.		

Perhitungan dan hasil proritisasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Perhitungan dan Hasil Prioritisasi Isu-Isu Strategis Pembangunan

No	Alternatif Isu Strategis	Kriteria ^(Bobot)								Hasil Penilaian $V_i = \frac{\sum_{j=1}^n X_{ij} W_j}{\sum_{j=1}^n X_j}$
		RPJMN	RPJMD Prov. Kalteng	RPJPD Kab. Kotim	RPJMD Kab. Seruyan	RPJMD Kab. Katingan	RTRWN	RTRW Prov. Kalteng	RTRW Kab. Kotim	
1	Pengentasan Kemiskinan	3 ^{0.29}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.38
2	Pengurangan Angka Pengangguran	3 ^{0.29}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.38
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	2.33
4	Pemerataan Pembangunan hingga ke Pedesaan	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	2.33
5	Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	1 ^{0.18}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	2.66
6	Ketahanan Pangan	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	1 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.91
7	Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	2.33
8	Peningkatan Investasi dan Ekspor	3 ^{0.29}	3 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.47
9	Penanganan dan Mitigasi Bencana	1 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.14
10	Reformasi Birokrasi untuk Mencapai Good Governance	1 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.69
11	Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas	1 ^{0.29}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	3 ^{0.18}	3 ^{0.06}	3 ^{0.06}	2.36
12	Penguatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan	1 ^{0.29}	1 ^{0.06}	3 ^{0.06}	3 ^{0.18}	1 ^{0.18}	3 ^{0.18}	1 ^{0.06}	1 ^{0.06}	1.59

Berdasarkan hasil analisa WPM, maka prioritas isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu:

1. Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal (Nilai WPM 2.66)
2. Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas (Nilai WPM 2.36)
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat (Nilai WPM 2.33)
4. Pemerataan Pembangunan hingga ke Pedesaan (Nilai WPM 2.33)
5. Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan (Nilai WPM 2.33)
6. Ketahanan Pangan (Nilai WPM 1.91)
7. Reformasi Birokrasi untuk Mencapai *Good Governance* (Nilai WPM 1.69)
8. Penguatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan (Nilai WPM 1.59)
9. Peningkatan Investasi dan Ekspor (Nilai WPM 1.47)
10. Pengentasan Kemiskinan (Nilai WPM 1.38)
11. Pengurangan Angka Pengangguran (Nilai WPM 1.38)
12. Penanganan dan Mitigasi Bencana (Nilai WPM 1.14)

4.2.12 Aktualisasi Isu Strategis Terhadap Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur

Berbagai uraian di sub bab sebelumnya bermuara pada permasalahan utama dan isu strategis dengan pembobotannya masing-masing. Hal ini akan mempermudah penentuan prioritas pembangunan dengan mengacu pada Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15 Prioritas Pembangunan dan Isu Strategis

No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Muatan Isu	Permasalahan Utama
1	Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Infrastruktur, Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Fasilitas Umum, serta Peningkatan Aksesibilitas • Pemerataan Pembangunan hingga ke Pedesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar • Belum optimalnya infrastruktur kawasan • Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang • Belum optimalnya konektivitas antarwilayah • Belum optimalnya cakupan pelayanan jaringan transportasi dan telekomunikasi
2	Sumberdaya Manusia	Kualitas dan Daya Saing SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat • Penguatan kondusifitas, pertahanan, dan keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan • Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan • Belum optimalnya kualitas pembangunan manusia berbasis gender • Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dan olahraga
3	Penguatan Ekonomi Masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Sektor Ekonomi Strategis dan Ekonomi Kerakyatan • Ketahanan Pangan • Peningkatan Investasi dan Ekspor • Pengentasan Kemiskinan • Pengurangan Angka Pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penguatan perlindungan sosial kelompok masyarakat rentan dan penduduk miskin • Relatif rendahnya daya saing angkatan kerja • Belum optimalnya iklim usaha/investasi di daerah • Belum optimalnya penguatan daya saing dan kelembagaan petani, serta pelaku IKM dan UMKM • Belum optimalnya pengelolaan pangan di daerah • Belum optimalnya pengelolaan destinasi maupun promosi wisata
4	Tata Kelola Pemerintahan	Manajemen Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Reformasi Birokrasi untuk Mencapai <i>Good Governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kualitas dan pelayanan publik • Belum optimalnya kualitas SDM Pemerintah Desa • Belum optimalnya implementasi Perda dan Perkada • Belum optimalnya ketersediaan regulasi di daerah untuk menunjang pelayanan publik • Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-kegiatan, serta peran kelitbang dalam perencanaan pembangunan daerah • Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan dan pengelolaan aset daerah

No	Prioritas Pembangunan	Isu Strategis	Muatan Isu	Permasalahan Utama
5	Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis	Penanggulangan Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Budaya Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Optimal • Penanganan dan Mitigasi Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran hutan, lahan dan permukiman • Belum optimalnya penanggulangan bencana dan pengelolaan persampahan • Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring untuk mencegah pencemaran air, tanah, udara dan konservasi habitat serta keanekaragaman hayati • Belum optimalnya manajemen pengelolaan dan pelestarian budaya daerah

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Visi merupakan arah pembangunan atau masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan Tahapan pembangunan ke-4 dalam RPJPD 2005-2025 dengan visi “**Demokratis, Adil, Maju, Aman, Indah-Lestari, Mandiri, Taqwa, Profesional**”, disingkat menjadi Damai dan Mantap. Implementasi dari visi tersebut dijabarkan sebagai:

1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang demokratis dalam bidang politik, sosial budaya, supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia;
2. Terwujudnya rasa aman bagi masyarakat;
3. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang maju, adil, dan makmur melalui pembangunan sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh. Tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mencapai kesejahteraan yang diinginkan;
4. Sumberdaya alam yang terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai tambah dan meningkatkan daya saing;
5. Jaringan transportasi yang mampu menjangkau ke perdesaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 12 misi yaitu:

Mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari adalah mewujudkan keasrian kabupaten Kotawaringin Timur yang hijau dengan alam lingkungan yang lestari. Kelestarian lingkungan hidup ini untuk memberikan ruang yang layak bagi generasi mendatang. Lestari juga berarti mempertahankan tradisi dan situs-situs sejarah yang bermanfaat bagi pendidikan dan pariwisata. Tradisi dan situs sejarah dilestarikan agar masyarakat Kotawaringin Timur memiliki identitas budaya dan tidak melupakan masa lalunya;

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia. Artinya bahwa untuk mencapai Kotawaringin Timur yang maju diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdedikasi kepada daerahnya. Sumberdaya manusia merupakan modal penting dalam memajukan suatu daerah;
2. Mengembangkan Industri Pengolahan adalah mewujudkan agro industri di Kabupaten Kotawaringin Timur baik industri hilir maupun industri hulu. Dengan pengembangan industri ini maka perekonomian Kotawaringin Timur tidak akan bergantung lagi pada sektor primer tetapi tercipta diversifikasi kegiatan ekonomi yang lain. Dengan pengembangan sektor industri diharapkan akan terjadi

- Peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan kesempatan kerja, dan nilai tambah produk pertanian;
3. Mengembangkan sektor pertanian yang sesuai dengan lahan di Kotawaringin Timur. Ini berarti bahwa pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas di Kabupaten Kotawaringin Timur disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim setempat. Dengan pendekatan agro ekosistem yang sesuai, produk pertanian akan memiliki daya saing yang tinggi;
 4. Mengembangkan Kondisi Sosial Politik yang Demokratis, Saling Tenggang Rasa, Persatuan, dan Aman adalah sebuah kondisi yang mewujudkan rasa aman di masyarakat. Saling Tenggang rasa akan adanya perbedaan baik perbedaan agama ataupun suku. Rasa aman ini akan terwujud jika warga Kabupaten Kotawaringin Timur bersatu dan menjalankan kehidupannya secara demokratis;
 5. Meningkatkan Pelayanan Fasilitas Sosial. Artinya untuk mewujudkan Kotawaringin Timur yang maju diperlukan peningkatan pelayanan fasilitas sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Sehingga warga dapat mencapai fasilitas ini dengan biaya murah dan bermutu tinggi. Dengan demikian pelayanan fasilitas sosial ini dapat melayani seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok;
 6. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa. Berarti bahwa dalam setiap tindakan didasari oleh prinsip-prinsip keagamaan yang berfungsi untuk menjaga akhlak dan moralitas baik pegawai maupun penduduk Kotawaringin Timur pada umumnya;
 7. Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi adalah pemerataan pembangunan jalan yang tidak hanya terkonsentrasi pada ibukota kabupaten tetapi juga sampai ke desa-desa sehingga ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kota besar. Selain itu juga mengembangkan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah yang ideal untuk meningkatkan investasi dengan sarana dan prasarana yang memadai;
 8. Meningkatkan Pelayanan Sarana dan Prasarana Permukiman adalah meningkatkan pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan listrik yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan peningkatan pelayanan ini akan meningkatkan pula produktifitas masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan;
 9. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana. Mitigasi bencana perlu dilakukan agar jumlah korban dan kerugian dapat diminimalkan. Bencana alam yang potensial terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dan kebakaran, baik kebakaran di permukiman maupun kebakaran hutan dan lahan;
 10. Meningkatkan Profesionalisme Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Menanamkan etos kerja, melaksanakan pendidikan dan

pelatihan, serta penempatan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian dapat melayani masyarakat secara profesional;

11. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan, meningkatkan koordinasi pembangunan dengan kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan Desember 2020, yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan yang akan menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai misi yang diemban. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat serta cita-cita masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun penjabaran Visi tersebut diatas sebagai berikut:

Mandiri bermakna pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

Maju bermakna adanya peningkatan dalam penyediaan sarana prasarana, pertumbuhan ekonomi, berkembangnya industri dan jasa, serta mampu menjawab berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional. Dengan kata lain, maju dapat diartikan sebagai membaiknya kesejahteraan masyarakat dan keunggulan daya saing daerah.

Sejahtera ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar pokok masyarakat, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, ekonomi, social dan budaya yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin dan pengangguran sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5.2 MISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas. Berdasarkan uraian visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)
5. Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Penjabaran kelima misi tersebut di atas tidak terlepas dari keterkaitan terhadap misi Pemerintah Pusat yang tercantum dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 seperti yang terlihat pada Tabel 5.1 berikut ini

Tabel 5.1 Kesesuaian Misi dalam RPJMD Kab. Kotim Tahun 2016-2021 terhadap RPJMN 2020-2024

		RPJMD Kab. Kotim				
		Misi 1	Misi 2	Misi 3	Misi 4	Misi 5
RPJMN	Misi 1		√			
	Misi 2				√	
	Misi 3			√		
	Misi 4		√		√	
	Misi 5	√				
	Misi 6				√	
	Misi 7					√
	Misi 8					
	Misi 9					√

Keterangan:

RPJMD Kab. Kotim

Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

Misi 2 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governance*)

Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

RPJMN:

Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Misi 2 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Misi 3 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Misi 4 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga

- Misi 5 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 6 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
Misi 7 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
Misi 8 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Misi 9 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa tiap misi dalam RPJMD telah memiliki keterkaitan dengan minimal 1 misi yang tercantum dalam RPJMN. Dengan demikian pencapaian misi pembangunan di daerah akan berkontribusi terhadap pencapaian misi pembangunan di tingkat nasional.

Untuk mencapai misi yang telah dijabarkan di atas, maka perlu aktualisasi aksi yang terwujud dalam program pembangunan. Adapun beberapa program pembangunan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai aktualisasi misi yang ditetapkan seperti yang terlihat pada Tabel 5.2 berikut ini

Tabel 5.2 Prioritas dan Program Pembangunan Kepala Daerah Terpilih

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
1	Infrastruktur	1. Menjadikan Kota Sampit Bebas Banjir, Bebas Sampah dan Sampit Terang.
		2. Penataan Kota Sampit melalui penataan permukiman, penataan bantaran sungai, peningkatan jalan dan jembatan terutama jalan kecil atau gang yang ada dalam kota Sampit.
		3. Pembenahan jalan dan drainase sehingga tidak ada lagi jalan yang rusak/berlubang serta menghindari terjadinya genangan air atau banjir.
		4. Penyediaan sarana dan pengelolaan sampah padat yang tepat guna dalam upaya menciptakan kota Sampit yang bersih, nyaman, asri dan indah.
		5. Penataan dan pengelolaan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU).
		6. Pembangunan/pengembangan dermaga ferry penyeberangan Sampit - Mentaya Seberang dan Samuda - Pulau Hanaut (Bapinang).
		7. Melanjutkan peningkatan Jalan Cempaka Mulia - Kampung Melayu hingga menembus Pulau Hanaut.
		8. Penataan Ibukota Kecamatan sebagai pusat atau sentra kegiatan ekonomi sosial masyarakat
		9. Memberikan Bantuan Stimulan bagi Rumah Tidak layak Huni kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
		10. Penyediaan sarana air bersih di perdesaan seperti wilayah Selatan yang sering mengalami kesulitan mendapatkan air bersih apabila terjadi musim kemarau.
		11. Memperluas dan membenahi jaringan distribusi air yang dikelola PDAM agar dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan.
		12. Membuka keterisolasian antar desa atau dari kecamatan ke desa melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi, telekomunikasi dan jaringan listrik atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
		13. Pengembangan sarana prasarana perekonomian seperti bandara, dermaga, pelabuhan laut, pasar, terminal dan fasilitas umum lainnya.
2	Sumberdaya Manusia	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu Unit Sekolah Baru (USB), ruang belajar baru, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, rumah dinas guru serta sarana dan prasarana pendukung lainnya
		2. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, dan tepat lokasi
		3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional
		4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 6. Pengembangan sekolah menengah kejuruan guna memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian dan terampil sesuai tuntutan pembangunan dan dunia kerja 7. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan (puskesmas, pustu, rumah dinas, peralatan kesehatan) 8. Peningkatan mutu dan pemerataan tenaga kesehatan 9. Peningkatan lingkungan sehat dan upaya kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk penyakit menular serta perbaikan gizi masyarakat 11. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 12. Penyediaan dan pengendalian obat dan perbekalan kesehatan 13. Pengawasan obat dan makanan 14. Pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan 15. Pemberian beasiswa sebanyak 500 orang (siswa yang miskin, tidak mampu dan berprestasi) 16. Mengiatkan pelaksanaan MTQ, PESPARAWI dan FESTIVAL TANDAK 17. Pemberian insentif kepada Tahfidz Al Qur'an 30 Juz yang bertugas di masjid-masjid 18. Memberikan santunan kepada para janda yang sudah tua, anak yatim / yatim piatu, orang miskin dan orang terlantar 19. Mengaktifkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai salah satu pilar mendayagunakan zakat untuk kesejahteraan umat
3	Penguatan Ekonomi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan lahan pertanian dan perkebunan dengan komoditi lokal yang kompetitif diantaranya melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/peningkatan Irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT) b. Pembukaan/pemanfaatan lahan tidur atau lahan kosong milik masyarakat yang tidak mampu dan miskin c. Mengiatkan penyuluhan pertanian hingga ke pelosok desa d. Pemberian bantuan bibit, pupuk dan alat mesin pertanian/perkebunan seperti alat panen padi (combine harvester), excavator dan hand tractor 2. Kerjasama dengan pengusaha dan perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja dari masyarakat lokal, baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan 3. Mengembangkan ketahanan pangan daerah melalui intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi tanaman pangan 4. Pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah 5. Mengembangkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber penghasilan masyarakat, diantaranya pengembangan perikanan di Sei ijum Raya serta kecamatan lainnya 6. Menumbuhkembangkan industri kecil dan rumah tangga serta industri pengolahan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja 7. Menciptakan iklim usaha/investasi yang aman dan kondusif untuk menarik minat investor 8. Pengembangan komoditi unggulan dengan mengarah pada konsep One Village One Product (satu desa dengan satu produk unggulan) 9. Pengembangan sektor pariwisata yang mengedepankan kearifan budaya lokal diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan obyek wisata religius seperti kubah makam Syekh Haji Abu Hamid di Pantai Ujung Pandaran, makam Syekh Basiri dan H b. Pengembangan destinasi alam/purbakala dengan pengelolaan habitat buaya yang ada di Pulau Hanaut dan Pulau Lepeh untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat c. Pengembangan wisata Sagonta Kota dengan melestarikan habitat flora dan fauna didalamnya menjadi salah satu obyek wisata unggulan dalam kota Sampit

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pengembangan wisata kuliner e. Mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai Identitas Daerah f. Mengembangkan kerajinan anyaman, ukiran, dan souvenir khas Kotawaringin Timur
4	Tata Kelola Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kelembagaan pemerintahan daerah (Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan penguatan kewenangannya sehingga lebih efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 2. Reorientasi program pembangunan daerah melalui perencanaan yang matang dengan prioritas terciptanya peluang berusaha bagi masyarakat melalui efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan 3. Peningkatan kinerja aparatur dengan mendorong peningkatan wawasan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan 4. Pemanfaatan teknologi informasi (e-government) secara terintegrasi dalam pengelolaan sistem administrasi pemerintahan daerah 5. Peningkatan penelitian/pengkajian sebagai dasar perencanaan dan penetapan kebijakan 6. Peningkatan sistem koordinasi aparatur pemerintah yang lebih efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan penggalan PAD 7. Penciptaan iklim birokrasi yang mendorong tumbuhnya etika tata laksana pemerintahan yang kooperatif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 8. Penguatan Pemerintahan Desa dengan mendorong kemandirian desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa, pengembangan kelembagaan desa serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya lokal (sumberdaya manusia, sumberdaya kelembagaan dan sumberdaya fisik)
5	Kotim Yang Nyaman, Lestari, Berbudaya dan Agamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reboisasi dan penghijauan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 2. Penataan ruang terbuka hijau dan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA). 3. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 4. Penempatan satuan pemadam kebakaran sampai tingkat kecamatan melalui Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana Karhutla. 5. Penanggulangan abrasi pantai Ujung Pandaran dan pembangunan Penyediaan Sarana Air Bersih berbasis masyarakat untuk mengatasi kekeringan. 6. Memberikan bantuan terhadap korban bencana sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. 7. Penyadartahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan. 8. Penguatan seni dan budaya daerah dengan mengiatkan sanggar-sanggar tari/seni dan pagelaran seni di balai budaya daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan urusan sesuai dengan kewenangan daerah serta penjabaran dari Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 5.3 sebagai berikut

Tabel 5.3 Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Satuan	Kondisi 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan										
Tujuan Daerah										
1	Peningkatan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	persen	31,10	32,59	33,70	34,98	36,23	37,60	39,10
Sasaran Daerah										
1	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	persen	50,93	52,07	52,22	53,25	54,39	55,58	56,81
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	persen	47,25	48,05	48,50	49,42	50,54	51,80	53,15
2	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Persentase layanan angkutan darat, laut, dan udara	persen		44,00	47,00	50,00	55,00	60,00	65,00
		Angka kecelakaan lalu lintas darat	jumlah	130	125	119	110	102	92	83
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	Persentase rumah tinggal bersanitasi	persen	73,15	78,15	83,15	87,15	91,15	94,15	96,15
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	persen	60,59	62,59	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59
		Persentase penduduk berakses air minum / air bersih	persen	27,76	32,76	37,76	42,76	47,76	52,76	57,76
		Rasio rumah layak huni	persen	18,98	18,99	19,00	19,01	19,02	19,03	19,04
		Persentase areal kawasan kumuh	persen	0,45	0,38	0,30	0,23	0,15	0,08	0,00
4	Meningkatnya cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi	persen		50,00	57,50	82,00	82,00	91,00	93,00
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa										
Tujuan Daerah										

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Satuan	Kondisi 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	71,31	71,86	72,48	73,10	73,73	74,35	74,98
Sasaran Daerah										
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,13	8,16	8,24	8,33	8,41	8,50	8,59
		Harapan Lama Sekolah	tahun	12,84	12,97	13,14	13,32	13,49	13,67	13,84
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	tahun	69,85	69,89	69,96	70,04	70,11	70,18	70,26
3	Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	NA	88,06	88,15	88,24	88,33	88,42	88,51
		Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	indeks	NA	30,96	32,20	33,36	34,45	35,58	36,30
4	Meningkatnya daya saing daerah	Produktivitas Total Daerah	juta rupiah	123,70	125,55	127,43	129,34	131,28	133,24	135,24
		Angka Kriminalitas Yang Tertangani	permiriad (per sepuluh ribu)	3,08**	5,45	5,13	4,92	4,81	4,29	3,69
5	Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	Persentase wirausaha muda	persen	31,00	34,00	37,00	41,00	45,00	48,00	51,00
		Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Misi 3: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja										
Tujuan Daerah										
1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	persen	-3,09	2,94	3,40	3,87	4,24	4,68	5,12
		Tingkat Inflasi	persen	1,62	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
		Tingkat Kemiskinan	persen	5,62	5,54	5,36	5,19	5,01	4,84	4,67
		Tingkat Pengangguran	persen	5,25	5,17	5,09	5,01	4,93	4,86	4,81
		PDRB per Kapita	juta	56,63	57,71	58,82	59,25	60,14	61,08	61,97

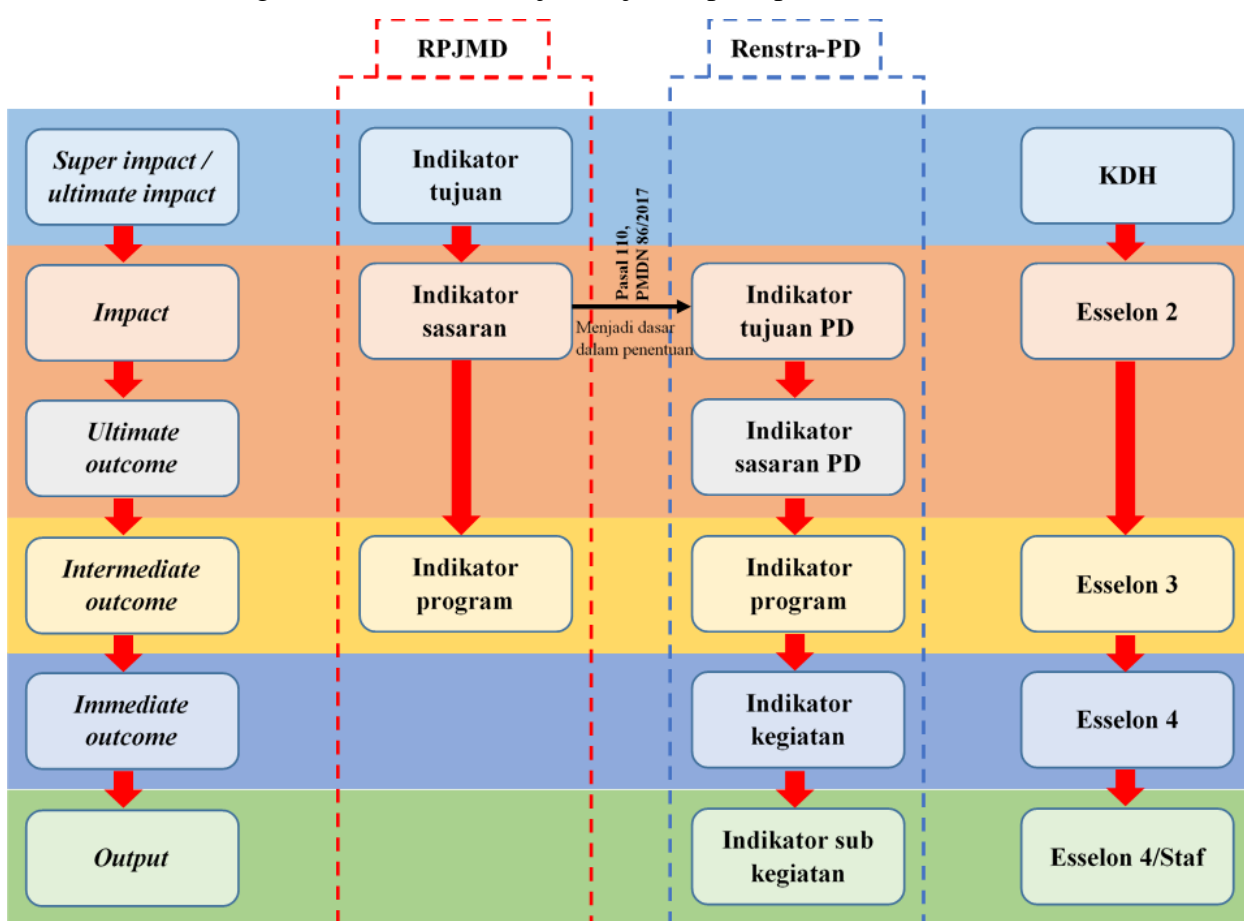
No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Satuan	Kondisi 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
			rupiah							
		Indeks Gini	indeks	0,32	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35
Sasaran Daerah										
1	Meningkatnya keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	persen	96,58	96,78	96,99	97,12	97,32	97,56	97,56
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	persen	87,10	88,60	90,00	91,40	92,90	93,40	93,40
		Penguatan Cadangan Pangan	persen	NA	2,50	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Meningkatnya kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	21,09	21,73	22,10	22,47	22,84	23,21	23,58
3	Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	persen	89,00	90,00	90,00	91,00	91,00	91,00	92,00
4	Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	persen	1,25	1,31	1,44	1,59	1,75	1,92	2,11
5	Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	persen	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05
6	Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	rasio	14,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)										
Tujuan Daerah										
1	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	indeks	CC	B	B	B	BB	BB	BB
Sasaran Daerah										
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Satuan	Kondisi 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	indeks	67,32	68,84	70,23	71,55	72,92	74,35	75,18
		Nilai SAKIP	kriteria	NA	B	B	BB	BB	BB	BB
		Nilai LPPD	kriteria	NA	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	indeks	1,95	2,00	2,20	2,50	2,80	3,00	3,20
4	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	persen	16,21	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00
5	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	Sangat tertinggal: 27 Tertinggal: 65 Berkembang: 59 Maju: 15 Mandiri: 2	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 20 Tertinggal: 66 Berkembang: 60 Maju: 18 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 19 Tertinggal: 63 Berkembang: 63 Maju: 18 Mandiri: 5	Sangat tertinggal: 17 Tertinggal: 62 Berkembang: 64 Maju: 20 Mandiri: 5	Sangat tertinggal: 16 Tertinggal: 57 Berkembang: 66 Maju: 23 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 14 Tertinggal: 56 Berkembang: 67 Maju: 24 Mandiri: 7
Misi 5: Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya										
Tujuan Daerah										
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	39,84	57,59	69,12	69,12	69,13	69,13	69,14
Sasaran Daerah										
1	Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	indeks	69,37	4,81	4,81	4,81	4,82	4,82	4,82
		Indeks Kualitas Udara	indeks	62,66	66,71	66,71	66,71	66,72	66,72	66,72
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	93,17	53,76	53,76	53,76	53,77	53,77	53,77
		Timbunan Sampah yang Ditangani	persen	46,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00

No	Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan dan Sasaran)	Satuan	Kondisi 2020	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya kualitas ruang publik	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	rasio	0,68	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71	0,72
3	Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	persen	11,75	11,75	29,41	47,06	64,71	82,35	100,00
		Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tujuan Daerah										
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	19,11	21,12	22,56	23,53	25,71	27,78	27,78
Sasaran Daerah										
1	Meningkatnya jumlah karya dan cagar budaya yang dikelola	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	NA	1,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	19,11	21,12	22,56	23,53	25,71	27,78	29,73

Tabel 5.3 menjabarkan misi ke dalam tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya masing-masing. Secara normatif, indikator kinerja yang terdapat dalam Tabel 5.2 merupakan perjanjian kinerja antara Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tahun 2019 telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan ini terdapat entitas baru dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu Sub Kegiatan. Peraturan ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kedua peraturan perundangan tersebut secara logis merubah tingkatan indikator kinerja menjadi seperti pada Gambar 5.1 berikut ini



Gambar 5.1 Perubahan Tingkatan Indikator Kinerja Atas PMDN Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020

Gambar 5.1 memperlihatkan bahwasanya dengan adanya PMDN Nomor 90 Tahun 2019 maupun Kepmendagri 050 Tahun 2020 tidak merubah segmentasi indikator kinerja di tingkat daerah dan di tingkat Perangkat Daerah.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD sehingga efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategik, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup ekologi (lingkungan) pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Mengacu pada penjabaran tujuan dan sasaran pada bab sebelumnya, penjabaran strategi dalam pencapaian misi pembangunan selama periode 5 tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1 Penjabaran Strategi

Misi	Strategi
M.1 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Mewujudkan akselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i>
M.2 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas fasilitas maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas Pengarutamaan gender Meningkatkan daya saing pemuda dan angkatan kerja Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman
M.3 Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja	Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif Revitalisasi sektor pangan strategis Meningkatkan perlindungan sosial Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja
M.4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (<i>good governance</i>)	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kualitas, dan sistem pelayanan publik Meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah
M.5 Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi, yang selanjutnya menjadi arah kebijakan pembangunan untuk tiap tahunnya. Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode Kepala Daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD. Berdasarkan strategi yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dapat dijabarkan arah kebijakan pada Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan akselerasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i>	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
	Pembangunan PSU lingkungan perumahan, permukiman, dan pelayanan dasar
	Pembangunan jaringan transportasi dan telekomunikasi
Meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas fasilitas maupun pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar
	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan
Pengarusutamaan gender	Peningkatan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
Meningkatkan daya saing pemuda dan angkatan kerja	Penyelenggaraan pembinaan wirausahawan muda
	Peningkatan pelatihan tenaga kerja berorientasi pada pasar kerja
Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman	Optimalisasi penegakan Perda dan Perkada
Meningkatkan dukungan dalam penciptaan IKM dan UMKM yang kompetitif dalam rangka pemulihan ekonomi paska Covid-19	Peningkatan kualitas kelembagaan, pelaku usaha, dan sarana-prasarana usaha
Revitalisasi sektor pangan strategis	Penguatan kontinuitas dan kualitas produk pangan strategis
	Diversifikasi pangan
Meningkatkan perlindungan sosial	Peningkatan upaya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) dan penduduk miskin
Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Peningkatan kapasitas pelaku dan sarana-prasarana pariwisata
Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan membuka kesempatan kerja	Fasilitasi, promosi, dan koordinasi penciptaan iklim usaha/investasi yang kondusif
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, kualitas, dan sistem pelayanan publik	Penguatan kinerja, kualitas, dan sistem pelayanan publik pemerintah daerah
	Optimalisasi sumberdaya manusia aparatur yang berorientasi pada integritas dan pelayanan publik
	Penguatan implementasi tripartit dalam pengembangan kerjasama antardaerah maupun antarinstansi
Meningkatkan dan mengembangkan kelitbangan dan inovasi daerah	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Swasta dalam pengembangan inovasi daerah
Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan	Peningkatan upaya pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni budaya, serta pengelolaan cagar budaya	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra
	Meningkatkan pelestarian kekayaan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya lokal

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Aktualisasi arah kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah dirumuskan pada Bab 5 adalah program pembangunan yang dilaksanakan oleh tiap Perangkat Daerah. Adapun penjabaran program pembangunan yang mengacu pada tiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.3 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Misi 1: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan																			
	Tujuan 1.1: Peningkatan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	31.1	32.59		33.7		34.98		36.23		37.6		39.1		39.1				
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (dalam persen)	50.93	52.07		52.22		53.25		54.39		55.58		56.81		56.81				
		Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (dalam persen)	47.25	48.05		48.5		49.42		50.54		51.8		53.15		53.15				
1	030	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50.92	52.25	92,185,634,336	52.96	37,246,795,050	53.57	37,342,400,000	54.22	42,380,000,000	55.18	61,800,000,000	56.28	71,224,000,000	56.28	342,178,829,386	DPUPRPRKP
			Sasaran1.1.2: Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Persentase layanan angkutan darat, laut, dan udara (dalam persen)		44		47		50		55		60		65		65		
				Angka kecelakaan lalu lintas darat (dalam jumlah)	130	125		119		110		102		92		83		83		
2	152	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Angka Kecelakaan	130	125	8,345,983,616	119	22,442,277,310	110	22,442,277,310	102	23,042,277,310	92	26,567,277,310	83	28,225,000,000	83	131,065,092,856	DISHUB
2	153	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan angkutan	40%	44%	129,998,700	47%	300,000,000	50%	300,000,000	55%	300,000,000	60%	435,000,000	65%	1,875,000,000	65%	3,339,998,700	DISHUB
			Sasaran1.1.3: Meningkatnya kualitas dan	Persentase rumah tinggal	73.15	78.15		83.15		87.15		91.15		94.15		96.15		96.15		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		kuantitas sarana-prasarana pelayanan dasar	bersanitasi (dalam persen)																	
			Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (dalam persen)	60.59	62.59		64.59		66.59		68.59		70.59		72.59		72.59			
			Persentase penduduk berakses air minum / air bersih (dalam persen)	27.76	32.76		37.76		42.76		47.76		52.76		57.76		57.76			
			Rasio rumah layak huni (dalam persen)	18.98	18.99		19		19.01		19.02		19.03		19.04		19.04			
			Persentase areal kawasan kumuh (dalam persen)	0.45	0.38		0.3		0.23		0.15		0.08		0		0			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	85.39	88.83	4,996,445,300	92.55	0	96.28	200,000,000	100.00	300,000,000	100.00	400,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	DPUPRPRKP
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (layak)	45.72	67.30	0	71.20	0	77.10	0	83.00	0	88.90	0	94.80	0	94.80	0	DPUPRPRKP
				Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (aman)	6.39	6.39	1,950,000,000	6.50	150,000,000	8.19	450,000,000	10.00	600,000,000	11.81	750,000,000	13.62	900,000,000	13.62	900,000,000	DPUPRPRKP
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	63.35	63.00	5,217,380,000	61.83	13,300,000,000	60.16	14,855,000,000	58.43	16,750,000,000	56.50	24,450,000,000	54.57	26,350,000,000	54.57	26,350,000,000	DPUPRPRKP
1	4	0	PROGRAM	Persentase	NA	0.00	0	0.00	0	9.68	1,167,350,00	19.36	1,155,350,00	29.04	1,155,350,00	38.72	1,155,350,00	96.80	4,633,400,00	DPUPRPRKP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	2	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	terlaksananya pengembangan perumahan						0		0		0		0		0		
1	0 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase terlaksananya kawasan permukiman	16.44	21.34	1,383,952,000	11.37	170,000,000	21.81	1,236,418,000	33.75	1,235,392,000	33.91	1,232,314,000	45.05	1,228,210,000	67.00	6,486,286,000	DPUPRPRKP
1	0 4 4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terlaksananya Cakupan Permukiman Yang Tertata	NA	32.72	0	39.45	0	46.18	100,000,000	52.91	100,000,000	59.65	100,000,000	66.38	0	66.38	300,000,000	DPUPRPRKP
1	0 4 5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	NA	8.80	963,028,300	17.80	986,000,000	21.38	642,350,000	31.53	1,235,790,000	59.62	3,200,207,465	100.00	4,421,652,552	100.00	11,449,028,317	DPUPRPRKP
		Sasaran 1.1.4: Meningkatkan cakupan jaringan telekomunikasi	Cakupan layanan telekomunikasi (dalam persen)	NA	50		57.5		82		82		91		93		93		
2	1 6 3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Layanan Telekomunikasi	71%	77%	0	81%	0	82%	200,000,000	86%	421,175,000	90%	421,175,000	94%	421,175,000	94%	0	Diskominfo
		Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa																	
		Tujuan 2.1: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (dalam indeks)	71.31	71.86		72.48		73.1		73.73		74.35		74.98		74.98		
		Sasaran 2.1.1: Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (dalam tahun)	8.13	8.16		8.24		8.33		8.41		8.5		8.59		8.59		
			Harapan Lama Sekolah (dalam tahun)	12.84	12.97		13.14		13.32		13.49		13.67		13.84		13.84		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) di	86%	88%	106,279,939,471	88%	42,160,559,942	90%	41,274,559,942	92%	41,382,059,942	93%	42,444,936,513	95%	43,574,936,513	95%	43,574,936,513	Dinas Pendidikan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Kotim																
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tercapainya kurikulum pendidikan	86%	0%	0	88%	2,855,000,000	88%	2,105,000,000	90%	2,105,000,000	91%	2,105,000,000	92%	2,105,000,000	93%	2,105,000,000	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tercapainya pemerataan dan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan	83%	86%	21,476,261,272	90%	32,479,356,390	92%	32,479,356,390	94%	32,479,356,390	94%	32,479,356,390	95%	32,529,356,390	96%	32,529,356,390	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terpuhinya izin untuk tempat pendidikan	92%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASRA	Terpuhinya bahasa lokal dan budaya lokal	80%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (dalam tahun)	69.85	69.89		69.96		70.04		70.11		70.18		70.26		70.26		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Terlaksana	78.9	82.7	100,246,956,516	85.0	57,735,104,800	86.8	60,659,930,000	88.3	62,952,805,000	89.5	68,008,162,500	90.4	70,802,285,000	90.4	70,802,285,000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat	68.3	80.8	21,440,157,148	83.0	320,000,000	84.7	323,750,000	86.7	323,750,000	88.3	15,025,742,500	90.0	22,173,750,000	90.0	22,173,750,000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Terlaksana	74.1	75.0	604,434,000	78.8	213,000,000	80.7	213,000,000	82.5	213,000,000	84.6	213,000,000	86.9	213,000,000	86.9	213,000,000	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Terlaksana	66.3	66.7	1,448,399,000	72.3	225,000,000	76.7	225,000,000	80.7	300,000,000	85.3	300,000,000	90.0	300,000,000	90.0	300,000,000	Dinas Kesehatan
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas pembangunan gender dan keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (dalam indeks)	NA	88.06		88.15		88.24		88.33		88.42		88.51		88.51		
		Indeks	NA	30.96		32.2		33.36		34.45		35.58		36.3		36.3		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Pembangunan Keluarga (IPK) (dalam indeks)																	
2	8	2	PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	46,908,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	604,988,000	DPPPAPPKB
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	399,916,500	100	161,573,300	100	161,573,300	100	161,573,300	100	161,573,300	100	181,973,300	100	1,228,183,000	DPPPAPPKB
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100	0	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	85,000,000	100	100,000,000	100	320,000,000	DPPPAPPKB
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100	0	100	39,413,250	100	39,413,250	100	39,413,250	100	39,413,250	100	50,000,000	100	207,653,000	DPPPAPPKB
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100	72,070,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	122,070,000	100	593,912,000	DPPPAPPKB
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100	0	100	131,805,700	100	131,805,700	100	131,805,700	100	131,805,700	100	216,805,700	100	744,028,500	DPPPAPPKB
2	1	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100	26,700,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	192,200,000	DPPPAPPKB
2	1	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100	3,735,980,950	100	159,912,520	100	159,912,520	100	159,912,520	100	267,801,870	100	295,000,000	100	4,778,520,380	DPPPAPPKB
2	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100	115,000,000	100	287,153,830	100	287,153,830	100	287,153,830	100	337,153,830	100	337,153,830	100	1,650,769,150	DPPPAPPKB
		Sasaran 2.1.4: Meningkatnya daya saing daerah	Produktivitas Total Daerah (dalam juta rupiah)	123.7	125.55	127.43	129.34	131.28	133.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	135.24	
			Angka Kriminalitas Yang Tertangani (dalam permiriad (per sepuluh ribu))	3,08**	5.45	5.13	4.92	4.81	4.29	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	3.69	
1	0	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penegakkan Perda/Perkada	80%	2,599,624,439	80%	1,602,401,710	80%	1,565,206,820	80%	3,887,057,820	80%	1,789,369,560	80%	2,630,064,420	80%	14,073,724,769	Satpol PP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		97,243,792		294,000,000		294,000,000		294,000,000		294,000,000		354,000,000		1,627,243,792	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		55,950,000		196,541,415		196,541,415		196,541,415		196,541,415		256,541,415		1,098,657,075	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Keselamatan dan perlindungan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program		86,946,100		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		250,000,000		1,096,946,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Jamsostek Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan																	
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang mengacu pada dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro			50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	99.83	100%	114,804,000	100%	220,385,554	100%	220,385,554	100%	220,385,554	100%	465,000,000	100%	1,461,346,216	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	96.67	100%	920,050,246	100%	1,030,338,858	100%	2,730,338,858	100%	54,230,338,858	100%	2,730,338,858	100%	1,498,915,000	63,140,320,678	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang ber-SKT	0	100%	802,406,050	100%	135,385,000	100%	135,385,000	100%	135,385,000	100%	135,385,000	100%	173,000,000	1,516,946,050	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapat	0	100%	304,016,000	100%	305,390,000	100%	305,390,000	100%	305,390,000	100%	305,390,000	100%	100,000,000	1,625,576,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
8	1	6		pembinaan peningkatan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya															
				Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	207,502,000	100%	220,390,000	100%	220,390,000	100%	220,390,000	100%	220,390,000	100%	950,000,000	100%	2,039,062,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	0	0		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	90	263,421,000	90	263,421,000	90	333,026,000	90	385,519,223	90	404,795,184	90	425,034,944	90	2,075,217,351	Kecamatan Kota Besi
7	0	0		Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	94	4,500,000	96	4,500,000	97	4,500,000	98	5,400,000	99	6,480,000	100	7,776,000	100	33,156,000	Kecamatan Cempaga
7	0	0		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	92	208,018,000	94	230,000,000	96	250,000,000	98	138,551,000	99	166,261,200	100	199,513,440	100	1,192,343,640	Kecamatan Cempaga
7	0	0		Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor	90	6,500,000	94	6,325,034	97	9,350,000	98	8,700,000	99	7,350,000	100	8,850,000	100	47,075,034	Kecamatan Mentaya Hulu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	90	140,850,000	92	131,050,000	94	138,050,000	98	139,500,000	99	139,050,000	100	179,250,000	100	867,750,000	Kecamatan Mentaya Hulu
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Paringgean
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	95	49,100,000	96	60,000,000	97	80,000,000	98	80,000,000	99	100,000,000	100	100,000,000	100	469,100,000	Kecamatan Paringgean
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	0	75	26,540,000	75	26,540,000	75	34,974,700	75	34,974,700	75	34,974,700	75	158,004,100	Kecamatan Baamang
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		75	197,595,000	75	304,115,000	75	304,115,000	75	314,115,000	75	314,115,000	75	314,115,000	75	1,748,170,000	Kecamatan Baamang
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggara	NA	-		75	20,000,000	80	20,000,000	82	20,000,000	84	25,000,000	88	25,000,000	88	110,000,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	aan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	82	214,294,000	84	215,000,000	86	220,000,000	88	220,000,000	89	225,000,000	90	225,000,000	90	1,319,294,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	-	-	96	6,300,000	97	8,950,000	98	8,200,000	99	6,800,000	100	8,150,000	100	38,400,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	92	118,591,000	94	136,466,000	96	140,976,000	98	138,551,000	99	139,892,000	100	179,750,000	100	854,226,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	93	124,740,000	94	174,000,000	95	175,500,000	97	176,000,000	98	174,000,000	100	180,000,000	100	1,004,240,000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor																Kecamatan Pulau Hanaut

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	yang terlaksana Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		78	194,350,000	78	220,065,000	78	220,065,000	78	230,065,000	78	230,065,000	78	230,065,000	78	1,324,675,000	Kecamatan Pulau Hanaut
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	0	0	0	0	0	0	98	8,000,000	99	10,000,000	100	10,000,000	100	28,000,000	Kecamatan Antang Kalang
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	0	0	96	20,000,000	97	20,000,000	98	35,000,000	99	35,000,000	100	40,000,000	100	150,000,000	Kecamatan Antang Kalang
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana																Kecamatan Teluk Sampit
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA		0	78	144,053,000	78	175,000,000	78	175,000,000	78	250,000,000	78	270,000,000	78	1,014,053,000	Kecamatan Teluk Sampit
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggara																Kecamatan Seranau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	97	149,865,000	97	193,565,000	97	196,468,475	97	199,371,950	97	202,275,425	97	205,178,900	97	205,178,900	Kecamatan Seranau
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA															Kecamatan Cempaga Hulu
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	90	116,730,000	94	239,607,538	95	240,708,500	96	255,634,000	97	281,197,400	100	320,000,000	100	1,097,539,903	Kecamatan Cempaga Hulu
7	0 1 4	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA		0	96	8,000,000	97	8,000,000	98	8,000,000	99	8,000,000	100	8,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Telawang
7	0 1 5	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun	NA		0	92	165,245,000	97	173,507,250	98	182,182,613	99	191,291,743	100	200,856,330	100	913,082,936	Kecamatan Telawang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0	0	2014																	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	78	109,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	565,000,000	Kecamatan Bukit Santuai	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	78	52,532,000	78	24,900,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	337,232,000	Kecamatan Bukit Santuai	
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	96	10,000,000	97	12,000,000	98	18,600,000	99	17,750,000	100	19,750,000	100	78,100,000	Kecamatan Tualan Hulu	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		92	71,400,000	94	203,600,000	96	203,600,000	96	235,125,000	98	235,635,000	100	237,300,000	100	1,186,660,000	Kecamatan Tualan Hulu
7	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	96	10,000,000	97	12,000,000	98	18,600,000	99	17,750,000	100	19,750,000	100	78,100,000	Kecamatan Telaga Antang	
7	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang		92	71,400,000	94	203,600,000	96	203,600,000	96	235,125,000	98	235,635,000	100	237,300,000	100	1,186,660,000	Kecamatan Telaga Antang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014																
	Sasaran 2.1.5: Meningkatnya pembangunan pemuda dan olahraga	Persentase wirausaha muda (dalam persen)	31	34	37	41	45	48	51	51								
		Jumlah prestasi olahraga (dalam Cabor)	24	24	24	24	24	24	24	24								
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	100%	1,227,999,501	100%	0	100%	75,000,000	100%	150,000,000	100%	485,000,000	100%	630,000,000	100%	2,567,999,501	Dispora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	100%	18,250,850,240	100%	0	100%	125,000,000	100%	160,000,000	100%	325,000,000	100%	600,000,000	100%	19,460,850,240	Dispora
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	100%	316,991,183	100%	0	100%	0	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	586,991,183	Dispora
	Misi 3: Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja																	
	Tujuan 3.1: Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	-3.09	2.943308493	3.395804682	3.865538821	4.240464236	4.675722475	5.123909177	5.123909177								
		Tingkat Inflasi (dalam persen)	1.62	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4								
		Tingkat Kemiskinan (dalam persen)	5.62	5.54	5.36	5.19	5.01	4.84	4.67	4.67								
		Tingkat Pengangguran (dalam persen)	5.25	5.16904	5.08544	5.00536	4.9288	4.85752	4.81	4.81								
		PDRB per	56.63	57.71495	58.82069	59.25226	60.13919	61.08442	61.97071	61.97071								

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Kapita (dalam juta rupiah)		455		536		377		523		256		208		208				
		Indeks Gini (dalam indeks)	0.32	≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,35		≤ 0,35				
		Sasaran 3.1.1: Meningkatkan keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (dalam persen)	96.58	96.78		96.99		97.12		97.32		97.56		97.56		97.56			
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (dalam persen)	87.1	88.6		90		91.4		92.9		93.4		93.4		93.4			
			Penguatan Cadangan Pangan (dalam persen)	NA	2.5		10		20		20		20		20		20			
2	9	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-Tercapainya ketersediaan energi (kkalori/kapita/hari)	3367,3	3384	1,153,825,100	3417	30,215,100	3452	30,215,100	3469	30,215,100	3504	161,725,475	3521	169,811,749	3521	169,811,749	DKP
2	9	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Tercapainya konsumsi angka kecukupan energi (kkalori/kapita/hari)	2234,3	2225,9	512,782,100	2217,4	474,921,400	2209,0	697,031,250	2200,6	729,855,050	2192,2	825,328,835	2190,0	937,594,702	2190,0	937,594,702	DKP
2	9	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya daerah rawan pangan	-	1 desa	106,185,200	2 desa	122,709,200	2 desa	116,185,200	2 desa	116,185,200	2 desa	126,993,000	2 desa	133,342,650	11 desa	133,342,650	DKP
2	9	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	2 kali	2 kali	34,676,100	3 kali	49,675,600	3 kali	47,675,600	3 kali	47,675,600	3 kali	53,058,000	3 kali	55,710,900	3 kali	55,710,900	DKP
		Sasaran 3.1.2: Meningkatkan kesejahteraan petani	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (dalam persen)	21.09	21.73		22.1		22.47		22.84		23.21		23.58		23.58			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3 2 5 0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	1	12528.05 (ton/thn)	402,737,650	13154.05	115,000,000	13780.05	132,694,100	14406.05	190,000,000	15032.05	205,738,319	15658.05	261,850,400	16284.05	1,308,020,469	Dinas Perikanan
3 2 5 0 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	1	10503.01 (ton/tahun)	2,260,596,950	11028.01	315,000,000	11553.01	391,694,100	12078.01	585,000,000	12603.01	702,714,410	13128.01	712,243,920	13653.01	4,967,249,380	Dinas Perikanan
3 2 5 0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase jumlah pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	0	0	0		0		0		24,774,220		25,000,000		25,000,000		74,774,220	Dinas Perikanan
3 2 5 0 6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi hasil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1	861.28 (ton/tahun)	22,394,600	1	20,000,000	1	65,000,000	1	130,000,000	1	140,000,000	1	165,000,000	1	542,394,600	Dinas Perikanan
3 2 7 0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	90%	100%	6,546,598,131	100%	6,985,000,000	100%	8,330,000,000	100%	8,330,000,000	100%	9,619,500,000	100%	8,661,100,000	100%	48,472,198,131	Dinas Pertanian
3 2 7 0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	90%	100%	3,192,015,364	100%	870,000,000	100%	4,095,000,000	100%	2,840,000,000	100%	3,601,000,000	100%	3,651,600,000	100%	18,249,615,364	Dinas Pertanian
3 2 7 0 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah ternak yang terkena penyakit	80%	100%	254,147,146	100%	140,000,000	100%	212,500,000	100%	212,500,000	100%	244,375,000	100%	268,812,500	100%	1,332,334,646	Dinas Pertanian

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3 2 7 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	80%	100%	58,063,532	100%	110,000,000	100%	558,500,000	100%	375,000,000	100%	431,250,000	100%	474,375,000	100%	2,007,188,532	Dinas Pertanian
3 2 7 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah izin usaha pertanian yang dikeluarkan	90%	100%	35,744,300	100%	35,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	92,000,000	100%	101,200,000	100%	423,944,300	Dinas Pertanian
3 2 7 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan serta Sarana dan Prasarana Penyuluhan	90%	100%	914,629,115	100%	380,000,000	100%	418,000,000	100%	418,000,000	100%	480,700,000	100%	528,770,000	100%	3,140,099,115	Dinas Pertanian
	Sasaran 3.1.3: Meningkatnya aktivitas ekonomi rakyat	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (dalam persen)	89	90		90		91		91		91		92		92		
2 1 7 2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Cabang/ Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi dan UKM
2 1 7 3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif		100%	170,448,000	100%	185,000,000	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2 1 7 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi dan UKM
2 1 7 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tercapainya jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan		100%	69,476,800	100%	123,555,904	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2 1 7 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Terlaksananya pemberdayaa		100%	208,012,500	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		PERLINDUNGAN KOPERASI	n koperasi untuk pengembangan usaha																	
2	177	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Tercapainya jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan jumlah UMKM yang terdata		100%	275,741,500	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	178	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Tercapainys jumlah promosi/UMKM /pameran yang diikuti		100%	235,131,500	100%	165,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin	N/A			100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Disperdagin
3	30	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan (Pasar/ Tradisional) yang terbangun				100%	1,000,000,000	100%	750,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	Disperdagin
3	30	4	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Strategis yang stabil di 17 Kecamatan				100%	495,000,000	100%	610,000,000	100%	625,000,000	100%	747,500,000	100%	747,500,000	100%	747,500,000	Disperdagin
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EXPOR	Realisasi ekspor netto non migas		100%	20,464,266,600	100%	615,000,000	100%	2,680,000,000	100%	705,000,000	100%	1,055,000,000	100%	1,055,000,000	100%	1,055,000,000	Disperdagin
3	30	6	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah alat UTTP yang telah ditera/tera ulang di 17 Kec.				100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Disperdagin
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya prosentase produk yang menggunakan tanda SNI				100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	50,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	Disperdagin

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	3 1	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Wilayah dan Akses Industri yang berkembang di Kab. Kotim			100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	102,500,000	100%	102,500,000	100%	102,500,000	Disperdagin	
3	3 1	2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerbitan izin usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah			100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Disperdagin	
3	3 1	3	PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data IKM yang akurat dan up to date			100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Disperdagin	
			Sasaran 3.1.4: Menguatnya sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (dalam persen)	1.25	1.31	1.44	1.59		1.75		1.92		2.11		2.11				
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Wisata		1.95%	499,832,000	0.00%	0	39.00%	10,000,000,000	19.50%	5,000,000,000	11.49%	2,945,600,000	28.05%	7,192,720,000	100.00%	25,638,152,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Promosi Pariwisata		10.00%	133,241,234	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	42.17%	562,000,000	47.83%	637,400,000	100.00%	1,332,641,234	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	180,000,000	0.00%	0	100.00%	180,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatkan Pelayanan SDM Kepariwisataa n dan Ekraf		9.40%	28,537,500	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	41.18%	125,000,000	49.42%	150,000,000	100.00%	303,537,500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Sasaran 3.1.5: Menguatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani (dalam persen)	65.05	70.05	75.05	80.05		85.05		90.05		95.05		95.05				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS Yang diberdayakan	100 Orang	100 Orang	381,400,000	100 Orang	410,000,000	100 Orang	451,000,000	100 Orang	496,100,000	100 Orang	545,710,000	100 Orang	600,281,000	100 Orang	600,281,000	Dinsos

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Jumlah Warga Negara migran yang dipulangkan	30 Orang	30 Orang	30,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	121,000,000	100 Orang	133,100,000	100 Orang	146,410,000	530 Orang	146,410,000	Dinsos	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang ditangani	15 Orang	15 Orang	646,097,764	20 Orang	361,500,000	20 Orang	397,650,000	20 Orang	437,415,000	20 Orang	481,156,500	20 Orang	529,272,150	115 Orang	529,272,150	Dinsos	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Pendamping PKH	30 Orang	46 Orang	556,900,000	49 Orang	540,665,000	49 Orang	594,731,500	49 Orang	492,358,000	49 Orang	545,443,800	49 Orang	599,988,180	49 Orang	599,988,180	Dinsos	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah tenaga terampil tagana	25 Orang	25 Orang	478,255,000	40 Orang	300,000,000	40 Orang	330,000,000	40 Orang	300,000,000	40 Orang	399,300,000	40 Orang	439,230,000	40 Orang	439,230,000	Dinsos	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	2 TMP	96,000,000	2 TMP	96,000,000	2 TMP	105,600,000	2 TMP	100,000,000	2 TMP	127,776,000	2 TMP	140,553,600	2 TMP	140,553,600	Dinsos	
	Sasaran 3.1.6: Meningkatnya investasi di daerah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (dalam rasio)	14	5		5		5		5		5		5		5			
02	1802	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		0	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000		DPMPTSP	
02	1803	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		2 Kegiatan	9,387,749,975	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000		DPMPTSP
02	1805	0	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		3 Kegiatan	335,172,724	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448		DPMPTSP
			Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)																
			Tujuan 4.1: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (dalam indeks)	CC	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (dalam indeks)	Baik	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP Badan	72.25%	75%	14,495,676,289	76%	13,721,782,300	77%	14,407,871,415	78%	15,128,264,986	79%	15,884,678,235	80%	16,678,912,147	80%	16,678,912,147	Bapenda
02	1801	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		27 Kegiatan	5,458,638,037	27 Kegiatan	12,911,147,002	27 Kegiatan	17,811,147,002	27 Kegiatan	19,961,147,002	27 Kegiatan	24,961,147,002	27 Kegiatan	26,961,147,002			DPMPTSP
02	1806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			0	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	150,000,000		0		0		0			DPMPTSP
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	81.5	82.2	82,962,086,518	83.6	81,131,993,200	85.6	81,203,418,000	86.8	81,335,543,000	88.9	81,578,193,000	90.0	81,636,063,000	90.0	81,636,063,000	Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89%	90%	344,954,338,760	90%	294,174,546,593	92%	297,810,546,593	94%	299,703,046,594	95%	308,640,170,023	96%	322,460,170,023	96%	322,460,170,023	Dinas Pendidikan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	5,427,784,844	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,710,251,750	100%	33,659,043,594	Dispora
2	231	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat	100%	100%	3,613,134,957	100%	3,935,942,500	100%	4,160,942,500	100%	4,373,942,500	100%	4,866,790,656	100%	5,128,590,656	100%	26,079,343,769	Dispustakasp

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Daerah yang sesuai ketentuan perundangan																	
2	2 3	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pemustaka Tahunan	13.07%	3.08%	26,654,400	3.46%	85,000,000	3.99%	150,000,000	4.18%	205,000,000	4.39%	205,000,000	4.61%	260,000,000	23.7%	931,654,400	Dispustakaspip
2	2 3	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Kualitas Pelestarian Koleksi	0.43%	0.45%	0	0.50%	0	0.55%	10,000,000	0.60%	30,000,000	0.65%	35,000,000	0.70%	0	3.5%	75,000,000	Dispustakaspip
2	2 4	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan	0.00%	0.16%	0	0.25%	60,000,000	0.33%	0	0.41%	72,000,000	0.50%	0	0.58%	150,000,000	2.2%	282,000,000	Dispustakaspip
2	2 4	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Kualitas Peningkatan Pengelolaan Arsip Secara Baku	86.53%	9.61%	0	11.53%	35,000,000	13.46%	45,000,000	15.38%	35,000,000	17.30%	90,000,000	28.84%	60,000,000	96.1%	265,000,000	Dispustakaspip
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	119,403,734,608	100	145,978,676,000	100	146,978,676,000	100	147,978,676,000	100	157,978,676,000	100	164,978,676,000	100	883,297,114,608	RSUD dr. Murjani
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	100	100	103,743,083,501	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	606,760,243,214	RSUD dr. Murjani
2	1 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	20%	5,926,503,064	40%	8,772,009,450	60%	8,972,987,050	80%	9,269,062,410	90%	9,509,745,306	100%	9,944,496,492	100%	52,394,803,772	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1 2	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	daerah Kabupaten/Kota	100%	20%	938,451,700	40%	130,000,000	60%	143,000,000	80%	157,300,000	90%	173,030,000	100%	190,333,000	100%	1,732,114,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
2	1 2	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kematian yang tepat waktu	100%	20%	96,925,650	40%	262,724,000	60%	288,996,400	80%	317,896,040	90%	349,685,644	100%	384,654,208	100%	1,700,881,942	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
2	1 2	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan data kependudukan	100%	20%	43,999,700	40%	97,500,000	60%	107,250,000	80%	117,975,000	90%	129,772,500	100%	142,749,750	100%	639,246,950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. B 2. 100	3,619,069,558	1. B 2. 100	3,171,346,423	1. B 2. 100	3,351,741,423	1. B 2. 100	4,265,639,743	1. B 2. 100	4,443,531,721	1. B 2. 100	4,626,880,365	1. B 2. 100	23,478,209,233	Kecamatan Kota Besi
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal		90	469,835,277	90	469,835,277	90	469,835,277	90	620,761,813	90	621,384,667	90	622,026,207	90	3,273,678,519	Kecamatan Kota Besi
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kebutuhan		90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	8,604,930,000	Kecamatan Kota Besi

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 1	0 1	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	1. B 2. 100	2,726,960,164	1. B 2. 100	3,927,001,400	1. B 2. 100	4,122,851,470	1. B 2. 100	4,428,943,044	1. B 2. 100	4,600,807,546	1. B 2. 100	4,771,348,743	1. B 2. 100	24,577,912,367	Kecamatan Cempaga
7	0 1 2	0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	20,000,000	94	50,000,000	96	50,000,000	96	60,000,000	98	72,000,000	100	86,400,000	100	338,400,000	Kecamatan Cempaga
7	0 1 3	0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	92	20,000,000	93	20,000,000	95	20,000,000	97	24,000,000	98	28,800,000	100	34,560,000	100	147,360,000	Kecamatan Cempaga
7	0 1 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	1. B 2. 100	3,151,056,210	1. B 2. 100	3,579,384,666	1. B 2. 100	3,825,623,700	1. B 2. 100	3,189,304,450	1. B 2. 100	3,474,127,450	1. B 2. 100	2,796,271,500	1. B 2. 100	20,015,767,976	Kecamatan Mentaya Hulu
7	0 0 0	0 0 0	PROGRAM	Persentase	NA	90	70,000,000	92	91,000,000	94	212,100,000	96	87,500,000	98	93,500,000	100	98,850,000	100	652,950,000	Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	1 2	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal																Mentaya Hulu
7	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	90	519,575,140	93	25,000,000	95	31,036,000	97	27,546,000	98	33,301,000	100	31,025,700	100	667,483,840	Kecamatan Mentaya Hulu
7	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. B 2. 100	3,417,069,256	1. B 2. 100	4,010,871,884	1. B 2. 100	4,114,871,884	1. B 2. 100	4,414,871,884	1. B 2. 100	4,394,871,884	1. B 2. 100	4,664,871,884	1. B 2. 100	25,017,428,676	Kecamatan Parenggean
7	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	95	439,206,166	96	639,206,166	97	639,206,166	98	689,206,166	99	689,206,166	100	689,206,166	100	3,785,236,996	Kecamatan Parenggean
7	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	95	284,000,000	96	334,000,000	97	460,000,000	98	460,000,000	99	760,000,000	100	790,000,000	100	3,088,000,000	Kecamatan Parenggean
7	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan		1. B 2. 100	6,983,978,254	1. B 2. 100	6,396,445,167	1. B 2. 100	8,896,445,167	1. B 2. 100	6,678,010,467	1. B 2. 100	6,978,010,467	1. B 2. 100	7,278,010,467	1. B 2. 100	43,210,899,989	Kecamatan Baamang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan															
				Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	75	1,113,231,462	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	7,205,644,877	Kecamatan Baamang
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	75	3,704,875,000	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	22,484,922,500	Kecamatan Baamang
7	0 1 1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	NA	7,883,026,253	100	8,370,987,770	100	8,615,987,770	100	9,449,693,720	100	9,446,693,720	100	9,449,987,720	100	53,216,376,953	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
				Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A		A			
				Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	88	92	95	97	98	100	100	100	100	100	100	100		
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	17,778,280	94	17,778,280	96	17,778,280	96	17,778,280	98	17,778,280	100	17,778,280	100	106,669,680	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kebutuhan	NA	3,670,000,000	92	3,670,000,000	93	3,670,000,000	95	3,670,000,000	97	3,670,000,000	98	3,670,000,000	100	22,020,000,000	Kecamatan Mentawa Baru

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi																Ketapang	
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	1. 100 2. BB 3. 90%	2,977,706,085	1. 100 2. BB 3. 92%	3,518,769,350	1. 100 2. BB 3. 94%	3,139,585,000	1. 100 2. A 3. 96%	3,198,136,050	1. 100% 2. AA 3. 100%	3,477,259,050	1. 100% 2. AA 3. 100%	2,987,483,800	1. 100% 2. AA 3. 100%	19,298,939,335	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	9400%	98,325,000	9400%	66,325,000	9600%	90,100,000	9600%	101,625,000	9800%	105,000,000	10000%	118,450,000	10000%	579,825,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	9200%	28,613,600	9300%	31,763,600	9500%	32,896,000	9700%	33,446,000	9800%	32,201,000	10000%	32,305,000	10000%	191,225,200	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	0	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan		1. B 2. 100	3,513,140,300	1. B 2. 100	3,474,015,350	1. B 2. 100	3,623,515,350	1. B 2. 100	3,930,981,600	1. B 2. 100	4,016,081,600	1. B 2. 100	4,114,931,600	1. B 2. 100	22,762,665,800	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan																	
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	94	88,450,000	94	127,000,000	96	127,000,000	98	127,000,000	98	127,000,000	100	137,000,000	100	733,450,000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	93	1,886,252,800	93	1,883,000,000	95	1,982,000,000	97	1,896,000,000	97	1,883,000,000	100	1,883,000,000	100	11,413,252,800	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	0 1 1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. 100	2,533,082,711	1. 100	4,009,263,450	1. 100	4,220,428,000	1. 100	4,433,952,411	1. 100	4,724,403,282	1. 100	4,987,376,696	1. 100	24,908,506,550	Kecamatan Pulau Hanaut
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan		78	152,214,752	78	204,000,000	78	205,000,000	78	210,000,000	78	200,000,000	78	200,000,000	78	1,171,214,752	Kecamatan Pulau Hanaut

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			sesuai standar pelayanan minimal																
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi		78 36,050,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 60,000,000	78 336,050,000			Kecamatan Pulau Hanaut
7	0 1 1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKP2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	1. 1002. B3. 100 2,570,990,515	1. 1002. B3. 100 4,144,008,084	1. 1002. B3. 100 4,350,508,100	1. 1002. B3. 100 4,615,634,600	1. 1002. B3. 100 4,810,634,600	1. 1002. B3. 100 4,819,634,600	1. 1002. B3. 100 25,311,410,499							Kecamatan Antang Kalang
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	0.95 489,950,000	0.96 561,500,016	0.97 605,000,000	0.98 610,000,000	0.99 625,000,000	100 625,000,000	100 625,000,000	100 625,000,000	100 625,000,000	100 625,000,000	100 3,516,450,016			Kecamatan Antang Kalang
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	0 0	0 0	0 0	97 25,000,000	98 30,000,000	100 30,000,000	100 30,000,000	100 30,000,000	100 30,000,000	100 30,000,000	100 85,000,000			Kecamatan Antang Kalang
7	0 1 1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan		1. 100 2,209,484,364	1. 100 3,496,063,150	1. 100 3,679,790,150	1. 100 4,424,600,000	1. 100 4,503,100,000	1. 100 4,530,000,000	1. 100 4,530,000,000	1. 100 4,530,000,000	1. 100 4,530,000,000	1. 100 4,530,000,000	1. 100 22,843,037,664			Kecamatan Teluk Sampit

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100				
7	012	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	78	84,500,000	78	75,700,000	78	100,000,000	78	100,000,000	78	200,000,000	78	200,000,000	78	760,200,000	Kecamatan Teluk Sampit
7	013	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	78	14,725,000	78	35,974,000	78	45,000,000	78	45,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	260,699,000	Kecamatan Teluk Sampit
7	011	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang		1. 100 2. B 3. 100	3,147,346,768	1. 100 2. B 3. 100	3,519,526,855	1. 100 2. B 3. 100	3,572,319,891	1. 100 2. B 3. 100	3,625,112,661	1. 100 2. B 3. 100	3,677,905,563	1. 100 2. B 3. 100	3,730,698,466	1. 100 2. B 3. 100	3,730,698,466	Kecamatan Seranau

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	95	565,154,692	95	493,202,595	95	500,600,634	95	507,998,673	95	515,396,712	95	522,794,751	95	522,794,751	Kecamatan Seranau
7	0 1 3	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	98	464,400,000	98	734,000,000	98	745,010,000	98	756,020,000	98	767,030,000	98	778,040,000	98	778,040,000	Kecamatan Seranau
7	0 1 1	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	1. 100	2,437,040,127	1. 100	3,215,212,662	1. 100	3,446,647,700	1. 100	4,219,109,897	1. 100	4,570,962,887	1. 100	4,865,412,854	1. 100	23,379,344,659	Kecamatan Cempaga Hulu
7	0 1 2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA		0	94	26,420,000	96	33,104,000	98	36,414,400	98	39,055,400	100	42,205,500	100	177,199,300	Kecamatan Cempaga Hulu
7	0 0 0	0	PROGRAM	Persentase	NA		0	93	18,000,000	95	21,600,000	97	22,000,000	97	24,200,000	100	25,202,000	100	111,002,000	Kecamatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	1 3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi																Cempaga Hulu
7	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. 100 2. B 3. 100	2,505,721,953	1. 100 2. B 3. 100	3,254,211,000	1. 100 2. B 3. 100	3,417,921,550	1. 100 2. B 3. 100	3,589,817,628	1. 100 2. B 3. 100	3,770,308,509	1. 100 2. B 3. 100	3,959,823,934	1. 100 2. B 3. 100	20,497,804,574	Kecamatan Telawang
7	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	90	77,750,000	92	10,800,000	94	11,340,000	96	11,907,000	98	12,502,350	100	13,127,468	100	137,426,818	Kecamatan Telawang
7	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi																Kecamatan Telawang
7	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah		1. 100	2,193,963,103	1. 100	3,587,437,700	1. 100	5,904,107,700	1. 100	2,933,719,895	1. 100	2,958,719,895	1. 100	2,983,719,895	1. 100	20,561,668,188	Kecamatan Bukit Santuai

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100			
7	0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	78	1,710,270,000	78	237,020,000	78	263,600,000	78	277,300,000	78	277,300,000	78	277,300,000	78	3,042,790,000		Kecamatan Bukit Santuai
7	0 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi		0	78	43,000,000	78	78,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	301,000,000		Kecamatan Bukit Santuai
7	0 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang	1. 100 2. B 3. 100	2,485,752,057	1. 100 2. B 3. 100	2,647,941,400	1. 100 2. B 3. 100	2,848,841,946	1. 100 2. B 3. 100	3,252,331,126	1. 100 2. B 3. 100	3,719,498,200	1. 100 2. B 3. 100	3,198,148,726	1. 100 2. B 3. 100	18,152,513,455		Kecamatan Tualan Hulu

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			sesuai ketentuan perundangan																	
7	012	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	193,181,500	94	116,670,000	96	145,000,000	96	242,625,000	98	253,000,000	100	297,740,874	100	1,248,217,374	Kecamatan Tualan Hulu
7	013	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	0	0	0	0	95	28,769,454	97	33,446,000	98	30,181,000	100	32,305,000	100	124,701,454	Kecamatan Tualan Hulu
7	011	0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1.1002. B3.100	2,838,981,774	1.1002. B3.100	2,645,909,100	1.1002. B3.100	2,846,809,646	1.1002. B3.100	3,180,325,176	1.1002. B3.100	3,637,471,450	1.1002. B3.100	3,185,673,726	1.1002. B3.100	18,335,170,872	Kecamatan Telaga Antang
7	012	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	193,181,500	94	116,670,000	96	145,000,000	96	242,625,000	98	253,000,000	100	263,450,000	100	1,213,926,500	Kecamatan Telaga Antang
7	013	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan	NA	0	0	0	0	95	28,769,454	97	33,446,000	98	30,181,000	100	32,305,000	100	124,701,454	Kecamatan Telaga Antang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		kelurahan yang terpenuhi																
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK (dalam kriteria)	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dalam indeks)	67.32	68.84484		70.2282		71.54868		72.91632		74.34684		75.18		75.18		
		Nilai SAKIP (dalam kriteria)	NA	B		B		BB		BB		BB		BB		BB		
		Nilai LPPD (dalam kriteria)	NA	Tinggi		Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	24.82%	100.00%	556,520,000	100.00%	515,000,000	100.00%	540,750,000	100.00%	567,787,500	100.00%	596,176,875	100.00%	625,985,719	100.00%	625,985,719	Bapenda
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan yang profesional bebas dari korupsi, bersih dan melayani	94%	94%	11,418,881,891	94%	13,261,615,375	95%	13,983,762,748	95%	15,382,139,023	97%	16,920,352,925	98%	18,612,388,217	98%	18,612,388,217	BKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel	98%	98%	273,095,588,186	98%	265,252,872,400	99%	263,795,084,927	99%	263,868,652,367	100%	262,749,185,819	100%	262,706,072,524	100%	262,706,072,524	BKAD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah	95%	97%	1,969,849,000	98%	1,465,831,000	98%	2,901,471,100	99%	3,191,618,210	100%	3,510,780,031	100%	3,861,858,034	100%	3,861,858,034	BKAD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
					21.53%	6,679,910,300	24.18%	7,502,464,350	24.18%	7,502,464,350	24.18%	7,502,464,350	31.54%	9,784,389,727	34.31%	10,642,645,411	159.93%	31,023,150,358	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	2 5	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor	100 %	5,551,790,607	100 %	5,590,979,900	100 %	5,701,591,700	100 %	6,111,205,680	100 %	6,467,527,171	100 %	6,776,885,580	100 %	36,199,980,638	Dinas Perikanan
2	1 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,334,250,648	100%	3,709,610,546	100%	3,788,166,450	100%	3,888,166,450	100%	4,038,166,450	100%	4,238,166,450	100%	4,238,166,450	Dinas Koperasi dan UKM
x	x x	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	8,266,217,733	100%	9,314,530,550	100%	9,384,530,550	100%	9,866,530,550	100%	9,951,530,550	100%	10,551,530,550	100%	10,884,172,225	Disperdagin
3	2 7	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya Kegiatan Penunjang SKPD yang dilaksanakan	80%	20,849,983,712	100%	21,765,455,450	100%	24,091,455,450	100%	25,029,955,450	100%	27,816,630,450	100%	30,599,597,950	100%	150,153,078,461	Dinas Pertanian
2	9	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,29%	4,701,157,302	100%	4,216,723,200	100%	4,203,137,350	100%	4,420,313,550	100%	4,677,139,190	100%	5,047,784,499	100%	5,047,784,499	DKP
2	1 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kriteria Nilai SAKIP	NA	13,964,159,267	Baik	13,903,306,100	Baik	13,703,306,100	Baik	14,140,306,100	Baik	14,140,306,100	Baik	15,940,306,100	Baik	85,791,689,767	DLH
0 2	1 8	0 4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasa		4 Kegiatan	0	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000				DPMPTSP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		n Korupsi (KPK)																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	90,22%	100%	4,070,352,027	100%	5,468,568,700	100%	5,518,568,700	100%	5,868,568,700	100%	6,268,568,700	100%	6,618,568,700	100%	33,813,195,527	BPBD Kab.Kotim
1	051	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	94,67%	100%	5,071,690,581	100%	7,584,159,250	100%	7,716,296,632	100%	8,082,296,632	100%	8,419,139,250	100%	8,136,308,775	100%	8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	4,396,230,198	100%	5,625,215,700	100%	6,444,399,200	100%	4,986,507,700	100%	5,700,894,400	100%	6,477,645,770	100%	6,477,645,770	Dinsos
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	N/A		7,929,750,930		7,876,974,190		7,876,974,190		7,876,974,190		9,216,974,190		8,119,251,500		48,896,899,190	Dishub

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	0 1 0	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	perundangan 1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	12 Bulan	3,900,679,120	12 Bulan	5,391,054,460	12 Bulan	5,417,480,748	12 Bulan	5,531,305,748	12 Bulan	5,531,305,748	12 Bulan	6,114,345,638	12 Bulan	7,111,301,088	Diskominfo
1	0 5	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	7,407,170,318	100%	7,259,846,840	100%	7,547,041,730	100%	7,775,190,730	100%	7,772,878,990	100%	7,932,184,130	100%	45,694,312,738	Satpol PP
3	3 2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100	100	5,668,766,897	100	6,670,385,135	100	8,670,385,135	100	7,670,385,135	100	7,170,385,135	100	8,080,385,135	100	43,930,692,572	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3 2	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran swakarsa			16,598,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		160,000,000		576,598,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	8	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100	7,134,296,167	100	6,831,492,100	100	7,081,492,100	100	7,431,492,100	100	7,833,602,750	100	8,553,290,870	100	44,865,666,087	DPPPAPKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1 3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	N A	100	7,581,243,497	100	6,065,429,830	100	6,904,301,497	100	7,736,069,531	100	7,018,984,697	100	8,552,690,467	100	43,858,719,519	DPMD
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	46,102,086,971	100	39,192,901,824	100	44,610,132,925	100	39,140,132,925	100	40,017,403,600	100	41,723,364,605	100	250,786,022,850	Sekretariat Daerah
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase		100	27,082,854,785	100	8,689,441,526	100	9,719,888,975	100	15,189,888,975	100	33,273,654,979	100	34,128,299,013	100	128,084,028,252	Sekretariat Daerah
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase		100	2,079,063,550	100	2,052,526,800	100	2,204,848,250	100	2,204,848,250	100	2,183,206,533	100	2,183,206,533	100	12,907,699,915	Sekretariat Daerah
2	1 0	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan sesuai ketentuan perundangan			0	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
2	1 0	5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan			0	100	3,600,000,000		0	100	3,000,000,000		0		0	100	6,600,000,000	Sekretariat Daerah
4	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100	100	34,797,052,351	100	34,587,219,450	100	34,931,519,450	100	35,431,519,450	100	39,801,989,051	100	39,801,989,051	100	219,351,288,803	Sekretariat DPRD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
4	2	1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	perundangan Persentase tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan	100	100	10,643,974,000	100	10,643,974,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	64,486,644,000	Sekretariat DPRD
5	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah	1. 100 2. B 3. 100	1. 100 2. B 3. 100	6,862,924,295	1. 100 2. B 3. 100	6,013,263,245	1. 100 2. B 3. 100	6,668,143,606	1. 100 2. B 3. 100	6,291,538,590	1. 100 2. B 3. 100	6,823,603,943	1. 100 2. B 3. 100	7,598,513,879	1. 100 2. B 3. 100	40,257,987,558	BAPPELITBAN GDA
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100	100	1,652,437,100	100	892,479,055	100	941,373,055	100	941,373,055	100	1,210,717,300	100	875,718,555	100	6,514,098,120	BAPPELITBAN GDA
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan daerah	100	100	746,178,750	100	248,973,950	100	735,049,969	100	749,746,505	100	795,545,968	100	795,545,968	100	4,071,041,110	BAPPELITBAN GDA
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian	50	85	247,954,000	90	51,444,000	100	416,240,000	100	548,740,000	100	701,530,939	100	886,240,000	100	2,852,148,939	BAPPELITBAN GDA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	86.11	86.11	10,371,750,359	95.28	10,129,671,750	95.97	12,306,387,050	96.67	13,416,992,200	97.36	12,123,624,465	97.78	12,480,182,265	97.78	70,828,608,089	BKPSDM
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian	87.08	87.08	3,875,169,300	88.46	3,591,508,050	90	3,879,551,750	91.54	5,147,205,600	93.08	6,749,213,835	94.63	7,151,055,335	94.63	30,393,703,870	BKPSDM
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tingkat pengembangan SDM Aparatur	6.58	6.58	3,938,567,050	10.73	1,594,239,050	11.93	1,129,480,050	11.8	1,251,221,050	11.57	2,942,580,550	11.57	4,184,181,250	11.57	15,040,269,000	BKPSDM
6	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	100	10,800,892,060	100	8,595,338,100	100	8,916,768,950	100	9,332,815,343	100	9,799,456,110	100	10,259,636,860	100	57,704,907,422	Inspektorat
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Entitas/Obrik yang di Audit	100	100	1,488,862,700	100	1,982,260,000	100	2,081,373,000	100	2,185,441,650	100	2,294,713,733	100	2,409,449,419	100	12,442,100,502	Inspektorat
				Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)	19	21		25		30		32		36		40		40		
				Prosentase rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	95	95		95		96		96		97		97		97		
				Prosentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	50	53		56		59		62		65		68		68		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks/Nilai Korsupgah	NA	65	546,717,500	67	618,243,000	69	697,699,150	72	677,584,108	74	701,671,258	75	726,754,821	75	3,968,669,836	Inspektorat
				Jumlah SKPD yang berpredikat WBK/WBBM (Zona Integritas)	0	1		2		3		4		5		6		6		
8	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan	93.38	100	4,098,444,652	100	4,453,084,238	100	4,453,084,238	100	4,453,084,238	100	5,453,084,238	100	6,127,893,348	100	29,038,674,952	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	15.51	19,955,700,279	16.38	21,073,870,700	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	100	128,648,158,771	DINAS PUPRPRKP
			Sasaran 4.1.3: Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE (dalam indeks)	1.95	2		2.2		2.5		2.8		3		3.2		3.2		
2	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	66.06%	76.06%	3,396,130,440	77.82%	180,976,340	94.09%	192,976,340	96.35%	192,976,340	98.42%	237,976,340	99.50%	2,086,936,450	100.00%	3,690,361,500	Diskominfo
2	1	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika	40.35%	41.62%	20,294,700	52.25%	171,800,000	74.13%	433,373,712	82.32%	553,373,712	90.77%	757,373,712	97.34%	825,373,712	97.34%	793,826,592	Diskominfo
2	2	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	50.00%	50.00%	8,120,000	90.00%	45,000,000	100.00%	45,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	260,000,000	100.00%	260,000,000	100.00%	240,000,000	Diskominfo
2	2	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan	30.00%	30.00%	10,721,200	54.00%	75,000,000	80.00%	75,000,000	86.00%	85,000,000	92.00%	156,000,000	98.00%	156,000,000	98.00%	156,000,000	Diskominfo

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah																	
			Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (dalam persen)	16.2	16.5	17		17.5	18		18.5		19		19				
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	24.82%	100.00%	787,328,000	100.00%	1,925,000,000	100.00%	1,813,160,885	100.00%	1,665,729,814	100.00%	1,880,927,190	100.00%	2,056,884,434	100.00%	2,056,884,434	Bapenda
			Sasaran 4.1.5: Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM) (dalam indeks)	Sangat tertinggal: 27 Tertinggal : 65 Berkembang: 59 Maju: 15 Mandiri: 2	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal : 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 20 Tertinggal : 66 Berkembang: 60 Maju: 18 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 5 Tertinggal : 59 Berkembang: 69 Maju: 30 Mandiri: 5	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 51 Berkembang: 79 Maju: 33 Mandiri: 5	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 45 Berkembang: 81 Maju: 36 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 34 Berkembang: 81 Maju: 39 Mandiri: 7	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal : 40 Berkembang: 83 Maju: 39 Mandiri: 6	
2	1	0	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	N A			100	89,896,600	100	89,896,600	100	117,420,377	100	58,740,675	100	64,455,965	100	420,410,217	DPMD
2	1	0	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	N A	100		100	54,225,000	100	54,225,000	100	59,783,063	0	100	65,910,827	100	234,143,890	DPMD	
2	1	0	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	N A	100	286,561,300	100	865,773,850	100	1,703,844,803	100	1,163,126,348	100	1,955,919,907	100	702,913,288	100	6,678,139,496	DPMD
S	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibangun/difasilitasi	N A	100	436,171,200	100	460,373,820	100	1,183,431,200	100	1,159,299,781	100	1,122,636,975	100	1,278,128,009	100	5,640,040,985	DPMD

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	90	48,900,000	90	48,900,000	90	48,900,000	90	91,452,375	90	96,024,994	90	100,826,243	90	435,003,612	Kecamatan Kota Besi
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	96	20,500,000	98	85,500,000	98	85,500,000	100	102,600,000	100	123,120,000	100	147,744,000	100	564,964,000	Kecamatan Cempaga
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	90	2,000,000	92	10,000,000	96	26,600,000	98	47,550,000	99	29,600,000	100	23,800,000	100	139,550,000	Kecamatan Mentaya Hulu
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Paringgean
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase dokumen		75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	83,400,000	Kecamatan Baamang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	0 1 6	0	PEMERINTAHAN DESA	penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi																
7	0 1 6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	96	20,000,000	98	20,000,000	98	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	120,000,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	0 1 6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	96	14,069,000	98	19,319,000	98	33,250,000	100	29,350,000	100	25,450,000	100	29,650,000	100	151,088,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	0 1 6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	0 1 6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi		78	18,900,000	78	50,000,000	78	65,000,000	78	75,000,000	78	45,000,000	78	45,000,000	78	298,900,000	Kecamatan Pulau Hanaut
7	0 1 6	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai	NA	0	0	96	12,000,000	97	12,000,000	98	20,000,000	100	20,000,000	100	23,000,000	100	87,000,000	Kecamatan Antang Kalang

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	regulasi Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	67.32	68.85	0	70.23	18,000,000	71.55	20,000,000	73	20,000,000	74.35	27,000,000	75.18	27,000,000	75.18	112,000,000	Kecamatan Teluk Sampit
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi																Kecamatan Seranau
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	100	2,705,000	100	35,900,000	100	43,080,000	100	47,388,000	100	49,368,000	100	54,304,800	100	232,779,462	Kecamatan Cempaga Hulu
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA		0	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	60,000,000	Kecamatan Telawang
7 0 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi			0	100	48,300,000	100	125,000,000	100	174,000,000	100	149,000,000	100	139,000,000	100	635,300,000	Kecamatan Bukit Santuai

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	016	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	regulasi	NA	0	100	10,000,000	100	0	100	33,053,274	100	8,000,000	100	35,000,000	100	86,053,274	Kecamatan Tualan Hulu	
7	016	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	100	10,000,000	100	0	100	33,053,274	100	8,000,000	100	27,323,474	100	78,376,748	Kecamatan Telaga Antang	
			Misi 5: Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya																	
			Tujuan 5.1: Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (dalam indeks)	39.84	69.56	69.88		70.20		70.52		70.56		70.59		70.59			
			Sasaran 5.1.1: Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air (dalam indeks)	69.37	69.40	69.40		69.40		69.40		69.40		69.40		69.40			
				Indeks Kualitas Udara (dalam indeks)	62.66	88.91	89.01		89.11		89.21		89.25		89.30		89.30			
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (dalam indeks)	93.17	51.21	52.32		53.43		54.55		54.60		54.65		54.65			
				Timbunan Sampah yang Ditangani (dalam persen)	46	60	70		80		90		100		100		100			
2	112	0	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/	-	1 Dokumen	800,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	3 dokumen	1,800,000,000	DLH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Kota																	
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	-	-	0	1 dokumen	300,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	-	0	2 dokumen	800,000,000	DLH	
			Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	-	0	-	0	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	-	0	-	0	2 dokumen	1,000,000,000	DLH	
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	69.37	59.40	599,448,049	59.50	300,000,000	59.60	300,000,000	59.70	881,086,500	59.72	1,061,086,500	59.73	1,761,086,500	59.73	4,902,707,549	DLH
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	62.66	88.91		89.01			89.11		89.21		89.25		89.30		89.30	DLH	
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	93.17	53.76		53.76			53.76		53.77		53.77		53.77		53.77	DLH	
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah persentase tercapainya pengelolaan keanekaragaman hayati	-	60%	4,170,343,000	0%	0	0%	0	80%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	97%	1,000,000,000	97%	7,170,343,000	DLH
2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terkendalinya Pengelolaan Limbah LB3	-	0%	0	0%	0	0%	0	55%	160,000,000	70%	160,000,000	70%	160,000,000	70%	480,000,000	DLH
2	1	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang	58%	4%	76,300,800	0%	0	0%	0	4%	150,000,000	4%	150,000,000	4%	150,000,000	4%	526,300,800	DLH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota																	
		Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	3 orang	0	0	0	0	0	0	3 orang	90,000,000	3 orang	90,000,000	3 orang	90,000,000	4 orang	270,000,000	DLH	
2	1 1 0 7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	75,000,000	DLH
		Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	45,000,000	DLH	
		Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	30,000,000	DLH	
		Penetapan hak MHA	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	60,000,000	DLH	
		Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan	-	0	0	0	0	0	0	50%	15,000,000	50%	15,000,000	50%	15,000,000	50%	45,000,000	DLH	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			keterampilan																	
			Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	0	0	0	0	0	50%	25,000,000	50%	25,000,000	50%	25,000,000	50%	75,000,000		DLH	
2	1 1 8	0	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	2 Kegiatan	121,913,500	0	0	0	0	4 Kegiatan	121,913,500	4 Kegiatan	121,913,500	4 Kegiatan	121,913,500	7 Kegiatan	487,654,000	DLH
2	1 1 9	0	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	0	-	0	-	0	4 Penghargaan	100,000,000	4 Penghargaan	160,000,000	4 Penghargaan	160,000,000	4 Penghargaan	420,000,000	DLH
2	1 1 0	1	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota	1 pengaduan	80%	34,670,000	0%	0	0%	0	80%	50,000,000	80%	50,000,000	90%	50,000,000	80%	184,670,000	DLH
2	1 1 1	1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	Pengurangan Sampah 6%, Penanganan Sampah 40%	Pengurangan Sampah 10%, Penanganan Sampah 50%	5,592,839,050	Pengurangan Sampah 15%, Penanganan Sampah 55%	1,000,000,000	Pengurangan Sampah 20%, Penanganan Sampah 60%	3,600,000,000	Pengurangan Sampah 25%, Penanganan Sampah 65%	3,600,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	6,860,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	6,860,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	27,512,839,050	DLH
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R		0	10%		15%		20%		25%		30%		35%		35%		DLH
			Persentase cakupan area pelayanan		0	8,1%		12,4 %		14,7 %		17,7 %		19,6 %		21,9 %		21,9 %		DLH
			Persentase		0	35%		40%		45%		50%		55%		60%		60%		DLH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			jumlah sampah yang tertangani																
			Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71	DLH	
			Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%	DLH	
3	2 8	0 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	0	-	0	0,03	200.000.000	0,06	200.000.000	0,09	200.000.000	0,12	200.000.000	0,12	200.000.000	0,42	1.000.000.000	DLH
			Sasaran 5.1.2: Meningkatnya kualitas ruang publik	13,29	13,29		17,72		49,37		68,35		84,17		100		100		
2	1 1	0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	60%	4,170,343,000	0%	0	0%	0	80%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	97%	1,000,000,000	97%	7,170,343,000	DLH
1	3	1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	37,66	41,42	141,012,000	45,19	150,000,000	48,95	100,000,000	52,72	100,000,000	56,49	150,000,000	60,25	150,000,000	60,25	791,012,000	DPUPRRPKP
			Sasaran 5.1.3: Menurunnya risiko bencana kebakaran lahan, hutan, dan permukiman	11,75	11,75		29,41		47,06		64,71		82,35		100		100		
			Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	100	100		100		100		100		100		100		100		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		(dalam persen)																		
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (dalam persen)	100	100		100		100		100		100		100		100		100		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terencana, tepat dan cepat	87,73 %	100%	1,049,250,000	100%	1,600,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,850,000,000	100%	9,549,250,000	BPBD Kab.Kotim
1	5	4	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Meningkatnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	100%	4,000,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	4,000,000,000		BPBD Kab.Kotim	
1	0	0	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	89%	100%	2,068,512,500	100%	347,980,000	100%	565,842,618	100%	549,842,618	100%	713,000,000	100%	1,995,830,475	100%	1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kotim
			Tujuan 5.2: Penguatan pelestarian budaya daerah	Indeks Pemajuan Kebudayaan																
			Sasaran 5.2.1: Meningkatkan pelestarian dan pemajuan budaya daerah	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (dalam festival)	NA	1		8		10		12		14		16		16		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (dalam persen)	19.11	21.12		22.56		23.53		25.71		27.78		29.73		29.73		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		16.54%	1,321,895,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	31.24%	2,497,474,623	52.22%	4,174,698,939	100.00%	7,994,068,562	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		43.49%	80,800,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	26.91%	50,000,000	29.60%	55,000,000	100.00%	185,800,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	29.82%	170,000,000	70.18%	400,000,000	100.00%	570,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	42.92%	188,000,000	57.08%	250,000,000	100.00%	438,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		20.82%	788,748,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	39.59%	1,500,000,000	39.59%	1,500,000,000	100.00%	3,788,748,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini diuraikan mengenai seluruh program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung 5 prioritas pembangunan daerah yang disertai dengan capaian indikator masing-masing program selama 5 tahun mendatang dan indikasi pendanaannya. Secara umum, program pada tiap Perangkat Daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 kriteria sebagaimana yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kriteria pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kriteria yang kedua adalah program-program operasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang diembannya dimana telah dijabarkan ke dalam Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja yang dituangkan dalam RPJMD ini adalah indikator program dimana hal tersebut merupakan indikator *outcome* atau manfaat dari masing-masing program tersebut dalam jangka menengah. Pagu indikatif yang direncanakan dalam RPJMD ini mencerminkan kemampuan keuangan secara minimalis, sehingga untuk membiayai program-program yang tidak mampu dibiayai dengan keuangan daerah diharapkan akan dapat didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Untuk program-program yang belum mampu dibiayai mengingat keterbatasan keuangan yang ada tetap dicantumkan sebagai program stock dengan harapan akan dapat dibiayai apabila realisasi pendapatan daerah tercapai lebih dari 100%, akan tetapi belum ditetapkan targetnya pada dokumen ini. Target dari program-program tersebut akan ditentukan dalam rencana kerja (renja) Perangkat Daerah apabila pada saatnya nanti dapat terdani. Adapun program pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
1	01	Pendidikan																	
1	01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Kotim	86%	88%	106,279,939,471	88%	42,160,559,942	90%	41,274,559,942	92%	41,382,059,942	93%	42,444,936,513	95%	43,574,936,513	95%	44,394,936,513	Dinas Pendidikan
1	01	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tercapainya kurikulum pendidikan	86%	0%	0	88%	2,855,000,000	88%	2,105,000,000	90%	2,105,000,000	91%	2,105,000,000	92%	2,105,000,000	93%	2,105,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tercapainya pemerataan dan kualitas mutu tenaga pendidik dan kependidikan	83%	86%	21,476,261,272	90%	32,479,356,390	92%	32,479,356,390	94%	32,479,356,390	94%	32,479,356,390	95%	32,529,356,390	96%	32,529,356,390	Dinas Pendidikan
1	01	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Terpenuhinya izin untuk tempat pendidikan	92%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan
1	01	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terpenuhinya bahasa lokal dan budaya lokal	80%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan
1	02	Kesehatan																	
1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat Terlaksana	78.9	82.7	100,246,956,516	85.0	57,735,104,800	86.8	60,659,930,000	88.3	62,952,805,000	89.5	68,008,162,500	90.4	70,802,285,000	90.4	70,802,285,000	Dinas Kesehatan
1	02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat	68.3	80.8	21,440,157,148	83.0	320,000,000	84.7	323,750,000	86.7	323,750,000	88.3	15,025,742,500	90.0	22,173,750,000	90.0	22,173,750,000	Dinas Kesehatan
1	02	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Terlaksana	74.1	75.0	604,434,000	78.8	213,000,000	80.7	213,000,000	82.5	213,000,000	84.6	213,000,000	86.9	213,000,000	86.9	213,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Terlaksana	66.3	66.7	1,448,399,000	72.3	225,000,000	76.7	225,000,000	80.7	300,000,000	85.3	300,000,000	90.0	300,000,000	90.0	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	103,743,083,501	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	606,760,243,214	RSUD dr. Murjani
1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
1	03	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik.	24.03	25.53	7,836,988,000	27.03	2,700,000,000	28.53	2,707,000,000	30.03	3,075,486,000	31.53	4,482,000,000	33.03	5,150,000,000	33.03	25,951,474,000	DPUPRPRKP
1	03	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	85.39	88.83	4,996,445,300	92.55	0	96.28	200,000,000	100	300,000,000	100	400,000,000	100	500,000,000	100	500,000,000	DPUPRPRKP
1	03	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (layak)	45.72	67.3	0	71.2	0	77.1	0	83	0	88.9	0	94.8	0	94.8	0	DPUPRPRKP
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (aman)	6.39	6.39	1,950,000,000	6.5	150,000,000	8.19	450,000,000	10	600,000,000	11.81	750,000,000	13.62	900,000,000	13.62	900,000,000	DPUPRPRKP
1	03	06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	63.35	63	5,217,380,000	61.83	13,300,000,000	60.16	14,855,000,000	58.43	16,750,000,000	56.5	24,450,000,000	54.57	26,350,000,000	54.57	26,350,000,000	DPUPRPRKP
1	03	07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Jumlah Penyelenggaraan	8.43	4.00	9,752,640,000	5.00	5,000,000,000	5.00	5,500,000,000	5.00	6,000,000,000	6.00	9,000,000,000	8.00	12,000,000,000	33.00	12,000,000,000	DPUPRPRKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber IMB persatuan Bangunan	0.12	0.12	3,969,999,700	0.15	3,000,000,000	0.17	500,000,000	0.2	750,000,000	0.22	1,000,000,000	0.25	1,250,000,000	0.25	1,250,000,000	DPUPRPRKP
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	50.92	52.25	92,185,634,336	52.96	37,246,795,050	53.57	37,342,400,000	54.22	42,380,000,000	55.18	61,800,000,000	56.28	71,224,000,000	56.28	342,178,829,386	DPUPRPRKP
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tersedianya Sumber Daya Manusia dan Badan Usaha yang berkualitas dan berdaya saing di Bidang Jasa Konstruksi	20.23	28.21	50,000,000	36.47	80,000,000	44.73	100,000,000	52.99	120,000,000	61.25	132,000,000	69.52	150,000,000	69.52	632,000,000	DPUPRPRKP
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	73.67	75.15	699,975,000	77.98	2,750,000,000	78.09	750,000,000	79.60	800,000,000	81.10	850,000,000	82.51	750,000,000	82.51	6,599,975,000	DPUPRPRKP
1	04		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																	
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase terlaksananya pengembangan perumahan	NA	0.00	0	0.00	0	9.68	1,167,350,000	19.36	1,155,350,000	29.04	1,155,350,000	38.72	1,155,350,000	96.80	4,633,400,000	DPUPRPRKP
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase terlaksananya kawasan permukiman	16.44	21.34	1,383,952,000	11.37	170,000,000	21.81	1,236,418,000	33.75	1,235,392,000	33.91	1,232,314,000	45.05	1,228,210,000	67.00	6,486,286,000	DPUPRPRKP
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase terlaksananya Cakupan Permukiman Yang Tertata	NA	32.72	0	39.45	0	46.18	100,000,000	52.91	100,000,000	59.65	100,000,000	66.38	0	66.38	300,000,000	DPUPRPRKP
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase terlaksananya Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	NA	8.80	963,028,300	17.80	986,000,000	21.38	642,350,000	31.53	1,235,790,000	59.62	3,200,207,465	100.00	4,421,652,552	100.00	11,449,028,317	DPUPRPRKP
1	05		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	87,73 %	100%	1,049,250,000	100%	1,600,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,600,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,850,000,000	100%	9,549,250,000	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	Meningkatnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	-	100%	4,000,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	100%	4,000,000,000	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya upaya Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	89%	100%	2,068,512,500	100%	347,980,000	100%	565,842,618	100%	549,842,618	100%	713,000,000	100%	1,995,830,475	100%	1,995,830,475	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakkan Perda/Perkada		0.8	2,599,624,439	0.8	1,602,401,710	0.8	1,565,206,820	0.8	3,887,057,820	0.8	1,789,369,560	0.8	2,630,064,420	0.8	14,073,724,769	Satpol PP
1	06		Sosial																	
1	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah PSKS Yang diberdayakan	100 Orang	100 Orang	381,400,000	100 Orang	410,000,000	100 Orang	451,000,000	100 Orang	496,100,000	100 Orang	545,710,000	100 Orang	600,281,000	100 Orang	2,884,491,000	Dinas Sosial
1	06		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	Jumlah Warga Negara migran yang dipulangkan	30 Orang	30 Orang	30,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	110,000,000	100 Orang	121,000,000	100 Orang	133,100,000	100 Orang	146,410,000	530 Orang	640,510,000	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		KORBAN TINDAK KEKERASAN																	
1	06	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah PMKS yang ditangani	15 Orang	15 Orang	646,097,764	20 Orang	361,500,000	20 Orang	397,650,000	20 Orang	437,415,000	20 Orang	481,156,500	20 Orang	529,272,150	115 Orang	2,853,091,414	Dinas Sosial
1	06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Pendamping PKH	30 Orang	46 Orang	556,900,000	49 Orang	540,665,000	49 Orang	594,731,500	49 Orang	492,358,000	49 Orang	545,443,800	49 Orang	599,988,180	49 Orang	3,330,086,480	Dinas Sosial
1	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah tenaga terampil tagana	25 Orang	25 Orang	478,255,000	40 Orang	300,000,000	40 Orang	330,000,000	40 Orang	300,000,000	40 Orang	399,300,000	40 Orang	439,230,000	40 Orang	2,246,785,000	Dinas Sosial
1	06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2 TMP	2 TMP	96,000,000	2 TMP	96,000,000	2 TMP	105,600,000	2 TMP	100,000,000	2 TMP	127,776,000	2 TMP	140,553,600	2 TMP	665,929,600	Dinas Sosial
2		Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																	
2	07	Tenaga Kerja																	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		97,243,792		294,000,000		294,000,000		294,000,000		294,000,000		354,000,000		1,627,243,792	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		55,950,000		196,541,415		196,541,415		196,541,415		196,541,415		256,541,415		1,098,657,075	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Keselamatan dan perlindungan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Besaran Pemeriksaan Perusahaan Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		86,946,100		190,000,000		190,000,000		190,000,000		190,000,000		250,000,000		1,096,946,100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perusahaan yang mengacu pada				50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		250,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Mikro																Transmigrasi	
2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100	46,908,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	111,616,000	100	604,988,000	DPPPAPPKB	
2	08	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100	399,916,500	100	161,573,300	100	161,573,300	100	161,573,300	100	161,573,300	100	181,973,300	100	1,228,183,000	DPPPAPPKB	
2	08	04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		100	0	100	45,000,000	100	45,000,000	100	45,000,000	100	85,000,000	100	100,000,000	100	320,000,000	DPPPAPPKB	
2	08	05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100	0	100	39,413,250	100	39,413,250	100	39,413,250	100	39,413,250	100	50,000,000	100	207,653,000	DPPPAPPKB	
2	08	06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		100	72,070,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	99,943,000	100	122,070,000	100	593,912,000	DPPPAPPKB	
2	08	07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100	0	100	131,805,700	100	131,805,700	100	131,805,700	100	131,805,700	100	216,805,700	100	744,028,500	DPPPAPPKB	
2	09	Pangan																	
2	09	01 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-Tercapainya ketersediaan energi (kkalori/kapita/hari)	3367,3	3384	1,153,825,100	3417	30,215,100	3452	30,215,100	3469	30,215,100	3504	161,725,475	3521	169,811,749	3521	169,811,749	DKP
2	09	02 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	- Tercapainya konsumsi angka kecukupan energi (kkalori/kapita/hari)	2234,3	2225,9	512,782,100	2217,4	474,921,400	2209,0	697,031,250	2200,6	729,855,050	2192,2	825,328,835	2190,0	937,594,702	2190,0	937,594,702	DKP
2	09	03 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Tertanganinya daerah rawan pangan (desa)	-	1 desa	106,185,200	2 desa	122,709,200	2 desa	116,185,200	2 desa	116,185,200	2 desa	126,993,000	2 desa	133,342,650	11 desa	133,342,650	DKP
2	09	04 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan	2 kali	2 kali	34,676,100	3 kali	49,675,600	3 kali	47,675,600	3 kali	47,675,600	3 kali	53,058,000	3 kali	55,710,900	3 kali	55,710,900	DKP
2	10	Pertanahan																	
2	10	04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan sesuai ketentuan perundangan			0	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	400,000,000	100	2,000,000,000	Sekretariat Daerah
2	10	05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan			0	100	3,600,000,000		0	100	3,000,000,000		0		0	100	6,600,000,000	Sekretariat Daerah
2	11	Lingkungan Hidup																	
2	11	02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	-	1 Dokumen	800,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	3 dokumen	1,800,000,000	DLH
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	-	-	0	1 dokumen	300,000,000	-	0	1 dokumen	500,000,000	-	0	-	0	2 dokumen	800,000,000	DLH
			Terselenggaranya KLHS	-	-	0	-	0	1	500,000,000	1	500,000,000	-	0	-	0	2 dokumen	1,000,000,000	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		untuk K/R/P tingkat daerah provinsi						dokumen	0	dokumen	0						00			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	69.37	59.40	599,448,049	59.50	300,000,000	59.60	300,000,000	59.70	881,086,500	59.72	1,061,086,500	59.73	1,761,086,500	59.73	4,902,707,549	DLH
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	62.66	88.91		89.01		89.11		89.21		89.25		89.30		89.30		DLH
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	93.17	51.21		52.32		53.43		54.55		54.60		54.65		54.65		DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah persentase tercapainya pengelolaan keanekaragaman hayati	-	60%	4,170,343,000	0%	0	0%	0	80%	1,000,000,000	85%	1,000,000,000	97%	1,000,000,000	97%	7,170,343,000	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terkendalinya Pengelolaan Limbah LB3	-	0%	0	0%	0	0%	0	55%	160,000,000	70%	160,000,000	70%	160,000,000	70%	480,000,000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	0.5847	4%	76,300,800	0%	0	0%	0	4%	150,000,000	4%	150,000,000	4%	150,000,000	4%	526,300,800	DLH
				Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	3 orang	0	0	0	0	0	0	3 orang	90,000,000	3 orang	90,000,000	3 orang	90,000,000	4 orang	270,000,000	DLH
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	25,000,000	1 kelompok	75,000,000	DLH
				Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	15,000,000	1 kelompok	45,000,000	DLH
				Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	10,000,000	1 kelompok	30,000,000	DLH
				Penetapan hak MHA	-	-	0	-	0	-	0	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	20,000,000	1 kelompok	60,000,000	DLH
				Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	0%	0	0%	0	0%	0	50%	15,000,000	50%	15,000,000	50%	15,000,000	50%	45,000,000	DLH
				Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana	-	0%	0	0%	0	0%	0	50%	25,000,000	50%	25,000,000	50%	25,000,000	50%	75,000,000	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	2 Kegiatan	121,913,500	0	0	0	0	4 Kegiatan	121,913,500	4 Kegiatan	121,913,500	4 Kegiatan	121,913,500	4 Kegiatan	487,654,000	DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	-	0	-	0	-	0	4 Penghargaan	100,000,000	4 Penghargaan	160,000,000	4 Penghargaan	160,000,000	4 Penghargaan	420,000,000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota	1 pengaduan	80%	34,670,000	0%	0	0%	0	80%	50,000,000	80%	50,000,000	90%	50,000,000	100%	184,670,000	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan Sampah yang Ditangani	Pengurangan Sampah 6%, Penanganan Sampah 40%	Pengurangan Sampah 10%, Penanganan Sampah 50%	5,592,839,050	Pengurangan Sampah 15%, Penanganan Sampah 55%	1,000,000,000	Pengurangan Sampah 20%, Penanganan Sampah 60%	3,600,000,000	Pengurangan Sampah 25%, Penanganan Sampah 65%	3,600,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	6,860,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	6,860,000,000	Pengurangan Sampah 30%, Penanganan Sampah 70%	27,512,839,050	DLH
				Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0	10%		15%		20%		25%		30%		35%		35%		DLH
				Persentase cakupan area pelayanan	0	8,1%		12,4 %		14,7 %		17,7 %		19,6 %		21,9 %		21,9 %		DLH
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	0	35%		40%		45%		50%		55%		60%		60%		DLH
				Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/ kota	0	Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		Nilai TPA ≥ 71		DLH
				Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0	80%		80%		80%		80%		80%		80%		80%		DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase telaksananya RTH Publik	0.76	1,047,577,640	0.76	550,000,000	0.76	551,500,802	0.76	600,000,802	0.76	900,000,000	0.76	1,000,000,000	0.76	4,649,079,244	DPUPRPRKP	
2	12		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan KK, penyelesaian perekaman dan Pencetakan KTP-el serta Penerbitan KIA yang tepat waktu	100%	20%	938,451,700	40%	130,000,000	60%	143,000,000	80%	157,300,000	90%	173,030,000	100%	190,333,000	100%	1,732,114,700	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kematian yang tepat waktu	100%	20%	96,925,650	40%	262,724,000	60%	288,996,400	80%	317,896,040	90%	349,685,644	100%	384,654,208	100%	1,700,881,942	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemenuhan kebutuhan data kependudukan	100%	20%	43,999,700	40%	97,500,000	60%	107,250,000	80%	117,975,000	90%	129,772,500	100%	142,749,750	100%	639,246,950	Kotim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
2	13		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang dibentuk sesuai ketentuan	N A		100	89,896,600	100	89,896,600	100	117,420,377	100	58,740,675	100	64,455,965	100	420,410,217	DPMD	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melaksanakan kerja sama	N A	100		54,225,000	100	54,225,000	100	59,783,063		0	100	65,910,827	100	234,143,890	DPMD	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi desa sesuai ketentuan	N A	100	286,561,300	100	865,773,850	100	1,703,844,803	100	1,163,126,348	100	1,955,919,907	100	702,913,288	100	6,678,139,496	DPMD
S	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibina/difasilitasi	N A	100	436,171,200	100	460,373,820	100	1,183,431,200	100	1,159,299,781	100	1,122,636,975	100	1,278,128,009	100	5,640,040,985	DPMD
2	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100	26,700,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	33,100,000	100	192,200,000	DPPPAPPKB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			100	3,735,980,950	100	159,912,520	100	159,912,520	100	159,912,520	100	267,801,870	100	295,000,000	100	4,778,520,380	DPPPAPPKB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			100	115,000,000	100	287,153,830	100	287,153,830	100	287,153,830	100	337,153,830	100	337,153,830	100	1,650,769,150	DPPPAPPKB
2	15		Perhubungan																	
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan Angka Kecelakaan	130	125	8,345,983,616	119	22,442,277,310	110	22,442,277,310	102	23,042,277,310	92	26,567,277,310	83	28,225,000,000	83	131,065,092,856	DISHUB
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase layanan angkutan	40%	44%	129,998,700	47%	300,000,000	50%	300,000,000	55%	300,000,000	60%	435,000,000	65%	1,875,000,000	65%	3,339,998,700	DISHUB
2	16		Komunikasi dan Informatika																	
2	16		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	66%	76%	3,396,130,440	78%	180,976,340	94%	192,976,340	96%	192,976,340	98%	237,976,340	100%	2,086,936,450	100%	3,690,361,500	Diskominfo
2	16		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pengelolaan aplikasi informatika	40%	42%	20,294,700	52%	171,800,000	74%	633,373,712	82%	974,548,712	91%	1,178,548,712	97%	1,246,548,712	97%	793,826,592	Diskominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Cabang/ Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	100%	170,448,000	100%	185,000,000	100%	175,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi dan UKM	
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Tercapainya jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	100%	69,476,800	100%	123,555,904	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terlaksananya pemberdayaan koperasi untuk pengembangan usaha	100%	208,012,500	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Tercapainya jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan dan jumlah UMKM yang terdata	100%	275,741,500	100%	325,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase jumlah UMKM	100%	235,131,500	100%	165,000,000	100%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	225,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Dinas Koperasi dan UKM
2	18	Penanaman Modal																	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	0	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000	4 Kegiatan	300,000,000			DPMPSTP
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	2 Kegiatan	9,387,749,975	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000	2 Kegiatan	700,150,000			DPMPSTP
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	4 Kegiatan	0	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000	4 Kegiatan	840,122,000			DPMPSTP
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	3 Kegiatan	335,172,724	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448	3 Kegiatan	770,345,448			DPMPSTP
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	150,000,000	0	0	0	0	0	0			DPMPSTP
2	19	Kepemudaan Dan Olahraga																	
2	19		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	1,227,999,501	100%	0	100%	75,000,000	100%	150,000,000	100%	485,000,000	100%	630,000,000	100%	2,567,999,501	Dispora
2	19		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	18,250,850,240	100%	0	100%	125,000,000	100%	160,000,000	100%	325,000,000	100%	600,000,000	100%	19,460,850,240	Dispora
2	19		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	316,991,183	100%	0	100%	0	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	586,991,183	Dispora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2	20	Statistik																	
2	20	PROGRAM PENYELENGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	50%	50%	8,120,000	90%	45,000,000	100%	45,000,000	100%	80,000,000	100%	260,000,000	100%	260,000,000	100%	240,000,000	Diskominfo
2	21	Persandian																	
2	21	PROGRAM PENYELENGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi	30%	30%	10,721,200	54%	75,000,000	80%	75,000,000	86%	85,000,000	92%	156,000,000	98%	156,000,000	98%	156,000,000	Diskominfo
2	22	Kebudayaan																	
2	22	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Seni dan Budaya		16.54%	1,321,895,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	31.24%	2,497,474,623	52.22%	4,174,698,939	100.00%	19,100,733,125	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatkan SDM Pelaku Budaya		43.49%	80,800,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	26.91%	50,000,000	29.60%	55,000,000	100.00%	19,985,846,250	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Mengelola Sejarah Daerah		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	29.82%	170,000,000	70.18%	400,000,000	100.00%	570,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Melestarikan Cagar Budaya		0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	42.92%	188,000,000	57.08%	250,000,000	100.00%	438,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	22	06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan Museum		20.82%	788,748,000	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	39.59%	1,500,000,000	39.59%	1,500,000,000	100.00%	3,788,748,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	23	Perpustakaan																	
2	23	02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah Pemustaka Pertahun	13.07%	3.08%	26,654,400	3.46%	85,000,000	3.99%	150,000,000	4.18%	205,000,000	4.39%	205,000,000	4.61%	260,000,000	23.71%	931,654,400	Dispustakasp
2	23	03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Kualitas Pelestarian Koleksi	0.43%	0.45%	0	0.50%	0	0.55%	10,000,000	0.60%	30,000,000	0.65%	35,000,000	0.70%	0	3.45%	75,000,000	Dispustakasp
2	24	Kearsipan																	
2	24	02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan	0.00%	0.16%	0	0.25%	60,000,000	0.33%	0	0.41%	72,000,000	0.50%	0	0.58%	150,000,000	2.23%	282,000,000	Dispustakasp
2	24	03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Kualitas Peningkatan Pengelolaan Arsip Secara Baku	86.53%	9.61%	0	11.53%	35,000,000	13.46%	45,000,000	15.38%	35,000,000	17.30%	90,000,000	28.84%	60,000,000	96.12%	265,000,000	Dispustakasp
3	Pilihan																		
3	25	Kelautan dan Perikanan																	
3	25	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	100.00%	12528.05	402,737,650	37584.05	115,000,000	62640.05	132,694,100	87696.05	190,000,000	112752.05	205,738,319	137808.05	261,850,400	451008.3	1,308,020,469	Dinas Perikanan
3	25	04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	100.00%	10503.01	2,260,596,950	10713.07	315,000,000	31719.07	391,694,100	52725.07	585,000,000	73731.07	702,714,410	94737.07	712,243,920	274128.36	4,967,249,380	Dinas Perikanan
3	25	05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase jumlah pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	24,774,220	0	25,000,000	0	25,000,000	0	74,774,220	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	100.00%	861.28	22,394,600	878.5	20,000,000	895.72	65,000,000	912.94	130,000,000	930.16	140,000,000	947.38	165,000,000	100 %	542,394,600	Dinas Perikanan
3	26		Pariwisata																	
3	26	02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	1.95%	499,832,000	0.00%	0	39.00%	10,000,000,000	19.50%	5,000,000,000	11.49%	2,945,600,000	28.05%	7,192,720,000	100.00%	25,638,152,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Promosi Pariwisata	10.00%	133,241,234	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	42.17%	562,000,000	47.83%	637,400,000	100.00%	1,332,641,234	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	100.00%	180,000,000	0.00%	0	100.00%	180,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatkan Pelayanan SDM Kepariwisata dan Ekraf	9.40%	28,537,500	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	41.18%	125,000,000	49.42%	150,000,000	100.00%	303,537,500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
3	27		Pertanian																	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	90%	100%	6,546,598,131	100%	6,985,000,000	100%	8,330,000,000	100%	8,330,000,000	100%	9,619,500,000	100%	8,661,100,000	100%	48,472,198,131	Dinas Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	90%	100%	3,192,015,364	100%	870,000,000	100%	4,095,000,000	100%	2,840,000,000	100%	3,601,000,000	100%	3,651,600,000	100%	18,249,615,364	Dinas Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah ternak yang terkena penyakit	80%	100%	254,147,146	100%	140,000,000	100%	212,500,000	100%	212,500,000	100%	244,375,000	100%	268,812,500	100%	1,332,334,646	Dinas Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase jumlah kegiatan penanggulangan bencana pertanian yang dilaksanakan	80%	100%	58,063,532	100%	110,000,000	100%	558,500,000	100%	375,000,000	100%	431,250,000	100%	474,375,000	100%	2,007,188,532	Dinas Pertanian
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah izin usaha pertanian yang dikeluarkan	90%	100%	35,744,300	100%	35,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	92,000,000	100%	101,200,000	100%	423,944,300	Dinas Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase jumlah Penyelenggaraan Penyuluhan serta Sarana dan Prasarana Penyuluhan	90%	100%	914,629,115	100%	380,000,000	100%	418,000,000	100%	418,000,000	100%	480,700,000	100%	528,770,000	100%	3,140,099,115	Dinas Pertanian
3	28		Kehutanan																	
3	28	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase luasan konservasi sumber daya alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya yang terkelola	0	-	0	0,03	200.000,000	0,06	200.000,000	0,09	200.000,000	0,12	200.000,000	0,12	200.000,000	0,42	1.000.000,000	DLH
3	30		Perdagangan																	
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin	N/A		100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	100%	35,000,000	Disperdagin	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan (Pasar/ Tradisional) yang terbangun			100%	1,000,000,000	100%	750,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	Disperdagin	
3	30	04	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	Jumlah Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Strategis			100%	495,000,000	100%	610,000,000	100%	625,000,000	100%	747,500,000	100%	747,500,000	100%	747,500,000	Disperdagin	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	30	05	DAN BARANG PENTING	yang stabil di 17 Kecamatan															
			PROGRAM PENGEMBANGAN EXPOR	Realisasi ekspor netto non migas	100%	20,464,266,600	100%	615,000,000	100%	2,680,000,000	100%	705,000,000	100%	1,055,000,000	100%	1,055,000,000	100%	1,055,000,000	Disperdagin
3	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah alat UTTP yang telah ditera/tera ulang di 17 Kec.			100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	80,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	Disperdagin
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya prosentase produk yang menggunakan tanda SNI			100%	12,000,000	100%	12,000,000	100%	50,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	Disperdagin
3	31		Perindustrian																
3	31	01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Wilayah dan Akses Industri yang berkembang di Kab. Kotim			100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	70,000,000	100%	102,500,000	100%	102,500,000	100%	102,500,000	Disperdagin
3	31	02	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Penerbitan izin usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah			100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	Disperdagin
3	31	03	PROGRAM PENGOLAHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Data IKM yang akurat dan up to date			100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	35,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	Disperdagin
3	32		Transmigrasi																
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran swakarsa		16,598,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		160,000,000		576,598,000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
4	01		Sekretariat Daerah																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase	100	27,082,854,785	100	8,689,441,526	100	9,719,888,975	100	15,189,888,975	100	33,273,654,979	100	34,128,299,013	100	128,084,028,252	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase	100	2,079,063,550	100	2,052,526,800	100	2,204,848,250	100	2,204,848,250	100	2,183,206,533	100	2,183,206,533	100	12,907,699,915	Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD																
4	02	01	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan	100	10,643,974,000	100	10,643,974,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	10,799,674,000	100	64,486,644,000	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
5	01		Perencanaan																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100	1,652,437,100	100	892,479,055	100	941,373,055	100	941,373,055	100	1,210,717,300	100	875,718,555	100	6,514,098,120	BAPPELITBA NGDA
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan daerah	100	746,178,750	100	248,973,950	100	735,049,969	100	749,746,505	100	795,545,968	100	795,545,968	100	4,071,041,110	BAPPELITBA NGDA
5	02		Keuangan																
5	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	24.82%	1,343,848,000	100%	2,440,000,000	100%	2,353,910,885	100%	2,233,517,314	100%	2,477,104,065	100%	2,682,870,153	100%	2,682,870,153	Bapenda
5	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan	98%	273,095,588,186	98%	265,252,872,400	99%	263,795,084,927	99%	263,868,652,367	100%	262,749,185,819	100%	262,706,072,524	100%	262,706,072,524	BKAD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel																		
5	02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah	95%	97%	1,969,849,000	98%	1,465,831,000	98%	2,901,471,100	99%	3,191,618,210	100%	3,510,780,031	100%	3,861,858,034	100%	3,861,858,034	BKAD	
5	03	Kepegawaian																		
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian	87.08	87.08	3,875,169,300	88.46	3,591,508,050	90	3,879,551,750	91.54	5,147,205,600	93.08	6,749,213,835	94.63	7,151,055,335	94.63	30,393,703,870	BKPSDM
5	04	Pendidikan Dan Pelatihan																		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tingkat pengembangan SDM Aparatur	6.58	6.58	3,938,567,050	10.73	1,594,239,050	11.93	1,129,480,050	11.8	1,251,221,050	11.57	2,942,580,550	11.57	4,184,181,250	11.57	15,040,269,000	BKPSDM
5	05	Penelitian Dan Pengembangan																		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase jumlah Police brief terhadap jumlah dokumen hasil kajian/penelitian	50	85	247,954,000	90	51,444,000	100	416,240,000	100	548,740,000	100	701,530,939	100	886,240,000	100	2,852,148,939	BAPPELITBA NGDA
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																		
6	01	Inspektorat Daerah																		
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase Entitas/Obrik yang di Audit	100	100	1,488,862,700	100	1,982,260,000	100	2,081,373,000	100	2,185,441,650	100	2,294,713,733	100	2,409,449,419	100	12,442,100,502	Inspektorat
				Prosentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB (Sangat Baik)	19	21		25		30		32		36		40		40		
				Prosentase rekomendasi temuan Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	95	95		95		96		96		97		97		97		
				Prosentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	50	53		56		59		62		65		68		68		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks/Nilai Korsupgah	NA	65	546,717,500	67	618,243,000	69	697,699,150	72	677,584,108	74	701,671,258	75	726,754,821	75	3,968,669,836	Inspektorat
				Jumlah SKPD yang berpredikat WBK/WBBM (Zona Integritas)	0	1		2		3		4		5		6		6		
7		Unsur Kewilayahan																		
7	01	Kecamatan																		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	90	90	469,835,277	90	469,835,277	90	469,835,277	90	620,761,813	90	621,384,667	90	622,026,207	90	3,273,678,519	Kecamatan Kota Besi
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	90	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	1,434,155,000	90	8,604,930,000	Kecamatan Kota Besi
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Urusan	90	90	263,421,000	90	263,421,000	90	333,026,000	90	385,519,222	90	404,795,182	90	425,034,942	90	2,075,217,322	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		URUSAN PEMERINTAH UMUM	Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014				0			0		3		4		4		51	Kota Besi
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	90	48,900,000	90	48,900,000	90	48,900,000	90	91,452,375	90	96,024,994	90	100,826,243	90	435,003,612	Kecamatan Kota Besi
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	94	20,000,000	94	50,000,000	96	50,000,000	96	60,000,000	98	72,000,000	100	86,400,000	100	338,400,000	Kecamatan Cempaga
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	92	20,000,000	93	20,000,000	95	20,000,000	97	24,000,000	98	28,800,000	100	34,560,000	100	147,360,000	Kecamatan Cempaga
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	94	4,500,000	96	4,500,000	97	4,500,000	98	5,400,000	99	6,480,000	100	7,776,000	100	33,156,000	Kecamatan Cempaga
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	92	208,018,000	94	230,000,000	96	250,000,000	98	138,551,000	99	166,261,200	100	199,513,440	100	1,192,343,640	Kecamatan Cempaga
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	96	20,500,000	98	85,500,000	98	85,500,000	100	102,600,000	100	123,120,000	100	147,744,000	100	564,964,000	Kecamatan Cempaga
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	90	70,000,000	92	91,000,000	94	212,100,000	96	87,500,000	98	93,500,000	100	98,850,000	100	652,950,000	Kecamatan Mentaya Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	90	519,575,140	93	25,000,000	95	31,036,000	97	27,546,000	98	33,301,000	100	31,025,700	100	667,483,840	Kecamatan Mentaya Hulu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	90	6,500,000	94	6,325,034	97	9,350,000	98	8,700,000	99	7,350,000	100	8,850,000	100	47,075,034	Kecamatan Mentaya Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	90	140,850,000	92	131,050,000	94	138,050,000	98	139,500,000	99	139,050,000	100	179,250,000	100	867,750,000	Kecamatan Mentaya Hulu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	90	2,000,000	92	10,000,000	96	26,600,000	98	47,550,000	99	29,600,000	100	23,800,000	100	139,550,000	Kecamatan Mentaya Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	95	439,206,166	96	639,206,166	97	639,206,166	98	689,206,166	99	689,206,166	100	689,206,166	100	3,785,236,996	Kecamatan Parenggean

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	95	284,000,000	96	334,000,000	97	460,000,000	98	460,000,000	99	760,000,000	100	790,000,000	100	3,088,000,000	Kecamatan Parenggean
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Parenggean
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	95	49,100,000	96	60,000,000	97	80,000,000	98	80,000,000	99	100,000,000	100	100,000,000	100	469,100,000	Kecamatan Parenggean
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Parenggean
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal		75	1,113,231,462	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	1,218,482,683	75	7,205,644,877	Kecamatan Baamang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi		75	3,704,875,000	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	3,756,009,500	75	22,484,922,500	Kecamatan Baamang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	0	75	26,540,000	75	26,540,000	75	34,974,700	75	34,974,700	75	34,974,700	75	158,004,100	Kecamatan Baamang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		75	197,595,000	75	304,115,000	75	304,115,000	75	314,115,000	75	314,115,000	75	314,115,000	75	1,748,170,000	Kecamatan Baamang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi		75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	13,900,000	75	83,400,000	Kecamatan Baamang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	17,778,280	94	17,778,280	96	17,778,280	96	17,778,280	98	17,778,280	100	17,778,280	100	106,669,680	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	92	3,670,000,000	93	3,670,000,000	95	3,670,000,000	97	3,670,000,000	98	3,670,000,000	100	3,670,000,000	100	22,020,000,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	-		75	20,000,000	80	20,000,000	82	20,000,000	84	25,000,000	88	25,000,000	88	110,000,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan	NA	82	214,294,000	84	215,000,000	86	220,000,000	88	220,000,000	89	225,000,000	90	225,000,000	90	1,319,294,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	96	20,000,000	98	20,000,000	98	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	120,000,000	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	98,325,000	94	66,325,000	96	90,100,000	96	101,625,000	98	105,000,000	100	118,450,000	100	579,825,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	92	28,613,600	93	31,763,600	95	32,896,000	97	33,446,000	98	32,201,000	100	32,305,000	100	191,225,200	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	-	-	96	6,300,000	97	8,950,000	98	8,200,000	99	6,800,000	100	8,150,000	100	38,400,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	92	118,591,000	94	136,466,000	96	140,976,000	98	138,551,000	99	139,892,000	100	179,750,000	100	854,226,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	96	14,069,000	98	19,319,000	98	33,250,000	100	29,350,000	100	25,450,000	100	29,650,000	100	151,088,000	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	94	88,450,000	94	127,000,000	96	127,000,000	98	127,000,000	98	127,000,000	100	137,000,000	100	733,450,000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	93	1,886,252,800	93	1,883,000,000	95	1,982,000,000	97	1,896,000,000	97	1,883,000,000	100	1,883,000,000	100	11,413,252,800	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	93	124,740,000	94	174,000,000	95	175,500,000	97	176,000,000	98	174,000,000	100	180,000,000	100	1,004,240,000	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																Kecamatan Mentaya Hilir Selatan	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal		78	152,214,752	78	204,000,000	78	205,000,000	78	210,000,000	78	200,000,000	78	200,000,000	78	1,171,214,752	Kecamatan Pulau Hanaut
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi		78	36,050,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	336,050,000	Kecamatan Pulau Hanaut
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI	Persentase koordinasi															Kecamatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana																Pulau Hanaut	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	78	194,350,000	78	220,065,000	78	220,065,000	78	230,065,000	78	230,065,000	78	230,065,000	78	1,324,675,000	Kecamatan Pulau Hanaut	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	78	18,900,000	78	50,000,000	78	65,000,000	78	75,000,000	78	45,000,000	78	45,000,000	78	298,900,000	Kecamatan Pulau Hanaut	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	0.95	489,950,000	0.96	561,500,016	0.97	605,000,000	0.98	610,000,000	0.99	625,000,000	100	625,000,000	100	3,516,450,016	Kecamatan Antang Kalang	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	0	0	0	0	0	0	97	25,000,000	98	30,000,000	100	30,000,000	100	85,000,000	Kecamatan Antang Kalang	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	0	0	0	0	0	0	98	8,000,000	99	10,000,000	100	10,000,000	100	28,000,000	Kecamatan Antang Kalang	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	0	0	96	20,000,000	97	20,000,000	98	35,000,000	99	35,000,000	100	40,000,000	100	150,000,000	Kecamatan Antang Kalang	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	0	0	96	12,000,000	97	12,000,000	98	20,000,000	100	20,000,000	100	23,000,000	100	87,000,000	Kecamatan Antang Kalang	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	78	84,500,000	78	75,700,000	78	100,000,000	78	100,000,000	78	200,000,000	78	200,000,000	78	760,200,000	Kecamatan Teluk Sampit	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	78	14,725,000	78	35,974,000	78	45,000,000	78	45,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	260,699,000	Kecamatan Teluk Sampit	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana															Kecamatan Teluk Sampit	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		0	78	144,053,000	78	175,000,000	78	175,000,000	78	250,000,000	78	270,000,000	78	1,014,053,000	Kecamatan Teluk Sampit	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan	67.32	68.85	0	70.23	18,000,000	71.55	20,000,000	73	20,000,000	74.35	27,000,000	75.18	27,000,000	75.18	112,000,000	Kecamatan Teluk Sampit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		sesuai regulasi																		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	95	565,154,692	95	493,202,595	95	500,600,634	95	507,998,673	95	515,396,712	95	522,794,751	95	522,794,751	Kecamatan Seranau
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	98	464,400,000	98	734,000,000	98	745,010,000	98	756,020,000	98	767,030,000	98	778,040,000	98	778,040,000	Kecamatan Seranau
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana																Kecamatan Seranau
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	97	149,865,000	97	193,565,000	97	196,468,475	97	199,371,950	97	202,275,425	97	205,178,900	97	205,178,900	Kecamatan Seranau
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi																Kecamatan Seranau
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA		0	94	26,420,000	96	33,104,000	98	36,414,400	98	39,055,400	100	42,205,500	100	177,199,300	Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA		0	93	18,000,000	95	21,600,000	97	22,000,000	97	24,200,000	100	25,202,000	100	111,002,000	Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana																Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	90	116,730,000	94	239,607,538	95	240,708,500	96	255,634,000	97	281,197,400	100	320,000,000	100	1,097,539,903	Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	100	2,705,000	100	35,900,000	100	43,080,000	100	47,388,000	100	49,368,000	100	54,304,800	100	232,779,462	Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	90	77,750,000	92	10,800,000	94	11,340,000	96	11,907,000	98	12,502,350	100	13,127,468	100	137,426,818	Kecamatan Telawang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi																Kecamatan Telawang
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	NA		0	96	8,000,000	97	8,000,000	98	8,000,000	99	8,000,000	100	8,000,000	100	40,000,000	Kecamatan Telawang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	lintas sektor yang terlaksana	NA	0	92	165,245,000	97	173,507,250	98	182,182,613	99	191,291,743	100	200,856,330	100	913,082,936	Kecamatan Telawang	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,000,000	100	60,000,000	Kecamatan Telawang	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal		78	1,710,270,000	78	237,020,000	78	263,600,000	78	277,300,000	78	277,300,000	78	277,300,000	78	3,042,790,000	Kecamatan Bukit Santuai
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi		0	78	43,000,000	78	78,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	60,000,000	78	301,000,000	Kecamatan Bukit Santuai	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana		0	78	109,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	114,000,000	78	565,000,000	Kecamatan Bukit Santuai	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014		78	52,532,000	78	24,900,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	64,950,000	78	337,232,000	Kecamatan Bukit Santuai
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi		0	100	48,300,000	100	125,000,000	100	174,000,000	100	149,000,000	100	139,000,000	100	635,300,000	Kecamatan Bukit Santuai	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	NA	94	193,181,500	94	116,670,000	96	145,000,000	96	242,625,000	98	253,000,000	100	297,740,874	100	1,248,217,374	Kecamatan Tu alan Hulu
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	0		0	95	28,769,454	97	33,446,000	98	30,181,000	100	32,305,000	100	124,701,454	Kecamatan Tu alan Hulu	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	0	96	10,000,000	97	12,000,000	98	18,600,000	99	17,750,000	100	19,750,000	100	78,100,000	Kecamatan Tu alan Hulu	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	92	71,400,000	94	203,600,000	96	203,600,000	96	235,125,000	98	235,635,000	100	237,300,000	100	1,186,660,000	Kecamatan Tu alan Hulu
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	100	10,000,000	100	0	100	33,053,274	100	8,000,000	100	35,000,000	100	86,053,274	Kecamatan Tu alan Hulu	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase pelayanan publik	NA	94	193,181,500	94	116,670,000	96	145,000,000	96	242,625,000	98	253,000,000	100	263,450,000	100	1,213,926,5	Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal				0		0		0		0		0		00	Telaga Antang		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terpenuhi	NA	0		0	95	28,769,454	97	33,446,000	98	30,181,000	100	32,305,000	100	124,701,454	Kecamatan Telaga Antang	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban lintas sektor yang terlaksana	NA	0	96	10,000,000	97	12,000,000	98	18,600,000	99	17,750,000	100	19,750,000	100	78,100,000	Kecamatan Telaga Antang	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana sesuai ketentuan UU No 25 Tahun 2014	NA	92	71,400,000	94	203,600,000	96	203,600,000	96	235,125,000	98	235,635,000	100	237,300,000	100	1,186,660,000	Kecamatan Telaga Antang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun tepat waktu dan sesuai regulasi	NA	0	100	10,000,000	100	0	100	33,053,274	100	8,000,000	100	27,323,474	100	78,376,748	Kecamatan Telaga Antang	
8			Unsur Pemerintahan Umum																	
8	01		Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	99.83	100	114,804,000	100	220,385,554	100	220,385,554	100	220,385,554	100	220,385,554	100	465,000,000	100	1,461,346,216	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	96.67	100	920,050,246	100	1,030,338,858	100	2,730,338,858	100	54,230,338,858	100	2,730,338,858	100	1,498,915,000	100	63,140,320,678	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM yang ber-SKT	0	100	802,406,050	100	135,385,000	100	135,385,000	100	135,385,000	100	135,385,000	100	173,000,000	100	1,516,946,050	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapat pembinaan peningkatan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	100	304,016,000	100	305,390,000	100	305,390,000	100	305,390,000	100	305,390,000	100	100,000,000	100	1,625,576,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang ditangani		100	207,502,000	100	220,390,000	100	220,390,000	100	220,390,000	100	220,390,000	100	950,000,000	100	2,039,062,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	15.51	19,955,700,279	16.38	21,073,870,700	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	17.03	21,904,646,948	100.00	128,648,158,771	DPUPRPRKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	90,22 %	100%	4,070,352,027	100%	5,468,568,700	100%	5,518,568,700	100%	5,868,568,700	100%	6,268,568,700	100%	6,618,568,700	100%	33,813,195,527	BPBD	
2	09	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,29	100%	4,701,157,302	100%	4,216,723,200	100%	4,203,137,350	100%	4,420,313,550	100%	4,677,139,190	100%	5,047,784,499	100%	5,047,784,499	DKP
		xx	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kriteria Nilai SAKIP		Baik	13,964,159,267	Baik	13,903,306,100	Baik	13,703,306,100	Baik	14,140,306,100	Baik	14,140,306,100	Baik	15,940,306,100	Baik	85,791,689,767	DLH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	N/A		7,929,750,930		7,876,974,190		7,876,974,190		7,876,974,190		9,216,974,190		8,119,251,500		48,896,899,190	Dishub
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	12 Bulan	3,900,679,120	12 Bulan	5,391,054,460	12 Bulan	5,417,480,748	12 Bulan	5,531,305,748	12 Bulan	5,531,305,748	12 Bulan	6,114,345,638	12 Bulan	7,111,301,088	Diskominfo
2	17	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhi Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	3,334,250,648	100%	3,709,610,546	100%	3,788,166,450	100%	3,888,166,450	100%	4,038,166,450	100%	4,238,166,450	100%	4,238,166,450	Dinas Koperasi dan UKM
2	18	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		27 Kegiatan	5,458,638,037	27 Kegiatan	12,911,147,002	27 Kegiatan	17,811,147,002	27 Kegiatan	19,961,147,002	27 Kegiatan	24,961,147,002	27 Kegiatan	26,961,147,002			DPMPTSP
2	22	xx	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			21.53%	6,679,910,300	24.18%	7,502,464,350	24.18%	7,502,464,350	24.18%	7,502,464,350	31.54%	9,784,389,727	34.31%	10,642,645,411	159.93%	49,614,338,488	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	25	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	100 %	100 %	5,551,790,607	100 %	5,590,979,900	100 %	5,701,591,700	100 %	6,111,205,680	100 %	6,467,527,171	100 %	6,776,885,580	100 %	36,199,980,638	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	27	XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tercapainya Kegiatan Penunjang SKPD yang dilaksanakan	80%	100%	20,849,983,712	100%	21,765,455,450	100%	24,091,455,450	100%	25,029,955,450	100%	27,816,630,450	100%	30,599,597,950	100%	150,153,078,461	Dinas Pertanian
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	8,266,217,733	100%	9,314,530,550	100%	9,384,530,550	100%	9,866,530,550	100%	9,951,530,550	100%	10,551,530,550	100%	10,884,172,225	Disperdagin
5	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKIP Badan	72.25%	75%	14,495,676,289	76%	13,721,782,300	77%	14,407,871,415	78%	15,128,264,986	79%	15,884,678,235	80%	16,678,912,147	80%	16,678,912,147	Bapenda
5	02		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan yang profesional bebas dari korupsi, bersih dan melayani	94%	94%	11,418,881,891	94%	13,261,615,375	95%	13,983,762,748	95%	15,382,139,023	97%	16,920,352,925	98%	18,612,388,217	98%	18,612,388,217	BKAD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	94,67%	100%	5,071,690,581	100%	7,584,159,250	100%	7,716,296,632	100%	8,082,296,632	100%	8,419,139,250	100%	8,136,308,775	100%	8,136,308,775	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	44 Orang	47 Orang	4,396,230,198	47 Orang	5,625,215,700	47 Orang	6,444,399,200	47 Orang	4,986,507,700	47 Orang	5,700,894,400	47 Orang	6,477,645,770	47 Orang	33,230,892,968	Dinas Sosial
		XX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	81.5	82.2	82,962,086,518	83.6	81,131,993,200	85.6	81,203,418,000	86.8	81,335,543,000	88.9	81,578,193,000	90.0	81,636,063,000	90.0	81,636,063,000	Dinas Kesehatan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	89%	90%	344,954,338,760	90%	294,174,546,593	92%	297,810,546,593	94%	299,703,046,594	95%	308,640,170,023	96%	322,460,170,023	96%	336,640,170,023	Dinas Pendidikan
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	5,427,784,844	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,630,251,750	100%	5,710,251,750	100%	33,659,043,594	Dispora
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	100%	3,613,134,957	100%	3,935,942,500	100%	4,160,942,500	100%	4,373,942,500	100%	4,866,790,656	100%	5,128,590,656	100%	26,079,343,769	Dispustakasp
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	119,403,734,608	100	145,978,676,000	100	146,978,676,000	100	147,978,676,000	100	157,978,676,000	100	164,978,676,000	100	883,297,114,608	RSUD dr. Murjani
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota		100%	7,407,170,318	100%	7,259,846,840	100%	7,547,041,730	100%	7,775,190,730	100%	7,772,878,990	100%	7,932,184,130	100%	45,694,312,738	Satpol PP
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	5,668,766,897	100	6,670,385,135	100	8,670,385,135	100	7,670,385,135	100	7,170,385,135	100	8,080,385,135	100	43,930,692,572	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten/Kota		100	7,134,296,167	100	6,831,492,100	100	7,081,492,100	100	7,431,492,100	100	7,833,602,750	100	8,553,290,870	100	44,865,666,087	DPPPAPKB
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	100%	20%	5,926,503,064	40%	8,772,009,450	60%	8,972,987,050	80%	9,269,062,410	90%	9,509,745,306	100%	9,944,496,492	100%	52,394,803,772	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotim
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	N A	100	7,581,243,497	100	6,065,429,830	100	6,904,301,497	100	7,736,069,531	100	7,018,984,697	100	8,552,690,467	100	43,858,719,519	DPMD
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	46,102,086,971	100	39,192,901,824	100	44,610,132,925	100	39,140,132,925	100	40,017,403,600	100	41,723,364,605	100	250,786,022,850	Sekretariat Daerah
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	34,797,052,351	100	34,587,219,450	100	34,931,519,450	100	35,431,519,450	100	39,801,989,051	100	39,801,989,051	100	219,351,288,803	Sekretariat DPRD
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah	1. 100 2. B 3. 100	1. 100 2. B 3. 100	6,862,924,295	1. 100 2. B 3. 100	6,013,263,245	1. 100 2. B 3. 100	6,668,143,606	1. 100 2. B 3. 100	6,291,538,590	1. 100 2. B 3. 100	6,823,603,943	1. 100 2. B 3. 100	7,598,513,879	1. 100 2. B 3. 100	40,257,987,558	BAPPELITBA NGDA
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	86.11	86.11	10,371,750,359	95.28	10,129,671,750	95.97	12,306,387,050	96.67	13,416,992,200	97.36	12,123,624,465	97.78	12,480,182,265	97.78	70,828,608,089	BKPSDM
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	100	10,800,892,060	100	8,595,338,100	100	8,916,768,950	100	9,332,815,343	100	9,799,456,110	100	10,259,636,860	100	57,704,907,422	Inspektorat
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi kantor yang tersedia dalam mutu waktu yang sesuai kebutuhan	93.38	100	4,098,444,652	100	4,453,084,238	100	4,453,084,238	100	4,453,084,238	100	5,453,084,238	100	6,127,893,348	100	29,038,674,952	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. B 2. 100	3,619,069,558	1. B 2. 100	3,171,346,423	1. B 2. 100	3,351,741,423	1. B 2. 100	4,265,639,743	1. B 2. 100	4,443,531,721	1. B 2. 100	4,626,880,365	1. B 2. 100	23,478,209,233	Kecamatan Kota Besi	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. B 2. 100	2,726,960,164	1. B 2. 100	3,927,001,400	1. B 2. 100	4,122,851,470	1. B 2. 100	4,428,943,044	1. B 2. 100	4,600,807,546	1. B 2. 100	4,771,348,743	1. B 2. 100	24,577,912,367	Kecamatan Cempaga	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. B 2. 100	3,151,056,210	1. B 2. 100	3,579,384,666	1. B 2. 100	3,825,623,700	1. B 2. 100	3,189,304,450	1. B 2. 100	3,474,127,450	1. B 2. 100	2,796,271,500	1. B 2. 100	20,015,767,976	Kecamatan Mentaya Hulu	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. B 2. 100	3,417,069,256	1. B 2. 100	4,010,871,884	1. B 2. 100	4,114,871,884	1. B 2. 100	4,414,871,884	1. B 2. 100	4,394,871,884	1. B 2. 100	4,664,871,884	1. B 2. 100	25,017,428,676	Kecamatan Parenggean	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. B 2. 100	6,983,978,254	1. B 2. 100	6,396,445,167	1. B 2. 100	8,896,445,167	1. B 2. 100	6,678,010,467	1. B 2. 100	6,978,010,467	1. B 2. 100	7,278,010,467	1. B 2. 100	43,210,899,989	Kecamatan Baamang	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	NA	100	7,883,026,253	100	8,370,987,770	100	8,615,987,770	100	9,449,693,720	100	9,446,693,720	100	9,449,987,720	100	53,216,376,953	Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
				Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	BB	BB		BB		BB		BB		BB		A		A		
				Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	88		92		95		97		98		100		100		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	NA	1. 100 2. BB 3. 90%	2,977,706,085	1. 100 2. BB 3. 92%	3,518,769,350	1. 100 2. BB 3. 94%	3,139,585,000	1. 100 2. A 3. 96%	3,198,136,050	1. 100 2. A 3. 98%	3,477,259,050	1. 100% 2. AA 3. 100%	2,987,483,800	1. 100% 2. AA 3. 100%	19,298,939,335	Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 2. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. B 2. 100	3,513,140,300	1. B 2. 100	3,474,015,350	1. B 2. 100	3,623,515,350	1. B 2. 100	3,930,981,600	1. B 2. 100	4,016,081,600	1. B 2. 100	4,114,931,600	1. B 2. 100	22,762,665,800	Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. 100 2. B 3. 100	2,533,082,711	1. 100 2. B 3. 100	4,009,263,450	1. 100 2. B 3. 100	4,220,428,000	1. 100 2. B 3. 100	4,433,952,411	1. 100 2. B 3. 100	4,724,403,282	1. 100 2. B 3. 100	4,987,376,696	1. 100 2. B 3. 100	24,908,506,550	Kecamatan Pulau Hanaut
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		1. 100 2. B 3. 100	2,570,990,515	1. 100 2. B 3. 100	4,144,008,084	1. 100 2. B 3. 100	4,350,508,100	1. 100 2. B 3. 100	4,615,634,600	1. 100 2. B 3. 100	4,810,634,600	1. 100 2. B 3. 100	4,819,634,600	1. 100 2. B 3. 100	25,311,410,499	Kecamatan Antang Kalang
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD		1. 100	2,209,484,364	1. 100	3,496,063,150	1. 100	3,679,790,150	1. 100	4,424,600,000	1. 100	4,503,100,000	1. 100	4,530,000,000	1. 100	22,843,037,664	Kecamatan Teluk Sampit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100		2. B 3. 100			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. 100 2. B 3. 100	3,147,346,768 	1. 100 2. B 3. 100	3,519,526,855 	1. 100 2. B 3. 100	3,572,319,891 	1. 100 2. B 3. 100	3,625,112,661 	1. 100 2. B 3. 100	3,677,905,563 	1. 100 2. B 3. 100	3,730,698,466 	1. 100 2. B 3. 100	3,730,698,466 	Kecamatan Seranau
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. 100 2. B 3. 100	2,437,040,127 	1. 100 2. B 3. 100	3,215,212,662 	1. 100 2. B 3. 100	3,446,647,700 	1. 100 2. B 3. 100	4,219,109,897 	1. 100 2. B 3. 100	4,570,962,887 	1. 100 2. B 3. 100	4,865,412,854 	1. 100 2. B 3. 100	23,379,344,659 	Kecamatan Cempaga Hulu
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD 2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah 3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	1. 100 2. B 3. 100	2,505,721,953 	1. 100 2. B 3. 100	3,254,211,000 	1. 100 2. B 3. 100	3,417,921,550 	1. 100 2. B 3. 100	3,589,817,628 	1. 100 2. B 3. 100	3,770,308,509 	1. 100 2. B 3. 100	3,959,823,934 	1. 100 2. B 3. 100	20,497,804,574 	Kecamatan Telawang
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	1. 100	2,193,963,103	1. 100	3,587,437,700	1. 100	5,904,107,700	1. 100	2,933,719,895	1. 100	2,958,719,895	1. 100	2,983,719,895	1. 100	20,561,668,188	Kecamatan Bukit Santuai

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B			
		3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	1. 100	2,485,752,057	1. 100	2,647,941,400	1. 100	2,848,841,946	1. 100	3,252,331,126	1. 100	3,719,498,200	1. 100	3,198,148,726	1. 100	18,152,513,455	Kecamatan Tu alan Hulu
				2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		
				3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan RKPD	1. 100	2,838,981,774	1. 100	2,645,909,100	1. 100	2,846,809,646	1. 100	3,180,325,176	1. 100	3,637,471,450	1. 100	3,185,673,726	1. 100	18,335,170,872	Kecamatan Telaga Antang
				2. Nilai LAPKIN Perangkat Daerah	2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		2. B		
				3. Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		3. 100		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran kemajuan yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut, di antaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun indikator kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2. Penentuan target indikator kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan tren set data selama beberapa tahun terakhir. Proyeksi secara matematis dilakukan menggunakan pendekatan logaritma natural.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	persen	31,10	32,59	33,70	34,98	36,23	37,60	39,10
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	71,31	71,86	72,48	73,10	73,73	74,35	74,98
3	Pertumbuhan Ekonomi	persen	-3,09	2,94	3,40	3,87	4,24	4,68	5,12
4	Tingkat Inflasi	persen	1,62	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
5	Tingkat Kemiskinan	persen	5,62	5,54	5,36	5,19	5,01	4,84	4,67
6	Tingkat Pengangguran	persen	5,25	5,17	5,09	5,01	4,93	4,86	4,81
7	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	56,63	57,71	58,82	59,25	60,14	61,08	61,97
8	Indeks Gini	indeks	0,32	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35
9	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	indeks	NA	B	B	B	BB	BB	BB
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	39,84	69,56	69,88	70,52	70,56	70,59	70,59
11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Buah	NA	1	8	10	12	14	14
12	Presentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	persen	19,11	21,12	22,56	23,53	25,71	27,78	27,78

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
	Pertumbuhan PDRB	Persen	-3,09	2,94	3,40	3,87	4,24	4,68	5,12	5,12
	Laju inflasi	Persen	1,62	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
	PDRB per kapita	Juta Rupiah	56,63	57,71	58,82	59,25	60,14	61,08	61,97	61,97
	Indeks Gini	Indeks	0,32	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35
	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	Persen	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indeks	NA	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	94,38	94,46	94,64	94,81	94,99	95,16	95,33	95,33
	Rasio kesenjangan Kemiskinan	Rasio	0,87	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60	> 0,60
	Proporsi penduduk Dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per Hari	Persen	5,62	5,54	5,36	5,19	5,01	4,84	4,67	5,62
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,31	71,86	72,48	73,10	73,73	74,35	74,98	74,98
	Angka melek huruf	Persen	99,43	99,46	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,61
	Angka rata-rata lama Sekolah	Tahun	8,13	8,16	8,24	8,33	8,41	8,50	8,59	8,59
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,84	12,97	13,14	13,32	13,49	13,67	13,84	13,84
	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,85	69,89	69,96	70,04	70,11	70,18	70,26	70,26
	Persentase balita gizi buruk	Persen	3,0	3,0	2,8	2,6	2,4	2,2	2,0	2,0
	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	14,6	14	13,5	13	12,5	12	11,5	11,5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41	67,41
	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,25	3,75	3,52	3,30	3,07	2,85	2,62	2,62
	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75	94,75
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Persen	61,48	61,67	61,86	62,05	62,24	62,43	62,62	62,62
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	Persen	25,22	25,51	25,80	26,09	26,38	26,67	26,96	26,96
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase PAD Terhadap pendapatan	Persen	16,21	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,00
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pencegahan Korupsi / Monitoring Control for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Indeks	67,32	68,84	70,23	71,55	72,92	74,35	75,18	75,18
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	96,1	96,58	96,78	96,99	97,12	97,32	97,56	97,56
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	85,7	87,1	88,6	90,0	91,4	92,9	93,4	93,4
	Penguatan cadangan pangan	Persen	NA	2,5	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	NA	9,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	100
	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	19,26	19,61	20,02	20,43	20,84	21,25	21,66	21,66
	Kontribusi sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	0.63	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,21
	Produksi sektor pertanian	Ton	105.531	115.512	122.074	129.043	136.445	144.313	152.681	152.681
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	17.98	16,65	16,90	17,15	17,41	17,67	17,94	17,94
	Produksi sektor perkebunan	Ton	268.017,54	278.090,40	281.467,81	283.374,26	286.117,17	295.833,11	281.668,97	281.668,97
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	0.61	1,01	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,17
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,24	< 0,24	< 0,24	< 0,24	< 0,24	< 0,24	< 0,24	< 0,24
	Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	5,06	5,15	5,64	6,13	6,62	7,11	7,60	7,60
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,25	1,31	1,44	1,59	1,75	1,92	2,11	2,11
	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	1,04	1,05	1,07	1,10	1,12	1,14	1,17	1,17
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	19,01	19,23	19,78	20,33	20,88	21,42	21,97	21,97
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	21,68	21,82	21,96	22,10	22,24	22,38	22,52	22,52

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,92	0,92
	Pertumbuhan Industri	Persen	-2,17	3,27	3,77	3,87	3,97	4,07	4,17	4,17
	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	NA	88,06	88,15	88,24	88,33	88,42	88,51	88,51
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	indeks	NA	30,96	32,20	33,36	34,45	35,58	36,30	36,30
	Indeks Desa Membangun (IDM)	indeks	Sangat tertinggal: 27 Tertinggal: 65 Berkembang: 59 Maju: 15 Mandiri: 2	Sangat tertinggal: 43 Tertinggal: 56 Berkembang: 49 Maju: 16 Mandiri: 4	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal: 9 Berkembang: 89 Maju: 63 Mandiri: 7	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal: 8 Berkembang: 90 Maju: 63 Mandiri: 7	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal: 7 Berkembang: 91 Maju: 62 Mandiri: 8	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal: 6 Berkembang: 92 Maju: 62 Mandiri: 8	Sangat tertinggal: 0 Tertinggal: 5 Berkembang: 91 Maju: 63 Mandiri: 9	Sangat tertinggal: 27 Tertinggal: 65 Berkembang: 59 Maju: 15 Mandiri: 2
II. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	NA	13,39	13,69	13,99	14,29	14,59	14,89	14,89
	Nilai tukar petani	Indeks	80,73	80,81	80,89	80,97	81,05	81,13	81,22	81,22
	Produktivitas total Daerah	Juta Rupiah	123,70	125,55	127,43	129,34	131,28	133,24	135,24	135,24
	Persentase desa Berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	15,68	15,91	16,15	16,39	16,64	16,89	17,06	17,06
	Rasio pinjaman terhadap	Persen	82	149	84	92	93	95	98	98

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	simpanan di BPR									
	Angka kriminalitas yang tertangani	Permiriad (per sepuluh ribu)	3,08	5,45	5,13	4,92	4,81	4,29	3,69	3,69
	Rasio ketergantungan	Persen	35,66	35,58	35,50	35,43	35,35	35,27	35,19	35,19
	Nilai SAKIP	Kriteria	NA	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
	Nilai LPPD	Kriteria	NA	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	persen	16,21	16,50	17,00	17,50	18,00	18,50	19,00	19,00
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan									
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	30	32	34	36	38	40	42	42
	Angka partisipasi kasar SD/MI	Persen	106,43	106,43	104,76	105,36	105,34	106,24	106,24	107,34
	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	Persen	87,05	87,05	87,13	89,37	92,61	95,85	99,09	100
	Angka pendidikan yang ditamatkan	Persen	99,30	99,31	99,32	99,33	99,34	99,35	99,35	99,35
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A	Persen	97,43	97,96	98,56	98,76	99,15	99,76	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	Persen	73,82	85,77	88,82	91,87	94,92	97,97	100	100
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/ MI/Paket A	Persen	97,98	97,99	98,01	98,02	98,04	98,06	98,08	98,08

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/ MTs/Paket B	Persen	97,97	97,99	98,02	98,04	98,08	98,10	98,12	98,12
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/ MI	Persen	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/ MTs	Persen	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,9	0,8	0,8
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	86	90	92	94	96	98	100	100
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/ SMK/ MA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	80%	85%	87%	90%	93%	97%	100	100
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	85%	87%	90%	93%	97%	99%	100	100
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	4	4	4	4	4	4	4	4
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	126	132	145	148	152	163	163	165
	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	Rasio	44	56	67	73	76	80	84	90
	Rasio guru/murid per kelas	Rasio	538	538	538	538	538	538	538	538

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	rata-rata sekolah dasar									
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	2649	2649	2649	2649	2649	2649	2649	2649
	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	97,48	97,56	97,98	98,18	98,48	99,18	99,48	99,48
	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	99,71	99,73	99,75	99,77	99,79	99,81	99,83	99,83
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	99,43	99,46	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,61
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	68	75	82	87	90	93	95	98
2	Kesehatan									
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Bayi	11,2	11,0	10,5	10,5	10,0	10,0	9,5	9,5
	Angka kelangsungan hidup bayi	Bayi	988,8	989,0	989,5	989,5	990	990	990,5	990,5
	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Balita	11,8	11	10,5	10,5	10,0	10,0	9,5	9,5
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Bayi	11,2	11,0	10,5	10,5	10,0	10,0	9,5	9,5
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Ibu	177,5	175	170	165	160	155	150	150
	Rasio posyandu per satuan	Rasio	7,9	8,1	8,4	8,6	8,8	9,1	9,3	9,3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	balita									
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,46	0,46	0,46	0,50	0,50	0,51	0,51	0,51
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,005	0,005	0,005	0,007	0,01	0,01	0,01	0,01
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,31	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	52,4	80	82	84	86	88	90	90
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	74,9	76,4	81	85	87	90	95	95
	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan penemuan dan	Persen	80	80	82	84	86	88	90	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	penanganan penderita penyakit TBC BTA									
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	272	270	268	266	264	262	260	260
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	2	2	2	2	1	1	1	1
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	79,7	80	81	82	83	84	85	85
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka kejadian Malaria	Kasus	2	2	2	2	1	1	1	1
	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Orang	1490	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3000
	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	42,1	43	44	45	46	48	50	50
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kunjungan bayi	Persen	73,5	79,3	83,8	87,9	91,6	92	95	95
	Cakupan puskesmas	Persen	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5	123,5
	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	87,9	87,9	87,9	88,5	88,5	89,1	89,1	89,1
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan nifas	Persen	80,5	82	83	84	86	88	90	90
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	35,5	40	43	45	50	55	60	60

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	67,7	70	72	74	76	78	80	80
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	50	61	66	71	76	79	85	85
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,425	0,416	0,408	0,400	0,392	0,038	0,378	0,378
	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	Persen	5,41	4,32	3,78	3,24	2,70	2,16	1,62	1,62
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40	Persen	50,93	52,07	52,22	53,25	54,39	55,58	56,81	56,81

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KM/Jam)									
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	0,62	0,72	0,72	0,77	0,81	0,86	1,01	1,01
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (layak)	Persen	45,72	67,30	71,20	77,10	83,00	88,90	94,80	94,80
	Persentase rumah tinggal bersanitasi (aman)	Persen	6,39	6,39	6,50	8,19	10,00	11,81	13,62	13,62
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Persen	24,15	24,15	24,16	24,17	24,19	24,21	24,22	24,22
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	60,59	62,59	64,59	66,59	68,59	70,59	72,59	72,59
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	7,28	7,23	7,22	7,20	7,17	7,16	7,14	7,14
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	24,03	25,53	27,03	28,53	30,03	31,53	33,03	33,03
	Rasio Jaringan Irigasi	Rasio	0,76	1,21	1,74	2,39	3,04	3,78	4,53	4,53
	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	85,29	88,83	92,55	96,28	100	100	100	100
	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	0,45	0,38	0,3	0,23	0,15	0,08	0	0
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	6,24	10	15	20	25	30	30	30
	Rasio tempat pemakaman	Rasio	NA	43,37	44,66	45,89	47,07	48,20	49,28	49,28

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	umum per satuan penduduk									
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	0,68	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Persen	0,15	0,15	0,17	0,22	0,24	0,27	0,29	0,29
	Rasio bangunan ber- IMB / Persetujuan Bangunan Gedung per satuan bangunan	Unit	0,12	0,12	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25	0,25
	Ketaatan terhadap RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	47,25	48,05	48,5	49,42	50,54	51,8	53,15	53,15
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Rasio rumah layak huni	Persen	53,10	61,72	70,52	79,31	87,35	88,35	89,35	89,35
	Rasio permukiman layak huni	Ha	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,56	0,57	0,57
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	1,88	1,92	1,97	2,02	2,06	2,11	2,16	2,16
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	0,08	0,12	0,17	0,21	0,27	0,32	0,39	0,39
	Persentase permukiman yang tertata	Persen	1,03	1,12	1,21	1,29	1,38	1,47	1,56	1,56
	Persentase lingkungan	Persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pemukiman kumuh									
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Persen	NA	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persen	0,0039	0,0045	0,0053	0,0062	0,0072	0,0084	0,0098	0,0098
	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Persen	NA	8,00	26,00	48,00	74,00	92,00	100,00	100,00
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	67	73	78	84	89	95	100	100
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	88	95	95	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	11,75	11,75	29,41	47,06	64,71	82,35	100	100
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km /Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))	100 (15 Menit (Cakupan Wilayah 7,5 Km/ Kejadian))
	Persentase Penegakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PERDA									
	Persentase penurunan jumlah titik api (hot spot)	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Sosial									
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	55,37	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37	91,37
	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	64,93	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,93	94,93
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	NA	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	95,00	95,00
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	22,07	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07	94,07
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	Persen	63,59	68,59	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	lengkap									
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	65,91	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91	95,91
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	Tenaga Kerja									
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	25	20	20	20	20	20	20	20
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	25	25	25	25	25	25	25	25
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	5	7	9	11	13	15	17	17
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	93,83	93,50	93,85	93,91	93,85	93,90	93,90	93,90
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Persen	25	16	20	20	20	20	20	20
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	30	50	50	50	50	50	50	50
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Persen	80	81	82	83	85	86	87	87

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	berbasis masyarakat									
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	80	82	84	86	88	90	92	92
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	15,3	15,35	15,39	15,44	15,48	15,53	15,53	15,53
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	20	20,40	20,81	21,22	21,65	22,08	22,52	22,52
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	84,90	84,98	85,07	85,15	85,24	85,33	85,41	85,41
	Rasio KDRT	Persen	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	46,47	46,56	46,66	46,75	46,84	46,94	47,03	47,03
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	26	26	27	30	31	35	36	36
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga	Persen	24,44	26,66	28,91	30,05	32,57	35,6	38,61	38,61

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit									
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	26,67	31,67	36,17	41,07	46,07	50,37	53,77	53,77
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SD	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	Rasio	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	Rasio	52,57	52,57	52,57	52,57	52,57	52,57	52,57	52,57
	Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	Rasio	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki	Rasio	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pada kelompok usia 15-24 tahun									
3	Pangan									
	Ketersediaan pangan utama	Persen	113,91	116,3	118,5	120,8	123,3	125,7	128,3	128,3
	Ketersediaan energy dan protein perkapita	kkal/ kapita/ hari	3367,3 77	3384, 78	3417, 79	3452, 79	3469, 80	3504, 80	3521, 81	3521, 81
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00	90,00	90,00
4	Pertanahan									
	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyelesaian izin lokasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Lingkungan Hidup									
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten	Ada/ Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
	Hasil Pengukuran Indeks	Indeks	69,37	59,40	59,50	59,60	59,70	59,72	59,73	59,73

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kualitas Air									
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Indeks	62,66	88,91	89,01	89,11	89,21	89,25	89,30	89,30
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	93,17	51,21	52,32	53,43	54,55	54,60	54,65	54,65
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	MHA	0	1	1	1	1	1	1	1
	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	MHA	0	1	1	1	1	1	1	1
	Terverifikasinya hak Kearifan Lokal atau hak pengetahuan tradisional	hak	0	1	1	1	1	1	1	1
	Penetapan hak MHA	MHA	0	1	1	1	1	1	1	1
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan Pengetahuan dan keterampilan	Persen	50	50	100	100	150	150	150	150
	Terfasilitasi penyediaan sarana/ prasarana	Persen	0	10	50	50	50	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Pelatihan	3	3	3	4	4	4	5	5
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	35	40	40	50	50	55	55	60
	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	46	50	55	60	65	70	70	70
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	6,24	10	15	20	25	30	30	30
	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	8,1	8,1	12,4	14,7	17,7	19,6	21,9	21,9
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	21,55	35	40	45	40	55	60	60
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai TPA	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71	Nilai TPA \geq 71
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	80	80	80	80	80	80	80	80
6	Administrasi Kependudukan									

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan Pencatatan Sipil									
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	107.060	112.413	118.034	123.935	130.132	136.639	143.471	150.644
	Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio	698	733	770	808	848	891	935	982
	Rasio pasangan berakte menikah	Rasio	1.271	1.335	1.401	1.471	1.545	1.622	1.703	1.788
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	96,57	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	45,33	98,00	98,20	98,50	98,70	99,00	99,20	100,00
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	99,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	0,25	0,25	0,29	0,33	0,40	0,50	0,67	0,67
	Persentase LSM aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase LPM Berprestasi	Persen	0	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
	Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Posyandu aktif	Persen	11,70	20,00	30,00	40,00	50,00	55,00	60,00	60,00
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2,7	2,77	2,81	2,84	2,88	2,91	2,95	2,95
	Total Fertility Rate (TFR)	Bayi	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,18	2,18
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75	93,75
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	3	3	4	4	4	4	4	4
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil	Sektor	0	0	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan									
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerjasama	3	3	3	3	3	3	3	3
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
	Ratio Akseptor KB	Persen	75,97	76	77	78	79	80	81	81
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	79,11	79,13	79,15	79,17	79,19	79,21	79,23	79,23
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Bayi	53	29	28	27	26	25	24	24
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	4,09	4,08	4,07	4,06	4,05	4,04	4,03	4,03

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	11,65	11	10,5	10	9,5	9	8,5	8,5
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	75,97	77	78	79	80	81	82	82
	Persentase tingkat Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	4,8	4,5	4,3	4	3,8	3,6	3,5	3,5
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	46,75	46,75	46,75	46,75	47,8	47,8	47,8	47,8
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	13,53	13,53	13,53	13,54	14,01	14,01	14,01	14,01
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	29,3	29,3	29,3	29,3	29,7	29,7	29,7	29,7
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	41,1	41,17	41,17	41,5	41,15	41,15	41,15	41,15
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	Persen	58,82	60	61	61	61	61	62	62

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Remaja/ Mahasiswa									
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	86,3	86,3	86,3	87	87	87	87	87
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	Persen	200	200	200	200	200	200	200	200
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan	Persen	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan									
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	80	80	85	85	85	87	89	89
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	usia	23	23	23	23	23	23	23	23
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	63,23	63,23	64	64	64	64	64	64
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh	Persen	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	95

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan									
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	80	80	85	85	85	87	89	89
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	usia	23	23	23	23	23	23	23	23
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga	Persen	63,23	63,23	64	64	64	64	64	64

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	melalui APBD dan APBDes									
9	Perhubungan									
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang	55.919	57.000	59.700	61.700	63.800	65.200	67.000	67.000
	Rasio ijin trayek	Rasio	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329	0,0000329
	Jumlah uji kir angkutan umum	Uji Kir	9.139	12.795	16.450	18.278	20.106	21.934	25.589	25.589
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	Buah	1	2	2	3	3	4	5	5
	Persentase layanan angkutan darat	Persen	45	45	45	50	55	65	65	65
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	25	35	45	50	55	60	70	70
	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	273	600	900	1.100	1.500	1.700	2.000	2.000
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0120	0,0130	0,0140	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150	0,0150
	Jumlah Orang/Barang Melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun	Orang/Barang	106.939	155.000	155.500	161.000	161.500	167.000	167.500	167.500
10	Komunikasi dan Informatika									
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	58,82	64,71	76,47	88,24	100	117,65	129,41	129,41
	Cakupan Layanan	Persen	71.35	76.76	81.08	82.49	85.81	90.22	93.72	95.45

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Telekomunikasi									
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	72,88	75	77	80	82	83	85	85
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Rumah Tangga	92.698	92.800	93.010	93.211	93.403	93.596	93.712	93.712
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Rumah Tangga	74.585	74.815	75.125	75.425	75.775	76.025	76.400	76.400
	Persentase desa/kelurahan yang terlayani akses internet/telekomunikasi	Persen	71,35	76,76	81,08	86,49	90,81	96,22	100	100
	Nilai Indeks SPBE	Indeks	1,95	2	2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,8
11.	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah									
	Persentase koperasi aktif	Persen	78	79	80	81	82	83	84	84
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	87,81	87,79	87,77	87,75	87,73	87,71	87,69	87,69
	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	89,9	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	90,5
12.	Penanaman Modal									
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	200	150	150	150	150	150	150	150
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Persen	24	5	5	5	5	5	5	5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	24	20	20	20	20	20	20	20
	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Persen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
13.	Kepemudaan dan Olah Raga									
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	58	63	68	73	78	83	88	88
	Persentase wirausaha muda yang mandiri	persen	31,00	34,00	37,00	41,00	45,00	48,00	51,00	51,00
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	31	34	37	41	45	48	51	51
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	50	55	60	65	70	75	80	80
	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	10	15	20	25	30	35	40	40
	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	15	20	25	30	35	40	45	45
	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
14.	Statistik									
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB"	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15.	Persandian									
	Persentase Perangkat daerah	Persen	25,00	31,25	41,67	52,08	66,67	75,00	87,50	87,50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah									
16.	Kebudayaan									
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	NA	1	8	10	12	14	16	16
	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	19,11	21,12	22,56	23,53	25,71	27,78	29,73	29,73
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	178	178	300	480	650	900	1190	1190
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	0	1	2	3	4	5	6	6
17.	Perpustakaan									
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	954	2000	3250	5500	6500	8000	10000	10000
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Koleksi Buku	39519	39519	40519	41519	42519	43519	42519	42519
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021	0,0021
	Jumlah rata-rata Pengunjung perpustakaan/ tahun	Pengunjung	3	5	9	15	17	21	27	27
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Koleksi Buku	17311	17800	18400	18900	19400	20000	20500	20500

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	7	8	9	10	11	12	13	13
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	0	0	0,4	0,5	0,55	0,6	0,65	0,65
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	20	25	30	35	45	50	75	75
	Layanan Urusan Pilihan									
1.	Pariwisata									
	Kunjungan wisata	Persen	0,00	40,19	48,23	57,87	69,44	83,33	100,00	100
	Lama kunjungan Wisata	Hari/Orang	1	2,24	2,28	2,31	2,35	2,38	2,41	2,41
	PAD sektor pariwisata	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
2.	Pertanian									
	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Persen	21,09	21,73	22,10	22,47	22,84	23,21	23,58	23,58
	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	0.63	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,21	1,21
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	17.98	16,65	16,90	17,15	17,41	17,67	17,94	17,94
	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	0.61	1,01	1,04	1,07	1,10	1,14	1,17	1,17
	Produktivitas padi atau bahan	Persen	35,27	37,03	37,40	37,96	38,34	38,92	39,31	39,31

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	pangan utama lokal lainnya per hektar									
	Cakupan bina kelompok petani	Persen	35,89	36,6	37,15	37,71	38,28	38,85	39,43	39,43
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral									
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Persen	91,70	93,20	94,70	96,20	97,70	99,20	100	100
	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio	91,70	93,10	94,50	95,80	97,20	98,60	100	100
5.	Perdagangan									
	Ekspor Bersih Perdagangan	\$ (Dollar)	66.745.041,97	67.478.723,75	68.212.405,50	68.946.087,28	69.679.769,06	70.413.450,84	71.147.132,62	71.147.132,62
	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	Persen	3,50	3,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,50	4,50
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu	Persen	3,50	5,90	5,90	5,90	5,90	6,00	6,00	6,00
6.	Perindustrian									
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	4,50	4,50	4,75	5,00	5,25	5,25	5,50	5,50
7.	Transmigrasi									
	Persentase transmigran	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	swakarsa (Moratorium)									
8.	Kelautan dan Perikanan									
	Produksi perikanan	Ton/ Tahun	23.734,85	24.090,85	24.446,89	24.802,91	25.158,93	25.514,95	25.870,93	25.870,93
	Konsumsi ikan	Kg/ Perkapita/ Tahun	47.3	48.00	48.70	49.40	50.10	50.80	50.81	50.81
	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen	54	56	58	60	62	64	66	66
	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton/ Tahun	12.993,20	12.993,20	13.611,90	14.230,60	14.849,30	15.468	16.086	16.086
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	Persen	28	28	28	28	28	28	28	28
	Nilai tukar nelayan	Persen	113	114	115	116	117	118	119	119
	Penunjang Urusan									
1.	Perencanaan Pembangunan									
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA									
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Keuangan									
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase SILPA	Persen	40,5	45,9	49,6	52,9	60,25	67,5	80	80
	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	4,7	5,3	7,35	7,69	8,85	9,77	10	10
	Persentase program/ kegiatan yang tidak terlaksana	Persen	3,25	3,1	2,94	2,8	2,3	1,5	1	1
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	20	20	20	20	20	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	10	10	10	10	10	10	10	10
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	Persen	46,74	45,32	44,7	43,5	42,6	41,3	40	40
	Bagi hasil kabupaten/ kota dan desa	Persen	0,48	0,54	0,65	0,76	0,86	0,95	1	1
	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	24 JP	24 JP	24 JP	24 JP	32 JP	32 JP	40 JP	40 JP
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	0,0011	0,2 %	2,16 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	7,56%	7,56%	8,06%	8,56%	9,07%	9,57%	10,08%	10,08%
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	JPT	39	38	38	38	38	38	38	38
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	2.226	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182	2.182
	Jumlah pemangku jabatan	JFT	3153	3260	3260	3260	3260	3260	3260	3260

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	fungsional tertentu pada instansi pemerintah									
4.	Penelitian dan pengembangan									
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Pengawasan									
	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	86	86	87	88	89	90	91	91
	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20
	Jumlah temuan BPK	Temuan	963	983	1003	1023	1043	1063	1083	1083
6.	Sekretariat Dewan									
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX PENUTUP

RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJM Nasional.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

9.1 KAIDAH TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta Prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah supaya tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Lebih jauh lagi supaya tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh PD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra-PD yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2021-2026 untuk setiap tahunnya disusun melalui RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA);
4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten;
5. RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi acuan bagi setiap PD/unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
7. Renja-PD yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD) dan menjadi kontrak kinerja Kepala PD/Unit kerja.
8. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

